

**ISU LINGKUNGAN DALAM BINGKAI PESAN KONFLIK
PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN DI REMBANG, JAWA TENGAH**

**(Analisis Framing *Press Release* PT. Semen Indonesia, *Press Release* JMPPK,
dan Pemberitaan Kompas.com)**



**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia**

Oleh :

Ken Swari Mulia Nanda Putri

14321178

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**ISU LINGKUNGAN DALAM BINGKAI PESAN KONFLIK
PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN DI REMBANG, JAWA TENGAH
(Analisis Framing *Press Release* PT. Semen Indonesia, *Press Release* JMPPK,
dan Pemberitaan Kompas.com)**



**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia**

Oleh :

Ken Swari Mulia Nanda Putri

14321178

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi
ISU LINGKUNGAN DALAM BINGKAI PESAN KONFLIK
PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN DI REMBANG, JAWA TENGAH
(Analisis Framing *Press Release* PT. Semen Indonesia, *Press Release* JMPPK,
dan Pemberitaan Kompas.com)

Disusun oleh

Ken Swari Mulia Nanda Putri

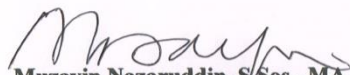
14321178

Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diujikan dan dipertahankan di
hadapan tim penguji skripsi.



الجامعة الإسلامية

Dosen Pembimbing Skripsi


Muzayin Nazaruddin, S.Sos., MA.
NIDN 0516087901

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

**ISU LINGKUNGAN DALAM BINGKAI PESAN KONFLIK
PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN DI REMBANG, JAWA TENGAH
(Analisis Framing Press Release PT. Semen Indonesia, Press Release JMPPK,
dan Pemberitaan Kompas.com)**

Disusun oleh

Ken Swari Mulia Nanda Putri

14321178

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Tanggal : 28 AUG 2018

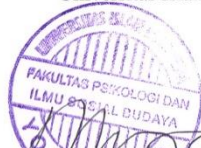
Dewan Penguji :

1. **Narayana Mahendra Prastya,**
S.Sos.,MA
NIDN 0520058402
2. **Muzayin Nazaruddin, S.Sos.,MA**
NIDN 0516087901

الجامعة الإسلامية

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia


Muzayin Nazaruddin, S.Sos., MA.
NIDN 0516087901

HALAMAN PERNYATAAN

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Ken Swari Mulia Nanda Putri

NIM : 14321178

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama menyusun skripsi ini saya tidak melakukan tindak pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setuju dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 12 Agustus 2018

Yang menyatakan,



(Ken Swari Mulia Nanda Putri, 14321178)

MOTTO

Selalu ada hikmah dibalik setiap tindakan dan apa yang telah terjadi. Yang harus kita lakukan adalah tetap berprasangka baik, tetap berbuat baik, dan tetap mengupayakan yang terbaik

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada :

1. Papa dan keluargaku tercinta.
2. Sahabat-sahabatku yang merupakan teman seperjuangan dan saling menguatkan.
3. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan moril.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya yang terang benderang yaitu ajaran agama Islam, yang menjadi petunjuk serta rahmat bagi alam semesta.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Skripsi yang berjudul "*Isu Lingkungan dalam Bingkai Pesan Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Rembang, Jawa Tengah : Analisis Framing Press release PT. Semen Indonesia, Press release JMPPK, dan Pemberitaan Kompas.com*" ini khusus untuk mengkaji bagaimana tulisan atau teks yang dikeluarkan oleh PT. Semen Indonesia, JMPPK, dan media Kompas.com pada masa konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah.

Dalam proses pengerjaan skripsi mulai dari tahap awal hingga tahap akhir, ada banyak pihak yang membantu peneliti, baik yang terlibat langsung membantu penyusunan skripsi, maupun yang tidak terlibat secara langsung namun membantu untuk memudahkan maupun memberikan dorongan moril pada peneliti selama proses pengerjaan. Menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini melibatkan banyak pihak yang membantu, maka peneliti dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Muzayin Nazaruddin, S.Sos., M.A. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dalam membimbing,

mengarahkan, dan membantu peneliti dalam proses pengerjaan skripsi ini dari tahap awal hingga penyelesaian skripsi.

2. Ibu Ida Nuraini Dewi Kodrat Ningsih, S.Ikom., MA sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang juga telah membantu peneliti selama dalam proses perkuliahan dan turut memberikan dukungan moril pada peneliti.
3. Seluruh dosen prodi Ilmu Komunikasi yang juga membantu peneliti dalam proses perkuliahan dan turut memberikan dukungan moril pada peneliti selama proses pengerjaan skripsi.
4. Seluruh staf prodi Ilmu Komunikasi yang turut membantu dan memudahkan peneliti dalam urusan administrasi perkuliahan serta turut memberikan dukungan moril pada peneliti.
5. Ayah peneliti, yaitu Bapak Edy Triyono Sumartadi yang telah menjadi motivator, penyemangat, dan penguat peneliti selama proses pengerjaan skripsi. Keluarga peneliti tercinta, yaitu mama, bunda, kakak dan adik-adik tercinta yang juga turut memberikan dukungan moril pada peneliti.
6. Narasumber peneliti yang telah memudahkan peneliti untuk mendapatkan data dalam skripsi peneliti, yaitu Farid Assifa selaku Editor Kompas.com yang telah bersedia peneliti wawancarai dalam rangka untuk melengkapi data penelitian, dan Aldy Januar Pinanggih selaku HR & GA Division Kompas.com yang telah memudahkan peneliti untuk menemukan narasumber untuk diwawancarai.
7. Staf *Block Office* Sofyan Inn Hotel Unisi Yogyakarta, yang telah bersedia memudahkan peneliti dalam proses pengerjaan skripsi selama peneliti melakukan magang di sana.
8. Sahabat-sahabat peneliti sejak SMA hingga sekarang, yaitu Junetta Fridania Vizardi, Diah Ayu Dwi Setyawati, dan Asmiati yang bersedia untuk saling berbagi cerita dan tips selama pengerjaan skripsi, turut memberikan dukungan moril pada peneliti, menyemangati peneliti selama proses pengerjaan skripsi.

9. Sahabat-sahabat peneliti selama proses perkuliahan di Universitas Islam Indonesia, yaitu Rachmalia Devinda Hardika, Arum Catur Wahyuni, Canceria Eka Wulandari, Meigitaria Sanita, Etry Novica Kurniasari, Wildatun Naziah, , Sri Rahayu, Ghina Yasmin, Citra P.K, Puji Lestari, Febri Setiawan E.S, Afifah R.P, Tiara, Saputra Dilingga, dll yang selalu memberikan dukungan, dorongan, semangat, dan bantuan-bantuan yang telah memudahkan peneliti baik dalam kehidupan sehari-hari maupun proses pengerjaan skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan peneliti yang sama-sama menjadi mahasiswa bimbingan skripsi bapak Muzayin Nazaruddin S.Sos., MA yang berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan skripsi dan saling memberikan dukungan, yaitu Andara Okta C, Pritha R.P, Ghandis N.Q, Pipit Barato Vanesa, Nadila Anindita, Sunnora Meilisa K, Sanik Ismata R, Khumaid Akhyat Sulkhan, Sarah Rahma A, dll.
11. Teman-teman KKN Unit 231 yaitu Desi Kurnia Ekawati, Ganis Noer Fadha Kusumandari, Yulia Ulva, Qonita Usthufiya, Ricky Ardiansyah, Fierdaus Andika Nur Fauzi, M. Ilham Julisar, dan Alwein Gilang Pramudya.
12. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan pada peneliti yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Akhir kata, peneliti berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan bagi siapapun yang telah memberikan peneliti dukungan dan bantuan selama proses pengerjaan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk ke depannya nanti. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi siapa pun yang membacanya. Aamin.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Yogyakarta, 12 Agustus 2018

Peneliti

Ken Swari Mulia Nanda Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
1. Penelitian Terdahulu	8
2. Kerangka Teori	15
F. Objek Penelitian.....	33
G. Metode Penelitian	33
1. Pendekatan dan Paradigma Penelitian	33
2. Metode Analisis Teks	34
3. Tahapan Analisis Teks.....	36
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	38
A. PT. Semen Indonesia	38
1. Sekilas Profil PT. Semen Indonesia	38
2. Visi Misi.....	41
3. Struktur Organisasi PT. Semen Indonesia	41
4. <i>Press release</i> PT. Semen Indonesia	42

B.	JMPPK	45
1.	Sekilas mengenai JMPPK	45
2.	Ajaran Samin	46
3.	<i>Press release</i> JMPPK.....	47
C.	Media Kompas.com	48
1.	Profil Kompas.com	48
2.	Mekanisme Kerja Kompas.com.....	50
3.	Pemberitaan www.kompas.com mengenai Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Rembang.....	52
BAB III TEMUAN PENELITIAN		57
A.	<i>Press release</i> PT. Semen Indonesia	57
1.	<i>Define Problems</i>	57
2.	<i>Diagnose Causes</i>	63
3.	<i>Moral Judgement</i>	64
4.	<i>Treatment Recommendation</i>	70
B.	<i>Press release</i> JMPPK.....	70
1.	<i>Define Problems</i>	71
2.	<i>Diagnose Causes</i>	81
3.	<i>Moral Judgement</i>	89
4.	<i>Treatment Recommendation</i>	104
C.	Berita Kompas.com.....	107
1.	<i>Define Problems</i>	110
2.	<i>Diagnose Causes</i>	122
3.	<i>Moral Judgement</i>	129
4.	<i>Treatment Recommendation</i>	146
5.	Keberpihakan www.kompas.com	151
BAB IV PEMBAHASAN.....		161
A.	Perbandingan Bingkai <i>Press release</i> PT. Semen Indonesia, <i>Press release</i> JMPPK, dan Berita Kompas.com.....	162
1.	Perbandingan Bingkai Berdasarkan Periode Waktu	162
2.	Perbandingan Bingkai Berdasarkan Elemen Framing	164
B.	Produksi Wacana	173
C.	Etika Lingkungan Hidup.....	180

BAB V PENUTUP	186
A. Kesimpulan	186
B. Keterbatasan Penelitian.....	189
C. Saran	189
DAFTAR PUSTAKA	190

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Elemen Framing Robert Entman.....	35
Tabel 2. 1 <i>Press release</i> PT. Semen Indonesia Berdasarkan Periode Waktu	42
Tabel 2. 2 <i>Press release</i> PT. Semen Indonesia yang Diteliti	44
Tabel 2. 3 <i>Press release</i> JMPPK yang Diteliti.....	47
Tabel 2. 4 Berita Kompas.com yang Akan Diteliti	54
Tabel 3. 1 Aspek Define Problems <i>Press release</i> PT. Semen Indonesia.....	59
Tabel 3. 2 Jenis Moral Judgement <i>Press release</i> PT. Semen Indonesia	65
Tabel 3. 3 Aspek Define Problems <i>Press release</i> JMPPK.....	72
Tabel 3. 4 Bingkai per Aspek dan Bingkai Umum <i>Press release</i> JMPPK	80
Tabel 3. 5 “Pelaku” dalam <i>Press release</i> JMPPK.....	85
Tabel 3. 6 Moral Judgement Dalam <i>Press release</i> JMPPK.....	91
Tabel 3. 7 Keberpikahan Kompas.com pada Pemberitaan Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah	108
Tabel 3. 8 Fokus Bingkai Berita Pro Pembangunan Pabrik Semen www.kompas.com	111
Tabel 3. 9 Fokus Bingkai Berita Kontra Pembangunan Pabrik Semen www.kompas.com	117
Tabel 3. 10 Diagnoses Causes pada Berita Pro Pembangunan Semen www.kompas.com	124
Tabel 3. 11 Pelaku dalam Berita Kontra Pembangunan Pabrik Semen www.kompas.com	126
Tabel 3. 12 Pokok Argumentasi Moral Judgement dalam Berita Pro Pembangunan Semen www.kompas.com.....	130
Tabel 3. 13 Pokok Argumentasi Moral Judgement dalam Berita Kontra Pembangunan Semen www.kompas.com.....	138
Tabel 3. 14 Perbandingan Pro dan Kontra Pemberitaan Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Rembang Pada www.kompas.com.....	155
Tabel 4. 1 Perbandingan Bingkai Berdasarkan Periode Waktu	162
Tabel 4. 2 Perbandingan Berdasarkan Elemen Framing.....	165
Tabel 4. 3 Produksi Wacana Pada Masa Konflik Pembangunan Pabrik Semen Rembang	173

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi PT. Semen Indonesia.....	41
--	----

ABSTRAK

Ken Swari Mulia Nanda Putri. 14321178. Isu Lingkungan dalam Bingkai Pesan Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Rembang, Jawa Tengah : Analisis Framing Press release PT. Semen Indonesia, Press release JMPPK, dan Pemberitaan Kompas.com. Program Studi Ilmu Komunikasi. Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Universitas Islam Indonesia, 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana PT. Semen Indonesia, JMPPK dan media Kompas.com membingkai konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah, dan isu apa yang diangkat oleh ketiga pihak tersebut saat berbicara mengenai konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah, lalu membandingkannya satu sama lain untuk melihat persamaan dan perbedaan pada bingkai yang diangkat.

Penelitian ini menggunakan metode analisis framing Robert Entman untuk menganalisis bingkai pesan masing-masing ketiga pihak tersebut. Objek yang diteliti adalah press release PT. Semen Indonesia, press release JMPPK, dan pemberitaan Kompas.com mengenai konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. Penelitian ini juga menggunakan paradigma kritis untuk mengkritisi masing-masing bingkai pesan ketiga pihak tersebut. Penelitian ini juga menggunakan metode wawancara narasumber untuk mendukung argumentasi mengenai bingkai yang dipakai oleh Kompas.com. Teori yang relevan dengan penelitian ini adalah teori wacana, teori framing, dan etika lingkungan hidup.

Hasil penelitian ini adalah PT. Semen Indonesia memposisikan isu lingkungan untuk branding perusahaan ramah lingkungan, terlihat dari kecendrungan PT. Semen Indonesia menggunakan model framing atribusi, pilihan resiko, dan berita. Sedangkan JMPPK memposisikan isu lingkungan sebagai isu yang harus mendapat perhatian khusus, terlihat dari kecenderungannya menggunakan model framing isu dan tindakan. Media kompas.com memposisikan isu lingkungan hanya sebagai isu yang diberitakan saja, bukan sebagai isu yang ditonjolkan. Hal ini terlihat dari isi berita kompas.com yang tidak memiliki ajakan untuk kelestarian lingkungan.

Kata Kunci : konflik pabrik semen Rembang, framing, press release, pemberitaan.

ABSTRACT

Ken Swari Mulia Nanda Putri. 14321178. Isu Lingkungan dalam Bingkai Pesan Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Rembang, Jawa Tengah : Analisis Framing Press release PT. Semen Indonesia, Press release JMPPK, dan Pemberitaan Kompas.com. Program Studi Ilmu Komunikasi. Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Universitas Islam Indonesia, 2018.

This research aim to refer how construction of a cement manufactory conflict in Rembang, Central Java framed by PT. Semen Indonesia, JMPPK, and Kompas.com media. This research also to find what an angle choosed by them if they talk about construction of a cemen manufactory conflict in Rembang, Central Java, then compare with each other to find about similarity and difference about that.

This research use a Robert Entman framing analysis method to analyze massage frame from PT. Semen Indonesia , JMPPK and Kompas.com . This object research is a PT. Semen Indonesia press release, JMPPK press release, and Kompas.com news. This research also use a critical paradigm to criticize the their massage frame. This research also use a interview method to support for argumentation about Kompas.com frame. The relevant theory with this research are discourse theory, framing theory, and environment ethics theory.

The result of this research is PT. Semen Indonesia use a environment issue to make a good enviromentally company's branding. This is because PT. Semen Indonesia prefer to use a atribution framing model, risk choice framing model, and news framing model. JMMPK use a environment issue to persuade people for care about environmental sustainability, it can see from used of issue model framing and action model framing for JMPPK press release. Media Kompas.com just preach a environment issue, not prefer to environment issue. It can see from kompas.com news content who have nothing to persuade people for care about environment.

Keywords : *construction of a cement manufactory conflict in Rembang, framing, press release, news.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT. Semen Indonesia berencana membuka pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Namun, rencana pembangunan pabrik semen ini mendapat penolakan dari masyarakat Rembang, terutama masyarakat Rembang yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK). Pembangunan pabrik semen tersebut ditolak oleh masyarakat karena berpotensi merusak lingkungan. Sebab, kawasan Watuputih yang merupakan tempat didirikannya pabrik semen tersebut adalah kawasan cekungan air yang merupakan kawasan lindungan geologi, di mana di dalamnya diklaim terdapat 49 goa dan 109 mata air¹. Kawasan Watuputih juga merupakan sumber mata air bagi masyarakat kabupaten Rembang dan sekitarnya.

Penolakan pabrik semen di Rembang ini pun berujung konflik antara PT. Semen Indonesia dengan masyarakat Rembang yang tergabung dalam sebuah komunitas yang bernama Jaringan Masyarakat Peduli Kendeng (JMPPK). Konflik pun semakin panas ketika masyarakat Rembang yang tergabung dalam komunitas tersebut melakukan berbagai aksi penolakan yang mendapat sorotan dari berbagai media, bahkan pemerintahan pusat pun turun tangan dalam konflik tersebut. Puncaknya, pada tahun 2014, masyarakat Rembang yang diwakili oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menggugat PT. Semen Indonesia ke Mahkamah Agung untuk membatalkan izin lingkungan pabrik semen PT. Semen Indonesia di Rembang².

¹ *Press release* JMPPK. Pers Rilis JM-PPK: “KEMBALIKAN HAK WATUPUTIH SEBAGAI KAWASAN LINDUNG”. 31 Maret 2017.

² Tommy Apriando. “Berharap Keadilan di PTUN Semarang, Warga Rembang Gugat Soal Pabrik Semen”. <http://www.mongabay.co.id/2014/11/14/berharap-keadilan-di-ptun-semarang-warga-rembang-gugat-soal-pabrik-semen/>. Diakses pada 31 Juli 2018.

Setelah selang dua tahun konflik pembangunan pabrik semen tersebut mendingin, konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah kembali memanas pada tahun 2016. Sebab, pada tahun 2016, WALHI memenangkan gugatan atas PT. Semen Indonesia dengan dikeluarkannya Putusan MA Nomor 99PK/TUN/2016 yang menyatakan bahwa izin lingkungan PT. Semen Indonesia dicabut³. Namun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo justru membuat addendum dan diskresi⁴ yang menyatakan bahwa pabrik semen di Rembang tetap beroperasi, padahal Putusan MA hanya menyatakan bahwa izin lingkungan PT. Semen Indonesia dicabut. Alasan mengapa Gubernur Jawa Tengah tersebut tidak mencabut izin lingkungan PT. Semen adalah karena putusan tersebut tidak menerangkan apa yang harus dilakukan pemerintah daerah dan tidak ada pernyataan bahwa pabrik semen ditutup⁵. Kebijakan gubernur Jawa Tengah ini dinilai bertentangan dengan putusan hukum yang telah ditetapkan. Hal ini menimbulkan protes besar dari masyarakat Rembang, bahkan pada bulan Maret 2016 sejumlah masyarakat Rembang melakukan aksi pengecoran kaki di depan Istana presiden di Jakarta sebagai bentuk protes atas kebijakan tersebut. Konflik pembangunan pabrik semen semakin memanas ketika salah satu peserta pengecoran kaki di depan Istana Presiden meninggal dunia⁶.

Dalam konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah, terdapat dua pihak yang aktif “bersuara” atas konflik tersebut. Kedua pihak tersebut aktif menyampaikan aspirasinya di media, terutama

³ Putusan. <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/df8fdd2e24a5061257ec52dfe1f7743a> . Diakses pada 31 Juli 2018

⁴ Rony Sitanggang. “Izin Semen Indonesia di Kendeng, Alasan Diskresi Ganjar”. http://kbr.id/nasional/02-2017/izin-semen-indonesia-di-kendeng-alasan-diskresi-ganjar_/88762.html . Diakses pada 31 Juli 2018.

⁵ Nazar Nurdin. “Gubernur Jateng Lakukan Diskresi Demi Kelanjutan Pabrik Semen Rembang”. <https://regional.kompas.com/read/2017/02/21/17225781/gubernur.jateng.lakukan.diskresi.demi.kelanjutan.pabrik.semen.rembang> . Diakses 31 Juli 2018.

⁶ Kristian Erdianto. “Kronologi Wafatnya Patmi, Petani Kendeng Usai Aksi Dipasung Semen”. <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/21/15294751/kronologi.wafatnya.patmi.petani.kendeng.usai.aksi.dipasung.semen> . Diakses pada 12 Juli 2018.

media sosial. Kedua pihak yang dimaksud adalah PT. Semen Indonesia dan JMPPK. Kedua pihak yang berkonflik tersebut saling melemparkan wacana agar masyarakat Indonesia secara luas mendukung mereka. Kedua pihak yang juga saling berkonflik ini juga semakin mendapat sorotan ketika media-media menyoroti konflik pembangunan pabrik semen di Rembang dan *statement* masing-masing pihak PT. Semen Indonesia, maupun JMPPK.

Dari sisi PT. Semen Indonesia, PT. Semen Indonesia tetap kukuh ingin tetap membangun pabrik semen di Kendeng. PT. Semen Indonesia pun membantah bahwa pembangunan pabrik semen di Kendeng akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Pada masa konflik antara PT. Semen Indonesia dan warga Kendeng, PT. Semen Indonesia pun aktif membuat sejumlah *press release* yang di upload di website resmi mereka yaitu www.semenindonesia.com. *Press release* PT. Semen Indonesia pun berisi seputar hal-hal positif yang pernah dilakukan oleh PT. Semen Indonesia termasuk dalam halnya kebaikan dalam hal isu lingkungan, meskipun pada saat itu kasus penolakan pembangunan pabrik semen di Kendeng sedang hangat-hangatnya diberitakan.

Di saat yang bersamaan, komunitas masyarakat yang menolak pembangunan pabrik semen di Kendeng yang bernama JMPPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) juga aktif dalam menyuarakan penolakan pembangunan pabrik semen di Rembang. JMPPK merupakan organisasi penolak pembangunan pabrik semen di Kendeng yang bisa dikatakan terbesar dibanding yang lain. Sebab, dibanding organisasi lainnya JMPPK merupakan organisasi sosial yang memiliki manajemen organisasi dan gerakan kampanye yang baik, bahkan JMPPK pun juga mempunyai website resmi yang bernama omahkendeng.org. Website ini berisi artikel-artikel dan berita-berita seputar kasus penolakan pembangunan pabrik semen di Kendeng. JMPPK ini pun ikut “berperang” melawan PT. Semen Indonesia melalui *press release* yang mereka tulis di website resmi mereka. Akibatnya, terjadi perebutan dalam membentuk opini publik, dalam hal ini adalah PT. Semen Indonesia dan JMPPK. Kedua instansi ini saling

mengkonstruksi pesan melalui *press release* nya untuk mendapatkan “simpati” dari media dan publik.

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengkaji bagaimana *press release* PT. Semen Indonesia yang ditulis atau dikeluarkan pada saat perusahaan tersebut tertimpa krisis. Krisis yang diambil dalam penelitian ini adalah ketika terjadi penolakan pembangunan pabrik semen di wilayah Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Peneliti pun juga ingin mengkaji bagaimana komunitas JMPPK menyuarakan penolakan pembangunan pabrik semen di Rembang melalui *press release* yang mereka buat pada masa konflik tersebut sedang panas. Selain itu, peneliti juga ingin melihat bagaimana media memberitakan konflik pembangunan pabrik semen di Rembang. Apakah media tersebut memberitakan hal yang sama dengan yang ditulis oleh *press release* PT. Semen Indonesia atau sama dengan yang ditulis oleh *press release* JMPPK atau bahkan media Kompas.com memiliki pandangan sendiri mengenai konflik tersebut, serta *angle* atau isu apa yang diangkat baik oleh media, JMPPK maupun dari PT. Semen Indonesia itu sendiri.

Peneliti memilih Kompas.com sebagai media yang diteliti karena portal berita yang beralamat www.kompas.com ini memiliki reputasi yang baik dalam memberitakan suatu kasus dan berimbang sehingga berita yang ditulis memang berdasarkan fakta dan tidak bias pada pihak mana pun⁷ dan masuk peringkat 11 *top sites* di Indonesia versi alexa.com⁸. Media nasional ini juga menjadi salah satu media yang sangat diantisipasi pemberitaannya oleh pihak PT. Semen Indonesia⁹. Sebab, media ini merupakan media yang intens dalam memberitakan konflik tersebut. Hal ini dibuktikan dengan media Kompas.com menjadi media yang paling banyak dalam

⁷ About Us. <https://inside.kompas.com/about-us>. Diakses 28 Juli 2018.

⁸ Mohammad Solihin dan Novi Kurnia. “Pemaknaan Konflik Pabrik Semen Kendeng dalam Framing Media Berita Online kompas.com dan suara.merdeka.com”. Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15 No.1 (Januari-April, 2017). Halaman 18-19.

⁹ Aghnia Kaulika Febrigiasty. “Strategi Manajemen Krisis PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk : Studi Kasus pada Proyek Pembangunan Pabrik di Rembang”. Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan) Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016. Halaman 44-49.

memberitakan konflik pembangunan pabrik semen di Rembang dibanding media lainnya berdasarkan perbandingan *keyword* media online nasional mengenai konflik pembangunan pabrik semen di Rembang¹⁰.

Penolakan pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah merupakan krisis yang tergolong baru dan pemberitaannya naik turun, sehingga peneliti membatasi bahwa penelitian ini hanya meneliti *press release* baik PT. Semen Indonesia maupun JMPPK dan pemberitaan www.kompas.com pada saat kasus penolakan pembangunan pabrik semen ini sedang dalam tahap puncak atau panas.

Kasus penolakan pembangunan pabrik semen di Kendeng ini “panas” pada dua kurun waktu, yaitu pada Oktober 2014 sampai Desember 2014 pada saat PT. Semen Indonesia digugat oleh masyarakat Rembang, Jawa Tengah dan pada Oktober 2016 sampai Maret 2017 ketika kasus tersebut kembali “panas” lantaran Putusan MA menyatakan izin pabrik semen PT. Semen Indonesia dicabut, sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengizinkan PT. Semen Indonesia untuk tetap melanjutkan pembangunan pabrik semen di Kendeng. Oleh karena itu, penelitian ini membatasi pada *press release* PT. Semen Indonesia dan JMPPK yang dikeluarkan pada September 2014 sampai Desember 2014 dan Oktober 2016 sampai Maret 2017, begitu pula dengan pemberitaan www.kompas.com yang dikeluarkan pada waktu yang sama mengenai kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis teks yaitu analisis framing atau analisis bingkai pada pesan, sehingga penelitian ini hanya akan berfokus pada teks media. Tetapi teks media yang diteliti terdiri dari dua jenis, yaitu *press release* dan pemberitaan media online.

Peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana *press release* suatu instansi ditulis pada masa krisis dan bagaimana media memberitakannya, serta bagaimana suatu komunitas masyarakat menulis *press release* untuk menyuarakan penolakannya pada perusahaan sekaligus memperkuat

¹⁰ Mohammad Solihin dan Novi Kurnia. “Pemaknaan Konflik Pabrik Semen Kendeng dalam Framing Media Berita Online kompas.com dan suara.merdeka.com”. Op.Cit. Halaman 18-19.

posisinya di mata publik dan media. Sebab, *press release* dan pemberitaan seringkali merepresentasikan kesenjangan kepentingan antara perusahaan yang dalam hal ini adalah praktisi *public relations* dengan media yang dikenal dengan istilah “*bad news is good news*”. Terlebih dengan adanya *press release* dari komunitas masyarakat yang dapat memojokan posisi perusahaan.

Dari sudut pandang *Public relations*, krisis merupakan suatu hal yang sangat dihindari karena hal ini berpotensi membahayakan perusahaan, sehingga ketika perusahaan terkena krisis terlebih diliput oleh media, maka praktisi *public relations* harus sangat berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Sebab, pada masa krisis, rumor-rumor dan persepsi akan sangat banyak bermunculan yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian informasi¹¹. Situasi ini akan semakin berbahaya ketika rumor atau persepsi tersebut dianggap fakta oleh masyarakat. Oleh karena itu, praktisi *public relations* suatu perusahaan harus memahami bahwa informasi yang beredar di masyarakat bisa dianggap menjadi fakta, terlebih bila media ikut memberitakannya, terlebih krisis juga menjadi momen perebutan wacana antara perusahaan dan media, ditambah lagi dengan adanya kehadiran organisasi masyarakat. Kemampuan praktisi *public relations* untuk mengkonstruksikan realitas pada masa krisis sangatlah dibutuhkan.

Konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng menunjukkan bagaimana pentingnya *press release* dan kemampuan menulis *press release*. Menulis *press release* bukan hanya menulis informasi yang mengandung nilai berita dan memiliki kelengkapan 5W+1H saja, tetapi menulis *press release* juga harus melihat bagaimana kondisi dan situasi saat itu. Menulis *press release* ketika masa krisis berbeda dengan menulis *press release* masa normal. Sebab, kondisi dan situasinya berbeda. Menulis *press release* juga harus mempertimbangkan bagaimana situasi yang terjadi di lapangan, bagaimana posisi perusahaan di mata publik dan media, dan isu apa yang

¹¹ Rachmat Kriyantono. “*Public relations, Issue & Crisis Management : Pendekatan Critical Public relations, Etnografi Kritis & Kualitatif*”. (Jakarta : Prenada Media Group, 2015) Halaman 201-202.

diangkat media ketika menulis berita tentang perusahaan. Dengan begitu kesenjangan antara pernyataan resmi perusahaan dan pemberitaan media bisa diantisipasi. Selain melihat bagaimana posisi perusahaan di mata publik dan media, praktisi PR juga harus melihat apakah ada organisasi yang berpotensi menekan perusahaan karena hal ini berkaitan dengan perebutan opini publik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bingkai pesan *press release* PT. Semen Indonesia pada konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah?
2. Bagaimana bingkai pesan *press release* JMPPK pada konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah?
3. Bagaimana bingkai pesan berita dari Kompas.com pada konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah?
4. Bagaimana perbandingan bingkai pesan dari *press release* PT. Semen Indonesia, *press release* JMPPK, dan berita Kompas.com mengenai konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengungkap bingkai pesan *press release* PT. Semen Indonesia pada masa konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah.
2. Untuk mengungkap bingkai pesan *press release* JMPPK pada masa konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah.
3. Untuk mengungkap bingkai pesan berita dari Kompas.com mengenai konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah.
4. Untuk membandingkan ketiga bingkai pesan dari tiga objek tersebut mengenai konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah.

5. Untuk melihat isu atau aspek apa yang diangkat oleh PT. Semen Indonesia, JMPPK, dan media Kompas.com ketika menuliskan konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Dapat menjadi referensi bagi penelitian bidang komunikasi yang menggunakan analisis teks.
- b. Dapat menjadi kajian baru dalam komunikasi karena penelitian ini merupakan “irisan” antara analisis teks mengenai konflik lingkungan dan komunikasi krisis korporasi.
- c. Dapat menjadi referensi bagi penelitian teks atau tulisan kehumasan terutama *press release*.
- d. Dapat menjadi referensi untuk penelitian mengenai komparansi antara berita dan *press release*.
- e. Dapat menjadi referensi bagi penelitian mengenai konflik tambang atau konflik lingkungan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi pengetahuan bagi organisasi-organisasi non profit atau komunitas masyarakat bagaimana menulis *press release* yang baik.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi praktisi PR bagaimana menulis *press release* yang baik, terutama menulis *press release* terutama ketika perusahaan mengalami krisis.
- c. Sebagai bahan evaluasi bagi media mengenai bagaimana memberitakan konflik lingkungan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Peneliti mencari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini dari aspek topik penelitian yang

diangkat. Setelah itu, peneliti akan menjelaskan perbedaan-perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sebagai bukti bahwa penelitian ini merupakan baru dan mengangkat sisi yang belum diangkat oleh penelitian terdahulu.

Ada sembilan penelitian terdahulu yang diajukan oleh peneliti. Dari kesepuluh penelitian tersebut, dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok penelitian terdahulu berdasarkan topik penelitiannya. Ketiga kelompok tersebut adalah penelitian terdahulu tentang analisis teks pemberitaan konflik tambang atau konflik lingkungan, penelitian terdahulu tentang *press release* perusahaan atau korporasi pada masa krisis, dan penelitian terdahulu tentang analisis tulisan atau teks masyarakat atau organisasi masyarakat mengenai konflik tambang atau konflik lingkungan. Penelitian tentang analisis teks pemberitaan tambang terdiri dari penelitian pertama hingga ketiga, penelitian tentang *press release* perusahaan atau korporasi pada masa krisis terdiri dari penelitian keempat hingga ketujuh, dan penelitian tentang agenda kehumasan dalam menangani krisis terdiri dari penelitian kedelapan hingga kesembilan.

Penelitian *pertama* adalah skripsi yang berjudul “*Pemberitaan Kasus Tambang di Pulau Flores : Analisis Framing Pemberitaan Kasus Penolakan Tambang di Pulau Flores Dalam Surat Kabar Harian Umum Flores Pos* ¹²”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Flores Pos memposisikan dirinya sebagai media yang peduli pada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan di Flores, sehingga bisa disimpulkan bahwa Flores Pos memposisikan dirinya sebagai media yang berpihak pada masyarakat yang menolak tambang.

Sama-sama meneliti pemberitaan media dan menggunakan metode analisis framing, tetapi penelitian di atas memiliki beberapa perbedaan

¹² Maria Septian Riasanti Mola. “Pemberitaan Kasus Tambang di Pulau Flores : Analisis Framing Pemberitaan Kasus Penolakan Tambang di Pulau Flores Dalam Surat Kabar Harian Umum Flores Pos”. Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Penelitian ini mengangkat topik kasus penolakan pembangunan pabrik semen di Kendeng, selain itu penelitian ini tidak hanya meneliti framing dari pemberitaan media saja, tetapi juga meneliti framing dari perusahaan tambang yaitu PT. Semen Indonesia dan framing dari organisasi penolak pembangunan pabrik semen yaitu JMPPK. Penelitian ini bukan hanya melihat framing yang dilakukan oleh media, tetapi juga melihat framing dari perusahaan tambang dan organisasi penentang perusahaan tambang lalu membandingkannya.

Penelitian *kedua* adalah sebuah artikel jurnal yang berjudul “*Praktik Kuasa Dibalik Wacana Tambang Pasir Besi : Studi CDA Terhadap Pemberitaan Surat Kabar Flores Pos dan Expo NTT*”¹³. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wacana tambang pasir besi ini diproduksi atau dibuat oleh para elit lokal, otoritas gereja, dan kekuasaan pranata sosial. Dengan status mereka sebagai kalangan terhormat di dalam masyarakat mereka, mereka pun (elit lokal dan otoritas gereja) dapat melanggengkan kekuasaan dengan mulus, terlebih pada masa Pilkada Ende 2014-2019 untuk meraih dukungan massa. Penelitian ini menggunakan metode CDA (*Critical Discourse Analysis*) atau analisis wacana kasus Norman Fairclough.

Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama mengangkat topik tentang tambang di suatu daerah dan sama-sama meneliti teks pemberitaan dengan menggunakan analisis teks. Tetapi penelitian di atas juga memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Perbedaan mendasar dari keduanya kasus tambang yang diangkat, penelitian di atas mengambil kasus tentang tambang pasir di Ende yang dijadikan wacana untuk memenangkan Pilkada di Ende 2014-2019, sedangkan penelitian

¹³ Paulus Krist Ngga'a. “Praktik Kuasa Dibalik Wacana Tambang Pasir Besi : Studi CDA Terhadap Pemberitaan Surat Kabar Flores Pos dan Expo NTT”. *Jurnal Of Government*, Volume 2, No. 1, (Juli – Desember 2016).

ini fokus pada bagaimana teks-teks atau pesan-pesan yang ditulis pada saat kasus penolakan pembangunan pabrik semen di Kendeng baik dilihat dari *press release* PT. Semen Indonesia, *press release* JMPPK, maupun pemberitaan www.kompas.com . Selain itu, metode analisis teks yang digunakan juga berbeda, pada penelitian di atas menggunakan metode analisis wacana kritis, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode analisis framing.

Penelitian *ketiga* adalah penelitian yang berjudul “*Pemaknaan Konflik Pabrik Semen Kendeng dalam Framing Media Berita Online kompas.com dan suaramerdeka.com*”. Penelitian ini menggunakan analisis framing untuk bagaimana media Kompas.com dan media suaramerdeka.com membingkai konflik pembangunan pabrik semen di Rembang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kompas.com cenderung berpihak pada salah satu pihak yang berkonflik, sedangkan suaramerdeka.com lebih netral dalam memberitakan konflik pembangunan pabrik semen di Rembang.

Penelitian ini sama-sama meneliti media online Kompas.com menggunakan analisis framing untuk mengetahui bagaimana media tersebut membingkai konflik pembangunan pabrik semen di Rembang. Tetapi, penelitian di atas meneliti berita-berita yang dikeluarkan pada tahun 2014 sampai 2015, sedangkan penelitian ini meneliti berita-berita yang dikeluarkan pada akhir tahun 2014 dan akhir tahun 2016 hingga awal tahun 2017 di mana pada tahun 2016 hingga 2017 tersebut konflik kembali memanas setelah putusan MA keluar. Selain itu, penelitian ini membandingkan pemberitaan Kompas.com dengan *press release* PT. Semen Indonesia dan *press release* JMPPK.

Penelitian *keempat* adalah sebuah artikel jurnal yang berjudul “*AirAsia Crisis Communications Strategies and Malaysia Airlines: A Content Analysis*¹⁴”. Penelitian menggunakan analisis isi kuantitatif

¹⁴ Ni Ketut Dimar Warsihantari dan I Gusti Ngurah Putra. ““AirAsia Crisis Communications Strategies and Malaysia Airlines: A Content Analysis””. Jurnal Komunikasi ISKI, Vol. 3 (2018).

untuk membandingkan isi *press release* Air Asia dan Malaysia Airlines ketika kedua maskapai asal Malaysia tersebut tertimpa krisis, di mana *press release* tersebut sebagai bagian dari strategi komunikasi krisis. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa baik Air Asia maupun Malaysia Airlines sama-sama cukup cepat dalam merespon krisis, yang membedakan adalah Air Asia menekankan pada permintaan maaf, sedangkan Malaysian Air menekankan pada kompensasi.

Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti sama-sama meneliti isi *press release* suatu korporasi atau perusahaan ketika sedang tertimpa krisis. Tetapi, metode penelitian yang digunakan berbeda, di mana penelitian ini menggunakan analisis framing, sedangkan penelitian di atas menggunakan analisis isi kuantitatif, begitu pula dengan krisis yang diangkat.

Penelitian *kelima* adalah penelitian yang berjudul “*Analisis Framing terhadap Pernyataan Resmi Kemenpora RI dan PSSI dalam Kasus Sanksi FIFA terhadap Indonesia*¹⁵”. Penelitian ini menggunakan analisis framing untuk melihat bagaimana kedua organisasi tersebut membingkai kasus sanksi FIFA yang diberikan pada Indonesia. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa baik Kemenpora RI maupun PSSI membingkai kasus tersebut sebagai akibat dari manajemen organisasi yang buruk. Tetapi, fokus yang diangkat kedua organisasi tersebut berbeda. Kemenpora RI memfokuskan pada perbaikan manajemen sepak bola di Indonesia, sedangkan PSSI memfokuskan pada nasib tim sepak bola Indonesia.

Penelitian ini sama-sama menggunakan analisis framing untuk menganalisis bingkai pesan suatu organisasi ketika sedang tertimpa krisis, tetapi krisis yang diangkat penelitian di atas dengan penelitian ini berbeda, di mana penelitian di atas mengenai sanksi FIFA, sedangkan

¹⁵ Narayana Mahendra Prasetya. “Analisis Framing terhadap Pernyataan Resmi Kemenpora RI dan PSSI dalam Kasus Sanksi FIFA terhadap Indonesia”. *Jurnal Komunikator*, Vol. 10 No. 1 (1 Mei 2018).

penelitian ini mengangkat konflik pembangunan pabrik semen di Rembang.

Penelitian *keenam* adalah penelitian yang berjudul “*Analisis Press Release Express Group tentang Perampokan di Dalam Taksi Putih Melalui Perspektif Analisis Wacana Kritis Dalam Mengatasi Krisis Kepercayaan Publik*¹⁶”. Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough untuk melihat bagaimana Express Group menggunakan *press release* sebagai strategi komunikasi krisis. Hasil penelitian menyatakan bahwa Express Group melalui *press release* nya mengkonstruksikan dirinya sebagai pihak yang tidak bersalah, bahkan sebagai korban atas isu yang beredar.

Penelitian ini juga meneliti *press release* yang dikeluarkan ketika suatu perusahaan tertimpa krisis. Tetapi, metode analisis teks yang digunakan dan krisis yang diangkat berbeda, di mana penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis untuk membongkar proses konstruksi realitas yang dilakukan Express Group pada masa krisis, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis framing untuk melihat bagaimana PT. Semen Indonesia membingkai konflik pembangunan pabrik semen di Rembang.

Penelitian *ketujuh* adalah penelitian yang berjudul “*Ethical Issues in Using CSR as Crisis Communciation Strategy: Case Study in PT Semen Indonesia Rembang Factory*¹⁷”. Penelitian ini memfokuskan pada isi *press release* PT. Semen Indonesia pada masa konflik pembangunan pabrik semen di Rembang dengan menggunakan analisis faming model Robert Entman. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PT. Semen

¹⁶ Mirana Hanathasia. “Analisis Press Release Express Group tentang Perampokan di Dalam Taksi Putih Melalui Perspektif Analisis Wacana Kritis Dalam Mengatasi Krisis Kepercayaan Publik”. *Journal Communication Spectrum*, Vol. 4 No.2 (Februari – Juli 2017).

¹⁷ Narayana Mahendra Prasetya. “Ethical Issues in Using CSR as Crisis Communciation Strategy: Case Study in PT Semen Indonesia Rembang Factory”. *Conference Proceedings. (Asian Congress For Media And Communication 2016 International Conference Yogyakarta, Asian Congress for Media and Communication (ACMC), Yogyakarta, 2016).*

Indonesia menekankan CSR dalam *press release* nya sebagai strategi untuk mengembalikan reputasi PT. Semen Indonesia.

Penelitian ini sama-sama menggunakan analisis framing pada *press release* PT. Semen Indonesia untuk meneliti bingkai pesan yang dibentuk oleh PT. Semen Indonesia, tetapi terdapat perbedaan pada rentang waktu yang dipilih, di mana penelitian di atas meneliti *press release* PT. Semen Indonesia pada tahun 2013 hingga 2015, sedangkan penelitian ini meneliti *press release* PT. Semen Indonesia pada akhir tahun 2014 dan akhir tahun 2016 hingga awal 2017.

Penelitian *kedelapan* adalah skripsi yang berjudul “*Makna Poster Di Tanah Kami Nyawa Tak Semahal Tambang : Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce Pada Poster Kasus Pembunuhan Salim Kancil*”¹⁸. Penelitian ini menggunakan analisis semiotika Charles Sanders Peirce untuk mengetahui makna yang terkandung dalam poster yang diberi nama “Tanah Kami Nyawa Tak Semahal Tambang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna di dari poster ini adalah bahwa Indonesia lebih menghargai tambang dibandingkan nyawa seseorang.

Kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti pesan atau teks, dan sama-sama mengambil topik mengenai pro kontra perusahaan tambang di suatu daerah. Tetapi objek yang diteliti berbeda, penelitian ini meneliti teks *press release* organisasi dan kelompok penentang tambang, serta teks pemberitaan media. Metode penelitian yang digunakan pun berbeda. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing, sedangkan penelitian di atas menggunakan analisis semiotika. Penelitian ini berfokus pada bagaimana teks yang ditulis pada masa krisis oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

¹⁸ Vivi Ramalia. “Makna Poster Di Tanah Kami Nyawa Tak Semahal Tambang : Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce Pada Poster Kasus Pembunuhan Salim Kancil”. Skripsi Sarjana Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom Bandung, 2016.

Penelitian *kesembilan* adalah penelitian yang berjudul “*Reforma Agraria Dalam Karya Seni Grafis (Analisis Semiotika Karya Seni Grafis Lembaga Budaya Kerakyatan Taring Padi Yogyakarta dalam Menyampaikan Reforma Agraria di Indonesia)*”¹⁹. Penelitian ini menggunakan analisis semiotika Charles Sanders Peirce untuk menemukan tanda-tanda dan makna pada karya seni grafis Lembaga Budaya Kerakyatan Taring Padi dalam menyampaikan reforma agraria di Indonesia dalam merespon Ketetapan MPR No. IX tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Hasil penelitian menyatakan bahwa karya-karya lembaga budaya ini sarat dengan tanda-tanda dan makna yang menunjukkan idealisme petani.

Penelitian ini sama-sama meneliti karya dan isi pesan organisasi masyarakat atau masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya ketika terjadi konflik lingkungan, yang membedakan adalah bentuk karya yang dibuat. Lembaga Budaya Kerakyatan Taring Padi membuat karya seni grafis, sedangkan JMPPK membuat *press release*.

Berdasarkan pemaparan mengenai sembilan penelitian terdahulu di atas, kebaruan penelitian ini terletak pada komparansi atau perbandingan pemberitaan media, *press release* perusahaan, dan karya masyarakat (*press release* JMPPK) pada masa krisis atau konflik yang dalam hal ini adalah konflik pembangunan pabrik semen di Rembang.

2. Kerangka Teori

a. *Press Release*

Press release atau dalam bahasa Indonesia disebut siaran pers adalah sebuah tulisan kehumasan yang berbentuk berita yang

¹⁹ Latif Puspo. “Reforma Agraria Dalam Karya Seni Grafis (Analisis Semiotika Karya Seni Grafis Lembaga Budaya Kerakyatan Taring Padi Yogyakarta dalam Menyampaikan Reforma Agraria di Indonesia)”. Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.

dikirimkan kepada media baik media massa maupun online untuk dipublikasikan pada masyarakat²⁰.

Press release merupakan alat publikasi yang penting, sebab *press release* memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam membentuk kesadaran publik akan perusahaan dibanding iklan²¹. Sebab, *press release* dimuat di media, di mana media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat atau publik melalui kekuatan penyampaian informasinya²². Oleh karena itu, praktisi *public relations* harus mempunyai kemampuan menulis *press release* yang baik agar *press release* tersebut dapat dimuat oleh media yang akhirnya dapat memberikan publisitas yang positif terhadap perusahaan.

Berdasarkan jenis informasi yang ditonjolkan, terdapat tiga jenis *press release* menurut Thomas Bivins²³, yaitu :

1. *Basic Publicity Release*

Press release yang mengandung informasi-informasi yang memiliki nilai berita²⁴. Jenis *press release* ini adalah jenis *press release* yang paling banyak dikirimkan ke media.

2. *Product Release*

Press release yang berisi informasi seputar produk perusahaan²⁵.

3. *Financial Release*

²⁰ Sarah Rogatianni Artati Gultom, "Citra yang Ditampilkan Perusahaan dalam *Press release* (Analisis Isi Mengenai Jenis Release dan Jenis Citra yang Ditampilkan *Public relations Officer* SantikaPremiere Dyandra Hotel & Convention Medan dalam *Press Release*". Halaman 3. (<http://jurnal.usu.ac.id/index.php/flow/article/view/11641/4997>, akses pada 10 Mei 2017).

²¹ Titis Gandariani. "Public Relations dan Kemampuan Menulis Press Release sebagai Publisitas Korporat". Jurnal Lentera Komunikasi, Vol.2 No. 1 (Agustus, 2016). Halaman 72.

²² Rizki Hidayat. "Peran *Public relations* dalam Mempengaruhi Konten Media". Jurnal Interaksi, Volume 5 No. 1 (Januari, 2016). Halaman 91.

²³ Sarah Rogatianni Artati Gultom, "Citra yang Ditampilkan Perusahaan dalam *Press release* (Analisis Isi Mengenai Jenis Release dan Jenis Citra yang Ditampilkan *Public relations Officer* SantikaPremiere Dyandra Hotel & Convention Medan dalam *Press Release*". Loc.Cit.

²⁴ Arnita Nur Novianti. "Proses Penulisan Press Release Untuk Mendukung Media Massa oleh Humas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta". Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012. Halaman 13.

²⁵ Ibid

Press release yang berisi informasi seputar keuangan perusahaan. Biasanya jenis *press release* ini diberikan kepada pemegang saham²⁶.

Menurut Mahmud Muhidin²⁷, motivasi perusahaan atau dalam hal ini adalah praktisi *public relations* dalam menulis *press release* adalah :

1. Memelihara kesadaran (*aware*) masyarakat akan keberadaan perusahaan melalui informasi-informasi yang tertuang dalam *press release*.
2. Menginformasikan sesuatu yang baru pada masyarakat terkait kegiatan perusahaan, seperti peristiwa yang baru saja dialami perusahaan, ide atau gagasan perusahaan, dan lain-lain.
3. Memberikan konfirmasi terkait isu atau kabar burung yang berkaitan dengan perusahaan.
4. Untuk membantah informasi-informasi yang tidak benar bahkan sesat yang berkaitan dengan perusahaan.
5. Untuk mempromosikan produk baru²⁸.

Press Release pada Masa Krisis

Salah satu strategi manajemen krisis yang dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan konstruksi sosial atas realitas pada masa krisis²⁹. Krisis tersebut dikonstruksi agar dapat mengarahkan perusahaan menuju fase pasca krisis. Dalam prakteknya, konstruksi realitas pada masa krisis dilakukan melalui tulisan-tulisan yang

²⁶ Sarah Rogatianni Artati Gultom, "Citra yang Ditampilkan Perusahaan dalam *Press release* (Analisis Isi Mengenai Jenis Release dan Jenis Citra yang Ditampilkan *Public relations Officer* SantikaPremiere Dyandra Hotel & Convention Medan dalam *Press Release*". Loc.Cit.

²⁷ Titis Gandariani. "Public Relations dan Kemampuan Menulis Press Release sebagai Publisitas Korporat". Loc.Cit. Halaman 72-73.

²⁸ Ibid.

²⁹ Rachmat Kriyantono. "Public Relation & Crisis Management : Pendekatan Critical Public Relations Etnografi Kritis & Kualitatif". (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2012). Halaman 211.

dikeluarkan perusahaan pada masa krisis. Pernyataan-pernyataan perusahaan ini merujuk pada *press release* yang dikeluarkan pada masa krisis. Sebab, konstruksi realitas tersebut dilakukan melalui konstruksi bahasa sehingga dapat menciptakan makna yang disepakati bersama³⁰. Penggunaan bahasa, kata-kata, istilah, gaya penulisan, dll inilah yang merupakan bentuk konstruksi realitas yang dilakukan perusahaan pada saat krisis terjadi.

b. Produksi Wacana

Bagi Michael Foucault, wacana bukanlah hanya sekedar kata atau kalimat yang tertulis, melainkan mengandung sebuah ideologi bahkan pandangan hidup di dalamnya³¹. Ideologi dan pandangan hidup inilah yang mempengaruhi seseorang dalam menjalani kehidupannya. Adanya ideologi yang mempengaruhi seseorang dalam menjalani hidupnya menunjukkan bahwa tindakan-tindakan yang diambil manusia dalam hidupnya bukanlah murni dari dirinya sendiri, melainkan diarahkan oleh ideologi dan pandangan hidup yang dianutnya di mana di dalamnya mengandung arahan mana tindakan yang benar dan salah. Ideologi ini tidak akan bisa mempengaruhi manusia apabila tidak ada unsur kuasa di dalamnya³². Hal ini menjadi bukti bahwa wacana tidak bisa lepas dari adanya pengaruh kekuasaan untuk mempengaruhi tingkah laku manusia. Kekuasaan di sini bukanlah kuasa seperti halnya jabatan, melainkan berbentuk sebuah aturan atau regulasi yang dipatuhi bersama³³. Regulasi atau aturan hidup inilah yang mengarahkan benar dan salah pada manusia.

³⁰ Ibid

³¹ Eriyanto. "Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media". (Yogyakarta : PT. LkiS Pelangi Aksara, 2009). Halaman 65-66.

³² Aminah Bahasoan dan Amir Faisal Kotarumalos. "Praktek Relasi Wacana dan Kuasa Foucaultdian dalam Realias Multi Profesi di Indonesia". Jurnal Populis, Volume 8 No.1 (Maret 2014). Halaman 13-14.

³³ Eriyanto. "Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media". Op.Cit. halaman 67-68.

Dalam proses produksi wacana, terjadi kontak antara kekuasaan dan pengetahuan. Kontak tersebut menghasilkan sebuah hubungan yang saling berkaitan di mana kekuasaan akan menghasilkan sebuah pengetahuan, di mana pengetahuan ini adalah klaim kebenaran atas kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Michael Foucault menegaskan bahwa dalam proses produksi wacana, kekuasaan tidak berjalan apabila tidak ada pengetahuan yang melandasinya karena pengetahuan itu sendiri memiliki efek kuasa³⁴. Seperti halnya hubungan antara guru dan siswa, di mana guru sebagai orang yang memiliki pengetahuan mumpuni berkuasa atas muridnya, sehingga guru dikatakan memiliki kuasa karena atas pengetahuan yang dimiliki. Efek kuasa ini terjadi karena setiap orang yang memiliki pengetahuan dipandang memiliki level yang lebih tinggi dibanding yang lain sehingga sangat dihormati dan dijadikan panutan.

Apabila pengetahuan tersebut diproduksi oleh orang yang memiliki kekuasaan, maka pengetahuan tersebut akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Oleh karena itulah, pengetahuan tersebut dipatuhi dan tidak dibantah oleh pihak mana pun karena dianggap sebagai sebuah kebenaran. Hal ini memperkuat pernyataan Foucault yang menyatakan bahwa kebenaran bukanlah berasal dari langit, melainkan berasal dari pengetahuan yang diproduksi oleh kekuasaan yang diklaim sebagai kebenaran dan dipatuhi oleh masyarakat³⁵.

Wacana Dominan dan Wacana Terpinggirkan

Konsekuensi dari adanya hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan adalah adanya wacana dominan dan wacana terpinggirkan. Wacana dominan adalah wacana yang terpilih menjadi kebenaran oleh kekuasaan³⁶, sedangkan wacana

³⁴ Ibid halaman 66.

³⁵ Ibid halaman 66-67.

³⁶ Ibid halaman 76-78

terpinggirkan adalah sebaliknya, di mana wacana tersebut dianggap salah karena tidak dipilih oleh kekuasaan.

Adanya wacana dominan dan wacana terpinggirkan menimbulkan konsekuensi bahwa wacana dominan harus dipatuhi oleh masyarakat karena wacana tersebut diklaim penguasa sebagai kebenaran. Akibatnya, wacana dominan ini mempengaruhi bagaimana manusia menjalani kehidupannya, mulai dari bagaimana dia berpikir dan bertindak. Wacana dominan ini membatasi pandangan dan pemahamannya terhadap suatu fenomena, sehingga dia memahami suatu fenomena tetap berdasarkan pada wacana dominan dan berusaha untuk tidak melenceng dari wacana tersebut.

Dalam proses produksi wacana, terpinggirkannya suatu wacana, bisa jadi karena dua hal yaitu *pertama*, karena wacana tersebut belum cukup kuat untuk mendukung kekuasaan, *kedua* kemungkinan dipinggirkannya suatu wacana adalah karena ideologi dari penguasa itu sendiri³⁷. Pada poin kedua, wacana yang dipinggirkan karena ideologi dari penguasa, kemungkinan besar wacana tersebut adalah wacana yang tidak sesuai dengan ideologi yang dianut oleh penguasa, atau bahkan bisa jadi wacana tersebut mengancam kekuasaan si penguasa sehingga penguasa memilih untuk meminggirkan wacana tersebut dan mendominasi wacana yang bisa memperkuat kekuasaannya. Haryatmoko yang dikutip oleh Akmal dalam bukunya yang berjudul “Pahlawan dan Pecundang Militer Dalam Novel-Novel Indonesia” menyatakan bahwa wacana yang terpinggirkan tersebut adalah antikekuasaan³⁸. Adanya kekuasaan dan antikekuasaan mengindikasikan adanya pertarungan perebutan kekuasaan, seperti yang diutarakan oleh Michael Foucault yang menyatakan bahwa kuasa bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki

³⁷ Aprinus Salam dan Ramayda Akmal. “Pahlawan dan Pecundang Militer Dalam Novel-Novel Indonesia”. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2014). Halaman 17-18.

³⁸ Ibid

secara tetap, melainkan sesuatu yang selalu diperjuangkan dan diperebutkan³⁹.

Dalam konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, juga telah terjadi produksi wacana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Praktek produksi wacana yang terjadi adalah bagaimana PT. Semen Indonesia, JMPPK, dan media Kompas.com dalam memproduksi wacana yang mereka klaim sebagai kebenaran. Kebenaran ini akan dipatuhi oleh masyarakat luas dalam bentuk keberpihakan pada mereka ketika konflik tersebut terjadi. Wacana yang diproduksi pun bukanlah hanya sekedar wacana yang tertulis dalam *press release* maupun berita, melainkan mengandung ideologi dan pandang hidup masing-masing PT. Semen Indonesia, JMPPK, dan Kompas.com dalam melihat konflik pembangunan pabrik semen di Rembang. Dalam proses produksi wacananya pun, juga terdapat wacana yang dominan dan wacana yang dipinggirkan.

c. Framing

Framing atau bingkai merujuk pada suatu peristiwa yang telah dibingkai. Suatu fenomena tidak mungkin bisa diceritakan secara utuh, sehingga hanya bisa diambil dari satu bagian saja⁴⁰. Bagian dari fenomena yang difokuskan inilah yang diberi nama bingkai atau framing, di mana peristiwa hanya diceritakan dari satu bagian saja, yaitu bagian yang terbingkai. Hal ini dapat diilustrasikan seperti sebuah lingkaran besar dan terdapat sebuah bingkai kecil, bingkai kecil tersebut hanya bisa menangkap satu bagian saja, sedangkan yang lain tidak. Bagian yang berada dalam bingkai inilah yang kita kenal dengan istilah bingkai atau framing.

Dalam proses membingkai peristiwa tersebut, terjadilah proses konstruksi realitas, sehingga terlihat media atau korporasi

³⁹ Eriyanto. "Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media". Op.Cit. halaman 65-66.

⁴⁰ Rizki Hidayat. "Peran *Public Relations* dalam Mempengaruhi Konten Media". Log.Cit. Halaman 97.

memberitakan suatu peristiwa yang mengarah pada opini tertentu. Menurut Todd Gitlin dalam buku Eriyanto, framing adalah upaya untuk membentuk dan menyederhanakan realitas. Peristiwa yang telah mengalami framing tersebut mengalami proses seleksi, pengulangan, penekanan dan presentasi dari realitas⁴¹.

Secara umum, framing memiliki dua aspek penting, yaitu memilih fakta dan menulis fakta. Memilih fakta berarti menentukan mana fakta yang akan digunakan dan mana yang akan dibuang. Pada proses pemilihan fakta ini, akan dilakukan penekanan pada aspek tertentu. Menulis fakta merujuk pada bagaimana fakta yang telah memiliki penekanan pada aspek tertentu tersebut disajikan kepada khalayak atau publik. Penyajian tersebut dapat berupa gaya bahasa, gaya penulisan, kata apa yang mengalami penekanan, penempatan berita, penyertaan gambar, dll. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana khalayak memahami suatu realitas⁴².

Frame Media

Pada dasarnya, analisis framing digunakan untuk melihat bagaimana media atau wartawan dalam memandang suatu peristiwa⁴³. Pandangan atas peristiwa tersebut dapat dilihat dari bagaimana media atau wartawan memilih dan menonjolkan isu-isu tertentu ketika menuliskan peristiwa dalam bentuk berita⁴⁴. Hasilnya, isi pesan yang dalam hal ini adalah pemberitaan media cenderung pada sisi atau aspek tertentu. Kecendrungan pada satu sisi ini membuat satu sisi lainnya terlupakan.

Konsekuensi dari terjadinya framing atau pembingkaiannya suatu peristiwa oleh media adalah membatasi pandangan masyarakat

⁴¹ Eriyanto. "Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media". (Yogyakarta : LKiS Grup, 2011). Halaman 77-79.

⁴² Ibid halaman 81-82

⁴³ Alex Sobur. "Analisis Teks Media : Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing". (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002). Halaman 162-163.

⁴⁴ Ibid.

dalam memandang suatu fenomena atau peristiwa⁴⁵. Terbatasnya pandangan masyarakat ini terjadi karena proses framing yang cenderung menekankan aspek-aspek tertentu saja dan mengabaikan aspek yang lain, sehingga masyarakat pun melihat suatu peristiwa hanya dari aspek yang dibingkai saja. Terbatasnya pandangan masyarakat dalam melihat suatu fenomena dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dalam jangka panjang, di mana apabila fenomena yang serupa terjadi, maka masyarakat menyikapinya berdasarkan persepsi yang dimiliki masyarakat berdasarkan hasil framing tersebut. Salah satu contoh nyata dampak dari terjadinya framing adalah bagaimana media membingkai tragedi Sampit. Pada saat itu media cenderung memberitakan tragedi tersebut sebagai tragedi yang mengerikan dan kejam terlebih ditambah dengan hasil potret Charles Darapak yang menampilkan seorang pemuda Dayak dengan latar belakang mayat yang telah terpotong-potong tubuhnya. Akibat dari framing media tersebut, masyarakat Indonesia mempersepsikan suku Dayak sebagai suku yang kejam dan ganas⁴⁶.

Frame Korporasi

Framing atau pembingkaiannya realitas tidak hanya dilakukan oleh media saja, tetapi juga dilakukan oleh korporasi atau perusahaan. Tetapi, framing yang dilakukan korporasi berbeda dengan framing yang dilakukan oleh media. Framing korporasi merujuk pada framing praktek *public relations* di mana framing ini dilakukan untuk menunjang salah satu fungsi *public relations*, yaitu menyamakan persepsi masyarakat dengan persepsi korporasi atau perusahaan⁴⁷. Proses framing pada korporasi sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa publik atau masyarakat

⁴⁵ Eriyanto. "Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media". Op.cit. Halaman 88-89

⁴⁶ Ibid halaman 180

⁴⁷ Rachmat Kriyantono. "Teori-Teori *Public Relations* Perspektif Barat dan Lokal : Aplikasi Penelitian dan Praktik". Jakarta : Kencana, 2014). Halaman 314-315.

mempunyai persepsi sendiri mengenai korporasi, yang pada akhirnya persepsi ini mempengaruhi reputasi korporasi di mata masyarakat⁴⁸. Atribusi tersebut menjadi patokan korporasi untuk membentuk frame korporasi yang dapat menciptakan reputasi positif korporasi di mata masyarakat.

Dalam proses framing yang dilakukan oleh perusahaan, terdapat tujuh model framing dalam praktek *public relations* menurut Hallahan⁴⁹, yang terdiri dari :

1. Situasi

Perusahaan mem-framing situasi sehari-hari perusahaan yang berkaitan interaksi perusahaan dengan publik atau masyarakat, seperti event, meeting, dan lain-lain dengan tujuan memenuhi harapan publik pada perusahaan.

2. Atribusi

Perusahaan menonjolkan aspek atau isu tertentu yang berkaitan dengan hal-hal yang dikonsumsi oleh masyarakat seperti produk, pelayanan, dan lain-lain.

3. Pilihan-pilihan resiko

Perusahaan mem-framing dirinya sebagai perusahaan yang berani mengambil resiko untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan.

4. Tindakan-tindakan

Perusahaan mengarahkan publik untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap tepat untuk mendapatkan hal yang diinginkan.

5. Isu-isu

⁴⁸ Ibid halaman 315-316.

⁴⁹ Ibid halaman 317-320.

Perusahaan harus bisa meringkaskan isu-isu penting yang sekiranya bisa mempengaruhi reputasi perusahaan agar interpretasi isu yang ada di masyarakat sesuai dengan interpretasi isu oleh perusahaan.

6. Tanggung jawab

Perusahaan harus bisa menjelaskan posisi dirinya ketika terjadi suatu peristiwa yang melibatkan perusahaan, baik sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, maupun tidak.

7. Berita

Perusahaan harus bisa memproduksi informasi yang mengandung news values tetapi tetap menjaga reputasi perusahaan pada media, seperti *press release*, *newsletter*, dan lain-lain agar media dapat memuat informasi tersebut⁵⁰.

Framing suatu peristiwa dapat menunjukkan bagaimana ideologi dan pandangan suatu instansi dalam melihat suatu peristiwa. Ideologi tersebut dituangkan dalam teks-teks yang mereka keluarkan. Hasil analisis framing teks dari suatu media dapat menunjukkan bagaimana suatu media atau instansi atau komunitas memandang dan memahami suatu peristiwa. Dalam skala lebih jauh, apabila framing suatu media atau instansi dibandingkan satu sama lain, maka dapat ditemukan perbedaan atau persamaan masing-masing instansi dalam memandang suatu peristiwa.

d. Etika Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1982, Lingkungan Hidup adalah :

Kesatuan ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan

⁵⁰ Ibid

*perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya*⁵¹.

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka lingkungan hidup digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Cara manusia dalam menggunakan lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berbeda-beda, ada yang sewenang-wenang, ada pula yang memperhatikan bagaimana masa depan lingkungan ke depannya.

Cara manusia dalam menggunakan lingkungan hidup tidak lepas dari bagaimana manusia memahami lingkungan itu sendiri. Berdasarkan pemaparan Sony Keraf dalam bukunya yang berjudul “Etika Lingkungan Hidup”⁵², terdapat tiga etika yang dianut oleh manusia dalam melihat lingkungan hidup, yaitu :

1. Antroposentrisme

Paham ini mengatakan bahwa lingkungan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga manusia berhak untuk menggunakan alam sebebannya yang dalam hal ini lingkungan selama hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia⁵³. Paham ini awalnya berasal dari pandangan Aristoteles yang menyatakan bahwa tumbuhan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hewan, dan hewan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia⁵⁴. Pandangan Aristoteles ini meletakkan manusia sebagai makhluk hidup yang posisinya paling tinggi di muka bumi sehingga makhluk hidup yang berada di bawah manusia harus memenuhi kebutuhan manusia. Alasan mengapa manusia ditetapkan sebagai makhluk hidup yang memiliki posisi

⁵¹ Undang-Undang No. 4 tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 1.

⁵² Sony Keraf. “Etika Lingkungan Hidup”. (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2010). Halaman 45.

⁵³ Dwi Febriyani. “Krisis Lingkungan Hidup dan Pandangan Antroposentrisme Menurut A. Sony Keraf”. (Skripsi S1, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017). Halaman 6

⁵⁴ Sutoyo. “Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup”. ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1. (2013). Halaman 196-199

tertinggi karena manusia adalah satu-satunya makhluk hidup berakal⁵⁵. Namun, paham ini justru membuat manusia menjadi makhluk yang egois yang tidak memperhatikan keberlangsungan alam semesta beserta isinya terutama hewan, tumbuhan, serta lingkungan. Bencana alam, kerusakan lingkungan, punahnya beberapa spesies hewan dan tumbuhan, dan pemanasan global merupakan dampak dari keegoisan manusia yang bersumber dari paham antroposentrisme.

2. Biosentrisme

Kerusakan lingkungan akibat dari paham antroposentrisme mendorong munculnya paham biosentrisme di mana paham ini memahami bahwa semua yang ada di muka bumi ini berharga termasuk di antaranya adalah hewan dan tumbuhan⁵⁶. Oleh karena itu, hewan dan tumbuhan berhak untuk diperlakukan sama seperti halnya manusia, di mana ketika kebutuhan manusia harus dipenuhi, maka hewan dan tumbuhan pun juga berhak untuk dipenuhi kebutuhannya. Paham ini dicetuskan oleh Albert Schweitzer, seorang pemenang nobel tahun 1952⁵⁷. Paham biosentrisme ini bersumber dari prinsip moral hidup yang dianut oleh Albert Schweitzer, yaitu :

“Orang yang benar-benar bermoral adalah orang yang tunduk pada dorongan untuk membantu semua kehidupan, ketika ia sendiri mampu membantu, dan menghindari apapun yang membahayakan kehidupan”.⁵⁸

3. Ekosentrisme

Paham ini merupakan lanjutan dari paham biosentrisme. Bila paham biosentrisme hanya berfokus pada makhluk hidup yang ada di bumi, maka paham ini mencakup hal yang lebih luas di

⁵⁵ Ibid halaman 197

⁵⁶ Ibid halaman 200

⁵⁷ Ibid halaman 201

⁵⁸ Ibid

mana yang berharga dalam kehidupan ini bukan hanya makhluk hidup yang ada di muka bumi, tetapi juga benda-benda mati yang ada di alam semesta termasuk di dalamnya lingkungan⁵⁹. Oleh karena itu, praktek pengrusakan lingkungan seperti pencemaran air dan tanah yang merupakan benda mati sangat ditentang oleh paham ini, karena air dan tanah juga merupakan suatu yang berharga. Paham ekosentrisme inilah yang melahirkan berbagai komunitas, lembaga maupun gerakan-gerakan yang menyuarakan kelestarian alam. Dalam tingkat masyarakat, paham ekosentrisme ini berpadu dengan nilai-nilai adat yang dianut masyarakat sehingga menghasilkan sebuah kearifan lokal.

Setiap manusia yang ada di muka bumi ini pastilah memiliki salah satu pandangan terhadap lingkungan hidup sesuai dengan pemaparan di atas, begitu pula dengan PT. Semen Indonesia, JMPPK, dan media Kompas.com. Ketiga pihak tersebut pastilah memiliki salah satu dari ketiga pandangan manusia mengenai lingkungan. Pandangan mereka terhadap lingkungan tersebut mempengaruhi sikap dan tindakan mereka dalam menghadapi konflik pembangunan pabrik semen di Rembang. Sebab, konflik pembangunan pabrik semen di Rembang merupakan konflik lingkungan.

Isu Lingkungan dalam Media

Media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi khalayak yang dalam hal ini adalah masyarakat luas dengan kekuatan penyebaran informasinya. Kekuatan ini dapat digunakan untuk mengajak masyarakat untuk peduli pada lingkungan. Apa yang dikatakan media terkait isu lingkungan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terkait isu

⁵⁹ Eko Nurmardiansyah. "Eco-Philosophy dan Implikasinya Dalam Politik Hukum Lingkungan Di Indonesia". Melintas, edisi 30 Januari 2014". Halaman 87-88. <http://journal.unpar.ac.id/index.php/melintas/article/viewFile/1283/1253> . Diakses pada 07 Agustus 2018.

lingkungan. Oleh karena itulah, media menjadi salah satu dari pengelolaan lingkungan⁶⁰.

Dalam kajian jurnalistik, terdapat kajian jurnalisme lingkungan, di mana kajian ini merupakan kajian jurnalisme dalam memberitakan isu lingkungan. Isu lingkungan sedikit berbeda dengan isu lainnya di mana isu ini membutuhkan ketelitian dalam proses peliputan karena isu lingkungan hidup tidak lepas dari isu polusi, kelestarian alam, pencemaran, dan lain-lain yang membutuhkan banyak informasi khusus⁶¹. Tidak seperti isu politik yang isunya lebih cenderung umum, isu lingkungan cenderung lebih khusus karena informasi ini biasanya hanya didapatkan oleh orang-orang yang memang fokus pada isu lingkungan. Kekhususan ini tidak jarang membuat wartawan tidak terlalu tertarik mengangkat isu ini karena cukup sulit dipelajari dibanding isu lainnya⁶².

Selain itu, isu lingkungan merupakan isu yang tidak bisa berdiri sendiri, sebab isu ini selalu berkaitan dengan isu-isu lainnya⁶³. Isu lingkungan yang tidak bisa berdiri sendiri inilah yang menyebabkan isu lingkungan termasuk isu yang jarang diangkat oleh media.

Berita mengenai isu lingkungan yang baik adalah berita yang bersifat objektif⁶⁴. Selain itu, sebuah berita dikatakan memiliki

⁶⁰ Inda Fitriyarni. "Pemberitaan dan Persepsi Masyarakat Tentang Lingkungan Hidup di Media Cetak Lokal Provinsi Kalimantan Timur". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 11 No. 1 (Januari – April 2013) Halaman 18-20.

⁶¹ Rosalita Dian Utami dan Bonaventura Satya Bharata. "Praktek Jurnalisme Lingkungan Dalam Pemberitaan Pembangunan Pabrik Semen Di Kawasan Pegunungan Kendeng Rembang (Analisis Framing Praktek Jurnalisme Lingkungan dalam Pemberitaan Pembangunan Pabrik Semen di Kawasan Pegunungan Kendeng Rembang pada Media Mongabay.co.id Periode Februari-Agustus 2014)". <http://e-journal.uajy.ac.id/9453/1/JURNALKOM04422.pdf>. (diakses 06 September 2017).

⁶² Ibid

⁶³ Ibid

⁶⁴ Ibid

keberpihakan pada isu lingkungan apabila berita tersebut mengandung nilai-nilai yang mengajak pada kelestarian lingkungan⁶⁵.

Isu Lingkungan dalam *Press Release*

Berbeda dengan media, organisasi terutama yang berbasis profit justru sering mengangkat isu lingkungan, baik dalam *press release*, maupun *event*, kampanye, produk, *branding* dan lain-lain terlebih bila itu adalah perusahaan tambang.

Isu lingkungan mulai digaungkan seiring dengan berkembangnya konsep CSR (*Corporate Social Responsibility*) pada tahun 1990an⁶⁶. Semenjak saat itu, perusahaan yang dianggap berhasil, bukanlah lagi perusahaan yang meraih keuntungan terbanyak, melainkan perusahaan yang peduli pada isu sosial dan lingkungan⁶⁷. Berbagai perusahaan besar pun mengklaim diri mereka sebagai perusahaan yang ramah lingkungan, dan memiliki produk ramah lingkungan. Klaim sebagai perusahaan ramah lingkungan ini dapat dilihat berbagai bentuk produk perusahaan yaitu :

1. Jargon

Perusahaan membuat jargon-jargon yang mengangkat isu lingkungan, seperti produk ramah lingkungan, produk daur ulang, produk mudah hancur, produk terbuat dari bahan yang aman, dan lain-lain.

2. Manajemen Event

Perusahaan menyelenggarakan event-event yang bertema lingkungan, seperti global warming, gerakan menanam pohon, dan lain-lain.

⁶⁵ Febrina Zulmi. "Keberpihakan Media Terhadap Isu Pelestarian Lingkungan Hidup". Jurnal KATA, Vol.1 No.II, (Oktober 2017) Halaman 105-106.

⁶⁶ Tapin Pandapotan Saragih. "Analisis Wacana Kritis : Perkembangan Wacana CSR di Indonesia pada Harian Kompas Tahun 2007-2016". Tesis S2 Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Darma Yogyakarta, 2017. Halaman 1-2.

⁶⁷ Ibid

3. Artefak

Perusahaan menggunakan simbol atau logo-logo yang berkaitan dengan isu lingkungan, seperti logo daur ulang.

4. Produk tulisan *public relations*

Tulisan-tulisan public relations seperti *press relase*, *news letter*, majalah yang di dalamnya terdapat topik mengenai lingkungan⁶⁸.

Klaim atas perusahaan ramah lingkungan pun juga terjadi dalam level konten atau teks, di mana dalam berbagai produk *public relations writing*, terdapat pesan-pesan yang berkaitan dengan isu lingkungan. Pesan-pesan yang mengangkat isu lingkungan tersebut telah dikonstruksi atau dibingkai sedemikian rupa agar masyarakat mempercayai bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang ramah lingkungan.

Pembingkaiian isu lingkungan pada perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan tujuh model framing dalam *public relations*, di antaranya :

1. Situasi

Perusahaan mem-framing dirinya sebagai perusahaan sebagai perusahaan yang peduli dengan lingkungan melalui framing kegiatan perusahaan sehari-hari yang berkaitan dengan isu lingkungan. Seperti ketika perusahaan mengadakan event peduli lingkungan, maka perusahaan harus bisa membingkai event tersebut sebagai wujud kepedulian perusahaan pada lingkungan.

2. Atribusi

Perusahaan menonjolkan hal-hal yang berkaitan dengan isu lingkungan, seperti produk ramah lingkungan, produk terbuat dari bahan yang aman, produk mudah terurai, produk bisa didaur ulang, dan lain-lain.

⁶⁸ Rachmat Kriyantono. "Teori-Teori *Public Relations* Perspektif Barat dan Lokal : Aplikasi Penelitian dan Praktik". Loc.Cit. Halaman 317.

3. Pilihan-pilihan resiko

Hal ini bisa dilakukan dengan membingkai perusahaan mengambil tindakan penuh resiko yang berkaitan dengan isu lingkungan, seperti mengeluarkan dana besar untuk kegiatan CSR, mengganti bahan baku produk dengan bahan baku yang lebih aman meskipun lebih mahal, memilih metode ramah lingkungan meski keuntungan sedikit, dan lain-lain.

4. Tindakan-tindakan

Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya mengajak masyarakat untuk membawa kantong belanjaan sendiri, mengajak masyarakat untuk menggunakan produk-produk yang memiliki stiker ramah lingkungan, membeli satu produk berarti menyumbang kegiatan penghijauan, dan lain-lain.

5. Isu-isu

Hal ini bisa dilakukan dengan membingkai isu kegiatan-kegiatan perusahaan sebagai kegiatan ramah lingkungan, seperti metode pengolahan limbah dan air, memiliki taman atau tanaman di wilayah perusahaan, dan lain-lain.

6. Tanggung jawab

Hal ini biasanya terjadi ketika perusahaan tertimpa krisis, yang dalam hal ini merujuk pada krisis lingkungan. Pembingkai bisa dilakukan dengan menerima sebagai pihak yang bertanggung jawab atas krisis lingkungan, atau menolak bertanggung jawab dengan menggunakan berbagai pembenaran bahwa perusahaan tidak merusak lingkungan.

7. Berita

Perusahaan bisa membuat tulisan yang mengangkat isu lingkungan, namun tetap membuat citra mereka tetap baik dan tetap layak dimuat di media. Hal ini bisa dilakukan dengan menulis mengenai metode terbaru

yang ramah lingkungan, wawancara dengan aktivis lingkungan, dan lain-lain⁶⁹.

F. Objek Penelitian

Penelitian ini akan meneliti tiga objek berupa teks, di antaranya :

1. *Press release* PT. Semen Indonesia

Press release PT. Semen Indonesia yang dikeluarkan pada Oktober 2014 sampai Desember 2014 dan Oktober 2016 sampai Maret 2017. *Press release* PT. Semen Indonesia ini terdapat pada website official PT. Semen Indonesia yaitu www.semenindonesia.com. Penelitian ini akan meneliti satu *press release* utuh sebagai satu unit.

2. *Press release* JMPPK

Press release JMPPK yang dikeluarkan pada Oktober 2014 sampai Desember 2014 dan Oktober 2016 sampai Maret 2017. *Press release* JMPPK ini terdapat pada website official JMPPK yaitu omahkendeng.org. Penelitian ini akan meneliti satu *press release* utuh sebagai satu unit.

3. Berita Kompas.com

Pemberitaan Kompas.com mengenai kasus pembangunan pabrik semen di Rembang yang dikeluarkan pada Oktober 2014 sampai Desember 2014 dan Oktober 2016 sampai Maret 2017. Teks berita didapatkan dari portal berita online yaitu www.kompas.com. Peneliti akan meneliti satu berita utuh sebagai satu unit.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis. Paradigma kritis menganut paham bahwa realitas yang ada di dunia ini merupakan hasil

⁶⁹ Rachmat Kriyantono. "Teori-Teori *Public Relations* Perspektif Barat dan Lokal : Aplikasi Penelitian dan Praktik". Loc.Cit. Halaman 317-320..

pertarungan kekuatan sosial, ekonomi, dan politik, di mana pertarungan ini menghasilkan makna terhadap realitas yang ditonjolkan dan makna terhadap realitas yang dipinggirkan⁷⁰. Dalam paradigma ini, media menjadi alat menjadi alat untuk memproduksi realitas yang ditonjolkan maupun yang dipinggirkan di mana dalam hal ini adalah penguasa⁷¹. Hasil dari produksi realitas tersebut adalah teks-teks yang dikeluarkan oleh media, di mana dalam penelitian ini hasil produksi realitas juga berupa teks *press release*. Teks bukan hanya merupakan hasil konstruksi atas realitas yang dibentuk oleh lembaga yang menulis, melainkan teks juga merupakan bentuk nyata hasil pertarungan dalam membentuk realitas yang ditonjolkan dan dipinggirkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis framing. Di mana analisis framing adalah metode analisis teks yang digunakan untuk melihat bagaimana media dan perusahaan memberikan frame atau bingkai pada tulisan-tulisan yang mereka keluarkan, di mana bingkai ini merupakan hasil konstruksi atas realitas yang dilakukan oleh media maupun lembaga lainnya yang juga memproduksi teks. Meskipun sebenarnya analisis framing merupakan bagian dari paradigma konstruktivistik, penelitian ini juga ingin mengkritisi bingkai yang mereka lakukan, sehingga penelitian ini menggunakan paradigma kritis agar bisa mengkritisi bingkai yang digunakan oleh media dan perusahaan.

2. Metode Analisis Teks

Metode analisis teks yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis framing atau bingkai. Model analisis framing dipilih oleh peneliti adalah model analisis framing Robert Entman. Model

⁷⁰ Eriyanto. "Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media". Op.cit. Halaman 32 – 34.

⁷¹ Ibid halaman 29.

analisis framing ini menekankan dua hal, yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek-aspek tertentu⁷².

Seleksi isu merujuk pada bagaimana media atau organisasi dalam memilih fakta yang akan dipublikasikan ke publik. Dalam proses seleksi isu, akan terdapat fakta yang dipilih untuk dipublikasikan, mana fakta yang dibuang. Oleh karena itulah, baik organisasi terlebih media tidak akan memberitakan suatu peristiwa secara utuh, melainkan hanya memberitakan atau mempublikasikan satu atau dua fakta saja berdasarkan seleksi isu yang dilakukan.

Setelah melakukan seleksi isu, maka isu yang dipilih untuk dipublikasikan tersebut akan ditulis dengan menonjolkan aspek-aspek tertentu. Penonjolan aspek ini dilihat dari bagaimana media atau organisasi menggambarkan suatu peristiwa, penggunaan kata, gambar yang dipilih, narasi dari penulis teks, dan sebagainya.

Untuk melihat bagaimana suatu peristiwa mengalami pembingkaiian atau framing, maka Robert Entman pun memperkenalkan elemen-elemen framing yang digunakan membingkai suatu peristiwa.

Tabel 1. 1

Elemen Framing Robert Entman

<i>Define Problems</i>	Elemen ini menekankan bagaimana media atau organisasi melihat suatu peristiwa? Peristiwa ini dipahami dan dimaknai sebagai apa.
<i>Diagnoses Causes</i>	Elemen ini melihat apa atau siapa yang dianggap menjadi penyebab suatu peristiwa terjadi. Elemen ini juga bisa memaparkan apa atau siapa yang dianggap bersalah dalam suatu peristiwa.
<i>Moral Judgement</i>	Argumentasi atau nilai moral apa yang diangkat untuk membenarkan tindakan

⁷² Eriyanto. "Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media". Op.cit. halaman 221 – 223.

	yang diambil ketika terjadi suatu peristiwa.
<i>Treatment Recommendation</i>	Solusi apa yang ditawarkan oleh media atau organisasi untuk menghadapi peristiwa tersebut.

(Sumber : Eriyanto, “Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media”, halaman 223 - 224)

3. Tahapan Analisis Teks

Dalam melakukan analisis teks terhadap objek yang diteliti, terdapat beberapa tahap yang dilakukan, yaitu :

a. Penetapan kriteria teks yang akan diteliti

Untuk memudahkan peneliti mencari teks yang akan diteliti, maka peneliti pun memberikan kriteria pada teks yang akan diteliti, yaitu :

1. Teks tersebut merupakan *press release* PT. Semen Indonesia, *press release* JMPPK, dan berita dari www.kompas.com
2. Periode dikeluarkannya teks tersebut adalah Oktober 2014 – Desember 2014, dan Oktober 2016 – Maret 2017.
3. Teks tersebut membahas mengenai konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, atau yang berkaitan dengan konflik tersebut terutama yang mengangkat isu lingkungan.

b. Pencarian dan pengumpulan data

Pada tahapan ini, peneliti mulai mencari dan mengumpulkan teks sesuai dengan kriteria yang ditetapkan peneliti. Peneliti mencari teks tersebut langsung ke sumber di mana teks tersebut berada, yaitu *press release* PT. Semen Indonesia di website resmi PT. Semen Indonesia yang beralamat www.semenindonesia.com , *press release* JMPPK yang berada di website yang digunakan JMPPK untuk menyampaikan aspirasinya, yaitu omahkendeng.org, dan berita dari media Kompas.com didapatkan dari situs berita online kompas yaitu

www.kompas.com dengan tiga kata kunci di antaranya adalah Kendeng, Rembang, dan PT. Semen Indonesia.

c. Pemilahan data

Setelah mencari dan mengumpulkan teks yang membahas isu lingkungan, maka peneliti pun memilah-memilah kembali teks yang telah didapatkan. Pemilahan ini dilakukan untuk mengecek kembali apakah teks yang dicari telah memenuhi semua kriteria yang ditetapkan, atau hanya memenuhi beberapa saja. Peneliti melakukan pemilahan data agar teks yang dipilih benar-benar sesuai dengan topik penelitian. Pada tahapan ini, hanya *press release* PT. Semen Indonesia dan berita dari www.kompas.com saja yang melewati dua tahap pemilahan data hal ini disebabkan karena beberapa *press release* PT. Semen yang dikeluarkan pada periode yang ditetapkan, tidak sesuai dengan topik penelitian, dan berita Kompas.com yang dikeluarkan pada periode yang ditetapkan peneliti terlalu banyak. Sedangkan *press release* JMPPK hanya satu kali melakukan tahap pemilahan data karena sudah memenuhi semua kriteria teks yang dibutuhkan peneliti.

d. Penetapan data atau teks yang akan diteliti

Setelah melewati proses pemilahan, peneliti pun menetapkan teks-teks yang akan diteliti. Total teks yang diteliti dalam penelitian ini adalah 35 teks, dengan rincian *press release* PT. Semen Indonesia terdiri dari 5 teks, *press release* JMPPK 12 teks, dan berita www.kompas.com 18 teks.

e. Analisis teks per judul *press release* atau berita

Tahapan ini adalah tahapan utama dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode analisis teks framing model Robert Entman. Analisis teks dilakukan per tiap judul *press release* atau berita beserta isinya.

f. Menentukan bingkai pesan per objek yang diteliti

Setelah menganalisis masing-masing *press release* atau berita, maka peneliti menentukan bingkai pesan secara umum per masing-masing objek. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana objek membingkai konflik pembangunan pabrik semen di Rembang.

g. Membandingkan bingkai pesan antar objek

Setelah menentukan bingkai pesan antar objek, maka peneliti pun membandingkannya satu sama lain untuk mencari apa kesamaan dan perbedaan dari masing-masing bingkai pesan.

h. Pembahasan masing-masing bingkai pesan

Setelah melakukan perbandingan, maka bingkai pesan tersebut akan dibahas satu per satu untuk mendalami bingkai pesan masing-masing objek.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. PT. Semen Indonesia

1. Sekilas Profil PT. Semen Indonesia

PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di mana sebelumnya bernama PT. Semen Gresik adalah salah satu perusahaan produsen semen yang berada di bawah naungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Perusahaan ini diresmikan oleh presiden RI pertama, Ir. Soekarno dengan kapasitas 250.000 ton semen per tahun.

Pada bulan Juli 1991, komposisi pemegang saham perusahaan PT. Semen Indonesia adalah Negara RI 73% dan masyarakat 27%. Pada waktu tersebut pula, PT. Semen Indonesia menjadi perusahaan BUMN pertama yang *go public* dengan menjual 40 juta lembar saham pada masyarakat.

Lalu pada bulan September 1995, kepemilikan saham PT. Semen Indonesia berubah menjadi Negara RI 65% dan masyarakat 35% berdasarkan Penawaran Umum Terbatas I (Right Issue I) oleh pihak perseroan. Kemudian pada tanggal 15 September di tahun yang sama, PT. Semen Indonesia berkolaborasi dengan PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa dengan total kapasitas 8,5 juta ton per tahun.

Pada tanggal 17 September 1998, komposisi kepemilikan saham PT. Semen Indonesia berubah lagi menjadi Negara RI 51%, masyarakat 35% dan Cemex 14%. Cemex adalah satu perusahaan produsen semen berskala global yang berpusat di Meksiko dan hadir di lebih dari 50 negara di dunia⁷³. Kemudian pada tanggal 30 September 1999, presentasi komposisi pemegang saham PT. Semen Indonesia berubah menjadi Negara RI 51%, masyarakat 23,4%, dan Cemex 25,5%.

Pada tanggal 27 Juli 2006, perubahan komposisi kepemilikan saham pun kembali terjadi di mana kepemilikan saham menjadi Negara RI 51%, Blue Valley Holding 24,9%, dan masyarakat 24%. Kepemilikan saham oleh Blue Valley Holding terjadi karena adanya transaksi penjualan saham Cemex kepada Blue Valley Holding. Namun pada bulan Maret 2010, komposisi pemegang saham menjadi Negara RI 51%

⁷³ Company Profile. <https://www.cemex.com/about-us/company-profile> . Diakses pada 25 Juli 2018.

dan masyarakat 48,9%. Perubahan ini terjadi karena Blue Valley Holding menjual seluruh saham PT. Semen Indonesia melalui private placement.

Pada bulan April 2012, pembangunan pabrik Tuban IV dengan kapasitas 2,5 juta ton berhasil diselesaikan, lalu diserahkan pada Juli 2012, dan diresmikan pada bulan Oktober 2012. Lanjut pada kuartal ketiga 2012, pembangunan pabrik semen Tonasa telah diselesaikan dengan kapasitas yang sama dengan pabrik Tuban IV, dan ditargetkan beroperasi pada kuartal pertama 2013.

Bulan Desember 2012 menjadi sejarah bagi PT. Semen Indonesia karena menjadi perusahaan BUMN multinasional pertama di Indonesia dengan diambil alihnya 70% kepemilikan saham Thang Long Cement di Vietnam yang memiliki kapasitas 2,3 juta ton. Hal ini juga menjadikan PT. Semen Indonesia sebagai perusahaan semen terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 30 juta per tahun hingga kuartal pertama tahun 2013⁷⁴.

Pada 07 Januari 2013, PT. Semen Gresik resmi berganti nama menjadi PT. Semen Indonesia berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan. Pergantian nama ini juga menjadi langkah awal PT. Semen Indonesia untuk menerapkan *Strategic Holding Group* yang diharapkan mampu mensinergikan seluruh kegiatan produksi semen dan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki⁷⁵.

PT. Semen Indonesia memiliki website resmi yang bernama www.semenindonesia.com. Website ini berisi informasi-informasi seputar kegiatan PT. Semen Indonesia, profil PT. Semen Indonesia, *press release*, produk-produk PT. Semen Indonesia. Menariknya, website PT. Semen Indonesia ini memiliki rubrik yang bernama

⁷⁴ Profil Perusahaan. <http://www.semenindonesia.com/profil-perusahaan/>. Diakses pada 25 Juli 2018.

⁷⁵ Profil PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. <http://www.bumn.go.id/semenindonesia/berita/965>. Diakses pada 25 Juli 2018.

“Kinerja Berkelanjutan”, di mana rubrik tersebut berisi seputar kegiatan PT. Semen Indonesia yang berkaitan dengan isu lingkungan secara detail bahkan dilengkapi dengan laporan tahunan kegiatan tersebut.

2. Visi Misi

Visi :

Menjadi perusahaan persemenan internasional yang terkemuka di Asia Tenggara

Misi :

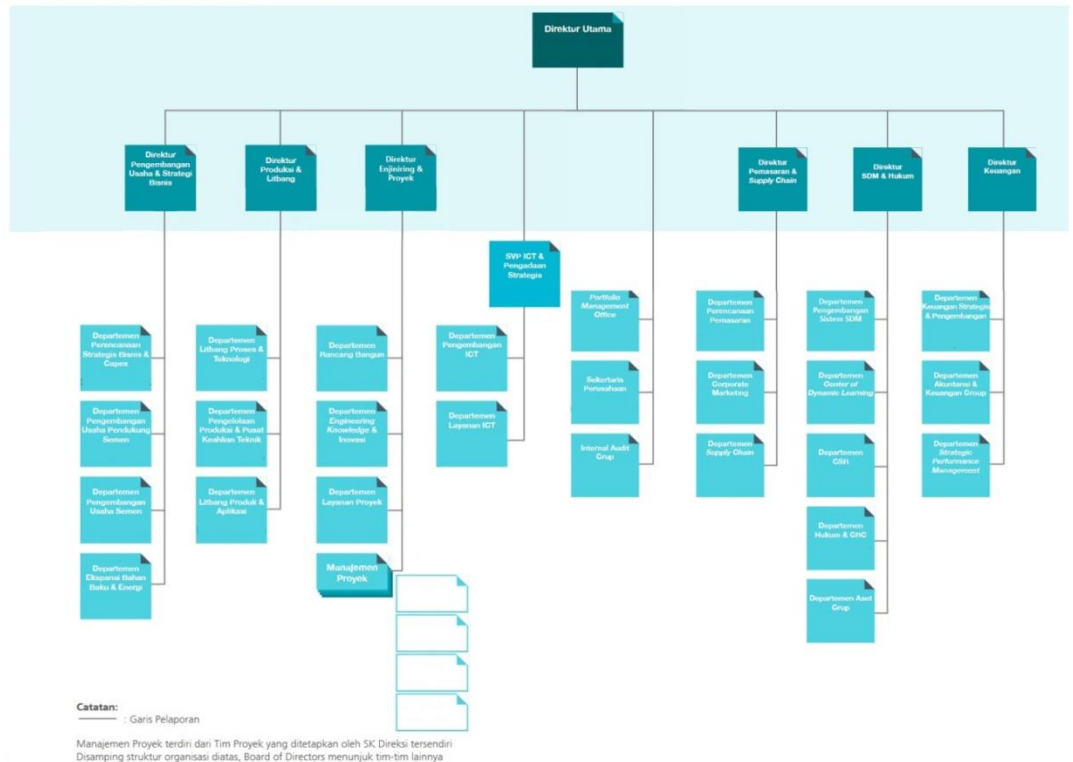
- Mengembangkan usaha persemenan dan industri terkait yang berorientasikan kepuasan konsumen.
- Mewujudkan perusahaan yang berstandar internasional dengan keunggulan daya saing dan sinergi untuk meningkatkan nilai tambah secara berkesinambungan.
- Mewujudkan tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan.
- Memberikan nilai terbaik terhadap pemangku kepentingan (stakeholders)
- Membangun kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia.⁷⁶

3. Struktur Organisasi PT. Semen Indonesia

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi PT. Semen Indonesia

⁷⁶ Visi dan Misi. <http://www.semenindonesia.com/visi-dan-misi/> . Diakses pada 26 Juli 2018.

STRUKTUR ORGANISASI



(Sumber : <http://www.semenindonesia.com/struktur-organisasi/> diakses pada 26 Juli 2018)

4. Press release PT. Semen Indonesia

Berdasarkan periode waktu yang ditetapkan peneliti, terdapat 17 *press release* PT. Semen Indonesia yang dikeluarkan. *Press release* ini didapatkan dari website resmi PT. Semen Indonesia, www.semenindonesia.com pada tajuk siaran press. Berikut adalah *press release* PT. Semen Indonesia yang dikeluarkan pada periode yang ditetapkan peneliti, yaitu Oktober 2014 sampai Desember 2014 dan Oktober 2016 sampai Maret 2017 :

Tabel 2. 1

***Press release* PT. Semen Indonesia Berdasarkan Periode Waktu**

NO	TANGGAL RILIS	JUDUL
1	05 Oktober 2014	Semen Indonesia Salurkan 78 Ekor Sapi Pada Perayaan Hari Raya Idul Adha 1415 H.
2	08 Oktober 2014	Penjualan Semen Gresik di Wilayah Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Mojokerto Hingga September Mencapai 1,17 Ton.
3	08 Oktober 2014	Penjualan Semen Gresik di Kalimantan Barat Hingga September 2014 Meningkat 17% Mencapai 196,42 Ribu Ton.
4	15 Oktober 2014	Semen Indonesia Raih Penghargaan Website Terbaik Versi Berita Satu.
5	16 Oktober 2014	Semen Indonesia Raih Penghargaan Green Industry dari Kementerian Perindustrian.
6	17 Oktober 2014	Sukses Jalankan Strategi Transformasi, Dwi Soetjipto Dirut Semen Indonesia Raih Penghargaan Sebagai CEO Pilihan Dari Serikat Perusahaan Pers (SPS).
7	19 Oktober 2014	Semen Indonesia Siap Cetak SDM Unggul Melalui Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI).
8	22 Oktober 2014	Penjualan Semen Gresik Wilayah Bali Meningkat 20,3 Persen.
9	04 November 2014	Penjualan Semen Gresik di Wilayah Kalimantan Selatan Hingga September Mencapai 200 Ribu Ton Dengan Pangsa Pasar 28,41 Persen.
10	10 November 2016	Semen Indonesia Serahkan Hasil Bedah Rumah Veteran Tahap Satu di Jawa Tengah.
11	11 November 2016	Semen Indonesia Ikut Kembangkan Kawasan Desa Wisata Pinge, Bali dengan Pasang Porous Concrete dan Flash Concrete.
12	12 November 2016	Semen Indonesia (SMGR) Kucurkan Dana Rp 670 Juta, Bangun Infrastruktur Air Bersih Untuk Warga Sekitar Pabrik Rembang.
13	15 November 2016	Semen Indonesia Foundation Dukung Pembangunan Sekolah Berwawasan dan Berbudaya Lingkungan di Madiun dan Magetan.

14	01 Desember 2016	Semen Gresik Luncurkan Portal Pelanggan BisnisKokoh.com di Business Gathering Area Bali.
15	17 Desember 2016	Semen Indonesia Bangun Fasilitas MCK Senilai Rp. 470 Juta di Kawasan Candi Borobudur.
16	17 Desember 2016	Semen Indonesia Grup Ditunjuk Jadi Koordinator Penyaluran Bantuan Gempa Aceh.
17	19 Desember 2016	Semen Indonesia Serahkan Bantuan 98 Tenda dan 15 Shelter Untuk Paguyuban PKL Alun-Alun Rembang.

Jumlah *Press release* Periode Oktober 2014 – Desember 2014 : 9

Jumlah *Press release* Periode Oktober 2016 – Maret 2017 : 8

Jumlah Keseluruhan : 17

Tetapi, dari 17 *press release* tersebut, hanya lima *press release* yang berkaitan dengan topik penelitian, sehingga hanya lima *press release* PT. Semen Indonesia yang akan diteliti. Berikut lima *press release* yang akan diteliti :

Tabel 2. 2

***Press release* PT. Semen Indonesia yang Diteliti**

NO	TANGGAL RILIS	JUDUL
1	05 Oktober 2014	Semen Indonesia Salurkan 78 Ekor Sapi Pada Perayaan Hari Raya Idul Adha 1415 H.
2	16 Oktober 2014	Semen Indonesia Raih Penghargaan Green Industry dari Kementerian Perindustrian.
3	12 November 2016	Semen Indonesia (SMGR) Kucurkan Dana Rp 670 Juta, Bangun Infrastruktur Air Bersih Untuk Warga Sekitar Pabrik Rembang.

4	15 November 2016	Semen Indonesia Foundation Dukung Pembangunan Sekolah Berwawasan dan Berbudaya Lingkungan di Madiun dan Magetan.
5	19 Desember 2016	Semen Indonesia Serahkan Bantuan 98 Tenda dan 15 Shelter Untuk Paguyuban PKL Alun-Alun Rembang.

Jumlah *Press release* Periode Oktober 2014 – Desember 2014 : 2

Jumlah *Press release* Periode Oktober 2016 – Maret 2017 : 3

Jumlah Keseluruhan *Press release* yang akan diteliti : 5

B. JMPPK

1. Sekilas mengenai JMPPK

Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) adalah sebuah komunitas yang menjadi wadah masyarakat Jawa Tengah untuk menyuarakan penolakan pembangunan pabrik semen yang didirikan pada tahun 2008⁷⁷. Komunitas ini dipimpin oleh Gunretno sebagai koordinator sekaligus sebagai tokoh masyarakat Samin atau Sedulur Sikep. Komunitas JMPPK tidak lepas dari pengaruh Sedulur Sikep. Sedulur Sikep atau Samin adalah komunitas masyarakat adat yang menganut ajaran Samin yang tersebar di sepanjang kawasan Pegunungan Kendeng yang meliputi Kabupaten Grobogan, Pati, Kudus, Rembang, dan Blora⁷⁸. Komunitas ini juga aktif di dunia maya sebagai upaya untuk membangun relasi dengan kalangan akademisi, politisi, tokoh agama, dan lain sebagainya serta untuk menarik dukungan

⁷⁷ Suharko. "Masyarakat Adat versus Korporasi : Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah Periode 2013 – 2016". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 20, Nomor 2 (November 2016). Halaman 103 – 104.

⁷⁸ Anita Dhewy. "Gunretno : "Ibu Bumi Wis Maringi, Ibu Bumi Dilarani, Ibu Bumi Kang Ngadili". <http://www.jurnalperempuan.org/tokoh/gunretno-ibu-bumi-wis-maringi-ibu-bumi-dilarani-ibu-bumi-ngadili> . Diakses pada 25 Juli 2018.

masyarakat secara luas. Salah satu platform online yang digunakan JMPPK adalah website omahkendeng.org yang di dalamnya memuat berbagai informasi dan data-data yang berkaitan dengan konflik pembangunan pabrik semen di wilayah Pegunungan Kendeng. Komunitas ini pada awalnya didirikan sebagai wadah untuk melakukan aksi penolakan pembangunan pabrik semen PT. Semen Gresik (sekarang PT. Semen Indonesia) di Sukolilo, Pati Jawa Tengah. Komunitas yang berbasis di Jawa Tengah ini pun kembali melakukan aksi penolakan pembangunan pabrik semennya ketika pabrik semen PT. Semen Indonesia dibangun di Tegaldowo, Rembang, Jawa Tengah yang prosesnya masih berjalan sampai sekarang.

2. Ajaran Samin

Komunitas JMPPK tidak lepas dari adanya pengaruh ajaran Samin, terlebih komunitas tersebut dipimpin oleh seorang tokoh Sedulur Sikep atau Samin, yaitu Gunretno. Samin sendiri merujuk pada sebuah masyarakat adat yang menganut ajaran Samin Surontiko. Ajaran ini dibawa oleh Samin Surontiko pada masa penjajahan Belanda⁷⁹. Pada masa itu, Samin Surontiko dan pengikutnya berprinsip tidak akan tunduk pada pemerintahan yang bersikap tidak adil pada petani karena kebijakan pengelolaan hutan⁸⁰, di mana pemerintahan saat itu merujuk pada pemerintahan Belanda pada saat menjajah Indonesia. Salah satu ajaran Samin yang dipegang teguh oleh komunitas Samin dan JMPPK terkait kelestarian lingkungan adalah dilarang untuk melakukan *pethil*, yaitu mengambil bagian dari alam atau lingkungan⁸¹.

⁷⁹ Kristian Erdianto. "Air Mata Petani Kendeng dan Prinsip "Sedulur Sikep" Menjaga Ibu Bumi". <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/23/06450991/air.mata.petani.kendeng.dan.prinsip.sedulur.sikep.menjaga.ibu.bumi>. Diakses pada 26 Juli 2018.

⁸⁰ Addi Mawahibun Idhom. "Resistensi Komunitas Sedulur Sikep Terhadap Rencana Pembangunan Tambang Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah". (Skripsi S1, Fakultas Ushluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009). Halaman 8.

⁸¹ Subarkah dan Anggit Wicaksono. "Perlawanan Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Atas Kebijakan Pembangunan Semen Gresik di Sukolilo Pati (Studi Kebijakan Berbasis Lingkungan dan Kearifan Lokal)". <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=172078&val=1322&title=Perlawanan%20Masyarakat%20Samin%20di%20Sukolilo%20Pati>

3. *Press release* JMPPK

Berdasarkan periode waktu yang ditetapkan peneliti, terdapat 12 *press release* yang dipublikasikan. *Press release* ini didapatkan dari website JMPPK yaitu omahkendeng.org . Berikut *press release* yang akan diteliti :

Tabel 2. 3

***Press release* JMPPK yang Diteliti**

NO	TANGGAL RILIS	JUDUL
1	23 Oktober 2014	<i>Press release</i> Jagongan Media Rakyat 2014: Jejaring Media Warga Menyelamatkan Kendeng Utara.
2	3 Desember 2014	Pers Rilis Aksi Bersama Koalisi Semarang untuk Kendeng: Investasi PT. Semen Indonesia Mengancam Lingkungan.
3	10 November 2016	Pers Release Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK): HORMATI PUTUSAN PENGADILAN, BERHENTILAH MEMBUAT PERNYATAAN KONTROVERSIAL.
4	18 Desember 2016	Pernyataan Sikap WALHI: Perlawanan WALHI terhadap Kejahatan Lingkungan Hidup di Karst Kendeng.
5	30 Desember 2016	PERNYATAAN KOMNAS PEREMPUAN ATAS PENDIRIAN DAN RENCANA PENDIRIAN PABRIK SEMEN SERTA EXPLOITASI KAWASAN KARTS DI PEGUNUNGAN KENDENG UTARA DAN SELATAN.
6	09 Januari 2017	PERS RELEASE JM-PPK: Patuhi Putusan MA!

[syarakat%20Samin%20\(Sedulur%20Sikep\)%20Atas%20Kebijakan%20%20Pembangunan%20Semen%20Gresik%20Di%20Sukolilo%20Pati%20\(Studi%20Kebijakan%20%20Berbasis%20Lingkungan%20Dan%20Kearifan%20Lokal\)](#). Diakses pada 26 Juli 2018

7	02 Febuari 2017	Pers Rilis JM-PPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) Semarang 2 Februari 2017.
8	10 Febuari 2017	Siaran Pers: “Kegiatan Usaha PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Di Kabupaten Rembang Ilegal ; Petani Rembang Laporkan Pidana Ke POLDA Jawa Tengah”.
9	11 Febuari 2017	SIARAN PERS: Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia dan Centre for Human Rights, Multiculturalim and Migration (CHRM2) Fakultas Hukum Universitas Jember.
10	21 Maret 2017	KENDENG MENUNDUKKAN KEPALA.
11	31 Maret 2017	Pers Release: Aksi Solidaritas Amankan Tani “Salatiga Peduli Kendeng”.
12	31 Maret 2017	Pers Rilis JM-PPK: “KEMBALIKAN HAK WATUPUTIH SEBAGAI KAWASAN LINDUNG”.

Jumlah *Press release* Periode Oktober 2014 – Desember 2014 : 2

Jumlah *Press release* Periode Oktober 2016 – Maret 2017 : 10

Jumlah Keseluruhan : 12

C. Media Kompas.com

1. Profil Kompas.com

Kompas.com adalah salah satu situs berita berbasis online di Indonesia sekaligus menjadi pelopor situs berita online di Indonesia. Situs berita ini diluncurkan pada 14 September 2014 dengan nama Kompas Online yang memiliki alamat www.kompas.co.id di bawah

naungan Kompas Gramedia Group. Kemudian pada awal tahun 1996, alamat situs berita tersebut berubah menjadi www.kompas.com dengan alasan untuk memaksimalkan pelayanan. Mulai pada 6 Agustus 1998, Kompas.com berada di bawah naungan PT. Kompas Cyber Media (KCM), salah satu unit bisnis Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang media online. Hal ini dilakukan setelah melihat potensi besar bisnis dunia digital dan peningkatan penggunaan internet sebagai alat untuk mencari informasi. Lalu pada 29 Mei 1998, situs berita ini berubah nama Kompas Online menjadi Kompas.com.

Tujuan Kompas Gramedia Group meluncurkan situs berita online www.kompas.com adalah untuk menjangkau pembaca Kompas yang tinggal di wilayah yang sulit dijangkau oleh jaringan distribusi Harian Kompas, terlebih untuk pembaca Kompas yang ada di wilayah Indonesia Timur bahkan pembaca Kompas yang tinggal di luar negeri. Dengan adanya portal berita online ini, maka pembaca Kompas yang berada di Indonesia Timur bisa tetap membaca harian Kompas yang selalu *up to date*, tanpa perlu menunggu koran Kompas yang biasanya datang beberapa hari setelah diterbitkan. Pembaca Kompas di luar negeri pun bisa mendapatkan berita-berita Kompas.com tanpa harus mendapatkan korannya.

Pada awal diluncurkan, Kompas.com hanya menampilkan berita-berita yang sama dengan berita-berita Kompas yang ada di media cetak. Setelah Kompas.com berada di bawah naungan PT. Kompas Cyber Media, situs berita online ini pun melakukan banyak pembenahan dan pengembangan demi memaksimalkan pelayanan pada pembaca Kompas akan informasi. Terlebih dengan meningkatnya pengunjung situs berita online tersebut akibat dampak dari peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia. Salah satu pembenahan yang dilakukan adalah situs berita www.kompas.com tidak hanya menampilkan salinan berita dari Harian Kompas cetak saja, tetapi juga melakukan *update* berita-berita terbaru yang terjadi sepanjang hari, baik berita tingkat regional,

nasional, maupun internasional dengan berbagai topik. Pembinaan lainnya yang dilakukan adalah dengan menambahkan kanal-kanal berita dan peningkatan kualitas berita yang disajikan agar dapat memberikan berita informasi yang *up to date* dan aktual.

2. Mekanisme Kerja Kompas.com

Dengan tujuan menjadi media yang selalu menyajikan berita utuh, objektif, independen, dan tidak bias oleh kepentingan tertentu, Kompas.com tidak hanya menyajikan berita terbaru dalam bentuk *hardnews*, tetapi juga berita-berita lain dari sudut pandang berbeda agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi. Keutuhan informasi tersebut disajikan dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah *hardnews*, *softnews* atau *feature*, *wrap up*, liputan khusus, dan liputan mendalam dalam bentuk *long-form*. Laporan mendalam pun juga disajikan bentuk Visual Interaktif Kompas (VIC) yang berbentuk multimedia *story telling*.

Penggunaan internet yang semakin meningkat menimbulkan konsekuensi bagi media untuk menyajikan informasi terbaru secara cepat. Namun bagi situs media online yang beralamat www.kompas.com, kecepatan bukanlah segalanya. Terlebih dengan sulitnya menemukan informasi-informasi yang benar karena banyaknya *hoax* yang beredar. Oleh karena itulah, media Kompas.com memosisikan diri mereka sebagai acuan media yang utuh.

Untuk menangkal informasi-informasi sesat yang meresahkan masyarakat, Kompas.com pun menerjunkan ratusan reporternya ke berbagai wilayah Indonesia agar bisa mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya berdasarkan hasil turun ke lapangan. Selain itu, Kompas.com pun juga memiliki divisi khusus yang bertugas melakukan monitoring pada percakapan di media sosial. Hasil monitoring tersebut diberikan kepada tim redaksi untuk menjadi bahan mentah agar dapat diolah menjadi sebuah berita.

Redaksi tidak akan langsung menelan mentah-mentah informasi yang beredar maupun viral di media sosial. Apapun bentuk informasinya, baik informasi lapangan maupun informasi di media sosial, redaksi Kompas.com akan melakukan filter informasi untuk memastikan apakah informasi tersebut benar atau hanya hoax.

Mekanisme kerja yang dilakukan oleh media Kompas untuk menyajikan berita yang utuh, objektif, independen, serta tidak bias akan kepentingan adalah melakukan verifikasi data. Verifikasi data tersebut terdiri dari observasi lapangan, wawancara narasumber, dan data yang kredibel.

Observasi lapangan merupakan hal yang wajib dilakukan bagi Kompas.com agar mendapatkan informasi yang utuh, objektif, serta tidak bias akan kepentingan. Apapun informasi yang didapatkan, baik langsung dari lapangan, maupun dari media sosial, akan tetap dilakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Untuk mendalami informasi, Kompas.com pun melakukan wawancara narasumber. Narasumber yang diwawancarai bukanlah orang sembarangan. Kompas.com akan mengecek kredibilitas narasumber tersebut berdasarkan latar belakang dan rekam jejaknya. Informasi dari narasumber pun tidak akan langsung dijadikan berita, melainkan akan di cek ulang terlebih dahulu ke pihak-pihak lain yang berkaitan dengan topik yang ingin diangkat.

Kompas.com pun melindungi privasi narasumber dengan tidak mempublikasikan informasi pribadi narasumber. Apabila ada yang ingin informasi mengenai narasumber tersebut, maka bisa didapatkan dari tim redaksi Kompas.com dengan persetujuan narasumber.

Untuk memperkuat kebenaran informasi, media Kompas.com pun memilih data yang berasal dari sumber resmi yang kredibel, baik nasional maupun internasional. Media Kompas.com pun juga

memiliki lembaga riset mandiri yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas.

Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran berita-berita hoax, Kompas.com melakukan verifikasi dan validasi terhadap semua informasi yang beredar di masyarakat. Upaya lainnya yang dilakukan adalah dengan membuat topik pilihan khusus yang bertajuk “Hoax atau Fakta?”. Kompas.com pun juga bekerja sama dengan TurnbackHoax.id untuk pembaca yang ragu-ragu akan kebenaran suatu informasi, maka informasi tersebut dapat dicek di <https://inside.kompas.com/laporkan-hoaks> . Hasil verifikasi informasi Kompas.com akan menghasilkan tiga jenis informasi yaitu, *fakta* apabila informasi benar, *hoax* apabila informasi salah, dan *sesat* apabila informasi benar namun dimanipulasi oleh penyebar informasi.⁸²

3. Pemberitaan www.kompas.com mengenai Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Rembang.

Berdasarkan periode waktu yang ditetapkan peneliti, terdapat 81 berita www.kompas.com yang berbicara mengenai konflik pembangunan pabrik semen di Rembang. Delapan puluh satu berita tersebut terdiri dari 12 berita pada periode Oktober 2014 – Desember 2014 dan 69 berita pada periode Oktober 2016 – Maret 2017 . Oleh karena berita yang berbicara mengenai konflik pembangunan pabrik semen di Rembang cukup banyak, maka peneliti melakukan kategorisasi berita agar dapat memilah-memilah berita mana yang akan diteliti. Kategorisasi dilakukan berdasarkan topik yang paling banyak diangkat oleh Kompas.com dalam memberitakan konflik pembangunan pabrik semen di Rembang. Alasan mengapa peneliti memilih kategorisasi berita berdasarkan topik yang diangkat adalah karena berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan, di mana

⁸² About Us. <https://inside.kompas.com/about-us> . Diakses pada 28 Juli 2018

penelitian ini memfokuskan pada aspek atau isu apa yang diangkat oleh masing-masing objek penelitian pada masa konflik pembangunan pabrik semen di Rembang.

Dari semua topik yang diangkat dalam berita www.kompas.com , terdapat empat topik yang paling banyak diangkat ketika memberitakan konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, yaitu :

a. Sikap Masyarakat Rembang

Topik ini memuat berita-berita yang berkaitan dengan sikap dan aksi masyarakat Rembang dalam menyikapi pembangunan pabrik semen di Rembang. Sikap tersebut bisa menolak pembangunan pabrik semen, maupun sebaliknya. Kata kunci untuk topik ini adalah masyarakat Kendeng, masyarakat Rembang, petani Kendeng.

b. Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia

Topik ini berisi berita-berita yang berkaitan dengan seputar perizinan pabrik semen PT. Semen Indonesia. Berita-berita ini memiliki kata kunci izin lingkungan, izin pembangunan, AMDAL.

c. Tindakan Pemerintah

Topik ini memuat berita-berita yang berkaitan dengan tindakan pemerintah yang diambil untuk menyelesaikan pro kontra pembangunan pabrik semen di Rembang. Kata kunci untuk berita-berita yang memiliki topik ini biasanya adalah nama pejabat, kebijakan yang diambil.

d. Sikap Pihak di Luar PT. Semen Indonesia dan Masyarakat Rembang

Topik ini memuat bagaimana sikap pihak-pihak di luar masyarakat Rembang dan PT. Semen Indonesia dalam menanggapi konflik pembangunan pabrik semen di Rembang. Sikap tersebut bisa saja mendukung pabrik semen atau menolak pabrik semen.

Berdasarkan kategorisasi topik di atas, topik terbanyak diangkat adalah mengenai sikap masyarakat Rembang pada konflik pembangunan pabrik semen di Rembang di mana terdapat 26 berita yang mengangkat topik tersebut. Kemudian topik mengenai tindakan pemerintah dengan 23 berita sebagai topik terbanyak kedua. Lalu 17 berita yang mengangkat topik mengenai izin lingkungan PT. Semen Indonesia dan 15 berita mengenai sikap pihak yang tidak terlibat konflik tetapi bersuara mengenai konflik tersebut.

Dari berita yang sudah dikategorisasikan tersebut, peneliti memilih berita yang akan diteliti secara acak dari masing-masing kategorisasi tersebut. Jumlah berita diambil dari masing-masing kategorisasi tersebut ialah enam berita dari topik sikap masyarakat Rembang, tiga berita dari topik izin lingkungan PT. Semen Indonesia, lima berita dari topik tindakan pemerintah, dan empat berita dari topik sikap pihak di luar PT. Semen Indonesia dan masyarakat Rembang. Total keseluruhan berita yang diteliti adalah 18 berita.

Tabel 2. 4

Berita Kompas.com yang Akan Diteliti

NO	TANGGAL RILIS	JUDUL	TOPIK
1	05 November 2014	Aktivis Gelar Aksi Tutup Mulut Desak Batalkan Izin Pabrik Semen di Rembang.	Sikap Masyarakat Rembang
2	06 November 2014	Walhi: Pabrik Semen Ancam 607.198 Warga di Rembang.	Sikap Pihak di Luar PT. Semen Indonesia dan Masyarakat Rembang
3	26 November 2014	Tolak Pabrik Semen, Ibu-ibu di Rembang Blokade Jalan Selama 160 Hari.	Sikap Masyarakat Rembang
4	14 Oktober 2016	Warga Protes Putusan Peninjauan Kembali Pabrik Semen di Rembang.	Sikap Masyarakat Rembang

5	22 Desember 2016	Dukung Pabrik Semen di Rembang, Mbah Moen Siap Temui Jokowi.	Sikap Pihak di Luar PT. Semen Indonesia dan Masyarakat Rembang
6	26 Desember 2016	Polda Jateng Telusuri Keabsahan Dokumen Kasus Semen Rembang.	Tindakan Pemerintah
7	17 Januari 2017	SK Pencabutan Pabrik Semen di Rembang Dianggap Multitafsir.	Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia
8	10 Febuari 2017	Tak Puas, Warga Rembang Tutup Akses ke Pabrik Semen Indonesia.	Sikap Masyarakat Rembang
9	21 Febuari 2017	Gubernur Jateng Lakukan Diskresi Demi Kelanjutan Pabrik Semen Rembang.	Tindakan Pemerintah
10	24 Febuari 2017	Ini Rincian Izin Lingkungan Terbaru untuk PT Semen Indonesia.	Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia
11	24 Febuari 2017	Dapat Izin Tambang Baru, Ini yang Dilakukan Semen Indonesia.	Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia
12	03 Maret 2017	Tinjau Pabrik Semen di Rembang, Kapolda Jateng Minta Warga Tidak Mudah Terprovokasi.	Tindakan Pemerintah
13	08 Maret 2017	Tokoh Samin Komentari Aksi Demo Menolak Pabrik Semen.	Sikap Pihak di Luar PT. Semen Indonesia dan Masyarakat Rembang
14	13 Maret 2017	Petani Kendeng Enggan Buka Belunggu Semen di Kaki Sebelum Bertemu Jokowi.	Sikap Masyarakat Rembang

15	17 Maret 2017	Menteri BUMN Tinjau Pendirian Pabrik Semen Rembang.	Tindakan Pemerintah
16	20 Maret 2017	Apa Sikap Presiden soal Penolakan Pabrik Semen di Kendeng?	Tindakan Pemerintah
17	23 Maret 2017	Air Mata Petani Kendeng dan Prinsip "Sedulur Sikep" Menjaga Ibu Bumi.	Sikap Masyarakat Rembang
18	24 Maret 2017	Ketua MPR Desak Pemerintah Tuntaskan Kisruh Pabrik Semen Rembang.	Sikap Pihak di Luar PT. Semen Indonesia dan Masyarakat Rembang

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

Bab ini memaparkan temuan-temuan penelitian yang ditemukan oleh peneliti selama proses pencarian data. Temuan penelitian tersebut adalah *press release* PT. Semen Indonesia, *press release* JMPPK, dan berita www.kompas.com yang membahas atau berkaitan dengan konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah yang dikeluarkan pada periode Oktober 2014 sampai Desember 2014 dan periode Oktober 2016 sampai Maret 2017.

Temuan penelitian ini dibahas dengan menggunakan metode analisis framing model Robert N. Entman. Dengan menggunakan metode analisis framing model Robert N. Entman, maka akan ditemukan aspek-aspek apa saja yang ditonjolkan oleh masing-masing instansi yang dalam hal ini adalah *press release* PT. Semen Indonesia, *press release* JMPPK, dan berita-berita www.kompas.com dalam membingkai konflik pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia di Rembang.

A. *Press release* PT. Semen Indonesia

Sebenarnya, ada 17 *press release* yang akan diteliti jika melihat pada periode waktu yang ditetapkan oleh peneliti, tetapi hanya ada 5 *press release* yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu konflik di Rembang, sehingga hanya 5 *press release* yang dianalisis. *Press release* tersebut terdiri dari dua *press release* yang dikeluarkan pada tahun 2014, dan tiga *press release* yang dikeluarkan pada tahun 2016.

1. *Define Problems*

Ada tiga poin penting dalam *define problems press release* PT. Semen Indonesia ini. *Pertama*, *define problems* tidak memusatkan pada konflik Rembang, tetapi memusatkan pada PT. Semen Semen Indonesia

itu sendiri, sehingga bila dilihat sekilas bahwa PT. Semen Indonesia membicarakan dirinya sendiri, tidak membicarakan konflik di Rembang. Sebab, tidak ada satupun *press release* PT. Semen Indonesia yang khusus membicarakan kasus konflik pembangunan pabrik semen di Rembang baik berupa klarifikasi maupun pernyataan sikap PT. Semen Indonesia pada kasus yang terjadi di Rembang tersebut. Tetapi, bila dilihat lebih teliti, bahwa aspek yang diangkat dalam *define problems press release* PT. Semen Indonesia ini sebenarnya masih berkaitan dengan konflik di Rembang secara tidak langsung bila melihat waktu dikeluarkannya *press release*, hanya saja dibuat dari sudut pandang PT. Semen Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari semua *press release* PT. Semen Indonesia yang menggunakan kata “PT. Semen Indonesia” dan kata “kami” untuk merujuk pada diri mereka.

“Kami menyadari bahwa alam sangat penting untuk menjaga keseimbangan”

(Press release PT. Semen Indonesia, “Semen Indonesia Raih Penghargaan Green Industry dari Kementerian Perindustrian”, 16 Oktober 2014)

“PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) menyalurkan 78 ekor sapi kurban.....”

(Press release PT. Semen Indonesia, “Semen Indonesia Salurkan 78 Ekor Sapi Pada Perayaan Hari Raya Idul Adha 1415 H , 05 Oktober 2014)

Kedua, secara garis besar ada dua aspek yang diangkat menjadi *define problems* dalam *press release* PT. Semen Indonesia, yaitu aspek lingkungan dan aspek sosial, bukan hanya pada lima *press release* yang dianalisis, tetapi semua *press release* PT. Semen Indonesia. Namun, sesuai dengan poin pertama, kedua aspek tersebut dijelaskan dari sudut pandang PT. Semen Indonesia sendiri.

Tabel 3. 1

Aspek Define Problems Press release PT. Semen Indonesia

Judul	<i>Define Problems</i>	Aspek
Semen Indonesia Salurkan 78 Ekor Sapi Pada Perayaan Hari Raya Idul Adha 1415 H.	Program CSR PT. Semen Indonesia sebagai bentuk kepedulian PT. Semen Indonesia pada masyarakat, salah satunya bidang keagamaan.	Sosial
Semen Indonesia Raih Penghargaan Green Industry dari Kementrian Perindustrian.	PT. Semen Indonesia sebagai perusahaan yang ramah lingkungan.	Lingkungan
Semen Indonesia (SMGR) Kucurkan Dana Rp 670 Juta, Bangun Infrastruktur Air Bersih Untuk Warga Sekitar Pabrik Rembang.	PT. Semen Indonesia adalah perusahaan yang peduli dan peka terhadap kebutuhan masyarakat Rembang.	Sosial
Semen Indonesia Foundation Dukung Pembangunan Sekolah Berwawasan dan Berbudaya Lingkungan di Madiun dan Magetan.	PT. Semen Indonesia adalah perusahaan yang peduli pada pendidikan dan lingkungan.	Lingkungan
Semen Indonesia Serahkan Bantuan 98 Tenda dan 15 Shelter Untuk Paguyuban PKL Alun-Alun Rembang.	PT. Semen Indonesia adalah perusahaan yang peduli pada kesejahteraan masyarakat Rembang.	Sosial

Dari kelima *press release* PT. Semen Indonesia, dua *press release* mengangkat aspek lingkungan sebagai *define problems* dan tiga *press release* yang mengangkat aspek sosial sebagai *define problems*. Alasan mengapa *press release* PT. Semen Indonesia dikatakan memiliki *define problems* yang menonjolkan aspek lingkungan dan aspek sosial adalah seluruh isi *press release* memaparkan secara rinci apa yang telah dilakukan oleh PT. Semen Indonesia dan prestasi atau keberhasilan dari atas yang dilakukan PT. Semen Indonesia dalam aspek lingkungan dan aspek sosial.

Press release yang mengangkat aspek lingkungan misalnya, pada *press release* yang berjudul “*Semen Indonesia Foundation Dukung Pembangunan Sekolah Berwawasan dan Berbudaya Lingkungan di Madiun dan Magetan*”, *press release* tersebut memaparkan secara rinci mengenai bagaimana komitmen dan kontribusi PT. Semen Indonesia untuk mendukung pembangunan sekolah berwawasan lingkungan. Pemaparan mengenai komitmen PT. Semen Indonesia dalam bidang lingkungan tersebut ada pada tiga paragraf dari keseluruhan *press release* yang berjumlah tujuh paragraf.

“ *Program pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan ini meliputi seminar, workshop, dan peninjauan lapangan tentang kebijakan berwawasan lingkungan, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, dan pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Dari kerja sama ini, diharapkan dapat melahirkan sekolah-sekolah yang berwawasan dan berbudaya lingkungan berstatus adiwiyata dan adiwiyata mandiri di Kota Madiun.*

Perguruan tinggi yang dikelola SMIF, Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) pun berkesempatan memberikan materi seminar bertema “Teknologi Ramah Lingkungan”. Menurut Rektor UISI, Prof. Herman Sasongko, upaya pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan ini merupakan langkah yang sangat baik dalam penyebarluasan wawasan lingkungan di sekolah.

Dua puluh tujuh sekolah yang mengikuti program pembinaan sekolah adiwiyata mandiri di Madiun meliputi 12

sekolah dasar, 10 sekolah menengah pertama, dan 5 sekolah menengah atas. Selain di Madiun, SMIF juga menandatangani nota kesepahaman mengenai sekolah adiwiyata mandiri dengan 25 sekolah di Magetan pada 16 November 2016 yang berlangsung di Kantor BLH Magetan”

(Press release PT. Semen Indonesia, “Semen Indonesia Foundation Dukung Pembangunan Sekolah Berwawasan dan Berbudaya Lingkungan di Madiun dan Magetan”, 15 November 2016)

Press release yang mengangkat aspek sosial pun demikian. Pada press release yang berjudul “Semen Indonesia Salurkan 78 Ekor Sapi Pada Perayaan Hari Raya Idul Adha 1415 H”, press release ini menjelaskan secara rinci apa saja yang PT. Semen Indonesia berikan pada masyarakat Rembang ketika Hari Raya Idul Adha, mulai dari menyumbangkan sapi dan pemotongan sapi, pembangunan masjid, bahkan menyebut “angka” yang dikeluarkan PT. Semen Indonesia untuk kegiatan keagamaan dalam rangka peduli pada masyarakat Rembang.

“ PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) menyalurkan 78 ekor sapi kurban pada peringatan hari raya Idul Adha 1435 H yang jatuh pada hari ini Minggu (5/10).

Lanjut kata Abi, “Setelah penyembelihan, hewan kurban tersebut akan diberikan dan didistribusikan dalam 2500 kantong kepada musholah sekitar dan yayasan sekitar perusahaan”. Tandas Abi.

Pada kesempatan kali ini, dana CSR perusahaan disalurkan dalam berbagai bentuk kegiatan keagamaan seperti pemberangkatan haji, pembangunan sarana dan prasarana ibadah, bantuan pelatihan pemberian pelatihan kepada pondok pesantren. Hingga saat ini perusahaan telah menyalurkan dana sebesar Rp 7,8 miliar dibidang keagamaan.”

(*Press release* PT. Semen Indonesia, “Semen Indonesia Salurkan 78 Ekor Sapi Pada Perayaan Hari Raya Idul Adha 1415 H”, 05 Oktober 2014)

Selain pemaparan rinci mengenai apa yang telah dilakukan oleh PT. Semen Indonesia dan prestasi atau keberhasilan dari atas yang dilakukan PT. Semen Indonesia dalam aspek lingkungan dan aspek sosial, alasan mengapa *press release* PT. Semen Indonesia dikatakan memiliki *define problems* yang menonjolkan aspek lingkungan dan aspek sosial karena PT. Semen Indonesia diserang dengan isu lingkungan dan isu sosial pada konflik pembangunan pabrik semen di Rembang. Pabrik semen yang dibangun oleh PT. Semen Indonesia dinilai dapat merusak lingkungan, dan pada proses pembangunannya terjadi berbagai permasalahan sosial.

Kemudian, poin *ketiga* yang tidak kalah penting adalah *press release* PT. Semen Indonesia membingkai PT. Semen Indonesia pada aspek lingkungan dan aspek sosial dalam bingkai yang positif atau baik. Bingkai *press release* yang terlihat dalam *define problems* adalah bahwa PT. Semen Indonesia adalah sebuah perusahaan besar yang baik. Baik yang spesifik merujuk pada arti bahwa PT. Semen Indonesia adalah perusahaan yang peduli dengan masyarakat khususnya masyarakat Rembang dan peduli dengan kelestarian alam. Bingkai positif ini terlihat dari dua kata kunci yang menunjukkan kebaikan PT. Semen Indonesia, yaitu peduli dan komitmen. Kata peduli dan komitmen ditemukan di hampir semua *press release* PT. Semen Indonesia. Tetapi, pada *press release* yang berjudul “Semen Indonesia (SMGR) Kucurkan Dana Rp 670 Juta, Bangun Infrastruktur Air Bersih Untuk Warga Sekitar Pabrik Rembang”, dan *press release* yang berjudul “Semen Indonesia Serahkan Bantuan 98 Tenda dan 15 Shelter Untuk Paguyuban PKL Alun-Alun Rembang”, tidak ditemukan kata kunci peduli dan komitmen. Meskipun tidak ada kedua kata kunci tersebut, tetapi kedua *press release* tersebut

memaparkan bagaimana respon masyarakat Rembang atas bantuan yang diberikan oleh PT. Semen Indonesia dan bagaimana masyarakat Rembang menyambut dengan hangat bantuan PT. Semen Indonesia tersebut. Respon masyarakat Rembang yang positif ini menjadi penguat bukti bahwa PT. Semen Indonesia adalah perusahaan yang baik menurut *press release* PT. Semen Indonesia.

“Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan tandon tersebut. “Saya bersyukur kepada Allh SWT. Rakyat saya segera kecukupan air,.....”

(Press release PT. Semen Indonesia, “Semen Indonesia (SMGR) Kucurkan Dana Rp 670 Juta, Bangun Infrastruktur Air Bersih Untuk Warga Sekitar Pabrik Rembang”, 12 November 2016)

“Ketua Paguyuban PKL Alun –Alun Rembang, Sriyono menyatakan siap untuk menjaga dan menggunakan tenda tersebut dengan optimal. “Terima kasih atas bantuan ini, ini sangat membantu kami dalam menyeragamkan tenda para PKL.....”

(Press release PT. Semen Indonesia, “Semen Indonesia Serahkan Bantuan 98 Tenda dan 15 Shelter Untuk Paguyuban PKL Alun-Alun Rembang”, 19 Desember 2016)

2. Diagnose Causes

Dari kelima *press release* yang dianalisis, hanya satu *press release* yang memiliki *diagnose causes* yaitu *press release* yang berjudul “Semen Indonesia (SMGR) Kucurkan Dana Rp 670 Juta, Bangun Infrastruktur Air Bersih Untuk Warga Sekitar Pabrik Rembang”, penyebab masalah atau *diagnose causes* dalam *press release* ini adalah warga sekitar pabrik semen Rembang yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih karena jauhnya jarak desa menuju mata air.

Poin penting dalam *press release* ini adalah *press release* ini sebagian besar *press release* tidak memiliki *diagnose causes* atau penyebab masalah. Hal ini menunjukkan bahwa *press release* ini tidak memiliki “aktor” yang disalahkan atau pihak yang dianggap menjadi penyebab masalah. Hal ini cukup unik mengingat *press release* ini dikeluarkan pada masa konflik dan PT. Semen Indonesia diposisikan sebagai pihak yang disalahkan pada media lain maupun LSM.

Meskipun ada satu *press release* yang memiliki *diagnose causes*, tetapi jenis *diagnose causes* hanyalah jenis *diagnose causes* sebab akibat, di mana penyebab masalah adalah faktor alami, bukan “aktor”.

3. *Moral Judgement*

Semua *press release* yang ditulis PT. Semen Indonesia, baik pada saat konflik maupun ketika masa normal tetap memiliki unsur *moral judgement* atau pembenaran moral di dalamnya. *Moral judgement* ini dapat dikatakan sebagai argumentasi atau penguat *define problems*.

Pada *press release* PT. Semen Indonesia, secara keseluruhan ada tiga jenis *moral judgement* yang digunakan, yaitu *kontribusi subjek*, *kutipan tokoh*, dan *prestasi*. *Kontribusi subjek* ialah apa saja yang dilakukan subjek yang dalam hal ini adalah PT. Semen Indonesia untuk masyarakat terutama masyarakat Rembang. Hal yang dilakukan tentulah harus bermanfaat bagi masyarakat. Jenis *moral judgement* kontribusi subjek dalam *press release* PT. Semen Indonesia biasanya dipaparkan secara rinci mengenai apa yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia dalam rangka peduli pada masyarakat, baik dipaparkan prosesnya, maupun dipaparkan apa saja jenis bantuan tersebut. Lalu jenis *moral judgement* *kutipan tokoh* ialah berupa statement atau kutipan tokoh terkait kontribusi PT. Semen Indonesia. Dalam *press release* PT. Semen Indonesia, pernyataan yang dikutip kebanyakan adalah tokoh masyarakat atau pejabat yang bersangkutan terkait bantuan yang diberikan PT. Semen Indonesia. Sedangkan jenis *moral judgement*

prestasi ialah prestasi diraih PT. Semen Indonesia. Prestasi tersebut dapat berupa penghargaan atau pun gelar tertentu. Pada *press release* PT. Semen Indonesia, jenis penghargaan yang diterima kebanyakan adalah penghargaan bidang lingkungan.

Tabel 3. 2

Jenis *Moral Judgement Press release* PT. Semen Indonesia

Judul	<i>Moral Judgement</i>	<i>Jenis Moral Judgement</i>
Semen Indonesia Salurkan 78 Ekor Sapi Pada Perayaan Hari Raya Idul Adha 1415 H.	PT. Semen Indonesia menyalurkan 78 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha 1435 H dan didistribusikan dalam 2500 kantong kepada mushalah dan yayasan sekitar perusahaan, pemberangkatan haji, pembangunan sarana dan prasarana ibadah, bantuan pelatihan, dan pemberian pelatihan kepada pondok pesantren. Total dana yang dikururkan untuk CSR bidang keagamaan adalah 7,8 miliar.	Kontribusi subjek
Semen Indonesia Raih Penghargaan Green Industry dari Kementrian Perindustrian.	Pemaparan mengenai inovasi pengolahan limbah dan pengolahan air yang dilakukan PT. Semen Indonesia dan penghargaan yang diraih PT. Semen Indonesia dalam bidang lingkungan. Pemaparan mengenai inovasi pengolahan limbah dan pengolahan air terdapat pada tiga paragraf secara berurutan yaitu paragraf ketiga, keempat, dan kelima. Sedangkan pemaparan mengenai prestasi PT. Semen Indonesia bidang	Kontribusi subjek, dan prestasi

	lingkungan terdapat pada dua paragraf yaitu paragraf kedua dan keenam.	
Semen Indonesia (SMGR) Kucurkan Dana Rp 670 Juta, Bangun Infrastruktur Air Bersih Untuk Warga Sekitar Pabrik Rembang.	<p>Pemaparan rinci mengenai bantuan yang diberikan PT. Semen Indonesia pada masyarakat Rembang, kisah masyarakat Rembang yang kesulitan air dan pernyataan Bupati Rembang, Abdul Hafidz.</p> <p>Pemaparan mengenai bantuan yang diberikan PT. Semen Indonesia terdapat pada paragraf kedua. Pemaparan mengenai kisah masyarakat Rembang yang kesulitan air terdapat pada empat paragraf, yaitu paragraf ketiga, keempat, kelima, dan ketujuh. Sedangkan pernyataan Bupati Rembang terdapat pada dua paragraf secara berurutan, yaitu paragraf kedelapan, dan paragraf kesembilan.</p>	Kontribusi subjek, dan kutipan tokoh
Semen Indonesia Foundation Dukung Pembangunan Sekolah Berwawasan dan Berbudaya Lingkungan di Madiun dan Magetan.	<p>Pemaparan mengenai sekolah-sekolah yang dibina oleh Semen Indonesia Foundation (SMIF) yang terdapat pada dua paragraf yaitu paragraf ketiga dan ketujuh.</p> <p>Lalu pada pernyataan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kota Madiun, Gandhi Hatmoko yang terdapat pada paragraf keenam.</p> <p>Dan pernyataan Rektor UISI, Prof. Herman Sasongko pada paragraf kelima.</p>	Kontribusi subjek, kutipan tokoh, dan prestasi

Semen Indonesia Serahkan Bantuan 98 Tenda dan 15 Shelter Untuk Paguyuban PKL Alun-Alun Rembang.	Pernyataan Bupati Rembang, Abdul Hafidz pada paragraf ketiga dan pernyataan Ketua Paguyuban PKL Alun-Alun Rembang pada paragraf keempat.	Kontribusi subjek dan kutipan tokoh
---	--	-------------------------------------

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kebanyakan *press release* PT. Semen Indonesia memiliki lebih dari satu jenis *moral judgement* dalam satu *press release*. Dari ketiga jenis *moral judgement*, kontribusi subjek merupakan jenis *moral judgement* yang paling banyak digunakan pada *press release* PT. Semen Indonesia di mana pada semua *press release* yang dianalisis, semua *press release* menggunakan jenis *moral judgement* kontribusi subjek, kemudian diikuti kutipan tokoh sebagai terbanyak kedua yang digunakan dalam *press release* PT. Semen Indonesia.

Pada *moral judgement* jenis kontribusi subjek, *moral judgement* tersebut berbentuk pemaparan rinci mengenai apa saja yang dilakukan subjek yang dalam hal ini adalah PT. Semen Indonesia. Pemaparan tersebut sangat rinci, mulai dari jenis bantuan yang diberikan, proses pemberian bantuan, bahkan menuliskan nominal atau angka. Pemaparan mengenai bantuan ini terdapat pada semua *press release* PT. Semen Indonesia. Pemaparan secara rinci bantuan ini bisa jadi berarti dua hal, yaitu PT. Semen Indonesia melakukan transparansi terkait bantuan yang diberikan bila dilihat dari bingkai positif, atau PT. Semen Indonesia terkesan pamer terhadap kebaikan yang dilakukan terlebih saat menyebutkan nominal bila dilihat dari bingkai negatif.

Sedangkan pada *moral judgement* jenis kutipan tokoh, statement atau kutipan tokoh yang paling banyak dikutip dalam *press release* PT. Semen Indonesia adalah pernyataan Bupati Rembang saat itu yaitu Abdul Hafidz. Bahkan, pada *press release* yang berjudul “Semen Indonesia (SMGR) Kucurkan Dana Rp 670 Juta, Bangun Infrastruktur

Air Bersih Untuk Warga Sekitar Pabrik Rembang”, pernyataan Bupati Rembang tersebut terdapat pada dua paragraf secara berurutan.

“Saya bersyukur kepada Allah SWT. Rakyat saya segera kecukupan air. Fasilitas seperti ini belum pernah ada sama sekali.....”

“Abdul Hafidz lebih jauh mengatakan kehadiran pabrik semen di wilayahnya terbukti memberikan banyak manfaat bagi warga. Bukan saja air bersih, Semen Indonesia juga mengucurkan banyak bantuan CSR untuk masyarakat di Kabupaten Rembang.”

(*Press release* PT. Semen Indonesia, “Semen Indonesia (SMGR) Kucurkan Dana Rp 670 Juta, Bangun Infrastruktur Air Bersih Untuk Warga Sekitar Pabrik Rembang”, 12 November 2016)

Bila melihat dari waktu dan kondisi pada saat *press release* ini dikeluarkan, alasan mengapa pernyataan Bupati Rembang menjadi pernyataan yang paling banyak dikutip dalam *press release* PT. Semen Indonesia adalah karena pada saat itu, PT. Semen Indonesia mengalami penolakan pembangunan pabrik semen di wilayah Kendeng yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten Rembang. Pernyataan Bupati Rembang dalam *press release* PT. Semen Indonesia ini menunjukkan bahwa Bupati Rembang berpihak pada PT. Semen Indonesia dengan asumsi bila orang nomor satu di Rembang mendukung pembangunan pabrik semen, maka hal tersebut sudah dipertimbangkan baik dan buruknya.

Lalu pada jenis *moral judgement* prestasi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa jenis prestasi yang paling banyak disebutkan dalam *press release* PT. Semen Indonesia penghargaan bidang lingkungan dan gelar-gelar yang berkaitan dengan lingkungan.

“....Diantaranya penghargaan Green Award 2013 kategori perusahaan pelestari sumber daya air, pelestari energy terbarukan, pelestari keanekaragaman hayati, pelopor pencegahan polusi, Penghargaan kategori ASEAN Energy Management Award dan ASEAN Coal Award oleh ASEAN Center For Energy. Perusahaan juga meraih Proper Emas sebagai penghargaan tertinggi bidang lingkungan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).”

(Press release PT. Semen Indonesia, “Semen Indonesia Raih Penghargaan Green Industry dari Kementerian Perindustrian”, 16 Oktober 2014)

“....Kami memiliki 4 sekolah yang sudah menyandang predikat Adiwiyata Mandiri, yakni SMA Gresik tahun 2010, SD dan SMK Gresik tahun 2014, dan SMP Gresik tahun 2016 ini....”

(Press release PT. Semen Indonesia, “Semen Indonesia Foundation Dukung Pembangunan Sekolah Berwawasan dan Berbudaya Lingkungan di Madiun dan Magetan”, 15 November 2016)

Bila melihat jenis *moral judgement* yang digunakan dalam *press release* PT. Semen Indonesia, bisa dikatakan bahwa *moral judgement* yang ada dalam *press release* ini mendukung dan memperkuat *define problems press release* PT. Semen Indonesia. Salah satu poin penting dalam *define problems press release* PT. Semen Indonesia adalah *press release* PT. Semen Indonesia membingkai PT. Semen Indonesia dalam bingkai yang positif. *Moral judgement* yang terdapat pada *press release* ini memperkuat bingkai positif tersebut. Hal ini karena jenis *moral judgement* yang digunakan memang mendukung bingkai positif tersebut. Jenis *moral judgement* kontribusi subjek, testimoni pihak lain, dan prestasi adalah jenis *moral judgement* yang bisa digunakan untuk membuat bingkai positif dalam suatu teks atau tulisan.

4. Treatment Recommendation

Seperti halnya pada *diagnoses causes*, hanya satu *press release* PT. Semen Indonesia yang memiliki *treatment recommendation*, bahkan *press release* yang memiliki *treatment recommendation* adalah *press release* yang sama dengan *press release* yang memiliki *diagnose causes*. *Press release* tersebut adalah *press release* yang berjudul “Semen Indonesia (SMGR) Kucurkan Dana Rp 670 Juta, Bangun Infrastruktur Air Bersih Untuk Warga Sekitar Pabrik Rembang”. *Treatment recommendation* atau tawaran solusi yang ditawarkan dalam *press release* tersebut adalah agar mendukung pembangunan pabrik semen yang ada di Rembang.

Poin penting dalam hal ini ialah bahwa sebenarnya PT. Semen Indonesia tidak menuntut pihak mana pun untuk mendukung PT. Semen Indonesia atau pun menuntut menyelesaikan masalah menurut sudut pandang PT. Semen Indonesia. Hal ini dilihat dari banyaknya *press release* PT. Semen Indonesia yang tidak memiliki *treatment recommendation* di dalamnya. Meskipun ada satu *press release* PT. Semen Indonesia yang memiliki *treatment recommendation*, tetapi *treatment recommendation* tersebut hanyalah hubungan sebab akibat dengan *diagnose causes*. Oleh karena PT. Semen Indonesia telah memberikan bantuan berupa pipanisasi sepanjang 1 kilometer dan tandon air 5.100 liter, maka sudah sepatutnya masyarakat Rembang mendukung pembangunan pabrik semen di wilayah Kendeng, Rembang sebagai balas budi atas pemberian PT. Semen Indonesia.

B. Press release JMPPK

Press release JMPPK yang dianalisis berjumlah dua belas berdasarkan periode waktu yang ditetapkan peneliti. Dari dua belas *press release* tersebut, dua *press release* yang dikeluarkan pada tahun 2014, tiga *press release* yang dikeluarkan pada tahun 2016, dan tujuh *press release* yang dikeluarkan pada tahun 2017.

1. *Define Problems*

Berbeda dengan *press release* PT. Semen Indonesia, *press release* JMPPK justru konsisten fokus membahas konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, tidak hanya *press release* yang dianalisis, melainkan semua *press release* yang dikeluarkan JMPPK semuanya berkaitan dengan kasus konflik pembangunan pabrik semen di Rembang. Tidak seperti *press release* PT. Semen Indonesia yang membahas konflik pembangunan pabrik semen secara tersirat, *press release* JMPPK membahas kasus konflik pembangunan pabrik semen secara tersurat atau terang-terangan, sehingga orang-orang awam yang membaca *press release* JMPPK langsung memahami bahwa *press release* mereka membahas kasus konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng. Hal ini bahkan bisa dilihat dari judul *press releasenya* saja.

Ketika membahas kasus konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, *press release* JMPPK membingkai kasus ini sebagai sebuah kasus kejahatan orang-orang elit kepada masyarakat kecil yang ingin melindungi alam. Hal ini terlihat dari bagaimana *press release* ini memaparkan tentang pejabat dan PT. Semen Indonesia yang dalam hal ini adalah orang-orang elit sebagai orang-orang yang jahat yang menggunakan kekuasaannya untuk merusak lingkungan demi keuntungan yang berlipat-lipat ganda, masyarakat kecil pun harus berjuang keras untuk melindungi lingkungan dari orang-orang elit yang ingin merusak lingkungan tersebut. Ada banyak kata kunci yang merujuk pada pemaparan tersebut, di antaranya adalah keadilan, penegakan hukum, kelestarian lingkungan, kejahatan lingkungan, perjuangan, dan kata kunci lainnya yang memiliki arti yang serupa.

“Selanjutnya, perjuangan warga menolak pabrik semen di Rembang untuk memperoleh keadilan dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup juga tak dimanusiakan...”

“Ini adalah preseden buruk bagi penegakan hukum lingkungan, di mana pembangkangan hukum justru dilakukan pejabat publik dan badan usaha negara...”

(*Press release* JMPPK, “Pers Release: Aksi Solidaritas Amankan Tani “Salatiga Peduli Kendeng”, 31 Maret 2017)

“*Dimenangkannya gugatan WALHI dan warga Rembang oleh MA pada tanggal 5 Oktober 2016, merupakan satu tahap dari perjalanan panjang penghentian kejahatan lingkungan di pegunungan Kendeng.*”

(*Press release* JMPPK, “Pernyataan Sikap WALHI: Perlawanan WALHI terhadap Kejahatan Lingkungan Hidup di Karst Kendeng”, 18 Desember 2016)

Bila melihat *define problem* pada setiap *press release* JMPPK yang dianalisis, secara garis besar ada empat aspek yang diangkat yaitu aspek lingkungan, aspek hukum, aspek politik, dan aspek sosial. Keempat aspek ini memperlihatkan bagaimana JMPPK mbingkai kasus pembangunan pabrik semen di Rembang, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *press release* JMPPK mbingkai kasus pembangunan pabrik semen di Rembang sebagai permasalahan lingkungan, hukum, politik, maupun sosial.

Tabel 3. 3

Aspek Define Problems Press release JMPPK

Judul	Define Problems	Aspek
<i>Press release</i> Jagongan Media Rakyat 2014: Jejaring Media Warga Menyelamatan Kendeng Utara.	Media sosial digunakan untuk membentuk kesadaran baru termasuk membentuk kesadaran masyarakat Kendeng Utara mengenai kerusakan alam yang ditimbulkan oleh pembangunan pabrik semen di wilayah Kendeng Utara.	Sosial
Pers Rilis Aksi Bersama Koalisi Semarang untuk	Aktivitas ekonomi perusahaan yang merusak lingkungan tidak pantas	Lingkungan

<p>Kendeng: Investasi PT. Semen Indonesia Mengancam Lingkungan.</p>	<p>mendapat bantuan finansial dari perbankan.</p>	
<p>Pers Release Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK): HORMATI PUTUSAN PENGADILAN, BERHENTILAH MEMBUAT PERNYATAAN KONTROVERSI AL</p>	<p>Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 99/PK/TUN/2016 yang dikeluarkan pada 05 Oktober 2016 menyatakan bahwa izin lingkungan PT. Semen Indonesia di Rembang telah batal atau dicabut. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pasal 40 ayat 2 adalah “Dalam hal izin lingkungan dicabut, maka usaha dan/atau kegiatan dibatalkan”.</p>	<p>Hukum</p>
<p>Pernyataan Sikap WALHI: Perlawanan WALHI terhadap Kejahatan Lingkungan Hidup di Karst Kendeng</p>	<p>Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dengan dikeluarkannya Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 99/PK/TUN/2016 yang dikeluarkan pada 05 Oktober 2016 menyatakan bahwa izin lingkungan PT. Semen Indonesia di Rembang telah batal atau dicabut. Putusan ini membuktikan adanya pidana lingkungan dalam aktivitas pertambangan PT. Semen Indonesia.</p>	<p>Hukum</p>
<p>PERNYATAAN KOMNAS PEREMPUAN ATAS PENDIRIAN DAN RENCANA PENDIRIAN PABRIK SEMEN SERTA EXPLOITASI KAWASAN KARTS DI PEGUNUNGAN KENDENG</p>	<p>Pendirian pabrik semen oleh PT. Semen Indonesia di Kendeng menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah.</p>	<p>Sosial</p>

UTARA DAN SELATAN.		
PERS RELEASE JM-PPK: Patuhi Putusan MA!	Masyarakat Kendeng menuntut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menghentikan aktivitas PT. Semen Indonesia di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah.	Politik
Pers Rilis JM-PPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) Semarang 2 Februari 2017.	Putusan PK Mahkamah Agung menyatakan bahwa izin lingkungan PT. Semen Indonesia dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa AMDAL yang diterbitkan PT. Semen Indonesia tidak layak dan cacat prosedur.	Hukum dan Lingkungan
Siaran Pers: “Kegiatan Usaha PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Di Kabupaten Rembang Ilegal ; Petani Rembang Laporkan Pidana Ke POLDA Jawa Tengah”.	PT. Semen Indonesia tetap beroperasi meski tidak memiliki izin lingkungan. Hal ini merupakan ilegal.	Hukum dan Politik
SIARAN PERS: Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia dan Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration (CHRM2) Fakultas Hukum Universitas Jember.	Masyarakat petani Rembang mendapatkan kekerasan yang diduga dilakukan oleh pendukung tambang. Bentuk kekerasan tersebut adalah perusakan tenda posko perjuangan pihak kontra semen dan pembakaran mushola.	Sosial dan Politik
KENDENG MENUNDUKKA N KEPALA.	Kematian Bu Patmi adalah bukti bahwa warga Indonesia masih harus menyatakan sikapnya sendiri karena tidak adanya pembelaan sama sekali dari pemerintah.	Politik

Pers Release: Aksi Solidaritas Amankan Tani “Salatiga Peduli Kendeng”.	Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah melawan keputusan yang ditetapkan Mahkamah Agung yang merupakan lembaga hukum tertinggi di Indonesia.	Politik
Pers Rilis JM- PPK: “KEMBALIKAN HAK WATUPUTIH SEBAGAI KAWASAN LINDUNG”.	Kementrian ESDM cenderung terlalu tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan mengenai Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih yang hanya bersumber dari data yang terbatas dan ala kadarnya.	Lingkungan

Berdasarkan tabel di atas, ada sembilan *press release* yang fokus hanya mengangkat satu aspek dalam *define problems press release* JMPPK dan tiga *press release* yang mengangkat dua aspek dalam satu teks utuh *press release* JMPPK. Adanya tiga *press release* yang mengangkat dua aspek sekaligus dalam satu teks utuh menunjukkan bahwa JMPPK melihat bahwa kasus konflik pembangunan pabrik semen di Rembang merupakan sesuatu yang kompleks. Pada sembilan *press release* JMPPK yang hanya fokus pada satu aspek dalam satu teks utuh, *press release* yang mengangkat aspek lingkungan berjumlah dua, aspek hukum berjumlah dua, aspek politik berjumlah tiga, dan *press release* yang mengangkat aspek sosial berjumlah dua. Kemudian, tiga *press release* JMPPK yang mengangkat dua aspek dalam satu teks utuh, diantaranya adalah *press release* yang berjudul “*Pers Rilis JM-PPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) Semarang 2 Februari 2017*” yang mengangkat aspek hukum dan lingkungan, lalu *press release* yang berjudul “*Siaran Pers: “Kegiatan Usaha PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Di Kabupaten Rembang Ilegal ; Petani Rembang Laporkan Pidana Ke POLDA Jawa Tengah*” dengan mengangkat aspek hukum dan politik, dan *press release* yang berjudul “*SIARAN PERS: Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia dan Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration*

(CHRM2) Fakultas Hukum Universitas Jember” yang mengangkat aspek sosial dan politik. Bila dilihat secara keseluruhan, maka aspek yang paling banyak diangkat dalam *press release* JMPPK adalah aspek politik, dan aspek hukum di urutan kedua terbanyak.

Aspek politik menjadi aspek yang paling banyak diangkat dalam *define problems press release* JMPPK dengan rincian tiga *press release* yang fokus pada satu aspek saja, dan dua *press release* yang mengangkat lebih dari satu aspek di dalamnya, di mana salah satunya terdapat aspek politik. Diangkatnya aspek politik dalam *press release* JMPPK menunjukkan bahwa kasus konflik pembangunan pabrik semen di Rembang merupakan permasalahan politik dengan adanya campur tangan politisi di dalamnya, termasuk dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh petinggi daerah maupun petinggi negara. Alasan mengapa beberapa *press release* JMPPK dikatakan mengangkat aspek politik adalah *press release* tersebut memaparkan bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kasus tersebut mempengaruhi proses penyelesaian kasus tersebut. Kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut baik pemerintah daerah maupun pusat dianggap sebagai manuver politik pemerintah dalam menangani kasus konflik pembangunan pabrik semen di Rembang.

Dari semua kebijakan pemerintah yang dipaparkan dalam *press release* JMPPK, kebijakan pemerintah yang paling banyak diangkat adalah kebijakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yaitu penerbitan addendum, pernyataan mengenai tafsir putusan MA, hingga diterbitkannya izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia. Kebijakan ini dibingkai sebagai manuver politik yang buruk dalam *press release* JMPPK. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana kebijakan ini dipandang melawan hukum dan tidak berpihak pada masyarakat Rembang sebagai pemimpin provinsi Jawa Tengah.

“...Gubernur Jawa Tengah justru diam-diam menerbitkan ijin lingkungan baru pada PT. Semen Indonesia di Rembang. Tindakan tersebut merupakan siasat untuk meneruskan kehadiran pabrik semen di Rembang, sekaligus pembangkangan hukum atas Putusan Mahkamah Agung yang telah memenangkan perjuangan warga”.

(Press release JMPPK, “PERS RELEASE JM-PPK: Patuhi Putusan MA!”, 09 Januari 2017)

Ada dua *press release* JMPPK yang fokus mengangkat aspek hukum dalam *define problems* nya dan dua *press release* yang mengangkat lebih dari satu aspek di dalamnya, di mana salah satunya terdapat aspek hukum. Alasan mengapa dikatakan bahwa beberapa *press release* JMPPK mengangkat aspek hukum adalah kedua *press release* tersebut sama-sama membahas kasus konflik pembangunan pabrik semen di Rembang dalam sudut pandang hukum. Hal ini terlihat dari beberapa kata kunci yang berkaitan dengan hukum seperti penegakan hukum, keadilan, putusan MA, ilegal, perizinan, dan lain-lain.

“ Hukum sebagai pilar keadilan utama telah kami tempuh. Upaya kasasi dan peninjauan kembali kami lakukan.”

(Press release JMPPK, “Pers Release Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK): HORMATI PUTUSAN PENGADILAN, BERHENTILAH MEMBUAT PERNYATAAN KONTROVERSIAL” , 10 November 2016)

Selain dari kata kunci, aspek hukum juga terlihat dari banyaknya aturan-aturan hukum yang dikutip dalam *press release*, seperti Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 99/PK/TUN/2016, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28D ayat 1, SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 Tahun 2017, dan lain-lain. Dari semua aturan hukum yang dikutip, aturan hukum yang paling banyak dikutip adalah Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 99/PK/TUN/2016 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Aspek selanjutnya yang juga diangkat dalam *press release* JMPPK adalah aspek sosial. Aspek sosial dalam *press release* JMPPK menyoroti masalah-masalah sosial yang terjadi sebagai dampak dari pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang dibingkai sebagai hal yang dapat memicu permasalahan sosial. Permasalahan sosial yang diangkat dalam *press release* JMPPK berbeda-beda. Pada *press release* yang berjudul “*PERNYATAAN KOMNAS PEREMPUAN ATAS PENDIRIAN DAN RENCANA PENDIRIAN PABRIK SEMEN SERTA EXPLOITASI KAWASAN KARTS DI PEGUNUNGAN KENDENG UTARA DAN SELATAN*”, setidaknya ada empat permasalahan sosial yang diangkat yaitu konflik horizontal antara masyarakat Kendeng yang pro dan kontra, kriminalisasi lahan, intimidasi dan diskriminasi anak-anak yang kontra semen oleh guru di sejumlah sekolah, dan kekerasan serta ancaman kekerasan terhadap perempuan. Lalu *press release* yang berjudul “*SIARAN PERS: Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia dan Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration (CHRM2) Fakultas Hukum Universitas Jember*” mengangkat permasalahan sosial mengenai kekerasan yang dialami oleh pihak kontra semen, yaitu perusakan tenda posko perjuangan pihak kontra semen dan pembakaran mushala.

Lalu pada *press release* yang mengangkat aspek lingkungan, meskipun sama-sama mengangkat aspek lingkungan, namun fokus yang

diangkat berbeda. Pada *press release* JMPPK yang berjudul “*Pers Rilis Aksi Bersama Koalisi Semarang untuk Kendeng: Investasi PT. Semen Indonesia Mengancam Lingkungan*” fokus yang dibahas adalah pentingnya penerapan paradigma pembangunan nasional “*green economy*” yang sayangnya belum sepenuhnya terlaksana karena kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia yang memberi bantuan finansial pada PT. Semen Indonesia yang aktivitasnya dapat merusak lingkungan. Sedangkan pada *press release* yang berjudul “*Pers Rilis JM-PPK: “KEMBALIKAN HAK WATUPUTIH SEBAGAI KAWASAN LINDUNG”*”, berfokus pada ketidakbecusan Kementerian ESDM dalam mengambil kesimpulan mengenai Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, di mana Kementerian ESDM menilai bahwa CAT Watuputih tidak masuk kriteria Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK), sedangkan menurut data-data yang dimiliki JMPPK menyatakan bahwa CAT Watuputih merupakan KBAK. Untuk memperkuat pernyataan bahwa CAT Watuputih merupakan KBAK, *press release* ini pun menyertakan data-data yang dimiliki oleh JMPPK yang dapat dikatakan kuat dan valid. Kesamaan kedua *press release* yang mengangkat aspek lingkungan ini adalah sama-sama mengkritik kebijakan pejabat terkait kasus pembangunan pabrik semen di Kendeng, hal ini terlihat dari kalimat-kalimat dalam kedua *press release* tersebut yang menunjukkan sebuah kritik baik pada kebijakan yang dikeluarkan maupun pejabat yang mengeluarkan kebijakan.

“Kemen ESDM (cq Badan Geologi) cenderung terlalu tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan CAT Watuputih tidak mengindikasikan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK), karena berdasarkan data yang terbatas dan al kadarnya”

(Press release JMPPK, Pers Rilis JM-PPK: “KEMBALIKAN HAK WATUPUTIH SEBAGAI KAWASAN LINDUNG”, 31 Maret 2017)

“...pinjaman financial perbankan terhadap PT. Semen Indonesia yang akan mengeksploitasi sumber cekungan air tanah watuputih akan berkontribusi menyumbang laju percepatan kerusakan lingkungan di Jawa Tengah...”

(Press release JMPPK, “Pers Rilis Aksi Bersama Koalisi Semarang untuk Kendeng: Investasi PT. Semen Indonesia Mengancam Lingkungan”, 03 Desember 2014)

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa unsur *define problems* dalam *press release* JMPPK membingkai konflik pembangunan pabrik semen di Rembang dalam empat aspek, yaitu aspek politik, hukum, sosial, dan lingkungan. Dalam tiap aspek yang diangkat, masing-masing memiliki fokus masing-masing. Bila melihat tiap fokus yang diangkat dalam keempat aspek tersebut, ada bingkai umum yang diangkat dalam aspek-aspek tersebut. Bingkai umum tersebut kemudian membentuk sebuah bingkai besar yang menjadi bingkai *press release* JMPPK secara keseluruhan. Berbeda dengan *press release* PT. Semen Indonesia yang meskipun memiliki aspek-aspek tertentu, tetapi bingkai secara umumnya sangat sederhana dibandingkan dengan bingkai *press release* JMPPK yang lebih kompleks, sehingga membutuhkan pemaparan yang lebih khusus lagi seperti yang dipaparkan dalam tabel di bawah berikut ini.

Tabel 3. 4

Bingkai per Aspek dan Bingkai Umum *Press release* JMPPK

Aspek	Bingkai per Aspek
Politik	Berlanjutnya pembangunan pabrik semen di Rembang merupakan salah satu strategi politik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan merupakan bukti bahwa pemerintah daerah Jawa Tengah tidak berpihak pada masyarakat.
Hukum	Berlanjutnya pembangunan pabrik semen di Rembang pasca putusan MA merupakan

	pembangkangan atau perbuatan yang melawan hukum yang berlaku.
Sosial	Pembangunan pabrik semen di Rembang menimbulkan berbagai permasalahan sosial.
Lingkungan	Pembangunan pabrik semen di Rembang dan segala kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan pabrik semen tersebut sama-sama merupakan perbuatan yang mendukung kerusakan lingkungan.
Bingkai Umum : Terjadinya konflik pembangunan pabrik semen di Rembang merupakan bukti bahwa pembangunan pabrik semen di Rembang hanya memiliki sedikit manfaat dibanding kerugiannya terutama dalam hal kelestarian lingkungan, sehingga masyarakat kecil di Rembang melakukan berbagai macam aksi sebagai bentuk untuk melindungi pegunungan Kendeng dari elit-elit pemerintah yang berusaha melakukan siasat-siasat politik agar pabrik semen di Rembang tetap beroperasi termasuk diantaranya tidak mematuhi putusan yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung dan berusaha untuk tetap tabah dan tegar atas berbagai permasalahan sosial yang dialami masyarakat Rembang akibat menolak pabrik semen.	

2. *Diagnose Causes*

Secara keseluruhan, ada dua pihak yang dianggap sebagai pelaku atau penyebab masalah dalam *press release* JMPPK, yaitu PT. Semen Indonesia dan pejabat publik. Pejabat publik yang disalahkan dalam *press release* JMPPK diantaranya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, presiden Jokowi, menteri ESDM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bupati Pati, dan lain-lain. Dari semua pihak yang dianggap sebagai “biang kerok”, pihak yang paling disalahkan dalam *press release* JMPPK adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan PT. Semen Indonesia.

PT. Semen Indonesia tentu saja jelas dianggap sebagai pihak yang paling bersalah karena membangun pabrik semen di Pegunungan Kendeng yang merupakan kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) yang akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Selain itu, PT. Semen Indonesia semakin dianggap “sangat bersalah” karena tetap nekat untuk

melanjutkan pembangunan pabrik semen di Kendeng. PT. Semen Indonesia dianggap sangat bersalah oleh JMPPK terlihat dari *press release* JMPPK yang berjudul “*Siaran Pers : Kegiatan Usaha PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Di Kabupaten Rembang Ilegal ; Petani Rembang Laporkan Pidana Ke POLDA Jawa Tengah*”. Dari judulnya saja sudah menunjukkan bahwa PT. Semen Indonesia adalah sebagai penyebab masalah. Dalam *press release* ini, JMPPK membongkar PT. Semen Indonesia sebagai perusahaan yang “nakal” karena pabrik semen di Rembang tetap beroperasi meskipun putusan MA menyatakan bahwa izin lingkungan PT. Semen Indonesia dibatalkan. Untuk memperkuat bahwa PT. Semen Indonesia adalah perusahaan yang “nakal”, *press release* ini menyertakan dua aturan hukum yaitu SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 Tahun 2017 dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (UU PPLH) pasal 36 ayat 1.

“Meskipun SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 Tahun 2017 telah mencabut Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia, namun kegiatan usaha PT. Semen Indonesia di lokasi pembangunan pabrik semen masih terus berlangsung. Artinya, usaha ini dilakukan tanpa memiliki Izin Lingkungan sebagai dasar hukumnya. Padahal, Pasal 36 ayat (1) UU PPLH menyatakan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”. Karena itu, tindakan PT. Semen Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di Rembang ialah tindakan ilegal.”

(*Press release* JMPPK, Siaran Pers: “Kegiatan Usaha PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Di Kabupaten Rembang Ilegal ; Petani Rembang Laporkan Pidana Ke POLDA Jawa Tengah”, 10 Februari 2017)

Kalimat “*usaha ini dilakukan tanpa memiliki Izin Lingkungan sebagai dasar hukumnya*” merupakan kalimat yang menunjukkan bahwa PT. Semen Indonesia dianggap sebagai pihak yang bersalah atau pelaku.

Selain PT. Semen Indonesia, pihak yang juga dianggap paling bersalah adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, bahkan dibandingkan dengan PT. Semen Indonesia, *press release* yang menjadikan Ganjar Pranowo sebagai pihak yang dianggap bersalah lebih banyak dibandingkan *press release* yang menjadikan PT. Semen Indonesia sebagai pihak yang bersalah. *Press release* JMPPK yang menjadikan Ganjar Pranowo sebagai pihak yang bersalah berjumlah enam, sedangkan *press release* yang menjadikan PT. Semen Indonesia sebagai pihak yang bersalah berjumlah lima. Jumlah yang selisih satu angka ini karena ada beberapa *press release* yang menjadikan keduanya (Ganjar Pranowo dan PT. Semen Indonesia) sebagai pihak yang dianggap paling bersalah. Dibandingkan dengan PT. Semen Indonesia, bingkai *press release* Ganjar Pranowo sebagai pihak yang dianggap bersalah lebih terkesan frontal. Hal ini terlihat dari beberapa *press release* JMPPK yang bahkan menyebut Gubernur Jawa Tengah ini dengan kata-kata “kasar”. Dalam *press release* yang berjudul “*Pers Release : Aksi Solidaritas Amankan Tani “Salatiga Peduli Kendeng”*”, *press release* tersebut menyebut Ganjar Pranowo telah menganggangi keputusan Mahkamah Agung (MA), lalu pada *press release* yang berjudul “*Pernyataan Sikap WALHI : Perlawanan WALHI terhadap Kejahatan Lingkungan Hidup di Karst Kendeng*”, menyebut Ganjar sebagai salah satu kepala daerah yang ceroboh.

“... Ganjar telah menganggangi keputusan yang telah ditetapkan MA, sebagai lembaga hukum tertinggi di Indonesia.”

(Press release JMPPK, “Pers Release : Aksi Solidaritas Amankan Tani “Salatiga Peduli Kendeng”, 31 Maret 2017)

“... masih banyak daerah yang dipimpin dan dikelola oleh kepala daerah dengan ceroboh, Ganjar Pranowo bukan hanya mencampur adukan tetapi juga menyamakan arti

bahasa dan hukum terhadap kata “membatalkan”, “menutup”, menyelamatkan cekungan air...”

(Press release JMPPK, “Pernyataan Sikap WALHI : Perlawanan WALHI terhadap Kejahatan Lingkungan Hidup di Karst Kendeng”, 18 Desember 2016)

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Ganjar Pranowo menjadi pihak yang paling disalahkan dalam *press release* JMPPK selain PT. Semen Indonesia, bahkan Ganjar Pranowo pun menjadi pihak yang paling banyak disebutkan sebagai penyebab masalah dalam *press release* JMPPK. Alasan mengapa Ganjar Pranowo menjadi salah satu pihak yang paling disudutkan adalah karena kebijakan Ganjar Pranowo yang menerbitkan izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia, padahal sebelumnya Mahkamah Agung telah memvonis bahwa izin lingkungan PT. Semen Indonesia dibatalkan. Kebijakan ini tentu menuai kritikan pedas selain dianggap berpihak pada PT. Semen Indonesia, Gubernur Jawa Tengah ini juga dianggap tidak mematuhi putusan MA terkait izin lingkungan PT. Semen Indonesia.

Selain kedua di atas, ada pihak-pihak lain yang juga dianggap bersalah oleh *press release* JMPPK, diantaranya adalah kementerian ESDM, Otoritas Jasa Keuangan, Bupati Pati, presiden Jokowi, dan lain-lain. Tetapi, pihak-pihak tersebut tidak terlalu disudutkan dalam *press release* JMPPK seperti halnya PT. Semen Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Bila dibuat analogi, pihak-pihak tersebut hanya membuat kecewa JMPPK, sedangkan Ganjar Pranowo dan PT. Semen Indonesia adalah pihak yang dibenci oleh JMPPK. Pihak-pihak yang telah disebutkan di atas, disalahkan dalam *press release* JMPPK karena dianggap berada di pihak PT. Semen Indonesia dan membantu memudahkan PT. Semen Indonesia untuk tetap melanjutkan pembangunan pabrik semen di Kendeng, contohnya *press release* JMPPK yang berjudul “*Pers Rilis Aksi Bersama Koalisi Semarang untuk Kendeng : Investasi PT. Semen Indonesia Mengancam lingkungan*”.

Pada *press release* tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia disalahkan karena OJK dan Bank Indonesia memberikan bantuan finansial pada PT. Semen Indonesia. Menurut *press release* tersebut, PT. Semen Indonesia tidak pantas mendapat bantuan finansial karena aktivitas perusahaan tersebut merusak lingkungan, memberi bantuan finansial berarti OJK dan Bank Indonesia turut andil dalam merusak lingkungan secara tidak langsung.

“... pinjaman financial perbankan terhadap PT. Semen Indonesia yang akan mengeksploitasi sumber air cekungan air tanah watuputih akan berkontribusi menyumbang laju percepatan kerusakan lingkungan di Jawa Tengah. Bank yang membantu secara finansial tersebut harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan hak asasi manusia guna meninjau ulang kerjasamanya ke PT. Semen Indonesia...”

(*Press release JMPPK, “Pers Rilis Aksi Bersama Koalisi Semarang untuk Kendeng: Investasi PT. Semen Indonesia Mengancam Lingkungan”, 03 Desember 2014*)

Tabel 3. 5

“Pelaku” dalam *Press release* JMPPK

Judul	<i>Diagnose Causes</i>	Pihak yang Dianggap Pelaku
<i>Press release</i> Jagongan Media Rakyat 2014: Jejaring Media Warga Menyelamatkan Kendeng Utara.	Seperti halnya kasus Prita Mulyasari dan kasus “cicak vs buaya”, kasus konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang tidak menarik perhatian media massa untuk meliputnya, tetapi, kasus ini justru ramai di media sosial. Ramainya kasus ini dibicarakan di media sosial, membuat media massa akhirnya meliput kasus konflik pembangunan pabrik semen tersebut.	Media massa
Pers Rilis Aksi Bersama	PT. Semen Indonesia mendapat bantuan pinjaman finansial dari	Ada tiga pihak yang disalahkan,

<p>Koalisi Semarang untuk Kendeng: Investasi PT. Semen Indonesia Mengancam Lingkungan.</p>	<p>Bank Indonesia, padahal pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia di Rembang dapat merusak lingkungan.</p>	<p>yang paling disalahkan adalah PT. Semen Indonesia, sedangkan kedua pihak lainnya disalahkan karena dianggap memudahkan PT. Semen Indonesia untuk merusak lingkungan, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p>
<p>Pers Release Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK): HORMATI PUTUSAN PENGADILAN, BERHENTILAH MEMBUAT PERNYATAAN KONTROVERSI</p>	<p>Pernyataan menyesatkan beberapa pihak terkait putusan pengadilan tentang pabrik semen PT. Semen Indonesia di Rembang.</p>	<p>Bupati Pati, Jawa Tengah dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Pati.</p>
<p>Pernyataan Sikap WALHI: Perlawanan WALHI terhadap Kejahatan Lingkungan Hidup di Karst Kendeng</p>	<p>Tindakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tidak mencabut izin lingkungan PT. Semen Indonesia setelah putusan MA dan PT. Semen Indonesia yang tetap melakukan aktivitas pertambangan meski izin lingkungan telah dicabut.</p>	<p>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan PT. Semen Indonesia. Tetapi yang paling disalahkan adalah Ganjar Pranowo karena tidak menggunakan wewenangnya sebagai kepala</p>

		daerah untuk mencabut izin lingkungan PT. Semen Indonesia.
PERNYATAAN KOMNAS PEREMPUAN ATAS PENDIRIAN DAN RENCANA PENDIRIAN PABRIK SEMEN SERTA EXPLOITASI KAWASAN KARTS DI PEGUNUNGAN KENDENG UTARA DAN SELATAN.	Banyaknya permasalahan sosial dan lingkungan yang terjadi Kendeng, Rembang akibat pro kontra pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia di Rembang.	PT. Semen Indonesia
PERS RELEASE JM-PPK: Patuhi Putusan MA!	Tindakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang belum menghentikan aktivitas PT. Semen Indonesia di Rembang, padahal putusan MA mengatakan bahwa izin lingkungan PT. Semen Indonesia dicabut, Ganjar Pranowo malah diam-diam menerbitkan izin lingkungan yang baru.	Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
Pers Rilis JM-PPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) Semarang 2 Februari 2017.	Masyarakat Rembang dibuat bingung dengan adanya undangan rapat Komisi Penilaian Amdal di BLH Provinsi Jawa Tengah untuk menilai adendum Amdal dan RKL-RPL PT. Semen Indonesia. Padahal, putusan MA telah membuktikan bahwa Amdal PT. Semen Indonesia tidak layak dan cacat prosedur.	Pemerintah Jawa Tengah dan PT. Semen Indonesia. Keduanya sama-sama disalahkan karena dianggap melakukan segala cara agar pabrik PT. Semen Indonesia tetap beroperasi di Rembang.

<p>Siaran Pers: “Kegiatan Usaha PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Di Kabupaten Rembang Ilegal ; Petani Rembang Laporkan Pidana Ke POLDA Jawa Tengah”.</p>	<p>PT. Semen Indonesia tetap melakukan aktivitas pertambangan di Rembang meskipun Putusan MA menyatakan bahwa izin lingkungannya dicabut, sehingga aktivitas PT. Semen Indonesia di Rembang tersebut dinyatakan ilegal.</p>	<p>PT. Semen Indonesia</p>
<p>SIARAN PERS: Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia dan Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration (CHRM2) Fakultas Hukum Universitas Jember.</p>	<p>Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat sama-sama membiarkan PT. Semen Indonesia membangun pabrik semennya di Rembang. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tidak mencabut izin lingkungan PT. Semen Indonesia, malah menerbitkan adendum. Padahal, MA menyatakan bahwa izin lingkungan PT. Semen Indonesia dibatalkan.</p>	<p>Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tetapi yang paling disalahkan adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo karena tidak mematuhi putusan MA.</p>
<p>KENDENG MENUNDUKAN KEPALA.</p>	<p>Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai tidak becus dalam menanggapi penolakan pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia di Kendeng.</p>	<p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p>
<p>Pers Release: Aksi Solidaritas Amankan Tani “Salatiga Peduli Kendeng”.</p>	<p>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pernah mencabut SK No 660.1/30 tahun 2016, lalu mengeluarkan SK baru pada 23 Febuari 2017 yaitu SK No 660.1/6 tahun 2017. Hal ini tidak masuk akal karena Ganjar menerbitkan SK baru di saat Amdal Induk sudah dinyatakan cacat yuridis oleh MA.</p>	<p>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.</p>

<p>Pers Rilis JM-PPK: “KEMBALIKAN HAK WATUPUTIH SEBAGAI KAWASAN LINDUNG”.</p>	<p>Badan Geologi tidak profesional dan tidak cakap dalam menjalankan tugas.</p>	<p>Kementrian ESDM terutama Badan Geologi.</p>
---	---	--

Selain PT. Semen Indonesia dan sejumlah pejabat, ada satu *press release* JMPPK yang menjadikan media massa sebagai “pelaku” dalam kasus konflik pembangunan pabrik semen di Rembang. Media massa disalahkan dalam *press release* JMPPK karena luput memberitakan kasus konflik tambang tersebut dan baru meliput kasus tersebut setelah ramai dibicarakan di media sosial. Tetapi, tidak seperti PT. Semen Indonesia atau pun pejabat lainnya yang “disalahkan” secara “tajam”, bingkai media massa sebagai “pelaku” tidak setajam pihak-pihak lainnya yang dianggap pelaku. Tidak tajam di sini merujuk pada bahwa media massa tidak mendapat sorotan yang terlalu kuat seperti halnya PT. Semen Indonesia maupun Ganjar Pranowo ataupun pihak lainnya. Hal ini terlihat dari isi *press release* tersebut yang menggambarkan kesalahan media massa dalam kasus konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng hanyalah kesalahan berupa kelalaian, lalai dalam meliput peristiwa yang penting. Hal ini berbeda dengan *press release* JMPPK lainnya yang menjadikan PT. Semen Indonesia dan pejabat publik sebagai pelaku. Bila kesalahan yang dilakukan media massa dibingkai sebagai kelalaian, maka kesalahan yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia dan pejabat publik lainnya dibingkai sebagai *human error*.

3. *Moral Judgement*

Sama seperti *press release* PT. Semen Indonesia, *press release* JMPPK juga memiliki unsur *moral judgement* sebagai pembenaran moral atau argumentasi untuk menguatkan unsur *define problem*. Argumentasi yang digunakan dapat memperkuat bingkai suatu teks

dalam melihat suatu peristiwa di mana dalam hal ini adalah kasus konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah.

Dari dua belas *press release* JMPPK yang dianalisis, ada enam jenis *moral judgement* yang digunakan, yaitu *Argumentasi Penulis*, *kutipan aturan hukum*, *pemaparan peristiwa*, *kutipan tokoh*, *kutipan temuan data*, dan *konsep teoritis*. *Argumentasi Penulis* adalah pernyataan atau pemaparan dari penulis *press release* JMPPK. Pemaparan tersebut berupa pandangan penulis *press release* dalam melihat kasus konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana penulis mengarahkan pembaca pada suatu opini melalui pemaparannya dengan menggunakan diksi-diksi tertentu. *Kutipan aturan hukum* ialah kutipan dari aturan-aturan hukum yang berlaku, kutipan tersebut dapat berupa Undang-Undang, putusan pengadilan, dan lain-lain. *Pemaparan peristiwa* adalah jenis *moral judgement* berupa pemaparan atau penjelasan mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi, pemaparan tersebut dapat berupa kronologi kejadian, langkah-langkah kerja, pemaparan mengenai aksi dan lain-lain. *Kutipan tokoh* ialah statement atau pernyataan tokoh yang dikutip oleh *press release* JMPPK terkait kasus konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng. *Kutipan temuan data* ialah data-data hasil temuan yang disertakan atau dikutip *press release* JMPPK sebagai bukti kuat secara akademis untuk memperkuat bingkai *press release* JMPPK dalam kasus konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng. Data-data temuan yang digunakan berupa data-data hasil penelitian baik dari JMPPK sendiri atau pun pihak lain dan data-data hasil observasi maupun dokumentasi baik dari JMPPK maupun pihak lain. Kemudian jenis *moral judgement* yang terakhir adalah *konsep teoritis* yang merupakan suatu konsep yang tersusun rapi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu *press release* JMPPK ada yang menggunakan konsep teoritis sebagai

moral judgement nya. Konsep teoritis tersebut tentu berkaitan dengan kasus konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng.

Pada *press release* JMPPK, satu *press release* bisa memiliki satu jenis *moral judgement* atau lebih. Jumlah *moral judgement* terbanyak dalam satu *press release* JMPPK adalah tiga. Adanya *press release* yang memiliki lebih dari satu *moral judgement* dalam satu teks menunjukkan bahwa *press release* JMPPK memiliki banyak hal yang bisa diangkat sebagai pembenaran moral atau argumentasi untuk membuat suatu bingkai dalam melihat kasus konflik pembangunan pabrik semen di Rembang sehingga *press release* JMPPK dapat memiliki lebih dari satu *moral judgement* dalam satu teks.

Tabel 3. 6

Moral Judgement Dalam Press release JMPPK

Judul	<i>Moral Judgement</i>	Jenis <i>Moral Judgement</i>
<i>Press release</i> Jagongan Media Rakyat 2014: Jejaring Media Warga Menyelamatkan Kendeng Utara.	Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) melakukan pemetaan partisipatif mengenai potensi goa dan mata air yang ada di wilayah Kendeng, yang di mana hasilnya bertentangan dengan AMDAL yang dikeluarkan, lalu hasil pemetaan tersebut dipublikasikan di media sosial.	Argumentasi Penulis
Pers Rilis Aksi Bersama Koalisi Semarang untuk Kendeng: Investasi PT. Semen Indonesia Mengancam Lingkungan.	Paradigma Pembangunan Nasional Green Economy, Kutipan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup, Pernyataan Deputy Gubernur Bank Indonesia pada paragraf ketiga, Pernyataan Manager Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi Eksekutif Nasional pada paragraf kelima,	Konsep teoritis, Kutipan Aturan Hukum dan Kutipan Tokoh.

	<p>Pernyataan dari pihak Satjipto Raharjo Insititute yaitu Unu Herlambang dan Hasan Tuban pada paragraf keenam, Dan pernyataan dari kuasa hukum warga Rembang, Zaenal terkait aksi damai yang dilakukan oleh 20 aktivis lingkungan, yang terdapat pada paragraf kedelapan.</p>	
<p>Pers Release Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK): HORMATI PUTUSAN PENGADILAN, BERHENTILAH MEMBUAT PERNYATAAN KONTROVERSIAL</p>	<p>Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 99/PK/TUN/2016 menyatakan bahwa izin lingkungan PT. Semen Indonesia dicabut. Pemaparan mengenai perjuangan masyarakat Kendeng dalam melindungi kelestarian alam yang terdapat pada paragraf pertama dan paragraf kedua.</p>	<p>Kutipan Aturan Hukum dan Argumentasi Penulis</p>
<p>Pernyataan Sikap WALHI: Perlawanan WALHI terhadap Kejahatan Lingkungan Hidup di Karst Kendeng</p>	<p>Kata “membatalkan” dan “menutup” memiliki makna yang berbeda tetapi merujuk pada hal yang sama. Membatalkan adalah tuntutan konstitusional WALHI terhadap izin lingkungan PT. Semen Indonesia untuk menyelamatkan pegunungan Kendeng, sedangkan menutup adalah kewajiban dan perintah konstitusional kepada Gubernur Jawa Tengah. Putusan MA sebagai putusan tertinggi dan bersifat final, maka Gubernur Jawa Tengah selaku pejabat yang terikat secara konstitusional haruslah mematuhi putusan MA.</p>	<p>Argumentasi Penulis</p>

<p>PERNYATAAN KOMNAS PEREMPUAN ATAS PENDIRIAN DAN RENCANA PENDIRIAN PABRIK SEMEN SERTA EXPLOITASI KAWASAN KARTS DI PEGUNUNGAN KENDENG UTARA DAN SELATAN.</p>	<p>Pemaparan mengenai langkah-langkah Komnas Perempuan dalam memantau dan mengawal konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng yang terdapat pada paragraf pertama. Dan rincian mengenai temuan-temuan Komnas Perempuan pada kasus tambang di Kendeng, Rembang yang terdiri dari delapan poin yang dipaparkan pada paragraf kedua hingga paragraf kedelapan.</p>	<p>Pemaparan Peristiwa dan Temuan Data</p>
<p>PERS RELEASE JM-PPK: Patuhi Putusan MA!</p>	<p>Kehadiran pabrik semen di Kendeng, Rembang akan merusak lingkungan, sehingga alasan menolak pembangunan pabrik semen di Kendeng adalah demi menjaga kelestarian alam. Selain itu, terdapat kejanggalan dan manipulasi data dalam AMDAL yang dijadikan dasar dikeluarkannya izin lingkungan. Pemaparan mengenai investasi PT. Semen Indonesia di Kendeng serta pelanggaran yang dilakukan yang terdapat pada paragraf kelima.</p>	<p>Argumentasi Penulis</p>
<p>Pers Rilis JM-PPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) Semarang 2 Februari 2017.</p>	<p>Pemaparan mengenai pemerintahan di tanah Jawa dari zaman kerajaan hingga sekarang yang berada pada paragraf kedua dan ketiga, Isi surat masyarakat Rembang mengenai Rapat Komisi Penilai AMDAL, Dan pemaparan mengenai aksi sembilan Kartini Kendeng yang terdapat pada paragraf ketujuh.</p>	<p>Argumentasi Penulis dan Pemaparan Peristiwa</p>
<p>Siaran Pers: “Kegiatan Usaha PT. Semen</p>	<p>Kutipan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan</p>	<p>Kutipan Aturan Hukum</p>

<p>Indonesia (Persero) Tbk Di Kabupaten Rembang Ilegal ; Petani Rembang Laporkan Pidana Ke POLDA Jawa Tengah”.</p>	<p>Hidup pasal 40 dan pasal 36 ayat 1 terkait izin lingkungan perusahaan tambang.</p>	
<p>SIARAN PERS: Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia dan Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration (CHRM2) Fakultas Hukum Universitas Jember.</p>	<p>Pemaparan mengenai pengabaian pemerintah mengenai kasus pembangunan pabrik semen di Rembang, dan buruknya birokrasi di Indonesia yang terdapat pada paragraf keenam hingga paragraf kedelapan. Dan nama-nama yang tergabung dalam Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia,</p>	<p>Argumentasi Penulis</p>
<p>KENDENG MENUNDUKKAN KEPALA.</p>	<p>Aksi cor kaki dengan semen yang dilakukan oleh masyarakat Kendeng didampingi oleh tim dokter. Dan kronologi keadaan Almh. Bu Patmi yang mengikuti aksi cor kaki dengan semen di depan Istana Negara hingga menghembuskan nafas terakhirnya yang terdapat pada paragraf ketiga hingga paragraf ketujuh.</p>	<p>Pemaparan Peristiwa dan Argumentasi Penulis</p>
<p>Pers Release: Aksi Solidaritas Amankan Tani “Salatiga Peduli Kendeng”.</p>	<p>Pemaparan mengenai argumentasi yang dianggap mitos oleh pihak kontra semen yang disebarkan oleh pemerintah yaitu pegunungan Kendeng tidak memiliki mata air sehingga tidak masalah melakukan aktivitas tambang di sana dan tambang dapat menyejahterakan masyarakat sekitar pertambangan, pemaparan ini</p>	<p>Argumentasi Penulis</p>

	terdapat pada paragraf ketiga hingga kelima. Dan pemaparan mengenai perjuangan masyarakat Kendeng yang tidak direspon oleh pemerintah yang terdapat pada paragraf keenam.	
Pers Rilis JM-PPK: “KEMBALIKAN HAK WATUPUTIH SEBAGAI KAWASAN LINDUNG”.	Data-data yang dimiliki oleh JMPPK tentang Cekungan Air Tanah Watuputih yang dipaparkan pada paragraf ketiga hingga paragraf kedelapan.	Kutipan Aturan Hukum dan Temuan Data

Berdasarkan tabel di atas, jenis *moral judgement* yang paling banyak digunakan dalam *press release* JMPPK adalah argumentasi penulis yang terdapat pada *delapan press release*, terbanyak kedua adalah kutipan aturan hukum yang berjumlah *empat*, lalu jenis *moral judgement* pemaparan peristiwa yang berjumlah *tiga*, kemudian kutipan temuan data yang ditemukan dalam *dua press release*, serta jenis *moral judgement* konsep teoritis dan kutipan tokoh yang masing-masing berjumlah *satu*.

Jenis *moral judgement* yang paling banyak digunakan dalam *press release* JMPPK adalah argumentasi penulis. Hal ini terlihat dari *delapan press release* JMPPK yang menggunakan argumentasi penulis sebagai *moral judgement* nya. Alasan mengapa argumentasi penulis menjadi salah satu jenis *moral judgement* yang digunakan dalam *press release* JMPPK adalah karena argumentasi atau pembenaran moral beberapa *press release* JMPPK berasal dari pemaparan penulis sendiri, bukan dari kutipan baik kutipan tokoh atau kutipan hukum maupun yang lainnya. Jenis *moral judgement* argumentasi penulis terlihat dari kalimat-kalimat yang berbentuk opini dan penggunaan kata “kami” dalam *press release* yang merujuk pada penulis itu sendiri.

“Sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang mencintai negeri ini, kami terpanggil untuk mencegah perusakan Pegunungan Kendeng dari berbagai upaya sistematis yang dilakukan oleh korporasi.”

(Press release JMPPK, “Pers Release Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK): HORMATI PUTUSAN PENGADILAN, BERHENTILAH MEMBUAT PERNYATAAN KONTROVERSIAL”, 10 November 2016)

“Meskipun tidak sebanding dengan besarnya nilai kelestarian alam, investasi senilai 5 triliun bukanlah nilai yang kecil. Sebagai BUMN, investasi tersebut sebagian besar adalah milik negara yang diperoleh dari pajak yang dibayar oleh warga negara.”

(Press release JMPPK, “PERS RELEASE JM-PPK: Patuhi Putusan MA!”, 09 Januari 2017)

Pada jenis *moral judgement* argumentasi penulis, terdapat dua topik yang diangkat, yaitu perjuangan masyarakat Kendeng dalam menjaga kelestarian alam dan kritik terhadap pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang tidak berpihak pada masyarakat Kendeng karena membiarkan PT. Semen Indonesia tetap membangun pabrik semen di Rembang meskipun masyarakat Kendeng menolaknya. pembiaran terhadap pabrik semen tersebut dibingkai sebagai kegagalan pemerintah dalam mengurus masyarakat Indonesia karena keegoisan mereka.

“Kami juga ingin menegaskan kekecewaan kami yang mendalam terhadap tumpulnya kepekaan politik para pengurus negara, termasuk pengingkaran tanggungjawab untuk menjamin keselamatan warga-negara dan keutuhan fungsi-fungsi ekologis dari bentang alam pulau Jawa, khususnya kawasan bentang alam Karst Kendeng.”

(*Press release* JMPPK, “KENDENG MENUNDUKKAN KEPALA”, 21 Maret 2017)

Jenis *moral judgement* selanjutnya yang paling banyak digunakan adalah kutipan aturan hukum yang berjumlah empat. Sesuai dengan namanya, maka yang menjadi *moral judgement* dalam beberapa *press release* JMPPK adalah kutipan yang berasal dari aturan-aturan hukum yang berlaku. Adanya kutipan aturan hukum yang menjadi *moral judgement* menunjukkan bahwa kasus konflik pembangunan pabrik semen di Rembang mengandung muatan hukum karena terdapat beberapa aturan hukum yang mendukung kasus tambang tersebut, bahkan kasus ini pun telah mendapat aturan hukum khusus dari Mahkamah Agung yaitu Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 99/PK/TUN/2016.

Adanya aturan hukum yang dikutip menjadi *moral judgement* pada beberapa *press release* JMPPK juga semakin memperkuat *define problems* pada aspek hukum. Kutipan aturan hukum inilah yang memperkuat bingkai *press release* JMPPK bahwa kasus konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng merupakan salah satu permasalahan hukum.

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab *define problems*, aturan hukum yang paling banyak dikutip adalah Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 99/PK/TUN/2016 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bila mengikuti kasus konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, alasan mengapa kedua aturan hukum ini paling banyak dikutip dalam *press release* JMPPK adalah *pertama*, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah aturan hukum yang digunakan untuk menolak pembangunan pabrik semen di Kendeng, karena pembangunan pabrik semen di Kendeng

merusak lingkungan, maka pastilah bertentangan dengan undang-undang tersebut, kemudian ditambah lagi dengan diterbitkannya izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia setelah putusan MA menyatakan izin lingkungan PT. Semen Indonesia dicabut, maka undang-undang ini semakin memperkuat bahwa saat ini status pabrik semen di Kendeng dinyatakan ilegal. *Kedua*, Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 99/PK/TUN/2016 adalah putusan yang ditetapkan Mahkamah Agung (MA) terkait izin lingkungan pabrik semen PT. Semen Indonesia di Kendeng. Putusan tersebut menyatakan bahwa izin lingkungan PT. Semen Indonesia dicabut atau dibatalkan. Hal ini tentu menjadi dasar yang kuat untuk menolak pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang. Putusan ini menunjukkan bahwa pembangunan pabrik semen di Kendeng sudah seharusnya dihentikan.

Jenis *moral judgement* yang selanjutnya adalah pemaparan peristiwa. Jenis *moral judgement* ini berupa pemaparan secara rinci dan berurutan (bila jenis pemaparan tersebut adalah sebuah pemaparan kronologis suatu peristiwa). Pada tiga *press release* JMPPK yang memiliki *moral judgement* berupa pemaparan peristiwa, masing-masing memaparkan hal yang berbeda-beda. Pada *press release* JMPPK yang berjudul “*PERNYATAAN KOMNAS PEREMPUAN ATAS PENDIRIAN DAN RENCANA PENDIRIAN PABRIK SEMEN SERTA EXPLOITASI KAWASAN KARTS DI PEGUNUNGAN KENDENG*”, hal yang dipaparkan adalah langkah-langkah Komnas Perempuan dalam memantau dan mengikuti jalannya kasus konflik pembangunan pabrik semen di Rembang. Lalu pada *press release* JMPPK yang berjudul “*Pers Rilis JM-PPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) Semarang 2 Februari 2017*”, ada dua hal yang dipaparkan, *pertama* pemaparan mengenai masyarakat Rembang yang berhasil memenangkan gugatan atas izin lingkungan hidup PT. Semen Indonesia kemudian mendapatkan undangan untuk penilaian adendum Andal yang

membuat mereka bingung sehingga sehingga salah satu masyarakat Rembang menulis surat terbuka pada Komisi Penilaian Amdal, *press release* ini menyertakan foto surat terbuka yang ditulis dengan tangan tersebut. Foto surat inilah yang menjadi *moral judgement* yang merupakan klimaks dari kebingungan masyarakat Rembang atas kebingungan mereka ketika mendapat undangan adendum Andal. Kedua, pemaparan mengenai aksi sembilan Kartini Kendeng dari Rembang di depan kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH). Aksi yang mereka lakukan adalah membawa berbagai hasil pertanian dari lahan pertanian mereka yang merupakan bagian dari kawasan pabrik semen PT. Semen Indonesia di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Tujuan dari aksi tersebut adalah membuktikan kepada seluruh masyarakat Indonesia terutama pemerintahan bahwa tanah Kendeng adalah tanah yang begitu subur sehingga menghasilkan berbagai jenis tanaman dan kesuburan tanah Kendeng akan hilang bila tanah tersebut dijadikan pabrik semen oleh PT. Semen Indonesia. Lalu pada press JMPPK selanjutnya yang berjudul “*KENDENG MENUNDUKKAN KEPALA*”, *press release* ini memaparkan kronologi bagaimana keadaan Almarhumah ibu Patmi secara rinci mulai dari mengikuti aksi penolakan pembangunan pabrik semen hingga akhirnya meninggal dunia dan dimakamkan. Almarhumah ibu Patmi adalah salah satu warga Pati yang mengikuti aksi pengecoran kaki di depan Istana Negara, Jakarta dalam rangka memprotes kebijakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengeluarkan izin lingkungan baru untuk pabrik PT. Semen Indonesia di Kendeng. Almarhumah meninggal dunia pada hari Selasa, 21 Maret 2017 pukul 02.55 WIB di Rumah Sakit St. Carolus Salemba, Jakarta dengan dugaan penyakit jantung.

Meskipun peristiwa yang dipaparkan berbeda, namun ada satu kesamaan di antara tiga *press release* tersebut, yaitu sama-sama memaparkan peristiwa yang berkaitan dengan perjuangan masyarakat

Rembang untuk menolak pembangunan pabrik di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah dalam bingkai melindungi kelestarian alam dan melawan kejahatan kalangan elit yang ingin merusak lingkungan. Kedua bingkai ini dapat ditemukan pada bagaimana *press release* ini memaparkan peristiwa yang berkaitan dengan perjuangan masyarakat tersebut.

“Tidak hanya padi, segala palawija dan ternak hidup dan dihidupi air dari Peg. Kendeng yang saat ini terancam musnah jika ekspansi pabrik semen dan tambang batu kapur jadi dilaksanakan di Peg. Kendeng. Kami tidak gentar sedikitpun untuk terus berjuang agar sumber kehidupan dan penghidupan kami tetap lestari, tidak hanya untuk masa sekarang, tetapi juga untuk masa depan anak cucu.”

(*Press release* JMPPK, “Pers Rilis JM-PPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) Semarang 2 Februari 2017”, 02 Februari 2017)

Jenis *moral judgement* selanjutnya adalah kutipan temuan data. Sesuai dengan namanya, maka yang menjadi *moral judgement* atau argumentasi untuk membenarkan unsur *define problems* adalah kutipan data-data yang merupakan hasil penelitian, hasil temuan, hasil pengamatan, dokumentasi, dan lain sebagainya. Pada *press release* JMPPK, data-data yang dikutip di antaranya adalah *pertama*, data yang dikutip pada *press release* JMPPK yang berjudul “*PERNYATAAN KOMNAS PEREMPUAN ATAS PENDIRIAN DAN RENCANA PENDIRIAN PABRIK SEMEN SERTA EXPLOITASI KAWASAN KARTS DI PEGUNUNGAN KENDENG*” adalah hasil dokumentasi Komnas Perempuan di wilayah Rembang dan Pati. Hasil temuan Komnas Perempuan tersebut terdiri dari delapan poin penting, kedelapan poin penting temuan Komnas Perempuan tersebut mencakup temuan dalam aspek lingkungan dan sosial. Pada temuan yang terkait aspek sosial, ditemukan adanya kekerasan pada perempuan yang menentang pembangunan pabrik semen di Kendeng, hasil temuan ini menjadi fokus utama Komnas Perempuan yang notabene bertugas

melindungi perempuan dari segala praktek kekerasan. *Kedua*, pada *press release* JMPPK yang berjudul “*Pers Rilis JM-PPK: “KEMBALIKAN HAK WATUPUTIH SEBAGAI KAWASAN LINDUNG”*”, terdapat tiga data yang dikutip dalam *press release* tersebut, keempat data tersebut adalah hasil uji lacak jaringan hidrologi oleh Tim Penyusun AMDAL PT. Semen Indonesia, hasil pendataan tim JMPPK dan Semarang Caver Assosiation (SCA), dan hasil penelitian LIPI dan Tim KLHK. Keempat data tersebut sama-sama mengatakan bahwa Cekungan Air Tanah (CAT) yang berada di pegunungan Kendeng merupakan kawasan yang dilindungi karena CAT Watuputih memiliki banyak goa dan mata air. Ketiga data yang dikutip tersebut membantah surat yang dikeluarkan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) yang menyatakan bahwa CAT Watuputih bukan kawasan yang dilindungi.

Lalu jenis *moral judgement* selanjutnya adalah kutipan tokoh. Sesuai dengan namanya, maka yang menjadi *moral judgement* adalah statement atau pernyataan tokoh publik terkait kasus konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng maupun hal-hal yang berkaitan dengan kasus tersebut. Hanya ada satu *press release* JMPPK yang menjadikan kutipan tokoh sebagai *moral judgement*. *Press release* tersebut berjudul “*Pers Rilis Aksi Bersama Koalisi Semarang untuk Kendeng: Investasi PT. Semen Indonesia Mengancam Lingkungan*”. *Press release* ini mengutip pernyataan Deputy Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas, pernyataan Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi Eksekutif Nasional, serta pernyataan Unu Herlambang dan Hasan Tuban dari Satjipto Raharjo Insititute. Pernyataan yang dikutip dari ketiga tokoh tersebut adalah pernyataan mengenai perlunya kebijakan dan aktivitas sektor perbankan yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan, dalam artian bahwa segala kebijakan sektor perbankan termasuk di antaranya memberikan pinjaman finansial pada perusahaan,

haruslah mempertimbangkan kembali apakah perusahaan tersebut berpotensi merusak lingkungan atau tidak. Jika perusahaan tersebut memiliki potensi merusak lingkungan, maka sektor perbankan perlu mempertimbangkan lebih matang lagi untuk memberikan pinjaman finansial tersebut.

Bila diperhatikan lebih detail, ketiga tokoh yang pernyataannya dikutip memiliki latar belakang yang berbeda. Ronald Waas memiliki latar belakang bekerja di sektor perbankan, Unu Herlambang dan Hasan Tuban yang memiliki latar belakang bekerja di bidang hukum, serta Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi Eksekutif Nasional yang fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan isu lingkungan. Meskipun ketiga tokoh ini memiliki latar belakang profesi yang berbeda, tetapi mereka sependapat bahwa perusahaan yang memiliki potensi merusak lingkungan perlu dipertimbangkan lagi bila perbankan ingin memberikan bantuan finansial.

Bila melihat waktu dan kondisi *press release* ini dikeluarkan, alasan mengapa penulis *press release* JMPPK mengutip pernyataan ketiga tokoh tersebut adalah karena ketiga tokoh tersebut sama-sama tidak menyetujui bila perusahaan tambang mendapat bantuan finansial dari perbankan dengan alasan bahwa memberikan bantuan finansial kepada perusahaan tambang maka secara tidak langsung juga ikut merusak lingkungan. Seperti yang telah diketahui bahwa PT. Semen Indonesia membangun pabrik semen di wilayah Kendeng, Rembang, Jawa Tengah, namun pembangunan pabrik semen itu mendapat penolakan dari masyarakat Rembang karena pembangunan pabrik semen di Kendeng akan merusak lingkungan, ditambah dengan fakta bahwa salah satu cekungan air yang terdapat di Kendeng, yaitu Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih merupakan salah satu kawasan lindung geologi. Kemudian, PT. Semen Indonesia mendapat bantuan finansial dari perbankan. Memberikan bantuan finansial pada PT. Semen Indonesia

merupakan suatu kesalahan, sebab memberikan bantuan kepada PT. Semen Indonesia sama saja dengan mendukung kerusakan lingkungan secara tidak langsung. Dikutipnya pernyataan ketiga tokoh yang memiliki latar belakang profesi yang berbeda menunjukkan bahwa kebijakan memberikan bantuan finansial pada PT. Semen Indonesia merupakan hal yang salah bila dilihat dari sudut pandang lingkungan, hukum, dan ekonomi perbankan.

Lalu jenis *moral judgement* terakhir yang ada pada *press release* JMPPK adalah konsep teoritis. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa konsep teoritis adalah sebuah konsep abstrak yang tersistem secara rapi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya ada satu *press release* JMPPK yang menjadikan sebuah konsep teoritis sebagai *moral judgement*, yaitu *press release* JMPPK yang berjudul “*Pers Rilis Aksi Bersama Koalisi Semarang untuk Kendeng: Investasi PT. Semen Indonesia Mengancam Lingkungan*”. Konsep teoritis yang terdapat pada *press release* ini adalah paradigma pembangunan nasional green economy, di mana pembangunan bukan hanya fokus pada mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya saja, tetapi juga harus menjaga kelestarian alam dan melibatkan masyarakat.

Bila melihat kasus konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah, alasan mengapa konsep pembangunan green economy dijadikan sebagai salah satu *moral judgement* adalah karena pembangunan pabrik semen di Kendeng dianggap hanya mementingkan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya saja, tidak memperhatikan keseimbangan alam, terlebih kawasan pabrik semen tersebut berada di kawasan yang memiliki banyak mata air. Adanya paradigma green economy menunjukkan bahwa pembangunan pabrik semen ini sudah bertentangan dengan konsep pembangunan yang seharusnya.

Dari keenam jenis *moral judgement* pada *press release* JMPPK, kutipan aturan hukum dan kutipan temuan data bisa dikatakan sebagai jenis *moral judgement* yang memiliki kekuatan dalam hal data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pada *press release* JMPPK yang memiliki jenis *moral judgement* aturan hukum, jenis *moral judgement* ini kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan karena memiliki kekuatan hukum, sehingga jenis *moral judgement* ini sulit untuk dibantah dengan jenis *moral judgement* yang lain. Sedangkan pada jenis *moral judgement* kutipan temuan data, jenis *moral judgement* ini memiliki kekuatan karena jenis *moral judgement* ini didapatkan dari hasil riset atau pun penelitian langsung ke lapangan, sehingga kebenaran data ini bisa dipertanggungjawabkan. Kebenaran data tersebut bisa dipertanggungjawabkan karena data-data tersebut di dapatkan dari hasil riset langsung ke lapangan.

4. *Treatment Recommendation*

Hampir semua *press release* JMPPK memiliki *treatment recommendation* atau rekomendasi penyelesaian ketika membahas konflik pembangunan pabrik semen di Rembang. Penyelesaian yang ditawarkan pun bermacam-macam tergantung pada apa yang dibahas dalam *press release* tersebut. Adanya unsur *treatment recommendation* pada hampir seluruh *press release* JMPPK menunjukkan bahwa penulis *press release* yang dalam hal ini adalah JMPPK menuntut pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pembangunan pabrik semen di Rembang untuk menyelesaikan konflik tersebut berdasarkan cara penyelesaian yang ditawarkan oleh JMPPK.

Ada sangat banyak *treatment recommendation* yang ditawarkan oleh JMPPK, bahkan dalam satu *press release* saja bisa memiliki tiga hingga empat *treatment recommendation*, bila semua *treatment recommendation* dalam dua belas *press release* tersebut dijumlahkan, maka jumlah *treatment recommendation* yang ditawarkan oleh *press*

release JMPPK berjumlah tiga puluh dua, tetapi bila semua *treatment recommendation* tersebut dikerucutkan lagi dengan menghitung beberapa *treatment recommendation* yang sama menjadi satu, maka jumlah *treatment recommendation* tersebut ialah dua puluh dua. Berikut *treatment recommendation* yang ditawarkan oleh JMPPK dalam *press release* nya :

- a. Masyarakat Indonesia mengetahui kasus konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng dan dapat bergerak bersama untuk menyelamatkan pegunungan Kendeng
- b. Sektor perbankan harus pertimbangkan kembali keputusan untuk memberikan bantuan finansial pada PT. Semen Indonesia
- c. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo harus mematuhi putusan Mahkamah Agung dengan mencabut izin lingkungan PT. Semen Indonesia
- d. Hentikan kekerasan dan kriminalisasi pada masyarakat penolak pabrik semen
- e. Presiden Indonesia tinjau ulang pembangunan pabrik semen di Kendeng
- f. Presiden Indonesia keluarkan kebijakan moratorium terkait kebijakan tambang
- g. Presiden Indonesia harus bersikap tegas dan tunjukkan komitmen dengan hentikan pendirian pabrik semen di Kendeng
- h. Presiden Indonesia harus gunakan kapasitasnya untuk memanusiakan manusia terutama masyarakat kecil yang berjuang untuk melindungi kelestarian alam
- i. Apresiasi perjuangan perempuan Kendeng
- j. Polri harus memiliki paradigma peduli lingkungan
- k. Polri harus usut kekerasan yang dialami oleh masyarakat penolak pabrik semen dan pembiaran kekerasan tersebut oleh jajaran kepolisian di bawahnya

- l. Polda Jawa Tengah harus bersikap objektif dan profesional dalam kasus konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng
- m. Hentikan ekspor semen
- n. Patuhi putusan Mahkamah Agung terkait izin lingkungan PT. Semen Indonesia
- o. Negara harus hentikan pembangunan pabrik semen di Kendeng
- p. Negara harus cermat keluarkan izin dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang independent
- q. Evaluasi lebih hati-hati dan bijak terhadap rencana pembangunan pabrik tambang
- r. Selesaikan konflik agraria di Jawa Tengah
- s. Jaga lumbung padi dengan memperbaiki sistem regenerasi petani
- t. Wujudkan reforma agraria sejati
- u. Kementrian ESDM harus terbuka dengan hasil riset dan penelitian terkait Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih
- v. Kembalikan hak Watuputih sebagai kawasan hutan lindung

Dari dua puluh dua solusi yang direkomendasikan JMPPK dalam *press release* nya, terdapat dua poin penting, yaitu *Pertama*, *treatment recommendation* yang paling banyak disebutkan dalam *press release* JMPPK adalah Gubernur Jawa Tengah harus patuhi putusan Mahkamah Agung dengan mencabut izin lingkungan PT. Semen Indonesia. *Treatment recommendation* ini disebutkan dalam enam *press release* JMPPK dengan judul yang berbeda. Seringnya *treatment recommendation* ini disebutkan dalam *press release* JMPPK menunjukkan bahwa *treatment recommendation* ini menjadi solusi utama yang dituntut JMPPK untuk menyikapi konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang Jawa Tengah. *Kedua*, presiden Indonesia Joko Widodo dan pemerintah pusat menjadi pihak yang paling banyak mendapatkan rekomendasi solusi atau *treatment*

recommendation dari *press release* JMPPK. Hal ini terlihat dari *treatment recommendation* yang ditujukan untuk Jokowi sebanyak empat dan *treatment recommendation* untuk pemerintah pusat sebanyak tiga. Empat *treatment recommendation* yang ditujukan untuk Jokowi adalah yaitu keluarkan kebijakan moratorium untuk perusahaan tambang, tinjau ulang pembangunan pabrik semen beserta mendengarkan aspirasi perempuan Kendeng, bersikap tegas dengan hentikan pendirian pabrik semen di Kendeng, dan gunakan kapasitas sebagai presiden untuk memanusiakan manusia terutama masyarakat Kendeng, sedangkan tiga *treatment recommendation* untuk pemerintah pusat adalah hentikan pendirian pabrik semen di Kendeng, cermat dalam mengeluarkan izin lingkungan dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang independent dan evaluasi lebih hati-hati terhadap rencana pendirian pabrik tambang.

Banyaknya *treatment recommendation* yang ditujukan untuk presiden dan pemerintah pusat menunjukkan bahwa pihak pemerintah pusat menjadi pihak yang paling banyak tuntutananya dalam *press release* JMPPK, hal ini berbeda dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Meskipun *treatment recommendation* yang ditujukan untuknya disebutkan dalam enam *press release* yang berbeda, tetapi *treatment recommendation* yang ditujukan untuk Gubernur Jawa Tengah tersebut hanya satu.

C. Berita Kompas.com

Jumlah berita dari www.kompas.com yang dianalisis berjumlah delapan belas sesuai dengan periode waktu yang ditetapkan peneliti yaitu Oktober 2014 sampai Desember 2014 dan Oktober 2016 sampai Maret 2017. Dari delapan belas berita tersebut terdiri dari tiga berita yang keluar pada tahun 2014, tiga berita yang keluar pada tahun 2016, dan dua belas berita yang keluar pada tahun 2017.

Berdasarkan hasil analisis framing berita www.kompas.com pada konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng, terdapat *sepuluh* berita pro pembangunan semen, *tujuh* berita kontra pembangunan semen dan *satu* berita yang memiliki keberpihakan tidak jelas. Keberpihakan tidak jelas ialah berita-berita yang tidak jelas menggambarkan keberpihakannya apakah berita tersebut mendukung pabrik semen atau menolak pabrik semen. Ketidakjelasan ini bisa terjadi karena dua hal, *pertama* tidak ditemukannya unsur-unsur keberpihakan dalam beritanya, *kedua*, berita tersebut justru memiliki dua unsur keberpihakannya, baik mendukung pabrik semen atau menolak pabrik semen, sehingga berita tersebut mengandung unsur keberpihakan pro pembangunan semen dan kontra pembangunan semen.

Tabel 3. 7

Keberpihakan Kompas.com pada Pemberitaan Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah

Tanggal	Judul Berita	Keberpihakan
05 Nov 2014	Aktivis Gelar Aksi Tutup Mulut Desak Batalkan Izin Pabrik Semen di Rembang	Kontra Pembangunan Semen
06 Nov 2014	Walhi: Pabrik Semen Ancam 607.198 Warga di Rembang	Kontra Pembangunan Semen
26 Nov 2014	Tolak Pabrik Semen, Ibu-ibu di Rembang Blokade Jalan Selama 160 Hari	Kontra Pembangunan Semen
14 Okt 2016	Warga Protes Putusan Peninjauan Kembali Pabrik Semen di Rembang	Pro Pembangunan Semen
20 Des 2016	Terkait Pabrik Semen, Ganjar Pertemukan Dua Kelompok Warga Rembang	Pro Pembangunan Semen
22 Des 2016	Dukung Pabrik Semen di Rembang, Mbah Moen Siap Temui Jokowi	Pro Pembangunan Semen

17 Jan 2017	SK Pencabutan Pabrik Semen di Rembang Dianggap Multitafsir	Kontra Pembangunan Semen
10 Feb 2017	Tak Puas, Warga Rembang Tutup Akses ke Pabrik Semen Indonesia	Kontra Pembangunan Semen
21 Feb 2017	Gubernur Jateng Lakukan Diskresi Demi Kelanjutan Pabrik Semen Rembang	Pro Pembangunan Semen
24 Feb 2017	Ini Rincian Izin Lingkungan Terbaru untuk PT Semen Indonesia	Pro Pembangunan Semen
24 Feb 2017	Dapat Izin Tambang Baru, Ini yang Dilakukan Semen Indonesia	Pro Pembangunan Semen
03 Mar 2017	Tinjau Pabrik Semen di Rembang, Kapolda Jateng Minta Warga Tidak Mudah Terprovokasi	Pro Pembangunan Semen
08 Mar 2017	Tokoh Samin Komentari Aksi Demo Menolak Pabrik Semen	Pro Pembangunan Semen
13 Mar 2017	Petani Kendeng Enggan Buka Belunggu Semen di Kaki Sebelum Bertemu Jokowi	Kontra Pembangunan Semen
17 Mar 2017	Menteri BUMN Tinjau Pendirian Pabrik Semen Rembang	Pro Pembangunan Semen
20 Mar 2017	Apa Sikap Presiden soal Penolakan Pabrik Semen di Kendeng?	Keberpihakan Tidak Jelas
23 Mar 2017	Air Mata Petani Kendeng dan Prinsip "Sedulur Sikep" Menjaga Ibu Bumi	Kontra Pembangunan Semen
24 Mar 2017	Ketua MPR Desak Pemerintah Tuntaskan Kisruh Pabrik Semen Rembang	Pro Pembangunan Semen

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa berita yang pro terhadap pembangunan pabrik semen di Kendeng berjumlah sepuluh, berita yang kontra berjumlah tujuh, dan satu berita memiliki keberpihakan yang tidak jelas. Jika melihat bagaimana sikap www.kompas.com pada konflik pembangunan pabrik semen di

Kendeng berdasarkan jumlah berita yang pro dan kontra, maka akan banyak yang mengatakan bahwa www.kompas.com mendukung pembangunan pabrik semen di Kendeng. Tetapi mengatakan www.kompas.com mendukung pabrik semen atau tidak bisa secara sembarangan hanya dengan melihat jumlah berita yang pro dan kontra terhadap pembangunan pabrik semen di Kendeng. Sebab, masih ada indikator lain yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana keberpihakan www.kompas.com terhadap konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng, yaitu dengan membedah berita-berita www.kompas.com dengan menggunakan elemen-elemen analisis framing model Robert N. Entman. Berikut rincian pemaparan berita-berita www.kompas.com per tiap elemen.

1. *Define Problems*

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa www.kompas.com memiliki tiga keberpihakan yang berbeda, yaitu pro pembangunan semen, kontra pembangunan semen, dan keberpihakan tidak jelas. Ketiga keberpihakan tersebut mengambil sudut pandang yang berbeda sehingga menghasilkan bingkai yang berbeda.

Sebuah berita dikatakan merupakan pro pembangunan semen apabila isi berita tersebut maupun unsur-unsur dalam berita tersebut merujuk pada dukungan untuk menyetujui pembangunan pabrik semen. Begitu pula dengan berita-berita yang dikatakan kontra pembangunan semen karena isi berita dan unsur-unsur dalam berita tersebut merujuk pada sikap menolak membangun pabrik semen.

Pro Pembangunan Semen

Pada berita-berita yang pro pembangunan semen, secara garis besar ada *tiga* hal yang dijadikan fokus dalam berita-berita tersebut, yaitu izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia, pernyataan tokoh, dan masyarakat Rembang mendukung pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Dengan ketiga fokus tersebut, www.kompas.com pada berita-berita yang pro terhadap pembangunan

semen di Rembang membingkai kasus konflik pembangunan pabrik semen di Rembang dalam tiga bingkai, yaitu pembangunan pabrik semen di Rembang sudah semestinya didukung karena PT. Semen Indonesia *mendapatkan izin baru* untuk pabrik semen di Rembang, pembangunan pabrik semen harus didukung karena *tokoh-tokoh penting mendukung*, dan bingkai bahwa pembangunan pabrik semen di Rembang harus diteruskan karena *masyarakat Rembang yang menginginkannya*.

Tabel 3. 8

Fokus Bingkai Berita Pro Pembangunan Pabrik Semen
www.kompas.com

Judul	<i>Define Problems</i>	Fokus Bingkai
Warga Protes Putusan Peninjauan Kembali Pabrik Semen di Rembang	Masyarakat Rembang tidak terima dengan hasil putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa izin pabrik semen PT. Semen Indonesia dicabut.	Masyarakat Rembang mendukung pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah.
Terkait Pabrik Semen, Ganjar Pertemukan Dua Kelompok Warga Rembang	Klarifikasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait putusan MA bahwa pabrik PT. Semen Indonesia di Rembang tidak ditutup, hanya dicabut izin lingkungannya.	Izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia
Dukung Pabrik Semen di Rembang, Mbah Moen Siap Temui Jokowi	KH Maimoen Zubair mendukung pendirian pabrik semen di Rembang.	Pernyataan tokoh
Gubernur Jateng Lakukan Diskresi Demi Kelanjutan Pabrik Semen Rembang	Gubernur Jawa Tengah lakukan diskresi sebagai tindak lanjut pasca pembatalan izin PT. Semen Indonesia oleh MA.	Izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia

Ini Rincian Izin Lingkungan Terbaru untuk PT Semen Indonesia	PT. Semen Indonesia mendapat izin lingkungan baru.	Izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia
Dapat Izin Tambang Baru, Ini yang Dilakukan Semen Indonesia	Komitmen PT. Semen Indonesia setelah mendapatkan izin lingkungan baru.	Izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia
Tinjau Pabrik Semen di Rembang, Kapolda Jateng Minta Warga Tidak Mudah Terprovokasi	Polda pabrik semen beroperasi di Rembang dan melakukan upaya untuk mengurangi ketegangan konflik pembangunan pabrik semen di Rembang.	Pernyataan tokoh
Tokoh Samin Komentari Aksi Demo Menolak Pabrik Semen	Warga Samin tidak menolak pembangunan pabrik semen.	Pernyataan tokoh
Menteri BUMN Tinjau Pendirian Pabrik Semen Rembang	Menteri BUMN meyakinkan masyarakat Rembang bahwa PT. Semen Indonesia berpihak pada masyarakat Rembang.	Pernyataan tokoh
Ketua MPR Desak Pemerintah Tuntaskan Kisruh Pabrik Semen Rembang	Saran Ketua MPR untuk menyelesaikan konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, yaitu memberikan kompensasi pada masyarakat yang terdampak pabrik semen.	Pernyataan tokoh

Berdasarkan tabel di atas, dari sepuluh berita yang pro pembangunan semen, *lima* berita memfokuskan bingkai pada pernyataan tokoh diluar pihak-pihak yang terlibat konflik, *empat* berita memfokuskan bingkai pada izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia, dan *satu* berita yang memfokuskan bingkai pada masyarakat Rembang yang mendukung pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa, Tengah. Hal ini menjadikan fokus pernyataan tokoh diluar pihak-pihak yang terlibat

konflik menjadi fokus bingkai yang paling banyak diangkat dalam berita pro pembangunan pabrik semen.

Pada berita yang memiliki fokus bingkai pada pernyataan tokoh diluar pihak-pihak yang berkonflik, ada tiga poin penting yang ditemukan, *pertama*, pernyataan tokoh yang diangkat menjadi berita adalah tokoh-tokoh penting yang memiliki pengaruh, di antaranya adalah K.H Maimoen Zubair yang merupakan salah satu tokoh ulama di Rembang, Polda Jawa Tengah, Menteri BUMN, Ketua MPR, dan perwakilan suku Samin. Kelima tokoh tersebut mempunyai pengaruh dalam masyarakat baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Dengan kelima tokoh yang menyatakan mendukung pembangunan pabrik semen di Rembang, hal ini membuat bingkai bahwa pembangunan pabrik semen di Rembang bukan sesuatu yang salah, dan bahkan malah mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar pabrik. Fokus bingkai yang muncul dalam berita-berita tersebut adalah *“orang-orang penting saja mendukung pembangunan pabrik semen berarti pembangunan pabrik semen bukan merupakan suatu masalah”*. Ditambah lagi orang-orang penting tersebut adalah orang yang memiliki pengaruh dan jabatan tinggi yang dapat meyakinkan orang awam untuk mendengarkan mereka. *Kedua*, pada tokoh-tokoh yang mengungkapkan mendukung pembangunan pabrik semen, ada dua pernyataan mendukung yang merupakan pernyataan *“mendukung bersyarat”*. Mendukung bersyarat maksudnya adalah tokoh tersebut mendukung pembangunan pabrik semen asalkan memenuhi *“syarat”* tertentu. Jenis pernyataan mendukung bersyarat ini terdapat pada pernyataan Ketua MPR dan pernyataan Menteri BUMN. Kedua pernyataan tersebut memberikan *“syarat”* yang berbeda untuk mendukung pembangunan pabrik semen di Rembang. Ketua MPR misalnya, mendukung pembangunan pabrik semen di Rembang asalkan pemerintah memberikan kompensasi yang layak untuk warga Kendeng. Lalu

Menteri BUMN akan mendukung pembangunan pabrik semen di Rembang asalkan PT. Semen Indonesia melaksanakan janjinya untuk membangun tempat penampungan air.

“Kalau tempat lahan untuk hidup dan mata pencaharian mereka hilang, harus ada kompensasi yang diberikan secara menyeluruh. Seperti pendidikan anak-anak mereka, pembangunan sumber daya manusianya dan keberlangsungan kehidupan mereka.”

(Berita www.kompas.com , “Ketua MPR Desak Pemerintah Tuntaskan Kisruh Pabrik Semen Rembang”, 24 Maret 2017)

“Rini juga memerintahkan kepada perseroan untuk menuntaskan pembangunan tempat penampungan air atau di tingkat kecamatan di Rembang. Dia minta warga melaporkan kepada dirinya terkait janji dari perseroan itu.”

(Berita www.kompas.com , “Menteri BUMN Tinjau Pendirian Pabrik Semen Rembang”, 17 Maret 2017)

Ketiga, selain pernyataan mendukung bersyarat, ada pula pernyataan mendukung yang merupakan pernyataan “tidak keberatan”. Pernyataan tidak keberatan adalah pernyataan tokoh yang tidak masalah terhadap pembangunan pabrik semen di Rembang. Perbedaan pernyataan ini dengan pernyataan mendukung lainnya adalah alasan mendukungnya. Pernyataan mendukung “tidak keberatan” tidak memiliki alasan tertentu untuk mendukung sesuatu, hanya membolehkan hal tersebut. Jenis pernyataan ini adalah pernyataan dari tokoh Samin. Tokoh Samin tersebut tidak mendukung pembangunan pabrik semen seperti halnya pihak lain dengan alasan kesejahteraan maupun yang lainnya, tetapi alasan tokoh Samin mendukung pabrik semen tersebut adalah hanya sekedar alasan membolehkan saja, ditambah lagi tokoh Samin tersebut merasa bahwa mereka tidak mempunyai hak untuk bersikap dalam konflik pembangunan pabrik

semen tersebut, sehingga mereka tidak masalah dengan adanya pembangunan pabrik semen di Rembang.

“Kita tidak menolak atau meminta, sebab kita tidak punya hak di situ. Yang penting tidak mengganggu,” ujar Maniyo.”

(Berita www.kompas.com , “Tokoh Samin Komentari Aksi Demo Menolak Pabrik Semen”, 08 Maret 2017)

Fokus bingkai selanjutnya yang terdapat berita-berita yang pro pembangunan semen adalah fokus izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia, di mana terdapat empat berita yang fokus pada hal tersebut. Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa PT. Semen Indonesia kembali mendapatkan izin lingkungan baru untuk pabrik semen di Rembang pasca Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa izin pabrik semen tersebut dicabut. Izin lingkungan tersebut didapatkan melalui Keputusan Gubernur nomor 660.1/0493 tahun 2017 pada tanggal 23 Februari 2017 berdasarkan sidang addendum Amdal pada 2 Februari 2017, di mana sidang tersebut dihadiri oleh pakar, pemerintah, akademisi, perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan perwakilan masyarakat. Bila melihat pemaparan mengenai proses diterbitkannya izin lingkungan baru tersebut, alasan mengapa izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia dijadikan fokus bingkai pada berita-berita pro pembangunan semen adalah karena sidang addendum amdal yang merupakan dasar dari diterbitkannya izin lingkungan tersebut dihadiri oleh perwakilan masyarakat. Dengan adanya perwakilan masyarakat yang hadir pada sidang tersebut, mengisyaratkan bahwa masyarakat akhirnya menyetujui pembangunan pabrik semen tersebut sehingga pabrik semen PT. Semen Indonesia di Rembang dapat memperoleh izin kembali. Selain itu, addendum sidang amdal pada 2 Februari 2017 disebutkan dalam empat berita yang memiliki fokus bingkai izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia. Hal ini menunjukkan

bahwa sidang addendum tersebut dijadikan salah satu argumentasi penguat *define problems* pada berita-berita www.kompas.com yang pro terhadap pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah.

Lalu, ada satu berita yang memfokuskan pada masyarakat Rembang yang mendukung pembangunan pabrik semen di Rembang. Berita tersebut berjudul “*Warga Protes Putusan Peninjauan Kembali Pabrik Semen di Rembang*”. Berita tersebut memaparkan bagaimana masyarakat Rembang tidak terima dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa izin pabrik semen di Rembang dicabut. Alasan mengapa masyarakat Rembang tidak terima dengan keputusan tersebut adalah karena pabrik semen tersebut menjadi harapan untuk mengangkat perekonomian desa.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa fokus bingkai pada berita-berita pro pembangunan semen lebih banyak diambil dari sudut pandang bukan dari masyarakat Rembang, melainkan di luar masyarakat Rembang seperti pernyataan tokoh maupun hal yang bersifat abstrak seperti izin lingkungan. Hanya satu berita yang menggunakan fokus bingkai pada masyarakat Rembang yang mendukung pembangunan pabrik semen di Rembang menunjukkan bahwa fokus bingkai pada masyarakat Rembang untuk berita pro pembangunan semen tidak cukup kuat untuk membentuk bingkai mendukung pembangunan pabrik semen.

Kontra Pembangunan Semen

Pada berita-berita yang kontra pembangunan pabrik semen, konflik pembangunan pabrik semen di Rembang difokuskan pada dua hal, yaitu aksi masyarakat Rembang untuk menolak pembangunan pabrik semen dan kebijakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang kembali menerbitkan izin lingkungan baru untuk PT. Semen Indonesia. Kedua fokus tersebut membingkai konflik pembangunan pabrik semen di Rembang sebagai, *pertama*, aksi penolakan pembangunan pabrik semen

di Rembang merupakan aksi perjuangan masyarakat Rembang untuk menjaga kelestarian alam. *Kedua*, kebijakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait izin lingkungan PT. Semen Indonesia dibingkai sebagai kebijakan pemerintah yang salah.

Tabel 3. 9

Fokus Bingkai Berita Kontra Pembangunan Pabrik Semen

www.kompas.com

Judul	<i>Define Problems</i>	Fokus Bingkai
Aktivis Gelar Aksi Tutup Mulut Desak Batalkan Izin Pabrik Semen di Rembang	Aksi tutup mulut aktivis lingkungan sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan pabrik semen di Rembang.	Aksi menolak pabrik semen
Walhi: Pabrik Semen Ancam 607.198 Warga di Rembang	Protes Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terhadap SK Gubernur Jawa Tengah terkait izin pertambangan PT. Semen Indonesia.	Aksi menolak pabrik semen
Tolak Pabrik Semen, Ibu-ibu di Rembang Blokade Jalan Selama 160 Hari	Blokade jalan masuk menuju pembangunan pabrik semen sebagai bentuk aksi penolakan ibu-ibu masyarakat Kendeng terhadap pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang.	Aksi menolak pabrik semen
SK Pencabutan Pabrik Semen di Rembang Dianggap Multitafsir	Gubernur Jawa Tengah dianggap memberi peluang pada PT. Semen Indonesia agar pabrik semen di Rembang tetap berjalan.	Kebijakan Gubernur Jawa Tengah
Tak Puas, Warga Rembang Tutup Akses ke Pabrik Semen Indonesia	Penutupan akses ke pabrik semen PT. Semen Indonesia sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Rembang terhadap pemerintah.	Aksi menolak pabrik semen
Petani Kendeng Enggan Buka Belunggu Semen di Kaki Sebelum	Petani Kendeng meminta kepada presiden Jokowi untuk mencabut izin lingkungan PT. Semen Indonesia yang dikeluarkan oleh	Aksi menolak pabrik semen

Bertemu Jokowi	Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.	
Air Mata Petani Kendeng dan Prinsip "Sedulur Sikep" Menjaga Ibu Bumi	Kekecewaan masyarakat Kendeng pada presiden Jokowi yang membiarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan izin baru untuk PT. Semen Indonesia.	Kebijakan Gubernur Jawa Tengah

Berdasarkan tabel di atas, dari tujuh berita www.kompas.com yang kontra terhadap pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah, *lima* berita memiliki fokus bingkai pada aksi menolak pembangunan pabrik semen di Rembang sekaligus menjadi fokus bingkai yang paling banyak diangkat dalam berita-berita www.kompas.com yang memiliki keberpihakan kontra pembangunan semen. Sedangkan *dua* berita lainnya fokus pada kebijakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait izin lingkungan PT. Semen Indonesia.

Lebih dari separuh berita www.kompas.com yang kontra terhadap pembangunan pabrik semen di Rembang memfokuskan bingkai pada aksi penolakan pembangunan pabrik semen di Kendeng yang dilakukan oleh masyarakat Rembang yang mayoritas adalah petani. Aksi penolakan ini dibingkai sebagai aksi perjuangan masyarakat kecil yang melindungi kelestarian alam dari pihak-pihak yang merusaknya. Hal ini terlihat dari bagaimana berita mengenai aksi penolakan pembangunan pabrik dipaparkan. Pemaparan tersebut terlihat dalam dua hal, *pertama*, penggunaan kata-kata atau diksi yang menunjukkan keberpihakan pada masyarakat Rembang atau aksi penolakan, seperti kata “perjuangan”, “warga terancam”, dan lain-lain. *Kedua*, aksi penolakan tersebut dipaparkan secara detail beserta alasan menolak pembangunan pabrik semen tersebut.

“Selain itu, aksi ini juga sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan warga Rembang yang menolak pendirian pabrik semen karena dianggap akan sangat merugikan warga.”

(Berita www.kompas.com , “Aktivis Gelar Aksi Tutup Mulut Desak Batalkan Izin Pabrik Semen di Rembang”, 05 November 2014)

“...Blokade tersebut adalah wujud penolakan mereka yang selama ini dilakukan tidak direspons oleh pemerintah dan PT SI. Sudah lebih dari 160 hari ibu-ibu menginap di tenda penolakan tapi pembangunan dengan alat berat terus dilakukan oleh PT SI.

Masyarakat yang kebanyakan ibu-ibu memblokade jalan dengan cara menghadang jalan memakai poster bertuliskan “jalan ditutup warga”. Penolakan warga tersebut karena lokasi pabrik dan lokasi eksploitasi penambangannya di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih. Kawasan tersebut merupakan kawasan yang memiliki fungsi penyimpan cadangan air.

Blokade warga akan terus dilakukan selama pemerintah dan PT SI tidak menghormati proses hukum yang ada di PTUN Semarang dengan menghentikan pembangunan pabrik dan eksploitasi kawasan resapan air Cekungan Air Tanah Watuputih...”

(Berita www.kompas.com , “Tolak Pabrik Semen, Ibu-ibu di Rembang Blokade Jalan Selama 160 Hari”, 26 November 2014)

Bentuk aksi penolakan yang diangkat www.kompas.com sebagai berita berbeda-beda. Bentuk aksi penolakan yang diangkat dalam berita adalah aksi tutup mulut oleh sejumlah aktivis lingkungan, blokade jalan masuk menuju lokasi pembangunan pabrik semen, aksi pengecoran kaki dengan semen, dan menggugat izin lingkungan PT. Semen Indonesia ke Pengadilan Tata Negara Usaha (PTUN) Semarang. Semua aksi tersebut dipaparkan secara detail oleh www.kompas.com .

Fokus bingkai selanjutnya yang terdapat pada berita-berita www.kompas.com yang kontra terhadap pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah adalah kebijakan Gubernur Jawa

Tengah Ganjar Pranowo terkait izin lingkungan PT. Semen Indonesia. Kebijakan Gubernur Jawa Tengah terkait izin pabrik semen tersebut dibingkai sebagai kebijakan yang salah di mana kebijakan tersebut dianggap tidak berpihak pada masyarakat Rembang. Hal ini terlihat dari pernyataan atau statement narasumber yang dikutip oleh www.kompas.com merupakan pernyataan yang mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

“Dia mengeluhkan sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menerbitkan izin baru bagi PT Semen Indonesia untuk melakukan operasi penambangan di wilayah pegunungan Kendeng.”

(Berita www.kompas.com , “Air Mata Petani Kendeng dan Prinsip “Sedulur Sikep” Menjaga Ibu Bumi”, 23 Maret 2017)

“Pernyataan Ganjar jelas bersayap, seolah sebagai Gubernur sudah mematuhi putusan Mahkamah Agung, tetapi terus menyusun strategi dan bersiasat agar pembangunan pabrik PT Semen Indonesia terus berjalan. Di sisi lain, ia kemudian mengarahkan bahwa 'bola panasnya' ke pihak perusahaan, dengan tetap memberi ruang kepada perusahaan untuk melengkapi persyaratan dokumen setelah keputusan ini keluar,” kata Dewi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/1/2017).”

(Berita www.kompas.com , “SK Pencabutan Pabrik Semen di Rembang Dianggap Multitafsir”, 17 Januari 2017)

Pada dua berita yang memiliki fokus bingkai pada kebijakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, ada dua kebijakan yang diangkat dalam berita yang dibingkai sebagai kebijakan yang salah, yaitu kebijakan Gubernur Jawa Tengah yang menerbitkan SK Gubernur Nomor 6601/4 tahun 2017 dan Keputusan Gubernur Nomor 660.1/6

tahun 2017. SK Gubernur Nomor 6601/4 tahun 2017 dibingkai negatif karena SK tersebut dianggap multitafsir, meskipun SK tersebut menyatakan bahwa izin lingkungan PT. Semen Indonesia dicabut, namun pada poin selanjutnya SK tersebut memerintahkan PT. Semen Indonesia untuk memperbaiki Amdal. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tetap mengupayakan agar pabrik semen di Rembang tetap berjalan, sebab poin lainnya pada SK tersebut memberi kesempatan kedua pada PT. Semen Indonesia untuk memperbaiki Amdal agar PT. Semen Indonesia memperoleh kembali izin untuk membangun pabrik semen di Rembang pasca putusan MA menyatakan izin lingkungan pabrik semen PT. Semen Indonesia dicabut. Sedangkan kebijakan Gubernur Jawa Tengah selanjutnya yaitu Keputusan Gubernur Nomor 660.1/6 tahun 2017 juga dibingkai sebagai kebijakan yang salah karena dianggap bertentangan dengan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 99/PK/TUN/2016 yang menyatakan bahwa izin lingkungan PT. Semen Indonesia dicabut, sedangkan keputusan Gubernur tersebut menyatakan bahwa pabrik semen di Rembang boleh beroperasi kembali.

Berbeda dengan berita-berita www.kompas.com yang memiliki keberpihakan pro pembangunan semen, fokus bingkai pemberitaan yang memiliki keberpihakan kontra justru lebih banyak membingkai dari sudut pandang masyarakat Rembang bahkan lebih dari separuh berita yang kontra terhadap pembangunan semen membingkai konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah dari sudut pandang masyarakat Rembang. Hal ini menunjukkan bahwa fokus bingkai pada masyarakat Rembang memiliki kecenderungan yang lebih kuat pada berita-berita yang memiliki keberpihakan kontra pembangunan semen.

Keberpihakan Tidak Jelas

Pada berita-berita www.kompas.com mengenai konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, ada satu berita yang memiliki keberpihakan tidak jelas, yaitu berita yang berjudul “*Apa Sikap Presiden soal Penolakan Pabrik Semen di Rembang?*”. Sesuai dengan berita ini memaparkan bagaimana sikap Presiden Indonesia, yaitu Jokowi terkait konflik pembangunan pabrik semen di Rembang. Menurut berita tersebut, sikap yang diambil Jokowi adalah menunggu hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang di mana akan rampung pada April 2017. Ada tiga poin yang menjelaskan mengapa berita ini dikatakan memiliki keberpihakan tidak jelas, *pertama*, dari narasumber berita sendiri, narasumber berita yang dikutip dalam berita ini memang memiliki sikap atau keberpihakan yang tidak jelas antara pro atau kontra. *Kedua*, dari bagaimana berita dipaparkan. Berita ini tidak menggunakan diksi atau pilihan kata yang menunjukkan keberpihakan, sehingga keberpihakan berita menjadi tidak jelas. *Ketiga*, berita ini hanya bersifat informasi atau hanya sekedar memaparkan atau mengabarkan bagaimana sikap presiden yang juga kebetulan tidak memiliki keberpihakan yang jelas terkait kasus konflik tambang tersebut.

2. *Diagnose Causes*

Pada berita-berita yang pro dan kontra terhadap pembangunan semen, kedua keberpihakan tersebut tetap memiliki *diagnoses causes* atau hal yang dianggap menjadi penyebab masalah. Tetapi, fokus atau hal apa yang dianggap menjadi penyebab masalah berbeda-beda. Pada berita-berita yang memiliki keberpihakan pro pembangunan semen, tiga poin penting yang perlu dicatat ialah *pertama*, hal yang dianggap menjadi penyebab masalah diwakili dengan kata tanya apa karena yang dianggap menjadi penyebab masalah dalam berita-berita pro pembangunan semen adalah sebuah peristiwa, atau kejadian. *Kedua*, *diagnoses causes* pada berita-berita pro pembangunan semen tidak bisa

diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokan karena hal yang diangkat menjadi penyebab masalah berbeda tiap beritanya. Lalu *ketiga*, berkaitan dengan dua poin sebelumnya, meskipun *diagnoses causes* pada berita-berita pro pembangunan semen tidak bisa diklasifikasikan, tetapi semua berita-berita pro pembangunan tersebut memiliki jenis *diagnoses causes* sebab akibat, di mana *diagnoses causes* menjadi penyebab dari munculnya berita-berita tersebut. Sedangkan pada berita-berita yang memiliki keberpihakan kontra, yang diangkat menjadi *diagnoses causes* diwakili kata tanya siapa, sehingga dapat dilihat bahwa berita-berita kontra pembangunan semen memfokuskan penyebab masalah pada orang atau “aktor”.

Pro Pembangunan Semen

Pada berita-berita www.kompas.com yang memiliki keberpihakan pro pembangunan semen, *diagnoses causes* atau penyebab masalah pada berita-berita tersebut tidak seragam, tidak seragam yang dimaksud adalah bahwa hal-hal yang dianggap menjadi penyebab masalah tidak bisa diklasifikasikan atau dikelompokkan karena hal yang dianggap menjadi penyebab masalah berbeda-beda jenisnya, bahkan untuk berita yang memiliki fokus bingkai yang sama. Contoh pada berita yang berjudul “*Terkait Pabrik Semen, Ganjar Pertemukan Dua Kelompok Warga Rembang*” dan “*Gubernur Jateng Lakukan Diskresi Demi Kelanjutan Pabrik Semen Rembang*”, kedua berita tersebut sama-sama memfokuskan bingkai pada izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, tetapi hal yang diangkat menjadi diagnose cause atau penyebab masalah dalam kedua berita tersebut berbeda, pada berita yang berjudul “*Terkait Pabrik Semen, Ganjar Pertemukan Dua Kelompok Warga Rembang*”, hal yang dijadikan penyebab masalah adalah kekecewaan masyarakat Rembang kepada Gubernur Jawa Tengah tersebut karena melakukan upaya agar pabrik semen di Rembang tetap terus berjalan. Sedangkan pada berita yang berjudul “*Gubernur Jateng Lakukan Diskresi Demi Kelanjutan*

Pabrik Semen Rembang”, hal yang menjadi penyebab masalah adalah putusan MA Nomor 99 PK/TUN/2016 hanya menjelaskan bahwa izin lingkungan PT. Semen Indonesia untuk pabrik di Rembang dicabut, tetapi putusan tersebut tidak menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah pasca putusan tersebut dikeluarkan.

Walaupun semua penyebab masalah dalam berita-berita pro pembangunan semen tidak bisa dikelompokkan karena perbedaan aspek yang menjadi penyebab masalah, tetapi *diagnoses causes* atau penyebab masalah dalam berita-berita pro pembangunan semen memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama menggunakan jenis *diagnoses causes* sebab akibat yang berhubungan dengan judul tiap berita tersebut, di mana *diagnoses causes* adalah penyebab dari munculnya berita-berita dengan berbagai judul tersebut. Sebagai contoh, pada berita yang berjudul “*Tokoh Samin Komentari Aksi Demo Menolak Pabrik Semen*”, berita ini memaparkan bagaimana pandangan tokoh-tokoh pemuka suku Samin terkait konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, *diagnoses causes* atau penyebab masalah mengapa tokoh pemuka suku Samin tersebut mengomentari konflik pembangunan pabrik semen di Rembang adalah karena munculnya opini bahwa suku Samin juga menolak pembangunan pabrik semen di Rembang lantaran saat melakukan aksi penolakan, masyarakat Rembang yang melakukan aksi tersebut menggunakan pakaian serba hitam di mana pakaian serba hitam tersebut adalah identitas suku Samin. Hubungan sebab akibat antara *diagnoses causes* dengan isi berita yang diangkat juga terdapat pada berita-berita pro pembangunan semen lainnya, seperti yang dipaparkan dalam tabel di bawah.

Tabel 3. 10

***Diagnoses Causes* pada Berita Pro Pembangunan Semen**
www.kompas.com

Judul	<i>Diagnoses Causes</i>
Warga Protes Putusan Peninjauan Kembali Pabrik Semen di Rembang	Putusan MA Nomor 99 PK/TUN/2016 yang menyatakan bahwa izin lingkungan PT. Semen Indonesia dicabut.
Terkait Pabrik Semen, Ganjar Pertemukan Dua Kelompok Warga Rembang	Kekecewaan masyarakat Rembang pada keputusan Ganjar Pranowo yang menerbitkan addendum terkait izin lingkungan PT. Semen Indonesia.
Dukung Pabrik Semen di Rembang, Mbah Moen Siap Temui Jokowi	Tidak ada.
Gubernur Jateng Lakukan Diskresi Demi Kelanjutan Pabrik Semen Rembang	Putusan MA tidak menjelaskan apa yang harus dilakukan pemerintah setelah putusan MA diberlakukan.
Ini Rincian Izin Lingkungan Terbaru untuk PT Semen Indonesia	Diskresi atau kebijakan khusus Gubernur Jawa Tengah pasca izin lingkungan PT. Semen Indonesia dicabut oleh Mahkamah Agung.
Dapat Izin Tambang Baru, Ini yang Dilakukan Semen Indonesia	PT. Semen Indonesia memperoleh izin lingkungan baru untuk pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah.
Tinjau Pabrik Semen di Rembang, Kapolda Jateng Minta Warga Tidak Mudah Terprovokasi	Banyaknya rumor dan provokasi-provokasi mengenai pembangunan pabrik semen di Rembang yang membuat situasi memanas.
Tokoh Samin Komentari Aksi Demo Menolak Pabrik Semen	Masyarakat yang melakukan aksi penolakan pabrik menggunakan pakaian serba hitam yang merupakan identitas masyarakat Samin sehingga muncul opini bahwa masyarakat Samin juga turut menolak pembangunan pabrik semen di Rembang.
Menteri BUMN Tinjau Pendirian Pabrik Semen Rembang	Aksi demo menolak pabrik semen di Rembang yang dilakukan oleh masyarakat Rembang di depan Istana Negara Jakarta.

Ketua MPR Desak Pemerintah Tuntaskan Kisruh Pabrik Semen Rembang	Aksi cor kaki yang dilakukan para petani Kendeng yang dinilai berbahaya.
--	--

Kontra Pembangunan Semen

Berbeda dengan berita-berita pro pembangunan semen, berita-berita www.kompas.com yang kontra pembangunan semen justru memiliki keseragaman dalam apa yang menjadi penyebab masalah, bahkan berita-berita tersebut secara jelas menyebutkan siapa penyebab masalah atau yang dalam hal ini adalah “aktor”.

Pada berita-berita yang memiliki keberpihakan kontra pembangunan semen, secara garis besar ada dua pihak yang dianggap aktor atau penyebab masalah dalam berita-berita kontra pembangunan semen, yaitu pejabat publik dan PT. Semen Indonesia. Pada pihak pejabat publik, pejabat yang disebut sebagai “aktor” atau penyebab masalah diantaranya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Polda Jawa Tengah, dan pemerintah secara umum. Dari semua pejabat publik yang menjadi pelaku atau penyebab masalah dalam berita-berita kontra pembangunan semen, pejabat yang paling dianggap sangat bersalah adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hal ini terlihat dari banyaknya berita-berita www.kompas.com yang kontra pembangunan semen yang menjadikan Gubernur Jawa Tengah tersebut sebagai pelaku atau penyebab masalah dalam berita tersebut.

Tabel 3. 11

Pelaku dalam Berita Kontra Pembangunan Pabrik Semen
www.kompas.com

Judul	<i>Diagnoses Causes</i>	Pihak yang Disalahkan
Aktivis Gelar Aksi Tutup Mulut Desak Batalkan Izin Pabrik Semen di Rembang	PT. Semen Indonesia membangun pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah berpotensi merusak lingkungan.	PT. Semen Indonesia
Walhi: Pabrik Semen Ancam 607.198 Warga di Rembang	Gubernur Jawa Tengah menerbitkan SK Gubernur nomor 668.1/17/12 yang isinya adalah memberikan izin lingkungan PT. Semen Indonesia untuk beroperasi di Rembang.	Pejabat /Gubernur Jawa Tengah
Tolak Pabrik Semen, Ibu-ibu di Rembang Blokade Jalan Selama 160 Hari	Aksi penolakan pembangunan pabrik semen di Rembang yang tidak mendapat tanggapan dari pemerintah dan PT. Semen Indonesia.	PT. Semen Indonesia dan Pejabat/Pemerintah
SK Pencabutan Pabrik Semen di Rembang Dianggap Multitafsir	SK pencabutan izin pabrik semen di Rembang yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah dinilai memiliki penafsiran bercabang.	Pejabat/Gubernur Jawa Tengah
Tak Puas, Warga Rembang Tutup Akses ke Pabrik Semen Indonesia	Masyarakat Rembang yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah yang tetap mengizinkan pabrik semen di Rembang tetap beroperasi. Lalu ditambah dengan somasi masyarakat Rembang tidak ditanggapi oleh Gubernur Jawa Tengah dan Polda Jawa Tengah.	Pejabat/Gubernur Jawa Tengah dan Polda Jawa Tengah
Petani Kendeng Enggan Buka Belunggu Semen di Kaki	Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluarkan izin baru untuk PT. Semen	Pejabat/Gubernur Jawa Tengah

Sebelum Bertemu Jokowi	Indonesia di wilayah Kendeng.	
Air Mata Petani Kendeng dan Prinsip "Sedulur Sikep" Menjaga Ibu Bumi	Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerbitkan izin lingkungan baru untuk pabrik semen PT. Semen Indonesia di Kendeng, padahal putusan MA menyatakan izin lingkungan pabrik semen PT. Semen Indonesia dicabut.	Pejabat/Gubernur Jawa Tengah

Berdasarkan tabel di atas, terdapat *dua* berita yang menjadikan PT. Semen Indonesia sebagai pihak yang dianggap bersalah, kemudian terdapat *satu* berita yang menjadikan Polda Jawa Tengah sebagai pihak yang bersalah, dan *satu* berita yang menjadikan pemerintah secara umum sebagai pihak yang bersalah, sedangkan sisanya menjadikan Gubernur Jawa Tengah sebagai aktor atau pelaku dalam berita-berita kontra pembangunan semen. Hal ini menjadikan Gubernur Jawa Tengah tersebut sebagai pihak yang paling dianggap bersalah dalam berita www.kompas.com yang memiliki keberpihakan kontra pembangunan semen, bahkan dibandingkan dengan PT. Semen Indonesia yang merupakan pihak yang membangun pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah.

PT. Semen Indonesia dijadikan salah satu pihak yang paling bersalah tentu jelas dikarenakan keputusannya untuk membangun pabrik semen di pegunungan Kendeng yang merupakan kawasan Cekungan Air Tanah (CAT). Keputusan ini jelas mendapat penolakan karena akan berpotensi merusak lingkungan yang akhirnya menyebabkan bencana alam.

Pihak yang dianggap paling bersalah lainnya adalah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, bahkan dibandingkan dengan PT. Semen Indonesia, Gubernur tersebut menjadi pihak yang paling disalahkan karena *lima* dari tujuh berita yang kontra pembangunan semen

menjadikan Ganjar Pranowo sebagai “aktor” atau penyebab masalah. Alasan mengapa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dijadikan pihak yang paling bersalah adalah karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Ganjar Pranowo terkait konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak pada masyarakat Rembang karena tetap berupaya agar pembangunan pabrik semen di Kendeng tetap dilanjutkan.

3. *Moral Judgement*

Pada berita-berita www.kompas.com yang berbicara mengenai konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, baik pro yang pro pembangunan semen maupun yang kontra, semuanya tetap memiliki unsur *moral judgement* di dalamnya. *Moral judgement* ini menjadi argumentasi yang menjadi penguat aspek define problem. Dengan melihat unsur *moral judgement* dalam berita-berita konflik pembangunan semen di Rembang, maka akan ditemukan nilai apa atau hal apa yang diangkat dalam berita-berita tersebut untuk menunjukkan keberpihakannya, baik yang pro pembangunan semen, maupun yang kontra.

Pro Pembangunan Semen

Pada berita-berita yang pro pembangunan semen, argumentasi yang diangkat menjadi *moral judgement* beragam bahkan dalam satu berita bisa memiliki lebih dari satu *moral judgement*, tetapi secara keseluruhan terdapat dua *moral judgement* yang paling banyak digunakan dalam berita-berita pro pembangunan semen www.kompas.com, yaitu *izin lingkungan pabrik semen PT. Semen Indonesia telah disepakati bersama* dan *PT. Semen Indonesia adalah perusahaan yang baik*. Dari sepuluh berita pro pembangunan semen, *tiga* berita diantaranya menjadikan argumentasi izin lingkungan pabrik semen PT. Semen Indonesia telah disepakati bersama sebagai *moral judgement*, dan *empat* berita memiliki argumentasi *PT. Semen Indonesia adalah perusahaan*

yang baik. Sedangkan berita-berita lainnya masing-masing memiliki *moral judgement* yang berbeda-beda tetapi sama-sama menunjukkan bahwa berita-berita tersebut mendukung pembangunan pabrik semen.

Tabel 3. 12

Pokok Argumentasi *Moral Judgement* dalam Berita Pro Pembangunan Semen www.kompas.com

Judul	<i>Moral Judgement</i>	Pokok Argumentasi
Warga Protes Putusan Peninjauan Kembali Pabrik Semen di Rembang	Pabrik semen menjadi lahan harapan baru untuk mengangkat perekonomian desa.	PT. Semen Indonesia adalah <i>perusahaan yang baik</i> karena perusahaan miliknya dapat menjadi harapan untuk mengangkat perekonomian desa.
Terkait Pabrik Semen, Ganjar Pertemukan Dua Kelompok Warga Rembang	Hasil rapat pasca Putusan MA terkait izin pertambangan PT. Semen Indonesia telah disepakati bersama termasuk dari pihak penolak pabrik semen Rembang. Masyarakat penolak pabrik semen menyalahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo karena menerbitkan addenddum izin lingkungan PT. Semen Indonesia pasca Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan izin lingkungan perusahaan tambang tersebut dan menduga bahwa adanya tim kecil yang dibentuk untuk memastikan agar pabrik semen di Rembang tetap beroperasi. Pemaparan klaim bahwa 95 persen warga sekitar pabrik semen di Kendeng mendukung	Izin lingkungan PT. Semen Indonesia yang baru telah <i>disepakati bersama</i> termasuk dari pihak penolak pabrik semen Rembang. Ganjar Pranowo mempertemukan dua kelompok warga Rembang baik yang pro maupun kontra karena <i>beliau disalahkan</i> atas kebijakannya menerbitkan addenddum izin lingkungan PT. Semen Indonesia.

	keberadaan pabrik semen yang terdapat pada lima paragraf terakhir.	<i>Mayoritas warga sekitar pabrik semen di Kendeng mendukung pembangunan pabrik semen.</i>
Dukung Pabrik Semen di Rembang, Mbah Moen Siap Temui Jokowi	Mendukung pabrik semen di Rembang adalah bagian dari membela negara Indonesia karena PT. Semen Indonesia adalah perusahaan milik negara.	Mendukung pabrik semen di Rembang juga merupakan salah satu <i>upaya mencintai negara</i> Indonesia.
Gubernur Jateng Lakukan Diskresi Demi Kelanjutan Pabrik Semen Rembang	Kepala daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan diskresi yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merupakan <i>kewenangannya sebagai kepala daerah.</i>
Ini Rincian Izin Lingkungan Terbaru untuk PT Semen Indonesia	Pemaparan mengenai rincian izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia yang telah ditandatangani oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah pada paragraf kelima hingga paragraf ketujuh. Penerbitan izin lingkungan baru ini merupakan hasil kesepakatan dalam sidang addendum pada 2 Februari 2017 yang dihadiri perwakilan pakar, pemerintah, akademisi, perwakilan masyarakat, dan perwakilan LSM. Addendum yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merupakan diskresi atau kebijakan khusus yang dibuat oleh Gubernur	Izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia <i>telah mendapat persetujuan</i> dari kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di mana merupakan pihak yang memiliki wewenang terkait persoalan lingkungan. Izin lingkungan PT. Semen Indonesia yang baru <i>telah disepakati</i>

	<p>Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan beliau telah melaporkan diskresi atau kebijakan khusus yang dia buat kepada presiden Jokowi, baik sebelum maupun sesudah kebijakan itu dibuat.</p>	<p><i>bersama</i> berdasarkan hasil kesepakatan pada sidang addenddum.</p> <p>Kebijakan yang dikeluarkan Ganjar Pranowo sudah pasti <i>mendapat persetujuan dari presiden Jokowi karena beliau telah melaporkan diskresi tersebut</i> kepada presiden Jokowi.</p>
<p>Dapat Izin Tambang Baru, Ini yang Dilakukan Semen Indonesia</p>	<p>Pemaparan mengenai sosialisasi dan konsolidasi yang akan dilakukan oleh PT. Semen Indonesia yang terdapat pada paragraf ketiga hingga paragraf keempat.</p> <p>PT. Semen Indonesia mempunyai riwayat yang sangat baik dalam pengolahan lahan bekas tambang, hal tersebut dapat dilihat dari pabrik semen PT. Semen Indonesia yang ada di Tuban dan Gresik.</p> <p>Penerbitan izin lingkungan baru ini merupakan hasil kesepakatan dalam sidang addenddum pada 2 Febuari 2017 yang dihadiri perwakilan pakar, pemerintah, akademisi, perwakilan masyarakat, dan perwakilan LSM.</p>	<p>PT. Semen Indonesia adalah <i>perusahaan yang baik</i> karena berkomitmen untuk melakukan konsolidasi dan sosialisasi terkait pembangunan pabrik semen pada warga sekitar pabrik semen.</p> <p>PT. Semen Indonesia adalah <i>perusahaan yang baik</i> karena perusahaan tersebut memiliki riwayat yang sangat baik dalam pengolahan lahan bekas tambang.</p> <p>Izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia</p>

		merupakan <i>hasil kesepakatan bersama</i> dengan berbagai perwakilan terkait kasus tersebut.
Tinjau Pabrik Semen di Rembang, Kapolda Jateng Minta Warga Tidak Mudah Terprovokasi	PT. Semen Indonesia kooperatif dalam kasus konflik pembangunan pabrik semen tersebut karena PT. Semen Indonesia telah mengedepankan langkah-langkah hukum yang berjalan. Langkah pencegahan yang diambil Polres Rembang adalah memberikan informasi sebanyak-sebanyaknya kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi.	PT. Semen Indonesia adalah <i>perusahaan yang baik</i> karena perusahaan tersebut kooperatif dalam kasus konflik pembangunan pabrik semen di Rembang. Polres Rembang berupaya memberikan informasi sebanyak-banyaknya agar <i>menghindari munculnya berbagai provokasi</i> .
Tokoh Samin Komentari Aksi Demo Menolak Pabrik Semen	Salah satu ajaran Samin adalah dilarang untuk mengumbar suara, serta bertindak berlebihan dalam menyikapi satu persoalan, termasuk halnya aksi demo. Masyarakat Samin merasa tidak punya hak untuk bersuara terkait pembangunan pabrik semen di Kendeng. Pemaparan mengenai pernyataan dari JMPPK yang ditaruh di paragraf akhir pada berita (letak pernyataan ini menunjukkan bahwa berita ini pro pembangunan semen).	Ajaran Samin mengajarkan untuk <i>tidak bertindak berlebihan</i> dalam menyikapi persoalan dan suku Samin <i>tidak berhak bersuara</i> terkait konflik pabrik semen di Rembang.

Menteri BUMN Tinjau Pendirian Pabrik Semen Rembang	Pabrik yang ada di Rembang saat ini adalah uji coba dan pabrik ini diharapkan dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Rembang.	PT. Semen Indonesia adalah <i>perusahaan yang baik</i> karena adanya pabrik mereka dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Rembang.
Ketua MPR Desak Pemerintah Tuntaskan Kisruh Pabrik Semen Rembang	Pembangunan pabrik industri memiliki sejumlah konsekuensi salah satunya adalah persoalan lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat setempat pasca pembangunan pabrik. Oleh karena itu, masyarakat terdampak pabrik harus mendapatkan kompensasi yang layak. Pemerintah juga harus menemui peserta aksi cor kaki dengan semen dan mengakomodasi permintaan peserta aksi tersebut.	Pembangunan pabrik industri pertambangan memang <i>memiliki sejumlah konsekuensi</i> dan perusahaan serta harus <i>sudah mengantisipasi</i> hal tersebut.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa argumentasi yang paling banyak digunakan dalam *moral judgement* berita-berita pro pembangunan semen ialah bahwa izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia telah disepakati bersama dan PT. Semen Indonesia adalah perusahaan baik. Kedua argumentasi ini bahkan bisa disebutkan lebih dari sekali dalam satu berita yang menunjukkan bahwa kedua hal tersebut menjadi dasar utama mengapa harus menyetujui pembangunan pabrik semen.

Argumentasi bahwa izin lingkungan PT. Semen Indonesia telah disepakati bersama terdapat dalam tiga berita dari sepuluh berita www.kompas.com yang pro pembangunan semen di Rembang. Dengan dijadikannya argumentasi ini sebagai *moral judgement* yang paling banyak digunakan, seolah www.kompas.com ingin menekankan pada

pembaca bahwa “*tidak ada lagi alasan untuk menolak pembangunan pabrik semen di Rembang, karena soal izin lingkungan PT. Semen Indonesia telah mencapai kesepakatan bersama termasuk dari pihak penolak pabrik semen*”. Argumentasi ini seolah “menyentil” pihak yang menolak pembangunan pabrik semen bahwa pihak kontra pembangunan semen sudah semestinya suportif dan mematuhi hasil kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Apabila tetap menolak, berarti telah mengingkari kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Kesepakatan bersama yang dimaksud dalam berita ini adalah hasil sidang addendum pada 2 Februari 2017 yang dihadiri perwakilan pakar, pemerintah, akademisi, perwakilan masyarakat, dan perwakilan LSM, termasuk di dalamnya pihak penolak pembangunan pabrik semen, sehingga dengan hadirnya pihak kontra menandakan bahwa pihak kontra telah mengetahui hal tersebut dan menyetujuinya.

Argumentasi selanjutnya yang juga banyak dijadikan *moral judgement* adalah bahwa PT. Semen Indonesia adalah perusahaan yang baik, di mana argumentasi ini disebutkan dalam empat berita yang berbeda, bahkan terdapat satu berita yang menyebutkan “dua kebaikan” perusahaan tambang tersebut. Perusahaan baik di sini merujuk pada dua hal, yaitu manfaat dari adanya pabrik semen dari PT. Semen Indonesia dan PT. Semen Indonesia sebagai perusahaan yang bertanggung jawab. Kedua jenis “kebaikan” tersebut dipaparkan dalam contoh yang berbeda-beda tetapi memiliki maksud yang sama dalam tiap berita. Menurut www.kompas.com, kebaikan PT. Semen Indonesia dari sisi manfaat pabrik yang dimilikinya adalah pabrik tersebut dapat menjadi harapan untuk mengangkat perekonomian desa dan dapat mendatangkan kesejahteraan. Sedangkan PT. Semen Indonesia dianggap sebagai perusahaan yang bertanggung jawab karena beberapa hal, yaitu perusahaan tersebut mau berkomitmen untuk lebih dekat dengan masyarakat Rembang dengan berbagai upaya yang dilakukannya diantaranya yaitu melakukan sosialisasi dan konsolidasi

pada masyarakat Rembang, PT. Semen Indonesia memiliki riwayat yang sangat baik dalam mengelola lahan bekas tambang sehingga masyarakat Rembang tidak perlu takut soal kerusakan lingkungan, dan PT. Semen Indonesia adalah perusahaan yang bertanggung jawab karena perusahaan tersebut kooperatif dalam menjalani langkah-langkah hukum pada masa konflik pembangunan pabrik semen di Rembang. Dengan berbagai “kebaikan” yang dimiliki PT. Semen Indonesia, sudah seharusnya pembangunan pabrik di Rembang didukung dan masyarakat Rembang tidak perlu khawatir dengan PT. Semen Indonesia karena PT. Semen Indonesia adalah perusahaan besar yang bertanggung jawab menurut berita-berita pro pembangunan pabrik semen www.kompas.com.

Selain adanya berbagai argumentasi yang dijadikan *moral judgement*, keberpihakan pro pembangunan semen juga dapat dilihat dari di mana pernyataan atau pemaparan yang berkaitan dengan kontra pembangunan semen diletakan, apakah ditaruh di bagian awal pada pembuka atau di bagian akhir pada penutup. Letak pernyataan atau pemaparan inilah yang juga menjadi tolak ukur keberpihakan suatu berita. Apabila pernyataan atau pemaparan pro pembangunan pabrik semen di letakan di bagian awal pada pembuka berita, maka berita tersebut memiliki keberpihakan pro pembangunan semen, begitu pula sebaliknya. Sebab, letak pernyataan atau pemaparan menunjukkan skala prioritas, semakin letaknya di awal, semakin menjadi prioritas pernyataan tersebut, yang berarti apabila hal-hal yang terkait pro pembangunan semen diletakan di bagian awal, berarti keberpihakan pro pembangunan semen merupakan prioritas dari berita tersebut. Dari sepuluh berita yang pro pembangunan semen, terdapat dua berita yang memasukan pernyataan kontra pembangunan semen, tetapi diletakan di bagian akhir, yaitu berita www.kompas.com yang berjudul “Warga Protes Putusan Peninjauan Kembali Pabrik Semen di Rembang” dan “Tokoh Samin Komentari Aksi Demo Menolak Pabrik Semen”. Kedua

berita ini meletakkan pernyataan atau pemaparan terkait kontra pembangunan semen di bagian akhir. Pernyataan atau pemaparan kontra ini tidak menjadi prioritas keberpihakan, melainkan hanya sekedar informasi.

Kontra Pembangunan Semen

Pada berita-berita kompas.com yang memiliki keberpihakan kontra terhadap pembangunan semen, argumentasi yang diangkat menjadi *moral judgement* lebih sedikit daripada argumentasi pada berita-berita pro pembangunan semen. Meskipun demikian, *moral judgement* pada berita-berita kontra pembangunan semen lebih fokus sehingga lebih mudah dikelompokkan atau diklasifikasikan. Mudahnya *moral judgement* berita-berita kontra pembangunan semen untuk diklasifikasikan menunjukkan bahwa berita-berita kontra pembangunan semen pada www.kompas.com konsisten dalam membahas konflik pembangunan pabrik semen dalam aspek-aspek tertentu, tidak melebar ke mana-mana.

Secara keseluruhan, terdapat *lima* pokok argumentasi yang dijadikan *moral judgement* dalam berita-berita kontra pembangunan semen, yaitu masyarakat Rembang telah melakukan berbagai upaya untuk menolak pembangunan pabrik semen di Rembang, lokasi tempat dibangunnya pabrik semen adalah kawasan lindung, kebijakan Gubernur Jawa Tengah bertentangan dengan hukum, izin pabrik semen di Rembang telah dicabut, dan presiden Jokowi berjanji untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di pegunungan Kendeng di mana selama proses tersebut pabrik semen tidak boleh beroperasi. Dalam satu berita, bisa memiliki lebih dari satu pokok argumentasi.

Tabel 3. 13

Pokok Argumentasi Moral Judgement dalam Berita Kontra Pembangunan Semen www.kompas.com

Judul	<i>Moral Judgement</i>	Pokok Argumentasi
Aktivis Gelar Aksi Tutup Mulut Desak Batalkan Izin Pabrik Semen di Rembang	<p>Ibu-ibu yang menolak pembangunan pabrik semen di Kendeng telah mendirikan tenda di dekat lokasi pabrik semen dan telah tinggal di tenda tersebut selama lebih dari empat bulan. Pemaparan mengenai alasan penolakan pembangunan pabrik semen yang terdapat pada paragraf keenam hingga paragraf ketujuh.</p>	<p>Masyarakat Rembang telah melakukan berbagai upaya untuk menolak pembangunan pabrik semen di Rembang.</p> <p>Lokasi tempat dibangunnya pabrik semen adalah kawasan lindung.</p>
Walhi: Pabrik Semen Ancam 607.198 Warga di Rembang	<p>Pemaparan mengenai Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih yang terdapat pada paragraf ketiga hingga paragraf kelima.</p> <p>Pemaparan mengenai SK Gubernur Jawa Tengah yang bernomor 668./1/17/2012 yang dianggap bertentangan dengan banyak aturan hukum. Pemaparan ini terdapat pada paragraf keenam hingga paragraf ketujuh.</p>	<p>Lokasi tempat dibangunnya pabrik semen adalah kawasan lindung.</p> <p>Kebijakan Gubernur Jawa Tengah bertentangan dengan hukum.</p>
Tolak Pabrik Semen, Ibu-ibu di Rembang	<p>Pemaparan mengenai Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih yang terdapat pada</p>	<p>Lokasi tempat dibangunnya pabrik semen</p>

<p>Blokade Jalan Selama 160 Hari</p>	<p>paragraf kelima hingga paragraf kedelapan. Pemaparan mengenai SK Gubernur Jawa Tengah yang bernomor 668./1/17/2012 yang dianggap bertentangan dengan banyak aturan hukum. Pemaparan ini terdapat pada paragraf kesembilan hingga paragraf kesepuluh.</p>	<p>adalah kawasan lindung. Kebijakan Gubernur Jawa Tengah bertentangan dengan hukum.</p>
<p>SK Pencabutan Pabrik Semen di Rembang Dianggap Multitafsir</p>	<p>Strategi politik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar pembangunan pabrik semen di Rembang tetap berlanjut, yaitu dengan mengeluarkan SK Gubernur Nomor 6601/4 tahun 2017. Dalam SK tersebut, meskipun izin pabrik semen di Rembang dinyatakan dicabut, namun pada poin kedua meminta PT. Semen Indonesia untuk membenahi AMDAL, yang bisa juga berarti memberi PT. Semen Indonesia kesempatan kedua.</p>	<p>Kebijakan Gubernur Jawa Tengah bertentangan dengan hukum.</p>
<p>Tak Puas, Warga Rembang Tutup Akses ke Pabrik Semen Indonesia</p>	<p>Putusan MA mengatakan bahwa izin pabrik semen di Rembang dicabut, sehingga keberadaan pabrik semen tersebut dianggap ilegal.</p>	<p>Izin pabrik semen telah di Rembang dicabut.</p>
<p>Petani Kendeng Enggan Buka Belunggu Semen di Kaki Sebelum Bertemu Jokowi</p>	<p>Petani Kendeng dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) telah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung, sehingga putusan MA menyatakan bahwa izin</p>	<p>Izin pabrik semen telah di Rembang dicabut. Presiden Jokowi berjanji untuk melakukan</p>

	<p>pabrik semen di Rembang dicabut.</p> <p>Pemaparan mengenai janji presiden Jokowi terkait pembangunan pabrik semen di Kendeng yang terdapat pada paragraf keempat hingga paragraf kesepuluh.</p>	<p>Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di pegunungan Kendeng, di mana selama proses tersebut pabrik semen tidak boleh beroperasi.</p>
<p>Air Mata Petani Kendeng dan Prinsip "Sedulur Sikep" Menjaga Ibu Bumi</p>	<p>Pemaparan mengenai komunitas adat Sedulur Sikep atau masyarakat Samin dan sejarah terbentuknya komunitas tersebut yang terdapat pada sub judul "Kultur Perlawanan" beserta isinya.</p> <p>Pemaparan mengenai perjuangan JMPPK yang terdapat pada sub judul "Menjaga Ibu Bumi" beserta isinya.</p>	<p>Masyarakat Rembang telah melakukan berbagai upaya untuk menolak pembangunan pabrik semen di Rembang.</p>

Berdasarkan tabel di atas, pokok argumentasi yang paling banyak digunakan adalah tentang masyarakat Rembang telah melakukan berbagai upaya untuk menolak pembangunan pabrik semen di Rembang, lokasi tempat dibangunnya pabrik semen adalah kawasan lindung, dan kebijakan Gubernur Jawa Tengah bertentangan dengan hukum. Ketiga pokok argumentasi tersebut masing-masing disebutkan sebanyak *tiga* kali dalam berita-berita kontra pembangunan semen. Sedangkan pokok argumentasi izin pabrik semen telah dicabut muncul sebanyak *dua* kali, dan tentang janji presiden Jokowi disebutkan hanya *satu* kali.

Pokok argumentasi masyarakat Rembang telah melakukan upaya untuk menolak pembangunan pabrik disebutkan sebanyak tiga kali, dan muncul dalam dua berita, di mana pada salah satu berita disebutkan dua kali. Alasan mengapa beberapa berita www.kompas.com memiliki jenis argumentasi ini adalah adanya pemaparan mengenai aksi atau upaya yang dilakukan masyarakat untuk menolak pembangunan pabrik semen di Rembang, bahkan aksi atau upaya tersebut dipaparkan secara rinci yang terdiri lebih dari satu paragraf. Seperti pada berita yang berjudul “Air Mata Petani Kendeng dan Prinsip “Sedulur Sikep” Menjaga Ibu Bumi”, berita ini bahkan memiliki sub judul sendiri untuk membahas aksi yang dilakukan masyarakat Kendeng untuk menolak pembangunan pabrik semen di Kendeng yaitu “Menjaga Ibu Bumi” yang terdiri dari dua belas paragraf. Adanya berita dengan sub judul tersendiri dan pemaparan hingga dua belas paragraf menunjukkan bahwa berita www.kompas.com yang kontra pembangunan semen benar-benar berpihak pada masyarakat Kendeng. Sebab, membuat berita dengan sub judul tersendiri beserta pemaparan yang sangat rinci menunjukkan merupakan bukti “suatu kesungguhan” suatu media, padahal untuk menyatakan keberpihakan bisa saja cukup dengan membuat berita yang singkat.

“Menjaga Ibu Bumi

....Kemudian pada 12 April 2016, sembilan petani perempuan yang kerap disebut “Kartini Pegunungan Kendeng”, mendatangi Jalan Medan Merdeka Barat, seberang Istana Negara. Mereka mengecor kaki dengan semen sebagai bentuk protes terhadap pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang.

Sembilan “Kartini Pegunungan Kendeng” tersebut merupakan para petani yang berasal dari Rembang, Pati, Blora, dan Grobogan.

Secercah harapan sempat muncul ketika Presiden Jokowi mengundang Kartini Kendeng untuk berdialog di Istana Negara, Selasa (2/8/2016). Dari pertemuan itu, pemerintah berjanji akan melakukan kajian lingkungan hidup strategis

(KLHS) di Pegunungan Kendeng. Selama kajian dilakukan, pabrik semen dilarang untuk beroperasi....”

(Berita www.kompas.com , “Air Mata Petani Kendeng dan Prinsip “Sedulur Sikep” Menjaga Ibu Bumi”, 23 Maret 2017)

Selain pemaparan yang rinci, upaya tersebut juga dibingkai sebagai perjuangan warga untuk melindungi kelestarian alam. Bingkai aksi penolakan tersebut terlihat dari adanya diksi “perjuangan” untuk memaparkan upaya penolakan tersebut.

“Selain itu, aksi ini juga sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan warga Rembang yang menolak pendirian pabrik semen karena dianggap akan sangat merugikan warga.”

(Berita www.kompas.com , “Aktivis Gelar Apress releaksi Tutup Mulut Desak Batalkan Izin Pabrik Semen di Rembang, 05 November 2014)

Bila melihat perkembangan kasus yang terjadi, alasan mengapa argumentasi masyarakat melakukan berbagai aksi untuk menolak pembangunan pabrik semen di Rembang menjadi salah satu argumentasi yang paling banyak digunakan adalah karena aksi dan upaya ini dinilai sebagai “kesungguhan” masyarakat Kendeng untuk melindungi kelestarian alam. Kesungguhan ini terlihat dari berbagai aksi yang dilakukan dan tidak pernah goyah atau tetap konsisten bersikap menolak. Kesungguhan inilah yang menarik www.kompas.com untuk menyatakan keberpihakannya pada masyarakat Kendeng.

Pokok argumentasi lainnya yang juga banyak digunakan dalam *moral judgement* berita www.kompas.com adalah bahwa lokasi pembangunan pabrik semen adalah kawasan lindung, kawasan lindung yang dimaksud ialah kawasan Cekungan Air Tanah (CAT). Pokok argumentasi ini disebutkan sebanyak tiga kali di tiga berita yang berbeda. Alasan mengapa kawasan CAT tidak boleh dibangun pabrik

semen adalah karena terdapat 49 goa dengan empat goa yang memiliki sungai bawah tanah dan memiliki 100 mata air yang mengalir yang dapat memenuhi kebutuhan air akan warga yang berada di empat belas kecamatan yang berbeda. Jika pembangunan pabrik semen tetap dilanjutkan, maka dikhawatirkan Rembang khususnya wilayah Kendeng akan kehilangan sumber mata air yang berakhir pada kekeringan. Kekeringan inilah yang merupakan kerusakan lingkungan. Pokok argumentasi ini juga menjadi penguat alasan utama mengapa pembangunan pabrik semen ditolak karena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

Pokok argumentasi selanjutnya yang juga banyak digunakan dalam *moral judgement* berita-berita kontra pembangunan semen adalah kebijakan Gubernur Jawa Tengah bertentangan dengan hukum, di mana pokok argumentasi ini muncul tiga kali dalam tiga berita berbeda. Munculnya pokok argumentasi ini dalam berita-berita kontra pembangunan semen adalah karena kebijakan Gubernur Jawa Tengah yang mengeluarkan izin untuk pembangunan pabrik semen di Rembang. Kebijakan yang dimaksud adalah SK Gubernur nomor 668.1/17/2012. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan hukum, bahkan banyak aturan hukum. Pada berita www.kompas.com yang berjudul “Walhi: Pabrik Semen Ancam 607.198 Warga di Rembang” dan “Tolak Pabrik Semen, Ibu-ibu di Rembang Blokade Jalan Selama 160 Hari”, kedua berita ini bahkan menyebutkan semua aturan-aturan hukum yang dilanggar oleh kebijakan Gubernur tersebut.

“... Dia menilai, SK tersebut telah bertentangan dengan banyak aturan, antara lain UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air jo Keputusan Presiden RI Nomor 26 tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Selain itu, SK tersebut juga bertabrakan dengan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2030, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten tahun 2011-2031.”

(Berita www.kompas.com, “Tolak Pabrik Semen, Ibu-ibu di Rembang Blokade Jalan Selama 160 Hari”, 26 November 2014)

Pokok argumentasi mengenai kebijakan Gubernur Jawa Tengah yang bertentangan dengan aturan hukum memiliki korelasi dengan pokok argumentasi lokasi pabrik semen adalah kawasan lindung. Korelasi ini terlihat dari aturan-aturan hukum yang “dilanggar” oleh Gubernur tersebut. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa SK Gubernur Jawa Tengah tersebut bertentangan dengan banyak aturan hukum, berdasarkan kutipan berita di atas, bahwa semua aturan-aturan hukum yang dilanggar adalah aturan-aturan hukum mengenai lingkungan, sehingga kesan yang dimunculkan dalam adalah “*aturan hukum saja melindungi kelestarian alam, mengapa SK Gubernur justru mau merusak lingkungan*”. Selain bertentangan dengan aturan-aturan hukum mengenai lingkungan, ada satu kebijakan Gubernur Jawa Tengah lainnya yang dianggap bertentangan dengan hukum yaitu, SK Gubernur nomor 66014/4 tahun 2017, meskipun SK ini menyatakan bahwa izin pabrik semen di Rembang dibatalkan, tetapi batalnya adalah batal “bersyarat”, di mana bahwa izin pabrik tersebut masih memungkinkan untuk diteruskan dengan syarat-syarat tertentu. Pada poin kedua SK ini menyebutkan bahwa PT. Semen Indonesia harus memperbaiki Amdal, sehingga muncul kesan bahwa apabila PT. Semen Indonesia memperbaiki Amdal, maka PT. Semen Indonesia akan mendapatkan kembali izin pabrik di Rembang. Hal ini dianggap bertentangan karena dianggap menyasati aturan hukum. Jika SK

Gubernur sebelumnya dianggap bertentangan dengan sejumlah aturan hukum terkait lingkungan, maka SK Gubernur yang ini dianggap bertentangan dengan aturan hukum bila dilihat dari aspek hukum karena bertentangan dengan Putusan MA yang menyatakan bahwa izin pabrik semen dibatalkan, sementara SK tersebut berupaya agar pabrik semen diteruskan.

Pokok argumentasi selanjutnya adalah izin pabrik semen di Rembang telah dicabut. Argumentasi ini muncul dalam dua berita yang berbeda. Pokok argumentasi ini merujuk pada Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 99/PK/TUN/2016 di mana putusan ini menyatakan bahwa izin semen di Rembang dicabut. Pokok argumentasi ini bisa dikatakan memiliki kekuatan dalam hal kevalidan karena pokok argumentasi ini memiliki kekuatan hukum sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Berbeda dengan pokok argumentasi terkait lokasi pabrik yang mengangkat isu kerusakan lingkungan, pokok argumentasi ini mengangkat isu hukum, sebab pokok argumentasi ini merujuk pada kebijakan Gubernur Jawa Tengah yang kembali menerbitkan izin lingkungan untuk pabrik semen di Rembang, padahal putusan MA menyatakan sebaliknya. Jika pokok argumentasi sebelumnya (lokasi pabrik semen merupakan kawasan lindung) menolak pembangunan pabrik semen karena dapat merusak lingkungan, maka pokok argumentasi ini menolak pembangunan pabrik semen karena bertentangan dengan putusan MA yang merupakan salah satu hukum tertinggi. Pokok argumentasi ini juga memperkuat pokok argumentasi lainnya yaitu bahwa kebijakan Gubernur Jawa Tengah bertentangan dengan aturan hukum.

Lalu pokok argumentasi *moral judgement* yang terakhir adalah janji presiden Jokowi untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hanya ada satu berita yang memiliki pokok argumentasi tersebut, yaitu berita yang berjudul “*Petani Kendeng Enggan Buka*

Belunggu Semen di Kaki Sebelum Bertemu Jokowi”. Ada dua poin penting yang menjadi alasan mengapa janji presiden Jokowi terkait KLHS ini dijadikan sebagai *moral judgement* berita-berita kontra pembangunan semen, *pertama*, diadakannya kajian KLHS oleh Jokowi merupakan respon dari protes terhadap pembangunan pabrik semen di Rembang di mana protes saat itu disampaikan oleh sembilan petani perempuan yang mendatangi Istana Negara dan mengecor kaki mereka dengan semen. Sebagai konsekuensi atas permintaan Jokowi untuk melakukan KLHS tersebut, maka pabrik semen di Rembang dilarang beroperasi selama proses kajian tersebut. Pelarangan beroperasi inilah yang menjadi alasan mengapa janji presiden Jokowi dijadikan sebagai salah satu *moral judgement* dalam berita-berita kontra pembangunan semen. *Kedua*, keberpihakan kontra pembangunan semen pada pokok argumentasi ini dibingkai sebagai harapan bagi masyarakat penolak pabrik semen di Kendeng. Bingkai sebagai harapan bagi masyarakat ini jelas terlihat dari penggunaan diksi “harapan” pada berita tersebut ketika memaparkan janji presiden Jokowi.

“Secercah harapan muncul ketika Presiden Jokowi mengundang sembilan Kartini Kendeng untuk berdialog di Istana Negara, Selasa (2/8/2016). Dari pertemuan itu, pemerintah berjanji akan melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) di Pegunungan Kendeng. Selama kajian dilakukan, pabrik semen dilarang untuk beroperasi.”

(Berita www.kompas.com , “Petani Kendeng Enggan Buka Belunggu Semen di Kaki Sebelum Bertemu Jokowi”, 13 Maret 2017)

4. Treatment Recommendation

Dari delapan belas berita www.kompas.com , tidak semua berita-berita tersebut memiliki *treatment recommendation* atau rekomendasi solusi dalam beritanya, hanya beberapa berita saja, baik yang pro pembangunan semen maupun kontra pembangunan semen. Hal ini

menunjukkan bahwa www.kompas.com tidak terlalu banyak menuntut agar konflik pembangunan pabrik semen di Rembang diselesaikan menurut cara yang dianjurkan oleh www.kompas.com .

Dari delapan belas berita www.kompas.com yang memiliki keberpihakan pro dan kontra, berita yang memiliki keberpihakan pro pembangunan semen memiliki *enam* solusi yang ditawarkan, sedangkan berita yang memiliki kontra pembangunan semen memiliki *lima* solusi yang ditawarkan.

Pro Pembangunan Semen

Pada berita-berita www.kompas.com yang memiliki keberpihakan pro pembangunan semen, terdapat enam solusi atau *treatment recommendation* yang ditawarkan. Enam solusi tersebut muncul dalam lima berita di mana salah satu berita mengandung dua *treatment recommendation*. *Treatment recommendation* yang ditawarkan oleh berita-berita www.kompas.com yang memiliki keberpihakan pro pembangunan semen adalah sebagai berikut :

- a. Pabrik semen di Rembang harus tetap berlanjut dan terus beroperasi.
- b. Masyarakat Rembang diharapkan memberi waktu PT. Semen Indonesia untuk membuktikan komitmennya.
- c. Masyarakat Rembang diharapkan ikut mengawasi PT. Semen Indonesia
- d. Pemerintah harus memberikan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak pabrik semen dan ajak masyarakat untuk bermusyawarah bila mereka menolak kompensasi.
- e. Masyarakat Rembang jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu atau rumor-rumor yang tersebar.
- f. Jangan bawa-bawa nama Samin dalam konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah.

Terdapat dua poin penting dalam *treatment recommendation* berita-berita pro pembangunan pabrik semen di Rembang pada www.kompas.com, *Pertama*, secara keseluruhan solusi yang ditawarkan oleh berita-berita pro pembangunan semen cenderung berbeda-beda tergantung pada isu apa yang diangkat dalam berita tersebut. *Treatment recommendation* yang berbeda-beda ini menunjukkan bahwa tidak ada *treatment recommendation* yang menjadi *treatment recommendation* utama atau *treatment recommendation* yang benar-benar ditekankan dalam berita-berita pro pembangunan semen. *Treatment recommendation* hanya mengikuti isu apa yang diangkat dalam berita tersebut beserta unsur-unsur elemen framing lainnya. Meskipun demikian, ada satu *treatment recommendation* yang disebutkan lebih dari satu kali, yaitu “*pabrik semen di Rembang harus diteruskan*” di mana *treatment recommendation* tersebut disebutkan sebanyak dua kali dalam dua berita yang berbeda. Walaupun disebutkan lebih dari sekali, tetapi jumlah disebutkannya *treatment recommendation* tersebut masih cenderung sedikit karena jumlahnya kurang dari separuh jumlah *treatment recommendation* berita-berita kontra pembangunan semen, sehingga *treatment recommendation* tersebut belum bisa dikatakan menjadi *treatment recommendation* utama.

Kedua, meskipun *treatment recommendation* yang ditawarkan berita-berita pro pembangunan semen berbeda-beda, tetapi sebagian besar *treatment recommendation* tersebut ditujukan untuk masyarakat Rembang, terutama masyarakat Rembang yang kontra atau menolak pembangunan pabrik semen di Rembang. *Treatment recommendation* yang ditujukan untuk masyarakat Rembang adalah *treatment recommendation* poin b hingga poin f, sehingga hampir semua *treatment recommendation* berita-berita pro pembangunan semen di Rembang www.kompas.com ditujukan untuk masyarakat Rembang yang menolak pabrik semen di Rembang. *Treatment recommendation* yang ditujukan untuk masyarakat yang menolak pembangunan pabrik semen di Rembang ini sangat terlihat pada

poin b, yaitu “*Masyarakat Rembang diharapkan memberi waktu PT. Semen Indonesia untuk membuktikan komitmennya*”, kata memberi waktu pada kalimat tersebut menunjukkan bahwa PT. Semen Indonesia meminta kesempatan kedua pada masyarakat Rembang, yaitu memberi waktu untuk membuktikan komitmen. Bila dipikirkan menggunakan logika, ketika seseorang meminta kesempatan kedua berarti seseorang tersebut telah melakukan kesalahan, sehingga meminta kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Begitu pula pada *treatment recommendation* tersebut, meminta waktu untuk membuktikan komitmen menunjukkan bahwa sebelumnya semacam “perselisihan” sehingga meminta waktu untuk menunjukkan “itikad baik” tersebut. Hal ini tentu saja merujuk pada masyarakat Rembang yang kontra pada pembangunan pabrik semen di Rembang. *Treatment recommendation* yang sebagian besar ditujukan untuk masyarakat penolak pabrik semen di Rembang juga diperkuat pada *treatment recommendation* poin f, yaitu “*Jangan bawa-bawa nama Samin dalam konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah*”, di mana dalam hal ini yang membawa nama Samin dalam konflik pembangunan pabrik semen di Rembang adalah masyarakat penolak pabrik semen di Rembang.

Kontra Pembangunan Semen

Sedangkan pada berita-berita www.kompas.com yang memiliki keberpihakan kontra pembangunan semen memiliki lima *moral judgement* atau solusi yang ditawarkan. Lima *treatment recommendation* tersebut muncul dalam lima berita yang berbeda. Berikut adalah *treatment recommendation* atau solusi yang ditawarkan oleh berita-berita kontra pembangunan semen www.kompas.com :

- a. Aktivitas pabrik semen di Rembang harus dihentikan selama proses gugatan.

- b. Aktivitas pabrik semen di Rembang harus dihentikan karena ilegal.
- c. Hakim PTUN diharapkan bersedia membatalkan izin pabrik semen di Rembang.
- d. Presiden Jokowi harus turun tangan dalam konflik pembangunan pabrik semen di Rembang.
- e. Presiden Jokowi harus menghentikan aktivitas pabrik semen di Rembang.

Berdasarkan poin-poin di atas, *treatment recommendation* atau solusi utama yang ditawarkan oleh berita-berita kontra pembangunan pabrik semen www.kompas.com adalah *hentikan aktivitas pabrik semen di Rembang*. Hal ini terlihat dalam beberapa hal, *Pertama*, dari lima solusi yang ditawarkan pada poin-poin di atas, tiga diantaranya secara langsung meminta aktivitas pabrik semen di Rembang dihentikan, yang membedakan hanyalah pada konteks bagaimana aktivitas pabrik semen tersebut dihentikan, apakah dihentikan selama proses gugatan, maupun dihentikan secara permanen, dan siapa yang diharapkan untuk melaksanakan solusi yang ditawarkan, apakah presiden Jokowi, hakim PTUN, maupun tidak disebutkan secara jelas kepada siapa solusi tersebut ditawarkan. *Kedua*, terdapat *treatment recommendation* yang tidak meminta aktivitas pabrik semen dihentikan, tetapi *treatment recommendation* tersebut merujuk pada penghentian aktivitas pabrik semen di Rembang. *Treatment recommendation* yang dimaksud adalah *treatment recommendation* pada poin c dan d. Kedua poin tersebut memang tidak meminta aktivitas pabrik semen di Rembang dihentikan, tetapi dampak dari solusi yang ditawarkan tersebut adalah dihentikannya aktivitas pabrik di Rembang. Seperti pada *treatment recommendation* Hakim PTUN diharapkan bersedia membatalkan izin pabrik semen di Rembang, di mana apabila izin pabrik semen dibatalkan, maka aktivitas pabrik semen di Rembang akan terhenti, begitu pula pada *treatment recommendation* yang meminta keterlibatan

Jokowi dalam konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, keterlibatan presiden Jokowi yang diharapkan adalah agar presiden Jokowi menegur Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo karena telah mengeluarkan SK yang dinilai dapat memberikan peluang pada PT. Semen Indonesia untuk meneruskan aktivitas pabrik semen di Rembang padahal putusan Mahkamah Agung menyatakan izin pabrik semen di Rembang dibatalkan serta agar presiden Jokowi langsung menghentikan aktivitas pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah.

5. Keberpihakan www.kompas.com

Berdasarkan hasil pemaparan sebelumnya, bahwa dari delapan belas berita www.kompas.com yang membahas mengenai konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, sepuluh berita mendukung pembangunan pabrik semen di Rembang (pro pembangunan semen), tujuh berita menolak pembangunan pabrik semen di Rembang (kontra pembangunan semen), dan satu berita tidak jelas keberpihakannya. Berita-berita yang memiliki keberpihakan pro pembangunan semen dan kontra pembangunan semen mengangkat aspek atau isu yang berbeda. Isu yang diangkat inilah yang membuat www.kompas.com memiliki keberpihakan yang berbeda.

Untuk melihat bagaimana sikap atau keberpihakan www.kompas.com secara keseluruhan pada konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, maka perlu diulas perbandingan antara dua keberpihakan tersebut. Ulasan tersebut akan memperlihatkan aspek atau isu apa yang diangkat pada masing-masing keberpihakan dan apa perbedaan dari kedua keberpihakan tersebut. Ulasan perbandingan tersebut akan dilihat berdasarkan unsur-unsur elemen framing Robert Entman pada berita-berita yang memiliki dua keberpihakan tersebut.

a. *Define Problems*

Pada unsur *define problems*, berita-berita yang pro pembangunan semen lebih memfokuskan konflik pembangunan pembangunan pabrik semen di Rembang dari sisi tokoh-tokoh yang mendukung pabrik semen dan izin baru lingkungan pabrik semen PT. Semen Indonesia. Hal ini terlihat dari berita-berita www.kompas.com yang mengangkat pandangan tokoh-tokoh penting, hampir semua tokoh tersebut mendukung pembangunan pabrik semen di Rembang, meskipun beberapa di antaranya mendukung “bersyarat” (pemaparan dapat dilihat pada sub *define problems* www.kompas.com). Diangkatnya pernyataan tokoh-tokoh yang mendukung pabrik semen tersebut seolah menyiratkan “tokoh-tokoh besar telah merestui pembangunan pabrik semen di Rembang”. Selain itu, berita-berita pro pembangunan semen juga fokus pada izin baru lingkungan PT. Semen Indonesia di mana izin tersebut didapatkan dari hasil sidang addendum yang dilaksanakan pada 2 Februari 2017 yang dihadiri oleh berbagai pihak penting termasuk di antaranya adalah masyarakat Rembang, sehingga sudah seharusnya pembangunan pabrik semen di Rembang dilanjutkan karena sudah disepakati sebelumnya.

Sedangkan berita-berita yang kontra pembangunan semen lebih memfokuskan pada aksi masyarakat Rembang menolak pembangunan pabrik semen di Rembang dan kebijakan Gubernur Jawa Tengah yang menerbitkan kembali izin lingkungan PT. Semen Indonesia. Aksi penolakan pembangunan pabrik semen tersebut dibingkai sebagai aksi perjuangan masyarakat kecil yang melindungi kelestarian alam karena ditemukan berbagai kata kunci yang berkaitan dengan hal tersebut seperti perjuangan, keadilan, warga terancam, dan lain-lain yang ditemukan pada berita-berita yang mengangkat fokus aksi penolakan pembangunan pabrik semen di Rembang. Lalu

pada fokus kebijakan Gubernur Jawa Tengah yang kembali menerbitkan izin lingkungan pabrik semen PT. Semen Indonesia, kebijakan ini dibingkai sebagai kebijakan yang salah karena dua hal, yaitu kebijakan tersebut tidak mematuhi putusan MA yang menyatakan izin pabrik semen di Rembang dicabut dan kebijakan tersebut tidak berpihak ke masyarakat kecil.

b. *Diagnoses Causes*

Pada unsur *diagnoses causes*, hal yang dianggap menjadi penyebab masalah berbeda-beda antara berita-berita pro pembangunan semen dan kontra pembangunan semen. Pada berita-berita pro pembangunan semen, yang dianggap menjadi penyebab masalah cukup beragam tergantung isu yang diangkat.

Sedangkan pada berita-berita yang kontra pembangunan semen, yang dijadikan penyebab masalah adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan PT. Semen Indonesia. Gubernur Jawa Tengah dianggap sebagai penyebab masalah karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan terkait konflik pembangunan pabrik semen di Rembang tidak berpihak dengan masyarakat kecil dan menguntungkan PT. Semen Indonesia. Sedangkan PT. Semen Indonesia dijadikan penyebab utama karena pembangunan pabrik semen di Rembang dapat berpotensi merusak lingkungan terlebih pegunungan Kendeng yang merupakan lokasi pabrik semen adalah kawasan lindung.

c. *Moral Judgement*

Pada unsur *moral judgement*, berita-berita pro pembangunan semen mengangkat isu izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia telah disepakati bersama dan PT. Semen Indonesia sebagai perusahaan yang baik sebagai argumentasi utama untuk mendukung pembangunan pabrik semen di Rembang. Izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia didapatkan dari hasil sidang addendum yang dilaksanakan pada 2 Februari 2017 di

mana sidang tersebut dihadiri berbagai pihak termasuk dari masyarakat Rembang. Kehadiran masyarakat Rembang tersebut menurut berita-berita pro pembangunan semen dijadikan argumentasi penguat. Sebab, hadirnya masyarakat Rembang berarti masyarakat telah mengetahui dan menyetujui untuk memberikan izin baru pada PT. Semen Indonesia, di mana bila masyarakat Rembang menolak berarti masyarakat Rembang dianggap tidak suportif. Selain itu, pembangunan pabrik semen harus dilanjutkan karena pabrik semen tersebut adalah milik PT. Semen Indonesia yang merupakan perusahaan yang baik di mana baik di sini merujuk pada PT. Semen Indonesia mempunyai riwayat yang baik sebagai perusahaan tambang dan perusahaan yang bertanggung jawab atas komitmen pada masyarakat.

Sedangkan pada berita-berita kontra pembangunan semen, argumentasi utama yang digunakan untuk menolak pembangunan pabrik semen di Rembang adalah lokasi pabrik semen merupakan kawasan lindung, masyarakat telah melakukan aksi untuk menolak pembangunan pabrik semen, dan izin pabrik semen di Rembang telah dicabut oleh MA. Lokasi pabrik semen PT. Semen Indonesia yang ada di Kendeng merupakan kawasan lindung geologi yang memiliki banyak sumber mata air sehingga dikhawatirkan Rembang akan mengalami kekeringan bila pabrik semen dibangun di sana, ditambah lagi putusan Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa izin pabrik semen di Rembang dicabut, sehingga sudah seharusnya pabrik semen di Rembang dihentikan karena bila tidak dihentikan berarti tidak mematuhi putusan MA yang memiliki kekuatan hukum. Selain itu, masyarakat Rembang juga telah menolak keras pembangunan pabrik semen di Rembang, seharusnya apabila masyarakat memang tidak ingin ada pabrik

semen di sana, sudah seharusnya pabrik semen tidak dilanjutkan. Sebab, melanjutkan pabrik semen berarti telah memaksa masyarakat yang juga berarti menganiaya masyarakat.

d. *Treatment Recommendation*

Lalu pada unsur *treatment recommendation*, berita-berita pro pembangunan semen memiliki banyak tawaran solusi atau *treatment recommendation*, sehingga berita-berita pro pembangunan semen tidak memiliki tawaran solusi utama. Meskipun demikian, tetapi hampir semua tawaran solusi yang ditawarkan oleh berita-berita pro pembangunan semen ditujukan untuk masyarakat Rembang terutama yang menolak pembangunan pabrik semen. Hal ini terlihat dari adanya tawaran solusi yang meminta masyarakat Rembang memberikan waktu pada PT. Semen Indonesia untuk membuktikan komitmennya yang di mana sudah jelas pasti merujuk pada masyarakat Rembang yang menolak pabrik semen di Rembang.

Sedangkan pada berita-berita kontra pembangunan semen, solusi utama yang ditawarkan adalah hentikan pabrik semen di Rembang. Meskipun terdapat tawaran solusi yang lain, tetapi semua tawaran solusi tersebut tetap merujuk pada penghentian aktivitas pabrik semen di Rembang.

Tabel 3. 14

Perbandingan Pro dan Kontra Pemberitaan Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Rembang pada www.kompas.com

Elemen Framing	Pro Pembangunan Semen	Kontra Pembangunan Semen
<i>Define Problems</i>	Difokuskan pada tokoh-tokoh yang	Difokuskan pada aksi masyarakat yang

	<p>mendukung pembangunan pabrik semen di Rembang dan izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia yang dibingkai sebagai kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya oleh masyarakat Rembang.</p>	<p>menolak pembangunan pabrik semen di Rembang sebagai aksi perjuangan masyarakat kecil melindungi kelestarian alam dan kebijakan Gubernur Jawa Tengah yang menerbitkan izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia sebagai kebijakan yang salah.</p>
<p><i>Diagnoses Causes</i></p>	<p>Tidak ada yang menjadi penyebab utama, karena yang dijadikan penyebab masalah beragam.</p>	<p>Gubernur Jawa Tengah dan PT. Semen Indonesia sebagai penyebab utama.</p>
<p><i>Moral Judgement</i></p>	<p>Izin pabrik semen PT. Semen Indonesia yang baru merupakan kesepakatan bersama, termasuk dengan masyarakat Rembang dan PT. Semen Indonesia adalah perusahaan yang baik.</p>	<p>Masyarakat Rembang telah menolak keras pembangunan pabrik semen di Rembang, sehingga pabrik semen harus dihentikan, melanjutkan pabrik semen sama saja dengan memaksa masyarakat Rembang, lokasi pabrik semen di Rembang adalah kawasan lindung, dan izin pabrik semen di Rembang telah dicabut oleh MA sehingga pabrik semen harus dihentikan.</p>
<p><i>Treatment Recommendation</i></p>	<p>Tidak ada solusi utama, karena solusi yang ditawarkan beragam, tetapi sebagian besar solusi ditujukan untuk masyarakat penolak</p>	<p>Hentikan pembangunan pabrik semen di Rembang sebagai solusi utama yang ditawarkan.</p>

	pabrik semen di Rembang agar memberi PT. Semen Indonesia kesempatan kedua.	
Bingkai Umum	Pembangunan pabrik semen di Rembang harus dilanjutkan karena banyak tokoh-tokoh penting telah mendukung pembangunan pabrik semen dan izin pabrik semen yang baru telah disepakati bersama, termasuk dengan masyarakat Rembang, sehingga tidak mendukung pabrik semen berarti tidak menghargai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.	Pembangunan pabrik semen di Rembang harus dihentikan karena lokasi pabrik semen adalah kawasan lindung, dan masyarakat telah melakukan berbagai aksi untuk menolak pabrik semen tersebut, sebab bila masyarakat tidak mau sebaiknya jangan memaksakannya. Selain itu, izin pabrik semen di Rembang sebelumnya telah dicabut oleh MA, tidak mencabut izin pabrik tersebut berarti tidak mematuhi putusan MA.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa keberpihakan www.kompas.com pada konflik pembangunan pabrik semen di Rembang adalah *tidak jelas*. Alasan mengapa www.kompas.com dinyatakan memiliki keberpihakan tidak jelas adalah *Pertama*, selisih jumlah antara jumlah berita-berita pro pembangunan semen dan berita kontra pembangunan semen sedikit atau kecil, di mana jumlah berita pro pembangunan semen adalah sepuluh dan jumlah berita kontra pembangunan semen adalah tujuh, meskipun jumlah berita pro pembangunan semen lebih banyak, tetapi jumlah tersebut belum cukup untuk mendominasi keberpihakan www.kompas.com, sebab bila dibuat presentase selisih antara jumlah berita yang pro pembangunan semen dan kontra pembangunan semen hanya berbeda belasan persen, di mana

presentase jumlah berita pro pembangunan semen adalah 56% dan presentase jumlah berita kontra pembangunan semen adalah 39%.

Kedua, mungkin secara jumlah memang berita pro pembangunan semen lebih banyak, tetapi dari unsur konsistensi dalam kefokusannya justru berita-berita kontra pembangunan semen lebih unggul, di mana berita-berita kontra pembangunan semen konsisten membahas aspek penolakan masyarakat Rembang sebagai aksi perjuangan dan kebijakan Gubernur Jawa Tengah sebagai kebijakan yang salah dalam tiap unsur-unsur elemen framing. Seperti pada elemen-elemen framing pada berita-berita kontra pada tabel 3.13 di atas, elemen *define problem* membahas konflik pembangunan pabrik semen di Rembang dari sisi aksi penolakan pembangunan pabrik semen yang dilakukan oleh masyarakat Kendeng sebagai bentuk perjuangan melindungi kelestarian alam dan kebijakan gubernur Jawa Tengah yang dibingkai sebagai kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat kecil, kemudian elemen *diagnoses causes* menjelaskan bahwa penyebab utama dalam konflik pembangunan pabrik semen adalah PT. Semen Indonesia yang membuka pabrik semen di kawasan yang dilindungi dan Gubernur Jawa Tengah yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang justru berpihak pada PT. Semen Indonesia. Kemudian argumentasi atas penolakan pembangunan pabrik semen pun dijelaskan dalam unsur *moral judgement* bahwa lokasi pembangunan pabrik semen merupakan kawasan lindung, terlebih putusan MA yang notabene berkekuatan hukum menyatakan bahwa izin pabrik semen di Rembang dibatalkan atau dicabut, dan juga masyarakat telah bersikeras menolak pembangunan pabrik semen di Rembang, sehingga memaksa masyarakat untuk setuju dengan pembangunan pabrik semen sama saja dengan menganiaya masyarakat. Pembahasan konflik pembangunan pabrik semen di Rembang pun ditutup dengan *treatment recommendation* yang meminta agar pabrik semen di Rembang dihentikan. Seperti yang terlihat, keempat elemen framing pada berita-berita kontra pembangunan semen tetap konsisten

membahas aspek yang telah diangkat dan pembahasan tidak melebar ke mana-mana, tetap pada fokus yang sama.

Berbeda dengan berita-berita pro pembangunan semen di mana pada elemen *diagnoses causes* dan elemen *treatment recommendation*nya beragam atau berbeda-beda sehingga sulit diidentifikasi atau dikelompokkan. Sulitnya mengidentifikasi unsur *diagnoses causes* dan *treatment recommendation* membuat berita-berita pro pembangunan semen sulit untuk mencari apa atau siapa penyebab utama menurut teks berita tersebut dan solusi apa yang paling diharapkan bisa dilaksanakan.

Ketiga, meskipun berita-berita pro pembangunan semen lemah dalam konsistensi fokus pada elemen *diagnoses causes* dan *treatment recommendation*, tetapi unsur *moral judgement* pada berita-berita pro pembangunan semen kuat sama seperti *moral judgement* berita-berita kontra pembangunan semen. Kekuatan yang dimaksud adalah konsistensi dalam mengangkat suatu aspek. Berita-berita pro pembangunan semen memiliki unsur *moral judgement* yang cukup kuat untuk meringkaskan keberpihakan pro pembangunan semen, terlebih unsur *moral judgement* tersebut memperkuat unsur *define problems* yang mengangkat izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia merupakan kesepakatan bersama sebagai aspek yang diangkat.

Keempat, meskipun berita-berita www.kompas.com lebih banyak yang mendukung pembangunan pabrik semen di Rembang, tetapi ada dua berita pro pembangunan semen yang merupakan keberpihakan “pro bersyarat” dan satu berita merupakan keberpihakan pro “tidak keberatan”. Keberpihakan pro bersyarat adalah pihak tersebut akan mendukung pembangunan pabrik semen di Rembang apabila memenuhi “syarat-syarat tertentu” yang berarti keberpihakan bisa saja batal apabila PT. Semen Indonesia tidak melaksanakan syarat tersebut (pemaparan lebih detail lihat pada sub bab *define problems* www.kompas.com), sedangkan keberpihakan pro tidak keberatan adalah pihak tersebut tidak

memiliki alasan yang argumentatif untuk mendukung pembangunan pabrik semen tersebut, hanya sekedar membolehkan (pemaparan lebih detail lihat pada sub bab *define problems* www.kompas.com). Meskipun keduanya merupakan pro pembangunan semen, tetapi keberpihakan tersebut tidak cukup kuat karena alasan yang tidak argumentatif dan bahkan bisa berpotensi menjadi kontra bila tidak menjalani syarat yang diajukan.

Kelima, treatment recommendation atau solusi yang ditawarkan oleh berita-berita pro pembangunan semen hanya sedikit yang mengutarakan secara langsung untuk melanjutkan pembangunan pabrik semen di Rembang, *treatment recommendation* yang paling banyak diajukan oleh berita-berita pro pembangunan semen sebagian besar adalah meminta masyarakat Rembang terutama yang menolak pembangunan semen untuk “memberi kesempatan kedua”. Hal ini menunjukkan bahwa keberpihakan www.kompas.com dalam hal mendukung pembangunan pabrik semen hanya dalam batas “biasa saja”, tidak terlalu “fanatik”. Sebab, berita-berita pro pembangunan semen www.kompas.com tidak meminta secara langsung untuk melanjutkan pembangunan pabrik semen di Rembang, tetapi hanya meminta “pengertian” masyarakat Rembang saja. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan berita-berita kontra pembangunan semen secara langsung meminta untuk menghentikan pembangunan pabrik semen di Rembang, bahkan *treatment recommendation* agar pabrik semen dihentikan menjadi *treatment recommendation* utama dalam berita-berita kontra pembangunan semen www.kompas.com .

Seperti yang telah disebutkan bahwa keberpihakan www.kompas.com pada konflik pembangunan pabrik semen di Rembang tidak jelas dengan berbagai alasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan melihat keberpihakan www.kompas.com dalam mbingkai kasus tersebut, maka peneliti melihat sikap media Kompas secara umum adalah *berusaha untuk menjadi penengah dan melihat*

kasus ini seobjektif mungkin. Hal ini sesuai dengan tagline www.kompas.com itu sendiri yaitu “*Jernih Melihat Dunia*” di mana www.kompas.com berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan berita yang objektif, independen, dan tidak bias oleh berbagai kepentingan, terutama kepentingan politik.⁸³

BAB IV

PEMBAHASAN

⁸³ “About Us : Jernih Melihat Dunia”, <https://inside.kompas.com/>, diakses pada Rabu, 09 Mei 2018 pukul 12.39 WIB. Diakses pada 03 Mei 2018

A. Perbandingan Bingkai *Press release* PT. Semen Indonesia, *Press release* JMPPK, dan Berita Kompas.com

Pada konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah, konflik tersebut bukan hanya terjadi di lapangan saja, tetapi juga terjadi dalam media yang dalam hal ini adalah teks atau naskah yang dikeluarkan pada masa konflik tersebut. Baik *press release* PT. Semen Indonesia, *press release* JMPPK, maupun *press* berita www.kompas.com memiliki bingkai masing-masing dalam menuliskan kasus konflik tersebut. Oleh karena itu, peneliti ingin membandingkan bingkai ketiga pihak tersebut dengan tujuan untuk melihat isu apa yang diangkat oleh ketiga pihak tersebut dan ingin melihat apakah terjadi pergeseran isu yang diangkat pada dua periode yang berbeda.

1. Perbandingan Bingkai Berdasarkan Periode Waktu

Peneliti menetapkan bahwa *press release* dan berita yang dianalisis adalah *press release* dan berita yang berkaitan kasus konflik pembangunan pabrik semen di Rembang yang dikeluarkan pada periode Oktober 2014 sampai Desember 2014 dan periode Oktober 2016 sampai Maret 2017. Periode Oktober 2014 sampai Desember 2014 adalah periode di mana masyarakat Rembang menggugat PT. Semen Indonesia ke Mahkamah Agung dan periode Oktober 2016 sampai Maret 2017 adalah periode di mana Putusan MA telah dikeluarkan dan kebijakan Gubernur Jawa Tengah pasca putusan MA. Dengan melihat perbandingan framing berdasarkan periode waktu, maka peneliti ingin melihat apakah ada perbedaan isu yang diangkat pada kedua periode tersebut, dan apabila memang ada, isu apakah yang diangkat pada kedua periode tersebut.

Tabel 4. 1

Perbandingan Bingkai Berdasarkan Periode Waktu

Instansi/Media	Periode Pertama (Oktober 2014-Desember 2014)	Periode Kedua
----------------	--	---------------

		(Oktober 2016-Maret 2017)
PT. Semen Indonesia	PT. Semen Indonesia adalah perusahaan yang peduli pada masyarakat dan lingkungan.	Framing tetap sama.
JMPPK	Pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah dapat merusak lingkungan karena Kendeng merupakan kawasan Cekungan Air Tanah (CAT)	Kebijakan Gubernur Jawa Tengah yang mengeluarkan addendum dan kembali menerbitkan izin lingkungan PT. Semen Indonesia bertentangan dengan Putusan MA sehingga tindakan Gubernur tersebut adalah melawan hukum dan tidak berpihak pada masyarakat kecil yang ingin melindungi kelestarian Kendeng.
Kompas.com	Semua berita www.kompas.com yang dikeluarkan pada periode ini menolak pembangunan pabrik semen di Rembang karena kawasan pegunungan Kendeng yang merupakan lokasi pabrik semen merupakan kawasan lindung.	Berita-berita www.kompas.com pada periode ini sebagian mendukung pembangunan pabrik semen dan sebagian menolak pembangunan pabrik semen. Tetapi, fokus yang diangkat pada periode ini adalah kebijakan Gubernur Jawa Tengah yang mengeluarkan izin baru pabrik semen PT. Semen Indonesia di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah.

Berdasarkan tabel di atas, *press release* PT. Semen Indonesia mengangkat framing yang sama pada kedua periode waktu tersebut. Hal

ini menunjukkan bahwa PT. Semen Indonesia tetap konsisten dengan framing yang diangkat. Sedangkan *press release* JMPPK dan www.kompas.com sama-sama mengalami pergeseran isu pada dua periode yang berbeda. Pergeseran isu merujuk pada bahwa *press release* JMPPK dan www.kompas.com mengangkat isu atau aspek yang berbeda pada kedua periode yang ditetapkan tersebut. Pada periode pertama, *press release* JMPPK dan www.kompas.com sama-sama mengangkat isu lingkungan, bahkan www.kompas.com pun turut “membenarkan” apa yang ditulis oleh *press release* JMPPK karena semua berita www.kompas.com pada periode tersebut menolak pembangunan pabrik semen di Rembang karena dapat merusak lingkungan.

Sedangkan pada periode kedua, *press release* JMPPK dan www.kompas.com pun juga mengangkat isu yang sama, yaitu kebijakan Gubernur Jawa Tengah pasca putusan MA, tetapi pada www.kompas.com terdapat beberapa berita yang justru mendukung pembangunan pabrik semen di Rembang dengan alasan tertentu (lihat pemaparan pada sub bab www.kompas.com). Hal ini menunjukkan bahwa *press release* JMPPK dan www.kompas.com memiliki bingkai yang sama dalam membahas konflik pembangunan pabrik semen di Rembang meskipun terdapat sedikit perbedaan pada aspek yang diangkat oleh www.kompas.com . Adanya beberapa berita www.kompas.com yang mendukung pembangunan pabrik semen pada periode kedua menunjukkan bahwa www.kompas.com memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat kebijakan Gubernur Jawa Tengah pasca putusan MA.

2. Perbandingan Bingkai Berdasarkan Elemen Framing

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bingkai pesan masing-masing pihak adalah untuk melihat isu apa yang diangkat dan ditonjolkan pada masa konflik tersebut.

Peneliti ingin melihat apa yang ditulis masing-masing pihak ketika dalam keadaan konflik. Pihak yang berkonflik pada konflik pembangunan pabrik semen di Rembang adalah PT. Semen Indonesia yang diwakili oleh *press release* PT. Semen Indonesia, masyarakat Rembang yang menolak pembangunan pabrik semen di Rembang yang diwakili oleh *press release* JMPPK, dan media www.kompas.com. Setelah menemukan bingkai pesan masing-masing pihak yang berkonflik, peneliti ingin membandingkannya satu sama lain, untuk melihat isu apakah yang diangkat oleh masing-masing pihak tersebut.

Tabel 4. 2

Perbandingan Berdasarkan Elemen Framing

Elemen Framing	PT. Semen Indonesia	JMPPK	Kompas.com
<i>Define Problems</i>	PT. Semen Indonesia adalah perusahaan yang peduli pada masyarakat dan lingkungan.	Pembangunan pabrik semen di Rembang memiliki lebih banyak kerugian dibanding manfaatnya terutama dalam bidang lingkungan. Selain itu, masyarakat Rembang terutama masyarakat sekitar Kendeng harus berjuang untuk melindungi pegunungan Kendeng dari elit-elit politik yang ingin merusak pegunungan Kendeng dengan berbagai cara termasuk melanggar aturan hukum yang berlaku dan	www.kompas.com memiliki keberpihakan tidak jelas pada konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, sehingga terdapat dua keberpihakan, yaitu pro pembangunan semen dan kontra pembangunan semen. Pro pembangunan semen : Difokuskan pada tokoh-tokoh yang mendukung pembangunan pabrik semen di Rembang dan izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia yang dibingkai sebagai kesepakatan yang

		masyarakat juga harus tabah dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial karena menolak pabrik semen tersebut.	telah disepakati sebelumnya oleh masyarakat Rembang. Kontra pembangunan semen : Difokuskan pada aksi masyarakat yang menolak pembangunan pabrik semen di Rembang sebagai aksi perjuangan masyarakat kecil melindungi kelestarian alam dan kebijakan Gubernur Jawa Tengah yang menerbitkan izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia sebagai kebijakan yang salah.
<i>Diagnoses Causes</i>	Tidak ada.	Penyebab utama atau aktor adalah PT. Semen Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah.	Pro pembangunan semen : Tidak ada yang menjadi penyebab utama, karena yang dijadikan penyebab masalah beragam. Kontra pembangunan semen : Gubernur Jawa Tengah dan PT. Semen Indonesia sebagai penyebab utama.
<i>Moral Judgement</i>	PT. Semen Indonesia telah melakukan	Moral judgement pada <i>press release</i> JMPPK sangat	Pro pembangunan semen : Izin pabrik semen PT. Semen

	<p>banyak kontribusi dalam bidang sosial dan lingkungan, meraih pengakuan akan hal tersebut berupa prestasi dan penghargaan, serta pengakuan dari tokoh-tokoh penting akan hal tersebut.</p>	<p>banyak, tetapi secara garis besar yang diangkat menjadi moral judgement, yaitu kawasan Kendeng lokasi pabrik semen tersebut adalah kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) yang memiliki banyak mata air, putusan MA yang berkekuatan hukum jelas menyatakan bahwa izin pabrik semen di Rembang dicabut, dan elit-elit politik yang tidak berpihak pada masyarakat kecil.</p>	<p>Indonesia yang baru merupakan kesepakatan bersama, termasuk dengan masyarakat Rembang dan PT. Semen Indonesia adalah perusahaan yang baik.</p> <p>Kontra pembangunan semen : Masyarakat Rembang telah menolak keras pembangunan pabrik semen di Rembang, sehingga pabrik semen harus dihentikan, melanjutkan pabrik semen sama saja dengan memaksa masyarakat Rembang, lokasi pabrik semen di Rembang adalah kawasan lindung, dan izin pabrik semen di Rembang telah dicabut oleh MA sehingga pabrik semen harus dihentikan.</p>
<p><i>Treatment Recommendation</i></p>	<p>Tidak ada.</p>	<p>Treatment recommendation sangat banyak. Tetapi yang paling banyak diajukan adalah agar Gubernur Jawa Tengah mematuhi putusan MA dengan mencabut</p>	<p>Pro pembangunan semen : Tidak ada solusi utama, karena solusi yang ditawarkan beragam, tetapi sebagian besar solusi ditujukan untuk masyarakat penolak pabrik</p>

		izin lingkungan PT. Semen Indonesia dan agar Jokowi turut campur tangan dalam kasus ini.	semen di Rembang agar memberi PT. Semen Indonesia kesempatan kedua. Kontra pembangunan semen : Hentikan pembangunan pabrik semen di Rembang sebagai solusi utama yang ditawarkan.
Bingkai Umum	PT. Semen Indonesia adalah perusahaan yang peduli pada masyarakat dan lingkungan.	Pembangunan pabrik semen di Rembang memiliki lebih banyak kerugian dibanding manfaatnya terutama dalam bidang lingkungan. Selain itu, masyarakat Rembang terutama masyarakat sekitar Kendeng harus berjuang untuk melindungi pegunungan Kendeng dari elit-elit politik yang ingin merusak pegunungan Kendeng dengan berbagai cara termasuk melanggar aturan hukum yang berlaku dan masyarakat juga harus tabah dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial karena	www.kompas.com mendukung pembangunan pabrik semen di Rembang karena izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia merupakan hasil kesepakatan bersama, termasuk dengan masyarakat Rembang terlebih banyak tokoh-tokoh penting yang mendukung. Tetapi di sisi lain www.kompas.com juga menolak pembangunan pabrik semen di Rembang karena masyarakat bersikeras tidak mau ada pabrik semen di Kendeng dengan alasan pabrik semen tersebut akan merusak lingkungan, terlebih juga

		menolak pabrik semen tersebut.	putusan MA menyatakan bahwa izin pabrik semen di Rembang dicabut sehingga Gubernur Jawa Tengah harus mencabut izin pabrik tersebut.
--	--	--------------------------------	---

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan bila melihat masing-masing bingkai umum dan elemen *define problems*, *press release* PT. Semen Indonesia, *press release* JMPPK, dan berita www.kompas.com secara keseluruhan mengangkat isu yang sama, yaitu isu lingkungan dan sosial, kemudian khusus *press release* JMPPK dan www.kompas.com juga mengangkat isu politik dan hukum. Tetapi yang membedakan antara ketiga pihak tersebut adalah fokus atau aspek yang diangkat.

Press release PT. Semen Indonesia memang mengangkat isu lingkungan dan sosial, tetapi fokus yang diangkat adalah bagaimana kontribusi PT. Semen Indonesia dalam isu lingkungan dan isu sosial, sehingga bingkai yang muncul adalah bingkai PT. Semen Indonesia sebagai perusahaan yang peduli dengan masyarakat kecil dan lingkungan. Bila melihat konteks atau waktu dikeluarkannya *press release* tersebut, maka bingkai pesan ini membantah *press release* JMPPK dan www.kompas.com yang menyatakan bahwa PT. Semen Indonesia adalah perusahaan yang tidak peduli dengan masyarakat kecil dan pabrik semen PT. Semen Indonesia yang dianggap merusak lingkungan.

Sedangkan *press release* JMPPK memfokuskan bingkai pada pembangunan pabrik semen di Rembang dapat merusak lingkungan dan segala kebijakan yang mendukung pembangunan pabrik semen merupakan kebijakan yang bertentangan dengan aturan hukum dan tidak berpihak pada masyarakat kecil dan kelestarian lingkungan.

Kemudian pada www.kompas.com memiliki dua sisi karena beberapa berita mendukung pabrik semen di Rembang dan beberapa berita lainnya menolak pembangunan pabrik semen. Pada berita-berita pro pembangunan semen, www.kompas.com memfokuskan pada izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia yang telah disepakati bersama dan mendapat dukungan oleh tokoh-tokoh penting, sedangkan berita-berita kontra pembangunan semen memfokuskan pada aksi penolakan pembangunan pabrik semen sebagai aksi perjuangan masyarakat dalam melindungi kelestarian alam dan kebijakan Gubernur Jawa Tengah terkait konflik pembangunan semen dianggap tidak berpihak pada masyarakat kecil di Rembang.

Pada elemen *diagnoses causes, press release* PT. Semen Indonesia tidak memiliki hal atau “aktor” yang dianggap menjadi penyebab masalah, sehingga elemen *diagnoses causes* pada PT. Semen Indonesia tidak ada. Meskipun ada satu *press release* PT. Semen Indonesia yang memiliki elemen *diagnoses causes*, tetapi yang diangkat menjadi penyebab masalah dalam *press release* tersebut hanyalah hubungan sebab akibat yang tidak memiliki unsur menyalahkan.

Kemudian pada *press release* JMPPK, PT. Semen Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi pihak utama yang dianggap menjadi penyebab masalah. PT. Semen Indonesia disalahkan karena membangun pabrik semen di pegunungan Kendeng yang merupakan kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) sehingga dikhawatirkan akan terjadi kerusakan lingkungan bila membangun pabrik semen di sana. Sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disalahkan karena kebijakannya yang membuat addendum dan kembali menerbitkan izin lingkungan PT. Semen Indonesia pasca putusan MA. Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan hukum karena putusan MA menyatakan bahwa izin pabrik semen PT. Semen Indonesia di Rembang dicabut dan menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo

tidak berpihak pada masyarakat kecil di Rembang serta kelestarian lingkungan.

Kemudian pada www.kompas.com, *diagnoses causes* pada berita-berita kontra pembangunan semen sama dengan *diagnoses causes press release* JMPPK yang menyalahkan PT. Semen Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Lalu pada berita-berita www.kompas.com yang pro pembangunan semen memiliki *diagnoses causes* yang beragam karena banyaknya hal yang dianggap menjadi penyebab masalah oleh berita pro pembangunan semen, sehingga *diagnoses causes* pada berita-berita pro pembangunan semen tidak memiliki “penyebab utama” dalam konflik pembangunan pabrik semen tersebut.

Pada elemen *moral judgement*, *press release* PT. Semen Indonesia mengklaim bahwa PT. Semen Indonesia telah melakukan banyak kontribusi pada masyarakat dalam bidang sosial dan lingkungan, seperti memberikan sejumlah bantuan dan pembangunan sarana, serta mendukung sekolah berbasis lingkungan, dan lain-lain. Kontribusi tersebut mendapat pengakuan dari tokoh-tokoh penting dan berbagai penghargaan serta prestasi yang diterima oleh PT. Semen Indonesia atas kontribusi tersebut.

Sedangkan pada *press release* JMPPK, terdapat sangat banyak argumentasi dan klaim yang dijadikan *moral judgement*, tetapi secara garis besar *moral judgement* utama pada *press release* JMPPK adalah lokasi pabrik semen PT. Semen Indonesia yang berada di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) yang juga merupakan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) di mana kawasan tersebut merupakan kawasan yang dilindungi. *Moral judgement* utama lainnya adalah Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 99/PK/TUN/2016 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa izin pabrik semen PT. Semen Indonesia di Rembang dibatalkan, tidak dipatuhinya putusan

MA tersebut oleh elit-elit politik menunjukkan bahwa penguasa tidak berpihak pada masyarakat kecil dan kelestarian lingkungan.

Dan untuk berita www.kompas.com, pada berita-berita yang pro pembangunan semen mengklaim bahwa izin lingkungan PT. Semen Indonesia yang baru merupakan hasil kesepakatan bersama termasuk dengan masyarakat Rembang pada sidang addendum 2 Februari 2017, sehingga bila masyarakat Rembang masih menolak pabrik semen di Rembang berarti tidak menghargai kesepakatan bersama tersebut. Selain itu, PT. Semen Indonesia adalah perusahaan yang bertanggung jawab (baik) sehingga tidak perlu khawatir mengenai keberlanjutan pabrik semen di Rembang. Lalu pada berita-berita yang kontra pembangunan semen, *moral judgement* hampir sama dengan *moral judgement press release JMPPK*, tetapi pada berita www.kompas.com menambahkan aksi penolakan pabrik semen yang dilakukan oleh masyarakat di Rembang dibingkai sebagai aksi perjuangan masyarakat dalam melindungi kelestarian alam.

Pada elemen *treatment recommendation, press release* PT. Semen Indonesia tidak menawarkan solusi apa pun, hal ini menunjukkan bahwa PT. Semen Indonesia tidak menuntut kasus konflik ini untuk diselesaikan menurut sudut pandang PT. Semen Indonesia.

Berbanding terbalik dengan *press release JMPPK* yang memiliki sangat banyak *treatment recommendation*, di mana terdapat dua puluh dua solusi yang ditawarkan. Namun, secara garis besar solusi utama yang ditawarkan oleh *press release JMPPK* adalah meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk mematuhi putusan MA dengan segera mencabut izin lingkungan pabrik semen di Rembang, dan meminta presiden Jokowi untuk campur tangan dalam kasus ini.

Treatment recommendation pada www.kompas.com berbeda dari *press release* PT. Semen Indonesia maupun *press release JMPPK*, baik yang pro pembangunan semen maupun yang kontra pembangunan semen. Pada berita-berita www.kompas.com yang pro pembangunan

semen, secara garis besar *treatment recommendation* ditujukan pada masyarakat Rembang khususnya yang menolak pabrik semen di Rembang agar memberikan PT. Semen Indonesia “kesempatan kedua”. Sedangkan pada berita-berita kontra pembangunan semen secara tegas meminta agar pabrik semen dihentikan.

B. Produksi Wacana

Menurut pemikiran Michael Foucault, pengetahuan dan kekuasaan merupakan sesuatu yang saling berkaitan, di mana pengetahuan akan membuat seseorang atau kelompok memiliki kekuasaan, dan kekuasaan akan memproduksi sebuah pengetahuan sebagai legitimasi atas kekuasaan itu sendiri⁸⁴. Tetapi, kekuasaan di sini bukan merupakan sebuah jabatan konstitusional, melainkan sebuah kontrol atas pemikiran mengenai benar dan salah⁸⁵. Benar dan salah inilah yang sering disebut sebagai wacana.

Dalam kasus konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, tidak hanya terjadi produksi pengetahuan atau wacana oleh saja, tetapi juga terjadi “pertarungan” dalam memproduksi wacana. Pihak yang bertarung tersebut adalah PT. Semen Indonesia, masyarakat Rembang (JMPPK), dan media yang terlibat dalam pertarungan wacana ini di mana peneliti memilih media Kompas.

Tabel 4. 3

Produksi Wacana Pada Masa Konflik Pembangunan Pabrik Semen Rembang

Media/Instansi	Wacana yang Diproduksi
----------------	------------------------

⁸⁴ Eriyanto. “Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media”. (Yogyakarta : PT. LkiS Pelangi Aksara, 2009). Halaman 66.

⁸⁵ Iswandi Syahputra. “Post Media Literacy : Menyaksikan Kuasa Media Bersama Michael Foucault”. Jurnal ASPIKOM, Volume 1, Nomor 1 (Juli 2010). Halaman 6.

PT. Semen Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Semen Indonesia adalah perusahaan yang peduli lingkungan dan masyarakat sosial 2. Pabrik PT. Semen Indonesia adalah pabrik yang ramah lingkungan
JMPPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah merusak lingkungan 2. Penolakan pembangunan pabrik semen di Rembang adalah cara untuk melindungi alam 3. Elit-elit politik egois dan serakah karena lebih mementingkan keuntungan daripada kelestarian lingkungan
Media Kompas.com (www.kompas.com)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada pemberitaan tahun 2014, wacana yang diproduksi media Kompas ialah menolak pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah karena merusak lingkungan terlebih masyarakat Rembang menolak keras akan hal tersebut 2. Pada pemberitaan tahun 2016 dan 2017, media Kompas menyetujui izin baru lingkungan PT. Semen Indonesia karena masyarakat Rembang telah sepakat akan hal tersebut melalui sidang adeddum

Berdasarkan tabel di atas, PT. Semen Indonesia adalah satu-satunya instansi yang tidak memproduksi wacana yang berbicara langsung mengenai konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, meskipun isu yang diangkat masih seputar isu lingkungan dan sosial. Kecendrungan PT. Semen Indonesia yang tidak berbicara langsung atas konflik tersebut menunjukkan bahwa PT. Semen Indonesia menganggap konflik pembangunan pabrik semen di Rembang sebagai konflik yang tidak membahayakan perusahaan. Sebab, apabila pihak yang berkonflik memilih untuk menghindari pembicaraan terkait konflik, maka pihak tersebut menganggap konflik tersebut tidak terlalu penting⁸⁶. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aghnia Kaulika F yang menyatakan bahwa PT. Semen Indonesia tidak menganggap konflik pembangunan pabrik semen di Rembang sebagai krisis⁸⁷. Padahal, konflik

⁸⁶ Pelatihan Keterampilan Manajerial SPMK (KPMK UGM), Manajemen Konflik, (Yogyakarta, Januari 2003)

⁸⁷ Aghnia Kaulika Febrigiasty. "Strategi Manajemen Krisis PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk : Studi Kasus pada Proyek Pembangunan Pabrik di Rembang". Skripsi Sarjana (tidak

pembangunan pabrik semen di Rembang memenuhi karakteristik sebagai krisis menurut Kouzmin⁸⁸ di mana konflik tersebut menimbulkan korban jiwa⁸⁹ serta menimbulkan kerusakan fisik dan non fisik⁹⁰.

Bungkamnya PT. Semen Indonesia pada konflik pembangunan pabrik semen di Rembang menunjukkan bahwa PT. Semen Indonesia masih mementingkan kepentingannya sendiri dan acuh terhadap masyarakat Rembang. Terlebih dengan didapatkannya kembali izin lingkungan pabrik semen di Rembang, menunjukkan bahwa masyarakat masih selalu menjadi pihak yang dikalahkan ketika terjadi konflik dengan perusahaan, terutama konflik lingkungan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Jendral KPA (Konsorium Pembaruan Agraria), Iwan Nurdin yang dilansir dari www.harnas.co, yang menyatakan bahwa :

“Perusahaan seakan menjadi peran utama dalam setiap kasus yang terjadi. Tidak jarang mereka semena-mena hingga menyebabkan kerusuhan bahkan sampai pada tewasnya warga”⁹¹

Konflik lingkungan menjadi konflik yang paling banyak mengorbankan masyarakat. Hal ini didukung data Komnas HAM pada tahun 2012, kasus pelanggaran HAM terbanyak yang melibatkan korporasi adalah konflik agraria

dipublikasikan) Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.

⁸⁸ Rachmat Kriyantono. *“Public relations, Issue & Crisis Management : Pendekatan Critical Public relations, Etnografi Kritis & Kualitatif”*. (Jakarta : Prenada Media Group, 2015) Halaman 197 – 204.

⁸⁹ Kristian Erdianto. “Kronologi Wafatnya Patmi, Petani Kendeng Usai Aksi Dipasung Semen”. <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/21/15294751/kronologi.wafatnya.patmi.petani.kendeng.usai.aksi.dipasung.semen>. Diakses pada 12 Juli 2018.

⁹⁰ Press release JMPPK. “PERNYATAAN KOMNAS PEREMPUAN ATAS PENDIRIAN DAN RENCANA PENDIRIAN PABRIK SEMEN SERTA EXPLOITASI KAWASAN KARTS DI PEGUNUNGAN KENDENG UTARA DAN SELATAN”. 30 Desember 2016.

⁹¹ Tegar Rizqon. “Masyarakat jadi Korban Konflik Agraria”. <http://www.harnas.co/2016/01/06/masyarakat-jadi-korban-konflik-agraria>. Diakses pada 12 Juli 2018

di mana terdapat 446 kasus dari 1048 kasus yang terjadi, kemudian juga terdapat kasus kerusakan lingkungan yang berada di urutan ketiga⁹².

Konflik pembangunan pabrik semen di Rembang hanyalah satu dari sekian banyak bukti bahwa perusahaan masih lebih mementingkan kepentingannya sendiri dan masyarakat kecil harus selalu menjadi pihak yang dikalahkan bahkan dikorbankan ketika terjadi konflik lingkungan.

Bila ditinjau dari kajian mengenai *press release*, PT. Semen Indonesia cenderung menggunakan *basic publicity release* pada masa konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, di mana jenis *press release* ini menekankan informasi-informasi yang mengandung nilai berita yang nantinya akan dikirim ke media dengan harapan agar *press release* tersebut dimuat di media⁹³. Sebab, media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat melalui informasi yang disampaikan⁹⁴.

Berdasarkan motivasi perusahaan dalam menulis *press release* menurut Mahmud Muhidin⁹⁵, PT. Semen Indonesia menulis *press release* dengan motif untuk memelihara kesadaran masyarakat (*awareness*) akan perusahaan. Hal ini merupakan hal yang lumrah karena semua organisasi terutama korporasi yang berbasis profit tentu ingin selalu diingat oleh masyarakat. Tetapi, satu hal yang peneliti sayangkan pada PT. Semen Indonesia adalah PT. Semen Indonesia tidak menggunakan *press release* untuk memberikan konfirmasi terkait krisis yang menimpa PT. Semen Indonesia, maupun membantah informasi-informasi yang tidak benar pada masa konflik pembangunan pabrik semen di Rembang. Padahal, *press release* dapat digunakan untuk memberi konfirmasi maupun

⁹² Lusya Arumingtyas. "Konflik Kekayaan Alam, Pemerintah Cenderung Berpihak pada Perusahaan". <http://www.mongabay.co.id/2016/10/31/konflik-kekayaan-alam-pemerintah-cenderung-bepihak-pada-perusahaan/>. Diakses pada 12 Juli 2018

⁹³ Arnita Nur Novianti. "Proses Penulisan Press Release Untuk Mendukung Media Massa oleh Humas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta". Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012. Halaman 13.

⁹⁴ Rizki Hidayat. "Peran *Public relations* dalam Mempengaruhi Konten Media". Jurnal Interaksi, Volume 5 No. 1 (Januari, 2016). Halaman 91.

⁹⁵ Titis Gandariani. "Public Relations dan Kemampuan Menulis Press Release sebagai Publisitas Korporat". Jurnal Lentera Komunikasi, Vol.2 No. 1 (Agustus, 2016). Halaman 72.

membantah isu-isu yang menimpa perusahaan⁹⁶. Meskipun PT. Semen Indonesia konsisten membahas isu lingkungan dan sosial pada masa konflik di mana kedua isu tersebut merupakan isu yang digunakan untuk menyerang PT. Semen Indonesia, namun hal itu bagi penulis tidak cukup. Penggunaan *press release* untuk memberikan konfirmasi atau bantahan dapat digunakan sebagai respon atau sikap perusahaan dalam menanggapi krisis yang menimpa perusahaan, termasuk dalam halnya adalah konflik pembangunan pabrik semen di Rembang.

Sedangkan JMPPK memproduksi wacana yang berbicara langsung mengenai konflik pembangunan pabrik semen di Rembang. Bila melihat wacana yang diproduksi oleh JMPPK, maka dapat disimpulkan bahwa JMPPK memposisikan dirinya sebagai dua pihak, yaitu sebagai aktivis lingkungan dan sebagai masyarakat kecil. Posisi sebagai aktivis lingkungan terlihat jelas dari wacana utama yang diproduksi oleh JMPPK di mana pabrik semen di Rembang ditolak kehadirannya karena dapat merusak lingkungan dan sejumlah aksi yang dilakukan yang dibingkai sebagai bentuk perjuangan melindungi kelestarian lingkungan. Sedangkan posisi sebagai masyarakat kecil terlihat dari wacana JMPPK mengenai elit-elit politik yang mendukung pembangunan pabrik semen di Rembang sebagai pihak yang egois. Posisi sebagai masyarakat ini juga diperkuat dengan berbagai pernyataan yang berbicara mengenai keadilan dan hak asasi manusia pada beberapa *press release* yang dikeluarkan JMPPK.

Bila melihat motivasi JMPPK dalam menulis *press release*, maka peneliti melihat motif yang digunakan JMPPK dalam menulis *press release* sebagian besar adalah untuk memelihara kesadaran masyarakat akan keberadaan JMPPK dan menginformasikan gagasan-gagasan yang dibawa oleh JMPPK. Motivasi untuk memelihara kesadaran tersebut terlihat dari cukup seringnya JMPPK menulis *press release* pada masa konflik pembangunan pabrik semen di Rembang. Penggunaan *press release* sebagai sarana untuk menyampaikan

⁹⁶ Ibid

gagasan juga terlihat dari banyaknya gagasan atau pemikiran JMPPK yang tertuang dalam *press release* nya (lihat pada pada Bab III bagian *press release* JMPPK). Terkadang, JMPPK juga menggunakan *press release* JMPPK untuk mengeluarkan pernyataan sikap JMPPK pada suatu isu atau respon terhadap keadaan. Salah satunya adalah *press release* JMPPK yang berjudul “*Pernyataan Sikap WALHI : Perlawanan WALHI terhadap Kejahatan Lingkungan Hidup di Karst Kendeng*” yang berisi respon atas kebijakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tidak mencabut izin lingkungan PT. Semen Indonesia, WALHI dan JMPPK pun secara tegas menyatakan tidak mendukung kebijakan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Wacana yang diproduksi media Kompas berbeda dengan wacana yang diproduksi oleh PT. Semen Indonesia dan JMPPK, wacana yang diproduksi tidak konsisten, karena menunjukkan keberpihakan yang berbeda. Wacana yang diproduksi oleh media Kompas pada tahun 2014 menyatakan menolak pabrik semen di Rembang, sedangkan wacana yang diproduksi pada tahun 2016 dan 2017 menyatakan mendukung pembangunan pabrik semen. Berdasarkan hasil analisis framing pada bab sebelumnya, perubahan keberpihakan ini terjadi karena hasil sidang addendum yang melibatkan masyarakat Rembang menyatakan telah setuju untuk memberikan izin lingkungan baru untuk PT. Semen Indonesia. Ketidakjelasan keberpihakan media Kompas ini dikonfirmasi oleh editor www.kompas.com Farid Assifa yang menyatakan bahwa :

“Kami sebagai media berada di posisi netral, mengakomodir kepentingan masyarakat dan ikut mengontrol kebijakan pemerintah soal pabrik semen. Jangan sampai dampak pabrik semen merugikan masyarakat. Kami juga memberi ruang bagi pabrik untuk melakukan pembelaan, memberi penjelasan terkait masalah izin, amdal dan lain-lain...”⁹⁷

⁹⁷ Wawancara via Email dengan Editor www.kompas.com Farid Assifa, 11 Juni 2018.

Sehingga berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa keberpihakan media Kompas tidak jelas karena media tersebut berusaha untuk netral dalam memberitakan konflik pembangunan pabrik semen di Rembang.

Selain menunjukkan keberpihakan media Kompas.com, wacana yang diproduksi oleh media tersebut beserta hasil wawancara dengan salah satu editor www.kompas.com juga menunjukkan bagaimana media tersebut melihat konflik pembangunan pabrik semen di Rembang. Berdasarkan hal yang disebutkan di atas, peneliti melihat bahwa media Kompas memandang konflik pembangunan pabrik semen di Rembang sebagai konflik sosial, bukan konflik lingkungan. Hal ini terlihat dari bagaimana media Kompas lebih memfokuskan pada perseteruan masyarakat Rembang dengan PT. Semen Indonesia dibanding bagaimana prediksi keadaan pegunungan Kendeng di masa depan apabila pabrik semen di Rembang tetap dibangun atau topik-topik lain yang berkaitan dengan lingkungan. Pandangan media Kompas ini juga menunjukkan bahwa isu lingkungan masih belum bisa menggeser isu politik dan sosial, sebagai isu yang paling menarik perhatian media untuk diangkat⁹⁸. Isu lingkungan hanya menjadi “isu pendukung” saja, bukan sebagai isu utama. Hal ini disebabkan karena isu lingkungan bukanlah isu yang bisa berdiri sendiri, sehingga isu ini akan selalu dikaitkan dengan isu-isu lainnya⁹⁹. Ditambah lagi, isu lingkungan merupakan isu yang membutuhkan pengetahuan khusus mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam isu lingkungan¹⁰⁰, sehingga membuat wartawan

⁹⁸ Suyanto. “Jurnalisme dan Lingkungan Hidup di Media Massa”. Prosiding Seminar Antarbangsa ke 5. <https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7575/artikel.pdf?sequence=3&isAllowed=y> Halaman 490 – 491. Diakses pada 17 Juli 2018.

⁹⁹ Rosalita Dian Utami dan Bonaventura Satya Bharata. “Praktek Jurnalisme Lingkungan Dalam Pemberitaan Pembangunan Pabrik Semen Di Kawasan Pegunungan Kendeng Rembang (Analisis Framing Praktek Jurnalisme Lingkungan dalam Pemberitaan Pembangunan Pabrik Semen di Kawasan Pegunungan Kendeng Rembang pada Media Mongabay.co.id Periode Februari-Agustus 2014)”. <http://e-journal.uajy.ac.id/9453/1/JURNALKOM04422.pdf> . (diakses 06 September 2018).

¹⁰⁰ Ibid

tidak tertarik untuk mengangkat isu ini, karena butuh usaha lebih untuk mendalami isu ini¹⁰¹.

C. Etika Lingkungan Hidup

Sikap manusia terhadap lingkungan baik merusak maupun melestarikan atau cuek dipengaruhi oleh bagaimana manusia tersebut memandang lingkungan itu sendiri. Menurut Sonny Keraf dalam bukunya yang berjudul “Etika Lingkungan Hidup¹⁰²”, terdapat tiga etika lingkungan hidup yang dianut oleh manusia yaitu :

1. Antroposentrisme

Etika lingkungan hidup yang menganut paham bahwa manusia adalah titik sentral alam semesta¹⁰³ sehingga keberadaan alam diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan manusia berhak menggunakan sebebasnya selama bisa memenuhi kebutuhannya¹⁰⁴.

2. Biosentrisme

Etika lingkungan hidup ini menyatakan bahwa manusia bukanlah titik sentral alam semesta, melainkan bagian dari spesies makhluk hidup yang ada di bumi bersama hewan dan tumbuhan, oleh karena itu hewan dan tumbuhan juga memiliki hak yang sama dengan manusia untuk dipenuhi kebutuhan hidupnya, dilindungi, dan diperjuangkan¹⁰⁵.

3. Ekosentrisme

Paham ini merupakan kelanjutan dari biosentrisme dengan cakupan yang lebih luas. Paham ini menekankan alam dan spesies makhluk hidup sebagai kesatuan ekosistem di muka bumi yang saling terikat satu sama

¹⁰¹ Ibid

¹⁰² Sonny Keraf. “Etika Lingkungan Hidup”. (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2010). Halaman 45.

¹⁰³ Dwi Febriyani. “Krisis Lingkungan Hidup dan Pandangan Antroposentrisme Menurut A. Sonny Keraf”. (Skripsi S1, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017). Halaman 111

¹⁰⁴ Ibid Halaman 6

¹⁰⁵ Sutoyo. “Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup”. ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1. Halaman 200-202

lain, sehingga aspek kehidupan yang bernilai bukan hanya pada makhluk hidup, tetapi juga alam atau dalam hal ini adalah lingkungan¹⁰⁶.

Bila etika lingkungan ini ditarik pada kasus konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah, maka dapat ditemukan bagaimana PT. Semen Indonesia, JMPPK, dan media Kompas dalam melihat lingkungan. Pemahaman yang dianut inilah yang mempengaruhi bagaimana sikap dan tindakan PT. Semen Indonesia, JMPPK, dan media Kompas dalam melihat konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah yang terlihat dari masing-masing pesan yang dikeluarkan pada konflik tersebut.

Melihat bagaimana sikap PT. Semen Indonesia terhadap isu lingkungan dan teks-teks yang dikeluarkan, maka perusahaan tersebut menganut paham antroposentrisme. Sikap antroposentrisme ini terlihat jelas dari keputusan PT. Semen Indonesia untuk membangun pabrik semen di wilayah Kendeng didasarkan atas alasan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan semen dan kepentingan bisnis atau meraih keuntungan. Meskipun PT. Semen Indonesia melakukan CSR bidang lingkungan, bahkan mendapat peringkat Emas PROPER pada tahun 2013¹⁰⁷ dan meraih penghargaan bidang lingkungan dari Kementerian ESDM tahun 2017¹⁰⁸, hal itu tetap tidak mengubah fakta bahwa PT. Semen Indonesia menganut paham antroposentrisme. Berbagai prestasi yang diraih oleh PT. Semen Indonesia dalam bidang lingkungan justru menimbulkan pertanyaan bagaimana definisi perusahaan ramah lingkungan itu sendiri. Sebab, keputusan PT. Semen Indonesia untuk membangun pabrik semen di kawasan Kendeng yang merupakan kawasan lindung geologi membuat peneliti mempertanyakan mengapa PT. Semen Indonesia

¹⁰⁶ Ibid halaman 203-204

¹⁰⁷ Widi Agustian. "12 Perusahaan Paling Ramah Lingkungan". <https://economy.okezone.com/read/2013/12/10/320/910168/12-perusahaan-paling-ramah-lingkungan>. Diakses pada 03 Juli 2018.

¹⁰⁸ RO-Micom. "PT Semen Indonesia Raih Penghargaan Bidang Lingkungan dari ESDM". <http://mediaindonesia.com/read/detail/105557-pt-semen-indonesia-raih-penghargaan-bidang-lingkungan-dari-esdm>. Diakses pada 03 Juli 2018.

mendapatkan berbagai penghargaan tersebut sementara membangun pabrik di kawasan lindung geologi adalah hal yang dilarang menurut aturan hukum¹⁰⁹.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013, kriteria perusahaan ramah lingkungan adalah perusahaan yang melakukan efisiensi energi, pengolahan limbah dengan prinsip 3R, pengurangan pencemaran udara, pengurangan pencemaran air, dan perlindungan keanekaragaman hayati¹¹⁰. PT. Semen Indonesia dikategorikan perusahaan ramah lingkungan karena melakukan sejumlah kriteria yang disebutkan sebelumnya. Meskipun demikian, definisi perusahaan ramah lingkungan ini tetap tidak merubah PT. Semen Indonesia dan perusahaan tambang lainnya sebagai pihak yang menganut paham antroposentrisme, sebab definisi ini justru masih memberikan kesempatan pada perusahaan agar bisa menjalankan kepentingan bisnisnya. Definisi perusahaan ramah lingkungan ini juga seolah memberikan pernyataan bahwa “*selama memenuhi dan melakukan kriteria perusahaan lingkungan, maka perusahaan tetap boleh beroperasi*”, meskipun perusahaan tersebut tetap memiliki potensi merusak lingkungan karena dibangun di kawasan lindung. Definisi ramah lingkungan ini pun semakin menunjukkan paham antroposentrismenya menurut artikel yang dilansir oleh salah satu majalah marketing online www.swa.co.id yang menyatakan bahwa perusahaan yang ramah lingkungan justru akan mendapat keuntungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa perpanjangan hak konsensi dan dimudahkan mengajukan pinjaman¹¹¹. Keuntungan yang didapatkan perusahaan yang didefinisikan ramah lingkungan ini justru semakin mendukung kepentingan bisnis perusahaan bukan kepentingan pelestarian lingkungan.

¹⁰⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung pasal 11 ayat 2.

¹¹⁰ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 8B.

¹¹¹ Yeffrie Yundiarto Prahadi. “Perusahaan Ramah Lingkungan, Apa Untungnya?”. <https://swa.co.id/swa/trends/management/perusahaan-ramah-lingkungan-apa-untungnya>. Diakses pada 03 Juli 2018

Selain itu, bila melihat dari cara PT. Semen Indonesia membingkai isu lingkungan, dapat dilihat bahwa PT. Semen Indonesia lebih cenderung membingkai isu lingkungan dengan menggunakan tiga model framing *public relations*, yaitu *atribusi*, *pilihan-pilihan resiko*, dan *berita*. Model atribusi terlihat dari bagaimana PT. Semen Indonesia menonjolkan prestasi-prestasi di bidang lingkungan dan inovasi metode pengolahan limbah. Sedangkan model pilihan-pilihan resiko terlihat dari bagaimana PT. Semen Indonesia melakukan kontribusi besar di bidang sosial dan lingkungan, di mana dalam *press release* ini PT. Semen Indonesia mengeluarkan dana yang besar untuk CSR. Dana besar ini dibingkai sebagai resiko bagi PT. Semen Indonesia, sehingga akan memunculkan kesan bahwa “*PT. Semen Indonesia rela keluar uang banyak demi masyarakat Rembang dan kelestarian lingkungan*”. Sedangkan model berita terlihat dari *press release-press release* yang dikeluarkan PT. Semen Indonesia, baik yang dalam periode penelitian, maupun tidak. Semua *press release* tersebut memiliki nilai berita, sehingga layak dimuat di media. Meskipun demikian, PT. Semen Indonesia tidak memfokuskan framing nya pada tanggung jawab. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa PT. Semen Indonesia lebih cenderung menggunakan model framing lain dibanding model framing tanggung jawab. Padahal model framing tanggung jawab sangat pas digunakan ketika suatu perusahaan tertimpa krisis, terlebih bila krisis tersebut menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Hal ini sangat disayangkan mengingat pada masa konflik pembangunan pabrik semen di Rembang, PT. Semen Indonesia dipersepsikan sebagai salah satu pelaku dalam konflik tersebut.

Sedangkan JMPPK menganut paham ekosentrisme. Paham ini sudah terlihat jelas dari berbagai pernyataan dan teks-teks yang dikeluarkan oleh JMPPK yang selalu menyuarakan kelestarian lingkungan. Tetapi, paham ekosentrisme yang dianut oleh JMPPK memiliki nuansa kearifan lokal dan perjuangan. Dilansir dari berita www.kompas.com, paham ekosentrisme JMPPK yang dalam hal ini adalah masyarakat Kendeng telah dipegang teguh

oleh nenek moyang mereka sejak ratusan tahun yang lalu. Bagi mereka, alam ibarat ibu yang memberi kehidupan sehingga harus dilindungi. Nuansa lokal semakin terasa dengan tembang ibu bumi yang berbunyi “*Ibu bumi wis maringi, ibu bumi dilarani, ibu bumi kang ngadili (Ibu bumi sudah memberi, ibu bumi disakiti, dan ibu bumi akan mengadili)*”¹¹². Sedangkan nuansa perjuangan terlihat dari bagaimana JMPPK menganggap melindungi alam dari kerusakan adalah bagian dari mencintai dan melindungi negara Indonesia pada narasi-narasi dalam tiap tulisannya¹¹³.

Press release JMPPK memiliki kecenderungan menggunakan model framing tindakan-tindakan dan isu-isu dalam membingkai isu lingkungan maupun konflik pembangunan pabrik semen di Rembang. Penggunaan model framing tindakan-tindakan ini terlihat dari JMPPK yang mengarahkan pembaca untuk melakukan suatu menyetujui bahwa pabrik semen di Rembang merusak lingkungan. Sedangkan model framing isu-isu terlihat dari JMPPK yang mengangkat isu lingkungan dalam *press release* nya. Isu lingkungan tersebut diperkuat dengan berbagai kutipan pernyataan tokoh, kutipan aturan hukum, bahkan hasil penelitian. Kecenderungan penggunaan dua model framing tersebut sesuai dengan JMPPK, karena dua model framing tersebut cocok digunakan untuk organisasi non profit yang lebih menekankan pada ajakan persuasif dan kesadaran akan suatu isu.

Sedangkan media Kompas juga menganut paham antroposentrisme. Paham antroposentrisme ini karena media Kompas hanya sekedar memberitakan isu lingkungan, bukan media yang memiliki keberpihakan pada isu lingkungan. Sebuah media dikatakan memiliki keberpihakan lingkungan apabila media tersebut menerapkan prinsip-prinsip etika lingkungan dalam memberitakan lingkungan, yaitu adanya nilai-nilai dan pengetahuan mengenai kelestarian

¹¹² Kristian Erdianto. “Air Mata Petani Kendeng dan Prinsip “Sedulur Sikep” Menjaga Ibu Bumi. <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/23/06450991/air.mata.petani.kendeng.dan.prinsip.sedulur.sikep.menjaga.ibu.bumi>. Diakses pada 03 Juli 2018

¹¹³ *Press release* JMPPK. “Pers Release Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK : HORMATI PUTUSAN PENGADILAN, DAN BERHENTILAH MEMBUAT PERNYATAAN KONTROVERSIAL”. 10 November 2016.

lingkungan yang disampaikan secara tersirat dalam berita¹¹⁴. Prakteknya, berdasarkan pemaparan sebelumnya, bahwa media Kompas memberitakan konflik pembangunan pabrik semen di Rembang sebagai konflik sosial bukan konflik lingkungan karena tidak ditemukan berita-berita mengenai konflik pembangunan pabrik semen di Rembang yang memiliki nilai dan pengetahuan mengenai kelestarian lingkungan secara tersirat di dalamnya.

Pembingkaian konflik pembangunan pabrik semen di Rembang sebagai konflik sosial bukan konflik lingkungan menunjukkan bahwa sensitivitas media Kompas terhadap isu lingkungan masih rendah. Hal ini juga semakin memperkuat bahwa media tersebut menganut paham antroposentrisme.

¹¹⁴ Febrina Zulmi. "Keberpihakan Media Terhadap Isu Pelestarian Lingkungan Hidup". Jurnal KATA, Vol.1 No.II, (Oktober 2017) Halaman 105-106.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bingkai Pesan *Press release* PT. Semen Indonesia, *Press release* JMPPK, dan Berita Kompas.com

Bingkai pesan yang difokuskan pada *press release* PT. Semen Indonesia pada masa konflik pembangunan pabrik semen di Rembang lebih cenderung membicarakan PT. Semen Indonesia sendiri. Sebab, *press release* PT. Semen Indonesia membingkai PT. Semen Indonesia sebagai perusahaan yang ramah lingkungan dan peduli pada masyarakat. Bingkai pesan ini diperkuat dengan elemen moral judgement yang menyebutkan berbagai kontribusi dan prestasi PT. Semen Indonesia dalam bidang lingkungan dan sosial. Tidak ada satupun *press release* PT. Semen Indonesia yang membahas langsung mengenai konflik pembangunan pabrik semen di Rembang. Meskipun demikian, PT. Semen Indonesia tetap memfokuskan bingkai pesan pada isu yang berkaitan dengan konflik tersebut, yaitu isu lingkungan dan isu sosial.

Pada *press release* JMPPK, konflik pembangunan pabrik semen di Rembang dibingkai sebagai bentuk perjuangan masyarakat Kendeng untuk melindungi kelestarian lingkungan yang dalam hal ini pegunungan Kendeng dari elit-elit politik yang ingin merusak lingkungan dengan berbagai cara. Konflik pembangunan pabrik semen ini dibahas dalam empat isu pada *press release* JMPPK, yaitu isu lingkungan, sosial, politik, dan hukum. *Press release* JMPPK ini menganggap bahwa PT. Semen Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai penyebab masalah dalam konflik tersebut. *Press release* ini pun secara tegas menuntut agar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk mematuhi putusan MA yang menyatakan bahwa

izin pabrik semen PT. Semen Indonesia di Rembang dicabut dengan berbagai argumentasi yang dijadikan pembenaran moral dalam *press release* tersebut.

Pada berita-berita www.kompas.com, terdapat dua bingkai pesan yang berbeda karena berita-berita www.kompas.com yang berbicara mengenai konflik pembangunan pabrik semen di Rembang memiliki keberpihakan yang berbeda di mana 10 berita mendukung pembangunan pabrik semen, 7 berita menolak pembangunan pabrik semen, dan 1 berita tidak memiliki keberpihakan yang jelas. Pada pemberitaan yang memiliki keberpihakan pro pembangunan pabrik semen, bingkai pesan yang dibuat adalah bahwa pembangunan pabrik semen di Rembang harus didukung karena dua hal, yaitu karena banyak tokoh-tokoh besar yang mendukung pembangunan pabrik semen tersebut dan juga karena masyarakat Rembang telah sepakat untuk memberikan izin lingkungan baru pada pabrik semen di Rembang berdasarkan hasil sidang addendum yang dilaksanakan pada 2 Februari 2017.

Sedangkan pada pemberitaan yang memiliki keberpihakan kontra pembangunan pabrik semen, bingkai pesan yang difokuskan adalah pembangunan pabrik semen di Rembang harus ditolak keberadaannya karena pabrik tersebut berpotensi dapat merusak lingkungan, terlebih lagi masyarakat Rembang menolak keras pabrik semen tersebut dengan melakukan berbagai aksi penolakan. Aksi penolakan ini dibingkai www.kompas.com sebagai perjuangan masyarakat Rembang untuk melindungi kelestarian alam. Selain itu, keputusan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tidak mencabut izin lingkungan pabrik semen di Rembang dibingkai sebagai keputusan yang melanggar aturan hukum dan tidak berpihak pada masyarakat. Pada satu berita yang memiliki keberpihakan yang tidak jelas, berita ini dianggap memiliki keberpihakan tidak jelas karena berita tersebut hanya sekedar pemaparan atau informasi dan tidak memiliki unsur keberpihakan.

2. Kesimpulan Teoritis

Bingkai pesan pada *press release* PT. Semen Indonesia, *press release* JMPPK, dan berita www.kompas.com memproduksi sebuah wacana yang menunjukkan dua hal, yaitu bagaimana ketiga instansi tersebut memandang konflik pembangunan pabrik semen di Rembang dan bagaimana ketiga instansi tersebut dalam melihat lingkungan atau alam.

PT. Semen Indonesia tidak memandang konflik pembangunan pabrik semen di Rembang sebagai krisis. Hal ini terlihat dari *press release* PT. Semen Indonesia yang dikeluarkan pada masa konflik pembangunan pabrik semen di Rembang di mana tidak ada satu pun yang membahas mengenai konflik tersebut. Selain itu, *press release* PT. Semen Indonesia juga memproduksi wacana bahwa PT. Semen Indonesia sebagai perusahaan ramah lingkungan dan peduli pada masyarakat yang terlihat dari semua *press release* yang dikeluarkan oleh PT. Semen Indonesia yang mengangkat isu lingkungan dan sosial dalam bingkai yang positif dengan berbagai pembelaan di dalamnya. Bingkai pesan dan wacana yang diproduksi PT. Semen Indonesia menunjukkan bahwa PT. Semen Indonesia menganut paham antroposentrisme dalam melihat lingkungan, meskipun PT. Semen Indonesia memproduksi wacana sebagai perusahaan lingkungan, tetapi wacana tersebut hanya untuk kepentingan PT. Semen Indonesia saja.

Sedangkan masyarakat Rembang yang dalam hal ini adalah JMPPK memandang konflik pembangunan pabrik semen di Rembang sebagai momen untuk memperjuangkan kelestarian lingkungan alam yang dalam hal ini adalah pegunungan Kendeng dan sebagai bagian dari mencintai negara Indonesia Hal ini terlihat dari bingkai pesan dan wacana yang diproduksi oleh JMPPK sarat dengan pesan kelestarian lingkungan serta memiliki nuansa perjuangan dan kearifan lokal di dalamnya. Bingkai pesan dan wacana yang diproduksi oleh JMPPK menunjukkan bahwa JMPPK menganut paham ekosentrisme.

Sebagai salah satu media yang turut memberitakan konflik pembangunan pabrik semen di Rembang. Media Kompas memberitakan konflik tersebut dengan menunjukkan keberpihakan yang berbeda di mana sebagian pemberitaan mendukung pabrik semen di Rembang sementara sebagian yang lain menolak. Media Kompas hanya sekedar memberitakan isu lingkungan, tidak menonjolkan isu lingkungan. Selain itu, media Kompas memiliki sensitivitas lingkungan yang rendah karena media Kompas lebih cenderung memberitakan konflik pembangunan pabrik semen sebagai konflik sosial dibanding konflik lingkungan. Hal ini membuat peneliti menyimpulkan bahwa media Kompas menganut paham antroposentrisme dalam melihat lingkungan.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya berfokus pada teks saja, tidak disertai dengan wawancara mendalam masing-masing instansi.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada periode ketika masyarakat mengajukan gugatan ke MA dan ketika Putusan MA telah keluar.

C. Saran

Saran Penelitian Selanjutnya

1. Peneliti berharap agar penelitian selanjutnya bisa memfokuskan pada perbandingan teks yang dikeluarkan untuk periode waktu April 2017 ke atas pasca pengumuman hasil KLHS.
2. Peneliti juga berharap agar penelitian selanjutnya dapat meneliti perbandingan teks yang dikeluarkan pada konflik – konflik industri lainnya.

Saran untuk PT. Semen Indonesia

1. Sebaiknya PT. Semen Indonesia menulis *press release* yang berisi pernyataan sikap pada konflik pembangunan pabrik semen di Rembang sebagai bentuk respon krisis. Ketiadaan pernyataan tersebut membuat PT. Semen Indonesia dicap sebagai perusahaan yang tidak peduli pada masyarakat.

2. Sebaiknya PT. Semen Indonesia menggunakan model framing tanggung jawab pada *press release* nya, mengingat PT. Semen Indonesia diposisikan sebagai pelaku. Model framing tanggung jawab ini dapat menunjukkan kesungguhan hati PT. Semen Indonesia dalam menyelesaikan krisis.

Saran untuk JMPPK

1. Sebaiknya JMPPK dalam menulis *press release* cukup mengangkat satu angle saja. Mengangkat banyak angle atau isu pada *press release* akan membuat *press release* terkesan bertele-tele dan melebar ke mana-mana.

Saran untuk media Kompas.com

1. Sebaiknya media Kompas.com memfokuskan konflik pembangunan pabrik semen di Rembang pada isu lingkungan, karena pada dasarnya konflik pembangunan pabrik semen di Rembang merupakan isu lingkungan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk edukasi pada masyarakat mengenai lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- BPPI Yogyakarta. 2008. *“Metodologi Riset Komunikasi : Panduan untuk Melaksanakan Penelitian Komunikasi”*. Yogyakarta : BPPI Yogyakarta dan PKMBP Yogyakarta.
- Eriyanto. 2009. *“Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media”*. Yogyakarta : LKiS Yogyakarta.
- Eriyanto. 2011. *“Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media”*. Yogyakarta : LKiS Grup.
- Foucault, Michael. 2017. *“Power/Knowledge : Selected Interviews and Other Writings 1972- 1977”*. Terj. Yudi Santosa. Yogyakarta : Narasi-Pustaka Promethea.
- Iriantara, Yosol. 2010. *“Media Relations : Konsep, Pendekatan, dan Praktik”*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Jorgensen, Marianne W, dan Louise J. Philips. 2010. *“Analisis Wacana : Teori & Metode”*. Terj. Imam Suyitno, Lilik Wahyuni, dan Suwarna. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Keraf, Sonny. 2010. *“Etika Lingkungan Hidup”*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Kriyantono, Rachmat. 2014. *“Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal : Aplikasi Penelitian dan Praktik”*. Jakarta : Kencana.
- Kriyantono, Rachmat. 2015. *“Public relations & Crisis Management : Pendekatan Critical Public relations Etnografi Kritis & Kualitatif”*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Puspitasari. 2016. *“Komunikasi Krisis : Strategi Mengelola dan Memenangkan Citra di Mata Publik”*. Jakarta : Libri Imprint BPK Gunung Mulia.
- Salam, Aprinus dan Ramayda Akmal. 2014. *“Pahlawan dan Pecundang Militer Dalam Novel-Novel Indonesia”*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

- Simarmata, Salvatore. 2014. “ *Media dan Politik : Sikap Pers terhadap Pemerintahan Koalisi di Indonesia*”. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sobur, Alex. 2012. “*Analisis Teks Media : Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*”. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sopian. 2016. “*Public relations Writting : Konsep, Teori, Praktik*”. Jakarta : PT. Grasindo.
- Susan, Novri. 2009. “*Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*”. Jakarta : Kencana.
- Titscher, Stefan dkk. 2009. “*Methods of Text and Discourse Analysis*”. Terj. Gazali, dkk. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Wazis, Kun. 2012. “*Media Massa dan Konstruksi Realitas*”. Yogyakarta : Aditya Media Publishing.

JURNAL :

- Bahasoan, Aminah dan Amir Faisal Kotarumalos. 2014. “*Praktek Relasi Wacana dan Kuasa Foucaultian dalam Realias Multi Profesi di Indonesia*”. Jurnal Populis, Volume 8 No.1 (Maret 2014). Halaman 13-22.
- Fitryarini, Inda. 2013. “*Pemberitaan dan Persepsi Masyarakat Tentang Lingkungan Hidup di Media Cetak Lokal Provinsi Kalimantan Timur*”. Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 11 No. 1 (Januari – April 2013) Halaman 17-29.
- Gandariani, Titis. 2016. “*Public Relations dan Kemampuan Menulis Press Release sebagai Publisitas Korporat*”. Jurnal Lentera Komunikasi, Vol.2 No. 1 (Agustus, 2016).

- Hanathasia, Mirana. 2017. “*Analisis Press Release Express Group tentang Perampokan di Dalam Taksi Putih Melalui Perspektif Analisis Wacana Kritis Dalam Mengatasi Krisis Kepercayaan Publik*”. *Journal Communication Spectrum*, Vol. 4 No.2 (Februari – Juli 2017).
- Hidayat, Rizki. 2016. “*Peran Public relations dalam Mempengaruhi Konten Media*”. *Jurnal Interaksi*, Volume 5 No. 1 (Januari, 2016). Halaman 90-100.
- Ngga’a, Paulus Krist. 2016. “*Praktik Kuasa Dibalik Wacana Tambang Pasir Besi : Studi CDA Terhadap Pemberitaan Surat Kabar Flores Pos dan Expo NTT Selama Masa Kampanye*”. *Jurnal Of Government*, Volume 2, No. 1, (Juli – Desember 2016). Halaman 1-22.
- Prasetya, Narayana Mahendra. 2018. “*Analisis Framing terhadap Pernyataan Resmi Kemenpora RI dan PSSI dalam Kasus Sanksi FIFA terhadap Indonesia*”. *Jurnal Komunikator*, Vol. 10 No. 1 (1 Mei 2018).
- Prastya, Narayana Mahendra. 2016. “*Analisis Framing dalam Riset Public relations*”. *Jurnal INFORMASI : Kajian Ilmu Komunikasi*, Volume 46, No. 2 (Desember 2016), Halaman 193-204.
- Solihin, Mohammad dan Novi Kurnia. 2017. “*Pemaknaan Konflik Pabrik Semen Kendeng dalam Framing Media Berita Online kompas.com dan suara merdeka.com*”. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 15 No.1 (Januari-April, 2017). Halaman 16-27.
- Suharko. 2016. “*Masyarakat Adat versus Korporasi : Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah Periode 2013 – 2016*”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 20, Nomor 2 (November 2016). Halaman 97 – 116.
- Sutoyo. 2013. “*Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup*”. *ADIL : Jurnal Hukum* Vol. 4 No. 1. Halaman 192 – 206.

- Syahputra, Iswandi. 2010. *“Post Media Literacy : Menyaksikan Kuasa Media Bersama Michael Foucault”*. Jurnal ASPIKOM, Volume 1, Nomor 1 (Juli 2010). Halaman 1-14.
- Warsihantari, Ni Ketut Dimar dan I Gusti Ngurah Putra. 2018. *“AirAsia Crisis Communications Strategies and Malaysia Airlines: A Content Analysis”*. Jurnal Komunikasi ISKI, Vol. 3 (2018).
- Yasir. 2012. *“Paradigma Komunikasi Kritis : Suatu Alternatif Bagi Ilmu Komunikasi”*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 1, Nomor 1 (Maret 2012), Halaman 8-17.
- Zulmi, Febrina. 2017. *“Keberpihakan Media Terhadap Isu Pelestarian Lingkungan Hidup”*. Jurnal KATA, Vol.1 No.II, (Oktober 2017) Halaman 101-108.

SKRIPSI TERDAHULU :

- Febriyasti, Aghnia Kaulika. 2016. *“Strategi Manajemen Krisis PT Semen Indonesia (PERSERO) Tbk: Studi Kasus pada Proyek Pembangunan Pabrik di Rembang”*. Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan) Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Febriyani, Dwi. 2017. *“Krisis Lingkungan Hidup dan Pandangan Antroposentrisme Menurut A. Sonny Keraf”*. Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Idhom, Addi Mawahibun. 2009. *“Resistensi Komunitas Sedulur Sikep Terhadap Rencana Pembangunan Tambang Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah”*. Skripsi Sarjana, Fakultas Ushluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Mola, Maria Septian Riasanti. 2014. *“Pemberitaan Kasus Tambang di Pulau Flores : Analisis Framing Pemberitaan Kasus Penolakan Tambang di Pulau Flores”*.

Dalam Surat Kabar Harian Umum Flores Pos". Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Novianti, Arnita Nur. 2012. "*Proses Penulisan Press Release Untuk Mendukung Media Massa oleh Humas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta*". Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Puspo, Latif. 2017. "*Reforma Agraria Dalam Karya Seni Grafis (Analisis Semiotika Karya Seni Grafis Lembaga Budaya Kerakyatan Taring Padi Yogyakarta dalam Menyampaikan Reforma Agraria di Indonesia)*". Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Ramalia, Vivi. 2016. "*Makna Poster Di Tanah Kami Nyawa Tak Semahal Tambang : Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce Pada Poster Kasus Pembunuhan Salim Kancil*". Skripsi Sarjana Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom Bandung.

Wardhani, Pratita Ayu. 2010. "*Karakteristik Isi Press release Pada Organisasi Profit, Non Profit, dan Pemerintahan : Analisis Isi Perbedaan Press release Pada Website PT. Indosat, WWF Indonesia, dan Depkominfo*". Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

REFERENSI ONLINE :

"*About Us : Jernih Melihat Dunia*", <https://inside.kompas.com/> . Diakses pada 12 Juli 2018.

Agustian, Widi. "*12 Perusahaan Paling Ramah Lingkungan*". <https://economy.okezone.com/read/2013/12/10/320/910168/12-perusahaan-paling-ramah-lingkungan>. Diakses pada 03 Juli 2018.

- Apriando, Tommy. “*Berharap Keadilan di PTUN Semarang, Warga Rembang Gugat Soal Pabrik Semen*”.
<http://www.mongabay.co.id/2014/11/14/berharap-keadilan-di-ptun-semarang-warga-rembang-gugat-soal-pabrik-semen/> . Diakses pada 31 Juli 2018.
- Arumingtyas, Lusia. “*Konflik Kekayaan Alam, Pemerintah Cenderung Berpihak pada Perusahaan*”.
<http://www.mongabay.co.id/2016/10/31/konflik-kekayaan-alam-pemerintah-cenderung-bepihak-pada-perusahaan/> . Diakses pada 12 Juli 2018
- Company Profile*. <https://www.cemex.com/about-us/company-profile> . Diakses pada 25 Juli 2018.
- Dhewy, Anita. “*Gunretno : “Ibu Bumi Wis Maringi, Ibu Bumi Dilarani, Ibu Bumi Kang Ngadili*”.
<http://ww.jurnalperempuan.org/tokoh/gunretno-ibu-bumi-wis-maringi-ibu-bumi-dilarani-ibu-bumi-ngadili> . Diakses pada 25 Juli 2018.
- Erdianto, Kristian. “*Air Mata Petani Kendeng dan Prinsip “Sedulur Sikep” Menjaga Ibu Bumi*”.
<https://nasional.kompas.com/read/2017/03/23/06450991/air.mata.petani.kendeng.dan.prinsip.sedulur.sikep.menjaga.ibu.bumi>. Diakses pada 03 Juli 2018.
- Erdianto, Kristian. “*Kronologi Wafatnya Patmi, Petani Kendeng Usai Aksi Dipasung Semen*”.
<https://nasional.kompas.com/read/2017/03/21/15294751/kronologi.wafatnya.patmi.petani.kendeng.usai.aksi.dipasung.semen>. Diakses pada 12 Juli 2018.
- Gultom, Sarah Rogatianni Artati, “*Citra yang Ditampilkan Perusahaan dalam Press release (Analisis Isi Mengenai Jenis Release dan Jenis Citra yang Ditampilkan Public relations Officer SantikaPremiere Dyandra Hotel & Convention Medan dalam Press release*”.
<http://jurnal.usu.ac.id/index.php/flow/article/view/11641/4997>. Diakses pada 12 Januari 2018.

Nazar Nurdin. “*Gubernur Jateng Lakukan Diskresi Demi Kelanjutan Pabrik Semen Rembang*”.

<https://regional.kompas.com/read/2017/02/21/17225781/gubernur.jateng.lakukan.diskresi.demi.kelanjutan.pabrik.semen.rembang> . Diakses 31 Juli 2018.

Nurmardiansyah, Eko. “*Eco-Philosophy dan Implikasinya Dalam Politik Hukum Lingkungan Di Indonesia*”. Melintas, edisi 30 Januari 2014”. Halaman 87-88.

<http://journal.unpar.ac.id/index.php/melintas/article/viewFile/1283/1253> . Diakses pada 07 Agustus 2018.

Prahadi, Yeffrie Yundiarto. “*Perusahaan Ramah Lingkungan, Apa Untungnya?*”.

<https://swa.co.id/swa/trends/management/perusahaan-ramah-lingkungan-apa-untungnya>. Diakses pada 03 Juli 2018.

Profil Perusahaan. <http://www.semenindonesia.com/profil-perusahaan/> . Diakses pada 25 Juli 2018.

Profil PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.

<http://www.bumn.go.id/semenindonesia/berita/965>. Diakses pada 25 Juli 2018.

Putusan.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/df8fdd2e24a5061257ec52dfe1f7743a> . Diakses pada 31 Juli 2018

Rizqon, Tegar. “*Masyarakat jadi Korban Konflik Agraria*”.

<http://www.harnas.co/2016/01/06/masyarakat-jadi-korban-konflik-agraria>.

Diakses pada 12 Juli 2018

RO-Micom. “*PT Semen Indonesia Raih Penghargaan Bidang Lingkungan dari ESDM*”.

<http://mediaindonesia.com/read/detail/105557-pt-semen-indonesia-raih-penghargaan-bidang-lingkungan-dari-esdm>. Diakses pada 03 Juli 2018.

Sitanggang, Rony. “*Izin Semen Indonesia di Kendeng, Alasan Diskresi Ganjar*”.

<http://kbr.id/nasional/02-2017/izin-semen-indonesia-di-kendeng-alasan-diskresi-ganjar/88762.html> . Diakses pada 31 Juli 2018.

Struktur Organisasi. <http://www.semenindonesia.com/struktur-organisasi/>. Diakses pada 26 Juli 2018.

Subarkah dan Anggit Wicaksono. “Perlawanan Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Atas Kebijakan Pembangunan Semen Gresik di Sukolilo Pati (Studi Kebijakan Berbasis Lingkungan dan Kearifan Lokal)”. [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=172078&val=1322&title=Perlawanan%20Masyarakat%20Samin%20\(Sedulur%20Sikep\)%20Atas%20Kebijakan%20Pembangunan%20Semen%20Gresik%20Di%20Sukolilo%20Pati%20\(Studi%20Kebijakan%20Berbasis%20Lingkungan%20Dan%20Kearifan%20Lokal\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=172078&val=1322&title=Perlawanan%20Masyarakat%20Samin%20(Sedulur%20Sikep)%20Atas%20Kebijakan%20Pembangunan%20Semen%20Gresik%20Di%20Sukolilo%20Pati%20(Studi%20Kebijakan%20Berbasis%20Lingkungan%20Dan%20Kearifan%20Lokal)). Diakses pada 26 Juli 2018.

Suyanto. “*Jurnalisme dan Lingkungan Hidup di Media Massa*”. Prosiding Seminar Antarbangsa ke 5. <https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7575/artikel.pdf?sequence=3&isAllowed=y> Halaman 490 – 491. Diakses pada 17 Juli 2018.

Utami, Rosalita Dian dan Bonaventura Satya Bharata. “*Praktek Jurnalisme Lingkungan Dalam Pemberitaan Pembangunan Pabrik Semen Di Kawasan Pegunungan Kendeng Rembang (Analisis Framing Praktek Jurnalisme Lingkungan dalam Pemberitaan Pembangunan Pabrik Semen di Kawasan Pegunungan Kendeng Rembang pada Media Mongabay.co.id Periode Februari-Agustus 2014)*”. <http://e-journal.uajy.ac.id/9453/1/JURNALKOM04422.pdf> . (diakses 06 September 2018).

Visi dan Misi. <http://www.semenindonesia.com/visi-dan-misi/> . Diakses pada 26 Juli 2018.

ATURAN HUKUM :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 8B.

Undang-Undang No. 4 tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung pasal 11 ayat 2.

PRESS RELEASE :

Press release JMPPK. “PERNYATAAN KOMNAS PEREMPUAN ATAS PENDIRIAN DAN RENCANA PENDIRIAN PABRIK SEMEN SERTA EXPLOITASI KAWASAN KARTS DI PEGUNUNGAN KENDENG UTARA DAN SELATAN”. 30 Desember 2016.

Press release JMPPK. “Pers Release Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK : HORMATI PUTUSAN PENGADILAN, DAN BERHENTILAH MEMBUAT PERNYATAAN KONTROVERSIAL”. 10 November 2016.

Press release JMPPK. Pers Rilis JM-PPK: “KEMBALIKAN HAK WATUPUTIH SEBAGAI KAWASAN LINDUNG”. 31 Maret 2017.

REFERENSI LAINNYA :

Pelatihan Keterampilan Manajerial SPMK (KPMK UGM), Manajemen Konflik, (Yogyakarta, Januari 2003)

Prasetya, Narayana Mahendra. 2016. “*Ethical Issues in Using CSR as Crisis Communciation Strategy: Case Study in PT Semen Indonesia Rembang Factory*”. *Conference Proceedings*. (Asian Congress For Media And Communication 2016 International Conference Yogyakarta, Asian Congress for Media and Communication (ACMC), Yogyakarta, 2016).

Saragih, Tapin Pandapotan. 2017. “*Analisis Wacana Kritis : Perkembangan Wacana CSR di Indonesia pada Harian Kompas Tahun 2007-2016*”. Tesis S2 Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Darma Yogyakarta.

Wawancara via Email dengan Editor www.kompas.com Farid Assifa, 11 Juni 2018.

LAMPIRAN



PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

- COMPANY PROFILE
- CORPORATE GOVERNANCE
- INVESTOR RELATION
- SUSTAINABLE DEVELOPMENT
- PRODUCT AND SERVICE
- NEWS AND PRESS
- CAREERS
- CONTACT US



Semen Indonesia Salurkan 78 Ekor Sapi Pada Perayaan Hari Raya Idul Adha 1415 H

OCTOBER 5, 2014 / 0 COMMENTS / IN SIARAN PERS / BY ADMIN

Gresik, 5 Oktober 2014 – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) menyalurkan 78 ekor sapi kurban pada peringatan hari raya Idul Adha 1435 H yang jatuh pada hari ini Minggu (5/10).

Hewan kurban tersebut akan disalurkan ke wilayah sekitar pabrik serta aset perusahaan. Seperti Pabrik Gresik, Pabrik Tuban, Packing plant dan beberapa desa ring 1 lokasi pembangunan pabrik baru perusahaan di Rembang.

Kepala Biro Komunikasi Perusahaan Semen Indonesia Abinanyu mengatakan “sebagai perusahaan yang terus memberikan kontribusi terhadap masyarakat, pada setiap tahun Semen Indonesia secara rutin melakukan pemotongan hewan kurban. Bantuan ini merupakan salah satu kepedulian perusahaan terhadap lingkungan untuk meningkatkan ikatan sosial kepada masyarakat melalui program CSR”.ujanya.

Lanjut kata Abi “Setelah penyembelihan, hewan kurban tersebut akan dibagikan dan didistribusikan dalam 2500 kantong kepada musnahlah sekitar dan yayasan sekitar perusahaan”. Tandaz Abi

Pada kesempatan kali ini, dana CSR perusahaan disalurkan dalam berbagai bentuk kegiatan keagamaan seperti pemberangkatan haji, pembangunan sarana prasarana ibadah, bantuan pelatihan pemberian pelatihan kepada pondok pesantren. Hingga saat ini perusahaan telah menyalurkan dana sebesar Rp 7,8 miliar dibidang keagamaan.

PROFIL PERUSAHAAN

- CEO SPEECH
- Company Profile
- Vision and Mission
- Manajemen
- Committee
- Awards

RECENT NEWS

- (Indonesia)* Desa Socorogo Berpotensi Merjadi Desa Wisata
- (Indonesia)* Produkt Kopi Hasil UMKM Rembang Binan Semen Indonesia
- SMT* Raih Penghargaan Indonesia Champion for ASEAN Award 2017
- Sales Report

(Indonesia) SMT Memberdayakan UMKM Rembang

Issued by : PT.Semen Indonesia

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi:

Semen Indonesia Raih Penghargaan Green Industry dari Kementerian Perindustrian

OCTOBER 16, 2014 / 0 COMMENTS / IN SIARAN PERS / BY ADMIN

Jakarta, 16 Oktober 2014 – Komitmen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (“Perseroan”) dalam mengoperasikan pabrik semen yang peduli terhadap lingkungan kembali mendapat apresiasi dari Kementerian Perindustrian RI. Hari Rabu 15/10 untuk keempat kalinya menerima penghargaan bidang Industri sebagai *Green Industry* yang diserahkan langsung oleh Menteri Perindustrian M.S Hidayat kepada Pjt Direktur Utama Semen Gresik Sunardi Pihonomuti di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta.

Sunardi Pihonomuti mengatakan “Ini merupakan ke 4 kalinya kami mendapatkan penghargaan Industri Hijau dari Kementerian Perindustrian sejak tahun 2011, penghargaan ini merupakan motivasi bagi kami untuk terus melakukan terobosan dalam mengelola pabrik semen yang berwawasan lingkungan. Kami menyadari bahwa alam sangat penting untuk menjaga keseimbangan. Oleh karena itu berbagai macam Inovasi terus kami lakukan untuk mencapai kinerja lingkungan yang optimal”.

Kinerja Perseroan yang membukan penghargaan tersebut antara lain efisiensi & konservasi energi, pengelolaan limbah B3 dan non B3, konservasi air dan memumbuh kembangkan keanekaragaman hayati. Efisiensi energi dilakukan dengan memanfaatkan biomass sebagai bahan bakar alternatif pada proses pembakaran awal serta memanfaatkan gas buang untuk pengeringan bahan baku pembuatan semen. “Kami berupaya meminimalisir pembuangan gas dan memakainya kembali (recycle) dalam proses pengeringan sehingga dapat menghemat pemakaian batu bara pada proses ini”. Ujar Sunardi.

Perseroan juga melakukan pengelolaan limbah B3 dan Non B3 dengan mengedepankan prinsip 3R (Reuse, Reduce & Recycle) dengan upaya Co-processing yang dilakukan untuk memanfaatkan limbah tersebut (baik internal maupun external) ke dalam proses produksi semen secara terkendali dan aman bagi lingkungan. Selain menjadi solusi pengelolaan limbah hal ini juga berkontribusi pada efisiensi pemakaian bahan baku yang tidak terbuarkan. Implementasi penggunaan limbah bahan baku rata-rata sebesar 10.000 ton/bulan.

Penggunaan air juga menjadi aspek penting perusahaan dalam rangka efisiensi. Perseroan memanfaatkan air hujan dan air buangan untuk di recycle sebagai air proses dan air bersih untuk keperluan domestik. Pada 2013, perusahaan dapat menekan Indeks pemakaian air sebesar 20,2 % serta memanfaatkan air permukaan atau air limbah domestik dan air hujan sebesar 72,5 %.

Berbagai penghargaan diraih perusahaan sebagai bukti bahwa perusahaan selalu mengedepankan aspek lingkungan dalam operasinya. Diataranya penghargaan Green Award 2013 kategori perusahaan pelestari sumber daya air, pelestari energy

PROFIL PERUSAHAAN

- CEO SPEECH
- Company Profile
- Vision and Mission
- Managemen
- Committee
- Awards

RECENT NEWS

- (Indonesia) Desa Soorogo Berpotensi Menjadi Desa Wisata*
- (Indonesia) Produk Kopi Hasil UTMKA Rembang Binaan Semen Indonesia*
- SMI Raih Penghargaan Indonesia Champion for ASEAN Award 2017*
- Sales Report (Indonesia) SMI Membedagakan UTMKA Rembang*

CATEGORIES

- CSR
- innovation
- Investor

Jakarta, 16 Oktober 2014 – Komitmen PT Semen Indonesia (Persro) Tbk. ("Perseroan") dalam mengoperasikan pabrik semen yang peduli terhadap lingkungan kembali mendapat apresiasi dari Kementerian Perindustrian RI. Hari Rabu 15/10 untuk keempat kalinya menerima penghargaan bidang industri sebagai *Green Industry* yang diserahkan langsung oleh Menteri Perindustrian M. S Hidayat kepada Pj. Direktur Utama Semen Gresik Sunardi Pronomurti di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta.

Sunardi Pronomurti mengatakan "ini merupakan ke 4 kalinya kami mendapatkan penghargaan Industri Hijau dari Kementerian Perindustrian sejak tahun 2011, penghargaan ini merupakan motivasi bagi kami untuk terus melakukan terobosan dalam mengelola pabrik semen yang berwawasan lingkungan. Kami menyadari bahwa alam sangat penting untuk menjaga keseimbangan. Oleh karena itu berbagai macam inovasi terus kami lakukan untuk mencapai kinerja lingkungan yang optimal".

Kinerja Perseroan yang membuahkan penghargaan tersebut antara lain efisiensi & konservasi energi, pengelolaan limbah B3 dan non B3, konservasi air dan menumbuh kembangkan keanekaragaman hayati. Efisiensi energi dilakukan dengan memanfaatkan biomassa sebagai bahan bakar alternatif pada proses pembakaran awal serta memanfaatkan gas buang untuk pengeringan bahan baku pembuatan semen. "Kami berupaya meminimalisir pembuangan gas dan memakainya kembali (recycle) dalam proses pengeringan sehingga dapat menghemat pemakaian batu bara pada proses ini". Ujar Sunardi.

Perseroan juga melakukan pengelolaan limbah B3 dan Non B3 dengan mengedepankan prinsip 3R (Reuse, Reduce & Recycle) dengan upaya Co-processing yang dilakukan untuk memanfaatkan limbah tersebut (baik internal maupun external) ke dalam proses produksi semen secara terkendali dan aman bagi lingkungan. Selain menjadi solusi pengelolaan limbah hal ini juga berkontribusi pada efisiensi pemakaian bahan baku yang tidak terbuang. Implementasi penggunaan limbah bahan baku rata-rata sebesar 10.000 ton/bulan.

Penggunaan air juga menjadi aspek penting perusahaan dalam rangka efisiensi. Perseroan memanfaatkan air hujan dan air buangan untuk di recycle sebagai air proses dan air bersih untuk keperluan domestik. Pada 2013, perusahaan dapat menekan indeks pemakaian air sebesar 20,2 % serta memanfaatkan air permukaan atau air limbah domestik dan air hujan sebesar 72,5 %.

Berbagai penghargaan diraih perusahaan sebagai bukti bahwa perusahaan selalu mengedepankan aspek lingkungan dalam operasinya. Diantaranya penghargaan Green Award 2013 kategori perusahaan pelestari sumber daya air, pelestari energi terbarukan, pelestari keanekaragaman hayati, pelopor pencegahan polusi. Penghargaan kategori ASEAN Energy Managemant Award dan ASEAN Coal Award oleh ASEAN Center For Energy. Perusahaan juga meraih Proper Emas sebagai penghargaan tertinggi bidang lingkungan yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Vision and Mission
Manajemen
Committee
Awards

RECENT NEWS

- (Indonesia) Desa Soorogo Berpotensi Merjadi Desa Wisata*
- (Indonesia) Produk Kopi Hasil UMKM Rembang Binang Semen Indonesia*
- SMIT Raih Penghargaan Indonesia Champion for ASEAN Award 2017*
- Sales Report*
- (Indonesia) SMIT Menerima Juara UMKM Rembang*

CATEGORIES

- CSR
- Innovation
- Investor
- kommunitas
- Report
- news
- pedoman

Semen Indonesia (SMGR) Kucurkan Dana Rp 670 Juta, Bangun Infrastruktur Air Bersih Untuk Warga Sekitar Pabrik Rembang

NOVEMBER 12, 2016 / 0 COMMENTS / IN SARAN PERS / BY ADMIN

Semen Indonesia (SMGR) Kucurkan Dana Rp 670 Juta,

Bangun Infrastruktur Air Bersih Untuk Warga Sekitar Pabrik Rembang

Rembang, 10 November 2016 – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) Kucurkan dana hingga Rp670 juta untuk membangun infrastruktur air bersih 2 desa sekitar pabrik Rembang yaitu Desa Kajar dan Pasucen Kec Gunung Rembang Jawa Tengah.

Dana tersebut digunakan untuk pembangunan pipanisasi sepanjang 1 kilometer dan sarana air bersih yang dialihkan ke tandon dengan kapasitas total 8.200 liter yang di bagi dalam 2 titik yaitu, di lokasi Masjid dusun Wuni Desa Kajar dan di lokasi dekat sumber mata air Desa Waru. Selain Dusun Wuni, Perusahaan juga memberikan bantuan pipanisasi dan tandon air 5.100 liter di Desa Pasucen.

"Selama puluhan tahun, sejak jaman nenek moyang kami tinggal di tempat ini, warga tak bisa menikmati air bersih. Warga setiap tahun kesulitan mendapatkan air, termasuk air bersih, untuk kegiatan sehari-hari," ujar Camat Gunung Teguh Gunawarman saat acara penyerahan penyaluran air bersih bantuan Semen Indonesia di SDN 02 Kajar, Kamis (10/11).

Menurut Teguh, wilayah yang selalu kesulitan air adalah Dusun Wuni yang berada di Desa Kajar. Dusun berpenduduk 125 kepala keluarga (KK) atau 700 jiwa. "Warga harus mengangsu (menimba air) dari desa tetangga. Desa Waru yang masuk Kecamatan Jepon, Kabupaten Bora sejauh 1 km," ujar Teguh.

Suwardi, salah seorang warga mengaku, setiap hari harus mengambil air dengan berjalan kaki dan menempuh jalan terjal dan menanjak. Dalam sehari, dia hanya mampu mengambil air 1-2 jerigen untuk keperluan rumah tangganya, dengan membeli Rp 5000 perjerigen.

PROFIL PERUSAHAAN

CEO SPEECH

Company Profile

Vision and Mission

Manajemen

Committee

Awards

RECENT NEWS

Sales Report

(Indonesia) Aspirasi Warga Seputar Pabrik Dukang Presiden Resmikan Pabrik Rembang

(Indonesia) Pabrik Gresik Mengemban Nisi Produsnt Sekaligus Etikast

(Indonesia) Dirut SMI Kunjungi Kampus Baru UISI

(Indonesia) Dirut : Ini Situasi Perang

CATEGORIES

CSR

Innovation

"Selama puluhan tahun, sejak jaman nenek moyang kami tinggal di tempat ini, warga tak bisa menikmati air bersih. Warga setiap tahun kesulitan mendapatkan air, termasuk air bersih, untuk kegiatan sehari-hari, 'ujar Camat Gunem Teguh Gunawarman saat acara penyerahan penyaluran air bersih bantuan Semen Indonesia di SDN 02 Kajar, Kamis (10/11).

Menurut Teguh, wilayah yang selalu kesulitan air adalah Dusun Wuni yang berada di Desa Kajar. Dusun berpenduduk 125 kepala keluarga (KK) atau 700 jiwa. "Warga harus mengangsu (menimba air) dari desa tetangga, Desa Waru yang masuk Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora sejauh 1 km," ujar Teguh.

Suwardi, salah seorang warga mengaku, setiap hari harus mengambil air dengan berjalan kaki dan menempuh jalan terjal dan menanjak. Dalam sehari, dia hanya mampu mengambil air 1-2 jergen untuk keperluan rumah tangganya, dengan membeli Rp 5000 perjergen.

Direktur Utama PT Semen Gresik Sunardi Prionomurti mengatakan, bantuan tandon ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi warga yang selama bertahun-tahun kesulitan mendapatkan air. Warga terbebas dari kesulitan mendapatkan air, serta beban biaya akibat harus membeli air.

"Bertahun-tahun warga di sini, kesulitan air, apalagi air bersih. Dengan adanya tandon ini, kami berharap dapat bermanfaat bagi warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehadiran kami di sini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi warga, utamanya yang masih kesulitan air bersih," tegas Sunardi.

Bupati Rembang Abdul Hafidz mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan tandon tersebut. "Saya bersyukur kepada Alian SWT. Rakyat saya seger, kecukupan air. Fasilitas air seperti ini belum pernah ada sama sekali. Kami juga sangat berterima kasih kepada warga di Desa Waru, Jepon, Blora, yang bersedia memberikan sumber airnya untuk dipakai warga di Dusun Wuni," ujar Abdul Hafidz.

Abdul Hafidz lebih jauh mengatakan, kehadiran pabrik semen di wilayahnya terbukti memberikan banyak manfaat bagi warga. Bukan saja air bersih. Semen Indonesia juga telah mengucurkan banyak bantuan CSR untuk masyarakat di Kabupaten Rembang.

"Untuk itu, saya meminta masyarakat mendukung penuh kehadiran pabrik semen di Rembang. Saya trenyuh, prihatin kalau di tempat lain pabrik semen milik asing kok justru tak mendapat penolakan, mengapa yang milik BUMN kok dioyak-oyak dan dihanbat. Saya pertanyakan, mana rasa merah-putihnya, nasionalismenya," ujar Hafidz.

Presiden Rembang Pabrik Rembang

(Indonesia) Pabrik Gresik Mengembangkan Misi Produktifitas Sekaligus Etikalitas

(Indonesia) Dirut SMI Kunjungi Kampus Baru UTISI

(Indonesia) Dirut : Ini Situasi Perwang

CATEGORIES

- CSR
- Innovation
- Investor
- komunitas
- Report
- news
- pedoman
- penghargaan-2013-2014
- penghargaan-2015
- penghargaan-2016
- penghargaan-2017
- pengumuman
- profil perusahaan
- rekrutment
- Saluran Distribusi
- siaran pers
- Uncategorized
- Uncategorized
- why's si



PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

COMPANY PROFILE CORPORATE GOVERNANCE INVESTOR RELATION SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRODUCT AND SERVICE NEWS AND PRESS CAREERS CONTACT US



Semen Indonesia Foundation Dukung Pembangunan Sekolah Berwawasan dan Berbudaya Lingkungan di Madun dan Magetan

NOVEMBER 15, 2016 / IN SIARAN PERS / BY ADMIN

Madun, 15 November 2016 – Semen Indonesia Foundation (SMIF) yang merupakan lembaga penunjang strategis PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menandatangani nota kesepahaman kerjasama dalam membangun sekolah peduli dan berbudaya lingkungan dengan 27 sekolah di Madun. Penandatanganan yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Madun, Muniro Danardono serta Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kota Madun, Gandhi Hatmoko, ini berlangsung di SMP Negeri 5 Kota Madun (15/11).

Program pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan ini meliputi seminar, *workshop*, dan peninjauan lapangan tentang kebijakan berwawasan lingkungan, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisatif, dan pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Dari kerjasama ini, diharapkan dapat melahirkan sekolah-sekolah yang berwawasan dan berbudaya lingkungan berstatus adiwiyata dan adiwiyata mandiri di Kota Madun.

Ketua SMIF, Soesetyoko Suwandi, mengatakan bahwa kerjasama ini merupakan wujud nyata komitmen Perseroan dalam membentuk generasi penerus berwawasan lingkungan. “Kami memiliki 4 sekolah yang sudah menyanggah predikat Adiwiyata Mandiri, yakni SMA Semen Gresik tahun 2010, SD dan SMK Semen Gresik tahun 2014, dan SMP Semen Gresik tahun 2016 ini. Hingga saat ini, SMIF telah membina sekitar 300 sekolah adiwiyata dan 400 sekolah adiwiyata mandiri,” katanya.

Perguruan tinggi yang dikelola SMIF, Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) pun bekesempatan untuk memberikan materi seminar bertema “Teknologi Ramah Lingkungan”. Menurut Rektor UISI, Prof. Herman Sasongko, upaya pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan ini merupakan langkah yang sangat baik dalam penyelesaian wawasan lingkungan di sekolah.

PROFIL PERUSAHAAN

CEO SPEECH
Company Profile
Vision and Mission
Manajemen
Committee
Awards

RECENT NEWS

Sales Report

(Indonesia) Aspirasi Warga Seputar Pabrik Dukung Presiden Resmikan Pabrik Rembang

(Indonesia) Pabrik Gresik Mengemban Misi Produktif Sekaligus Edukasi

(Indonesia) Dirut SMIF Kunjungi Kampus Baru UISI

(Indonesia) Dirut : Ini Situasi Perang



Indonesia (Perseo) Tbk menandatangani nota kesepahaman kerjasama dalam membangun sekolah peduli dan berbudaya lingkungan dengan 27 sekolah di Madiun. Penandatanganan yang disaksikan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Madiun, Muntoro Danardono serta Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kota Madiun, Gandhi Hatmoko, ini berlangsung di SMP Negeri 5 Kota Madiun (15/11).

Program pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan ini meliputi seminar, *workshop*, dan peninjauan lapangan tentang kebijakan berwawasan lingkungan, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisatif, dan pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Dari kerjasama ini, diharapkan dapat melahirkan sekolah-sekolah yang berwawasan dan berbudaya lingkungan berstatus adiwiyata dan adiwiyata mandiri di Kota Madiun.

Ketua SMIF, Soesetyoko Suwandi, mengatakan bahwa kerjasama ini merupakan wujud nyata komitmen Perseora dalam membentuk generasi penerus berwawasan lingkungan. "Kami memiliki 4 sekolah yang sudah menyangand predikat Adiwiyata Mandiri, yakni SMA Semen Gresik tahun 2010, SD dan SMK Semen Gresik tahun 2014, dan SMP Semen Gresik tahun 2016 ini. Hingga saat ini, SMIF telah membina sekitar 300 sekolah adiwiyata dan 400 sekolah adiwiyata mandiri," katanya.

Perguruan tinggi yang dikelola SMIF, Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) pun bekesempatan untuk memberikan materi seminar bertema "Teknologi Ramah Lingkungan". Menurut Rektor UISI, Prof. Herman Sasongko, upaya pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan ini merupakan langkah yang sangat baik dalam penyebarluasan wawasan lingkungan di sekolah.

"Kami senang dapat ikut berkontribusi dalam pembinaan ini karena kita tahu untuk meraih predikat adiwiyata mandiri tidaklah mudah, membutuhkan komitmen dari para guru dan murid untuk terus menjaga lingkungan," kata Herman.

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kota Madiun, Gandhi Hatmoko menyatakan apresiasinya terhadap langkah positif SMIF. "Semen Indonesia merupakan perusahaan pertama yang membuat kerjasama dalam pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan di Kota Madiun. Kita berharap ini dapat menjadi pionir bagi perusahaan lain untuk turut peduli dalam menanamkan karakter budaya dan wawasan lingkungan di sekolah," ujarnya.

Dua puluh tujuh sekolah yang mengikuti program pembinaan sekolah adiwiyata mandiri di Madiun in meliputi 12 sekolah dasar, 10 sekolah menengah pertama, dan 5 sekolah menengah atas. Selain di Madiun, SMIF juga menandatangani nota kesepahaman mengenai pembinaan sekolah adiwiyata mandiri dengan 25 sekolah di Magetan pada 16 November 2016 yang berlangsung di Kantor BLH Magetan.

Manajemen

Committee

Awards

RECENT NEWS

Sales Report

(Indonesia) Aspirasi Warga Seputar Pabrik Dukang Presiden Remmikan Pabrik Rembang

(Indonesia) Pabrik Gresik Mengembangkan Nisi Produkti Sekaligus Edukasi

(Indonesia) Dirut SMI Kunjungri Kampus Baru UISI

(Indonesia) Dirut : Ini Situasi Perung

CATEGORIES

- CSR
- Innovation
- Investor
- kommunitas
- Report
- news
- pedoman
- penghargaan-2013-2014
- penghargaan-2015

Semen Indonesia Serahkan Bantuan 98 Tenda dan 15 Shelter untuk Paguyuban PKL Alun-Alun Rembang

DECEMBER 19, 2016 / IN SIARAN PERS / BY ADMIN

Rembang, 18 Desember 2016 – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk memberikan bantuan berupa 98 tenda dan 15 shelter untuk Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-Alun Rembang. Bantuan ini secara simbolis diserahkan oleh Direktur Produksi PT Semen Gresik, anak perusahaan Semen Indonesia, Prasetyo Utomo kepada Bupati Rembang, Abdul Hafidz di acara Rembang Culinary Festival (18/12).

Prasetyo menuturkan bahwa pemberian bantuan ini adalah bentuk komitmen Perseroan dalam mengembangkan perekonomian Rembang. "Perseroan berkomitmen dalam memajukan perekonomian Rembang bersama-sama dengan pemerintah daerah, khususnya dalam hal ini para pedagang kaki lima. Sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan perusahaan," kata Prasetyo.

Abdul Hafidz menyampaikan apresiasinya kepada Perseroan atas bantuan ini. "Kami berterima kasih dan mengapresiasi bantuan serta dukungan Semen Indonesia dalam upaya bersama membangun perekonomian Rembang. Dengan bantuan ini, para PKL dapat lebih tertata dan tertib sehingga alun-alun Rembang terasa lebih indah serta secara tidak langsung akan mendorong peningkatan pendapatan para PKL. Oleh karena itu, saya minta agar semua PKL dapat merawat dan menggunakan tenda ini dengan sebaik-baiknya" ujar Abdul Hafidz.

Ketua Paguyuban PKL Alun-Alun Rembang, Stryono menyatakan siap untuk menjaga dan menggunakan tenda tersebut dengan optimal. "Terima kasih atas bantuan ini. Ini sangat membantu kami dalam menyergamkan tenda para PKL. Kita pastikan tenda ini akan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menjaga keindahan alun-alun. Kita akan saling mengingatkan jika ada yang tidak tertib dalam menjaga tenda dan tidak mengindahkan kebersihan," kata Stryono.

Rembang Culinary Festival adalah ajang festival kuliner yang diselenggarakan oleh Semen Indonesia bekerja sama dengan Pemkab Rembang. Acara ini berlangsung sehari penuh pada Sabtu (18/12). Festival ini dimulai dengan jalan sehat bersama Bupati Rembang dan Direktur Produksi Semen Gresik. Tak hanya jalan sehat, acara yang diikuti oleh ribuan masyarakat setempat di Alun-Alun Rembang ini juga digelar senam bersama.

PROFIL PERUSAHAAN

- CEO SPEECH
- Company Profile
- Vision and Mission
- Manajemen
- Committee
- Awards

RECENT NEWS

- Sales Report*
- (Indonesia) Aspinasi Warga Seputar Padrik Dukang Presiden Resmikan Padrik Rembang*
- (Indonesia) Padrik Gresik Mengemban Misi Produksi Sekaligus Etikasti*
- (Indonesia) Dirut SMI Kunjungi Kampus Baru UISI*
- (Indonesia) Dirut : Ini Situasi Perang*

CATEGORIES

- CSR
- Innovation
- Investor

Press Release Jagongan Media Rakyat 2014: Jejaring Media Warga
Menyelamatkan Kendeng Utara

23 - Oct - 2014 | adplus



Penetrasi media sosial begitu tinggi di Indonesia. Setelah gonjang-ganjing Research In Motion (RIM) beberapa tahun yang lalu, giliran perusahaan besar dalam social media, Twitter dan Facebook, mengunjungi Indonesia dengan tawaran yang lebih serius. Twitter memandang perlu membuka perwakilannya di negara tercerewet nomor empat di dunia dalam penggunaan twitter ini. Sebagai negara dengan pengguna facebook yang cukup tinggi, tak heran jika Mark Zuckerberg mendatangi Indonesia untuk membuka kemungkinan investasi lebih besar di Indonesia. Tak hanya pada hitung-hitungan bisnis, penggunaan media sosial juga terus berkembang untuk berbagai tujuan. Selain untuk kegiatan hiburan dan pendidikan, media sosial juga digunakan untuk kepentingan perjuangan warga mengenai berbagai isu, salah satunya adalah kasus rencana pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng Utara.

Kasus Prita Mulyasari dan penyelamatan KPK dalam kasus “cicak vs buaya” menunjukkan bagaimana kasus-kasus ini menjadi perhatian publik ketika ramai diperbincangkan di media sosial. Media massa yang semula tak begitu perhatian pun menjadi tertarik untuk mengangkatnya dengan menjadikan keriuhan di dunia social media sebagai rujukan. Penggunaan social media di kehidupan masyarakat urban tidak lah terlalu mengeherankan karena sebagian besar mereka telah meleak

informasi dan akrab dengan perangkat media terbaru . Namun bagaimana sosial media berperan dalam kehidupan masyarakat di daerah pedesaan?

Facebook sudah menjadi bagian keseharian dari remaja pedesaan kebanyakan. Murahannya perangkat smartphone dan meluasnya jaringan internet menjadi dua hal yang menyebabkan pesatnya perkembangan penggunaan internet dan sosial media di pedesaan, terutama di Jawa dan Sumatra. Medium baru ini membuat akses informasi menjadi lebih mudah. Begitu pula saat harus menyebarkannya kembali, cukup dengan sekali “klik” di tombol “bagikan”. Fenomena ini membuat peta aktor dalam konsolidasi pengetahuan di masyarakat pedesaan berubah. Bahwa mereka yang memiliki pengetahuan lebih banyak tidak melulu berasal dari kategori dewasa tapi bisa jadi remaja yang memiliki referensi informasi yang lebih beragam.

Ide tentang kemajuan yang dibawa oleh industrialisasi pertambangan tidak lagi menjadi konsep kemajuan yang ideal. Keselamatan anak cucu dan perlindungan alam menjadi dasar mereka menolak rencana penambangan ini. Kesadaran ini dihasilkan dari proses refleksi pengetahuan alternatif yang didapatkan oleh warga, baik dari pengalaman keseharian maupun dengan mengonsumsi media.

Kesadaran yang terus berubah akibat konsumsi media menjadi kalimat yang menggambarkan apa yang terjadi pada masyarakat Pegunungan Kendeng Utara. Jejaring informasi yang didapatkan dari media sosial menjadi materi untuk membentuk kesadaran baru yang berbeda dan lebih berani. Berbagai contoh kerusakan alam akibat pertambangan di daerah lain mereka dapatkan dari media alternatif karena sangat jarang media-media besar mengabarkannya. Menariknya, informasi alternatif ini tidak hanya berujung pada pernyataan positioning terhadap kasus rencana penambangan di Kendeng Utara tetapi berlanjut pada aksi nyata di luar konteks aktivisme media.

Selain melakukan aksi massa, warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng Utara juga melakukan pemetaan partisipatif mengenai potensi goa dan mata air yang ada di wilayahnya. Ini dilakukan untuk membantah temuan akademisi yang bekerja dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hasilnya, seperti yang ditemukan di Rembang dan Pati, banyak mata air, goa dan ponor yang tidak dimasukkan dalam dokumen AMDAL. Keilmiahan kajian AMDAL pun menjadi pertanyaan.

Pengalaman mengonsumsi dan memproduksi media alternatif oleh warga yang sedang menghadapi konflik sumber daya alam inilah yang ingin dibagikan ke banyak komunitas. Keikutsertaan Omah Kendeng yang didukung oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng dan Desantara Foundation dalam Jagongan Media Rakyat 2014 menjadi bagian dari agenda besar mempertemukan berbagai komunitas yang sedang mencoba mencari konsep pembangunan alternatif yang tidak harus merusak alam. Dalam kegiatan ini diharapkan publik

dapat mengetahui duduk persoalan dan bergerak bersama menyelamatkan Pegunungan Kendeng Utara.

Yogyakarta, 23 Oktober 2014

–Mokh Sobirin (Direktur Eksekutif Desantara Foundation)

Pers Rilis Aksi Bersama Koalisi Semarang untuk Kendeng: Investasi PT. Semen Indonesia Mengancam Lingkungan

3 - Dec - 2014 | adplus



Pers Rilis Aksi Bersama Koalisi Semarang untuk Kendeng;
Investasi PT. Semen Indonesia Mengancam Lingkungan
Hentikan bantuan financial ke PT Semen Indonesia

Semarang, 3/12/2014. Sekitar 20 aktivis lingkungan yang tergabung dalam Koalisi Semarang untuk Kendeng melakukan aksi diam di depan Bank Indonesia di jl. Imam Barjo Peleburan Semarang. Aksi yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap warga reimbang yang saat ini sedang berjuang menyelamatkan kawasan karst yang terancam pertambangan oleh PT Semen Indonesia.

Peran strategis Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk memastikan bahwa setiap uang yang dipinjamkan kepada perusahaan tidak merusak lingkungan dan melanggar hak asasi manusia sangat kuat. Komitmen dua lembaga tersebut sangat penting untuk terwujudnya investasi yang ramah lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Diketahui tahun ini Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup

untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan ekologis. Kerjasama ini merupakan program lanjutan KLH dengan Bank Indonesia sejak 2010 dalam kerangka pelaksanaan nota kesepahaman *green banking*.

Pelaksanaan *green banking* adalah satu upaya untuk mengubah paradigma dalam pembangunan nasional dari *greedy economy* menjadi *green economy*. *Greedy economy* merupakan istilah di mana fokus ekonomi hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi yang dinilai melalui pertumbuhan GDP, melakukan eksploitasi kekayaan alam, dan aktivitas ekonomi yang bertumpu pada utang. Sedangkan *green economy* merupakan perubahan pandang terhadap pembangunan ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan 3P (*people, profit, planet*), perlindungan dan pengelolaan kekayaan alam, serta partisipasi masyarakat. Berdasarkan undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengharuskan semua aktivitas ekonomi untuk patuh mendorong kelestarian lingkungan. Perbankan sebagai bagian dari entitas bisnis tentunya tidak terlepas dari hal ini. Pengabaian terhadap ketentuan tersebut tentunya akan berpotensi meningkatkan risiko kredit, risiko hukum dan risiko reputasi bagi perbankan. Untuk itu perbankan perlu memahami dan menguasai lebih baik mengenai manajemen risiko lingkungan hidup ini,” demikian Deputy Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas saat membuka pertemuan tersebut.

Kasus PT Semen Indonesia dengan masyarakat Kabupaten Rembang yang menolak rencana eksploitasi Cekungan Air Tanah Watuputih menjadi bukti bahwa konsep pembangunan berkelanjutan yang didorong oleh sektor perbankan masih belum sepenuhnya terlaksana. eksploitasi cekungan air tanah watuputih yang menjadi sumber air lebih dari 600 ribu jiwa seharusnya menjadi pertimbangan perbankan untuk tidak memberikan bantuan finansialnya ke PT. Semen Indonesia.

Manager Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi Eksekutif Nasional mengatakan “pinjaman finansial perbankan terhadap PT. Semen Indonesia yang akan mengeksploitasi sumber air cekungan air tanah watuputih akan berkontribusi menyumbang laju percepatan kerusakan lingkungan di Jawa Tengah. Bank yang membantu secara finansial tersebut harus mempertimbangan aspek lingkungan dan hak asasi manusia guna meninjau ulang kerjasama bantuannya ke PT Semen Indonesia” imbuhnya.

Sementara itu Unu Herlambang dan Hasan Tuban dari Satjipto Raharjo Institute menambahkan “kebijakan sektor perbankan yang peduli terhadap lingkungan mutlak dilakukan saat ini, karena kondisi Jawa Tengah yang selama ini sudah rawan bencana lingkungan – keadilan hukum harus menyentuh aspek dasar manusia yaitu lingkungan” katanya.

Aksi damai yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut diikuti oleh sekitar 20 orang dari berbagai macam latar belakang dengan mengenakan kaos SAVE-REMBANG untuk menunjukkan kepedulian dari masyarakat Semarang yang tergabung dalam Koalisi Semarang untuk Kendheng kepada aksi penolakan ibu-ibu di Rembang yang telah menetap di tenda selama lebih dari empat bulan. Aksi tersebut berlangsung damai dan diakhiri dengan penyerahan press relese yang ditujukan kepada pimpinan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

(OJK). Zaenal, kuasa hukum warga Rembang dari LBH Semarang mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan rangkaian acara berkelanjutan dalam rangka menyuarakan kepedulian terhadap kejahatan lingkungan dan tindakan represif aparat di aksi damai tenda perlawanan Rembang. “Peduli lingkungan dapat dilakukan dalam berbagai wujud, cara yang paling sederhana adalah dengan mendorong adanya komitmen bersama dari dunia perbankan untuk menolak memberikan kredit pada perusahaan yang ditengarai merusak lingkungan, serta masyarakat pada umumnya, untuk tidak menggunakan produk-produk pabrik yang melakukan perusakan alam”. Komitmen bersama itu seharusnya menjadi satu perspektif mengenai business ethic yang telah banyak disuarakan di luar negeri, tambahnya.

Selanjutnya, pada Kamis 4 Desember besok akan digelar kembali sidang gugatan Warga dan Walhi terhadap Izin Lingkungan PT Semen Indonesia yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Rencananya Sidang akan dibuka pada pukul 10.00 WIB dengan agenda sidang pembacaan Replik oleh Penggugat (warga dan Walhi). Maya Latifasari dari Koalisi Semarang untuk Kendheng menyerukan perlunya keterlibatan masyarakat luas sebagai bentuk pengawasan dalam persidangan yang terbuka dan jujur, untuk mengetuk nurani hakim akan masalah-masalah keadilan ekologis.

Kontak person :

Muhnur Satyahaprabu (Walhi / 081326436437)

Mazaya Latifasari (085715366614)

Pers Release Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK):
HORMATI PUTUSAN PENGADILAN, BERHENTILAH MEMBUAT
PERNYATAAN KONTROVERSIAL

10 - Nov - 2016 | adplus

Semarang, Kamis, 10 November 2016, dimana hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. 71 tahun yang lalu tepat pada tanggal 10 November 1945 para pejuang bangsa Indonesia berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Meski kini kita sudah tidak perlu mengangkat senjata dalam mempertahankan Indonesia kita harus tetap menghargai jasa-jasa pahlawan tersebut dan melanjutkan misi pahlawan Indonesia yakni dengan membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya menghargai dan melanjutkan visi misi para pahlawan, Petani di Pegunungan Kendeng juga merawat dan mempertahankan situs-situs pahlawan yang ada di pegunungan Kendeng dari ancaman rencana ekspansi pabrik semen.

Rencana ekspansi pabrik semen di Pegunungan Kendeng yang berada di beberapa kabupaten, mulai dari Kudus, Grobogan, Pati, Blora dan Rembang, hal itu sungguh mengoyak nurani Petani. Terancam hilangnya kelestarian Pegunungan Kendeng sebagai sumber penghidupan dan eksistensi kami sebagai bangsa yang merdeka, di depan mata. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang mencintai negeri ini, kami terpanggil untuk mencegah perusakan Pegunungan Kendeng dari berbagai upaya sistematis yang dilakukan oleh korporasi. Perlawanan yang bermartabat, mengedepankan budaya rembugan dengan berbagai pihak menjadi pilihan utama bagi kami. Hukum sebagai pilar keadilan utama telah kami tempuh. Upaya kasasi dan peninjauan kembali kami lakukan.

Persoalan pabrik semen di Rembang telah mencatat beberapa pernyataan pejabat publik dan akademisi merespon kekalahan PT Semen Indonesia di Mahkamah Agung Yang membuat pernyataan kontroversial terkait Pabrik Semen di Rembang di berbagai media, baik cetak maupun daring.

Pada pokoknya mereka menyatakan pendirian pabrik semen di Rembang bisa dan atau harus berlanjut, walaupun sudah ada putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor Register 99/PK/TUN 2016 pada 5 Oktober 2016. Putusan ini dibacakan Majelis Hakim PK dipimpin oleh Yorsan, Sudaryono, dan Irfan Fachruddin. Amar putusan tertulis dalam laman Mahkamah Agung adalah “Kabul PK, Batal Putusan Judex Facti, Adili Kembali: Kabul Gugatan, Batal Objek Sengketa”. Yang berarti izin lingkungan sebagai objek sengketa telah batal atau di cabut.

Padahal sangat jelas disampaikan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH yang isinya :

“Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan”
Dalam perkara itu, Joko Prianto, cs dan Walhi melawan Gubernur Jawa Tengah sebagai Tergugat I dan PT Semen Gresik (Semen Indonesia) sebagai Tergugat

Intervensi. Obyek gugatan berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Semen Oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

Terkait persoalan rencana pendirian pabrik semen oleh PT Sahabat Mulia Sakti di Pati, Izin lingkungan yang dikeluarkan Bupati Pati pada tanggal 8 Desember 2014 masih dalam proses KASASI. Karena tanggal 9 Agustus 2016 hakim PT TUN Surabaya memutuskan perkara nomor 79/B/2016/PT TUN.SBY bahwa hakim mengabulkan permohonan tergugat/pembanding dan membatalkan putusan nomor 15/G/2015/PTUN.SMG. Padahal para hakim yang memutus perkara bersertifikasi lingkungan. Sementara itu, sesama hakim yang bersertifikasi lingkungan di PTUN Semarang dan PT TUN Surabaya, mengapa dalam memutuskan perkara yang sama hasilnya berbeda. Ini menjadikan tanda tanya yang sangat BESAR bagi kami.

Terkait substansi dalam putusan tersebut tidak ditemukan pendapat hakim pada perkara, baik terkait permohonan tergugat atau pembanding dan pengugat atau terbanding. Tetapi, ada terdapat hakim yang Dissenting Opinion, yakni hakim anggota II. Menimbang, Putusan PTUN Semarang sudah tepat dan benar. Karena pada saat penerbitan objek sengketa a-quo mengandung cacat hukum (tidak mengikut sertakan masyarakat. Serta bertentangan dengan AUPB). Namun hakim I dan III berpendapat lain. Yakni, membatalkan putusan tingkat pertama, maka dengan disenting opinion (Hakim berpandangan beda) maka putusan majelis hakim Surabaya ada persoalan yang harus dibongkar.

Yang menjadi tanda tanya besar juga Bupati Pati dan Kabag Hukum kabupaten Pati setelah adanya putusan membuat opini bahwa masyarakat sudah tidak punya kesempatan Kasasi, ini bagian bukti juga bahwa Bupati Pati melakukan melawan hukum. Akan tetapi, pada tanggal 24 Agustus 2016 warga mengajukan KASASI di PTUN Semarang dan akhirnya dapat diterima.

Pernyataan orang-orang itu adalah pelecehan terhadap hukum dan putusan pengadilan dan sangat berbahaya dalam kerangka Negara Hukum. Bagaimana mungkin sebuah putusan final dan berkekuatan hukum tetap, yang dikeluarkan lembaga tertinggi pengadilan di Indonesia, namun disesatkan oleh pernyataan orang-orang tersebut. Berhentilah membuat pernyataan kontroversial dan patuhlah terhadap hukum yang ada di negeri ini.

Dengan seluruh harapan, permohonan dan pertimbangan yang kami sampaikan di atas, semua pihak yang bersengketa harus mematuhi putusan pengadilan dan menaatinya. Agar keadilan yang ditegakkan di negeri ini benar-benar dilaksanakan dengan adil.

Salam kendeng
Lestari !!!

Pernyataan Sikap WALHI: Perlawanan WALHI terhadap Kejahatan Lingkungan Hidup di Karst Kendeng

18 - Dec - 2016 | adplus



Jakarta-Membaca pemberitaan media dengan quote pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, WALHI menilai inilah cerminan bahwa masih banyak daerah yang dipimpin dan dikelola oleh kepala daerah dengan ceroboh, Ganjar Pranowo bukan hanya mencampur adukan, tetapi juga menyamakan arti bahasa dan hukum terhadap kata “membatalkan”, “menutup”, menyelamatkan cekungan

air”. Membatalkan adalah tuntutan konstitusional WALHI terhadap izin Lingkungan PT. SI untuk menyelamatkan fungsi hidrologis dan lingkungan kawasan Karst pergunungan Kendeng, sedangkan “menutup” adalah kewajiban dan perintah konstitusional kepada Gubernur Jawa Tengah (Pemerintah). Dimenangkannya gugatan WALHI dan warga Rembang oleh MA pada tanggal 5 Oktober 2016, merupakan satu tahap dari perjalanan panjang penghentian kejahatan lingkungan di pegunungan Kendeng.

Gugatan PTUN WALHI dan warga pada tahun 2014 dilakukan untuk membatalkan izin lingkungan PT. SI, setelah proses kajian terhadap kemungkinan dampak lingkungan, hak rakyat dan ketentuan perundang-undangan pada penerbitan izin PT. SI (sebelumnya PT. SG).

Aktivitas PT. SI dan proses penerbitan Izin PT. SI sarat dengan unsur pidana lingkungan hidup, diantaranya manipulasi informasi dan proses yang bertujuan melegalisasi kejahatan.

Diterima dan dikabulkannya gugatan pada Putusan MA terhadap PK perkara nomor 99 PK/TUN/2016, membuktikan bahwa memang telah terjadi pidana lingkungan dalam aktivitas PT. SI dan proses penerbitan izin oleh Gubernur Jawa Tengah.

Pasca putusan MA, Pidana lingkungan ini tetap berlanjut, PT. SI tidak menghentikan aktivitas dan Gubernur Jawa Tengah tidak mematuhi perintah MA untuk mencabut izin lingkungan, serta ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 71 dan Pasal 72 bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas pemegang izin.

Paska putusan MA, seharusnya gubernur mencabut izin lingkungan, dan selanjutnya karena IUP pertambangan tidak berlaku oleh batalnya izin lingkungan, dan Gubernur terikat secara konstitusional untuk menghentikan dan mencabut izin IUP PT. SI.

Terhadap situasi ini, WALHI mendesak Gubernur Jawa Tengah menghormati dan mematuhi perintah putusan MA dan konsekuensi hukum berikutnya.

KLHK sesuai perintah pasal 73 UU No. 32 Tahun 2009 untuk mengambil langkah langkah second line law enforcement terhadap pelanggaran yg serius pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti halnya dalam proses perizinan dan pidana.

Mabes Polri sebagai pelindung masyarakat, semestinya memiliki paradigma yang peduli lingkungan hidup, untuk segera memeriksa indikator indikator pelanggaran ketentuan perundangan dalam aktivitas PT. SI dan Gubernur Jawa Tengah pada penegakan pasal 94 UU 32 Tahun 2009.

Pada Akhirnya, mengingat pentingnya perlindungan terhadap kawasan ekosistem karst yang memiliki fungsi ekologis, sosial dan budaya, WALHI juga mendorong

agar Presiden segera mengeluarkan kebijakan moratorium terhadap industri semen dan kegiatan industri ekstraktif lainnya di seluruh Indonesia. (selesai)

Jakarta, 17 Desember 2016

PERNYATAAN KOMNAS PEREMPUAN ATAS PENDIRIAN DAN RENCANA PENDIRIAN PABRIK SEMEN SERTA EXPLOITASI KAWASAN KARTS DI PEGUNUNGAN KENDENG UTARA DAN SELATAN

30 - Dec - 2016 | adplus



Komnas Perempuan sebagai salah satu lembaga HAM memantau konflik pendirian pabrik semen dan eksploitasi batu kapur di wilayah pegunungan Kendeng, yang terbentang di bagian utara Pulau Jawa, melintasi wilayah Kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Rangkain pemantauan Komnas Perempuan adalah: (1) Mendokumentasi pengaduan 9 perempuan Kendeng ke Komnas Perempuan pada 19 November 2014 karena mengalami kekerasan. (2) Memantau perkembangan kasus melalui 9 Kartini Kendeng yang melakukan aksi mengecor kaki dengan semen di depan Istana pada 9 April 2016. (3) Memantau perjuangan hukum pada 5 September 2016 saat komunitas Kendeng melakukan aksi mengawal tuntutan dan keprihatinan Di PT TUN Semarang. (4) Melakukan pencarian fakta ke lapangan untuk menjalankan mandat pemantauan ke sejumlah wilayah yaitu Pati, Rembang, Purwodadi dan Kendal yang dilakukan pada September 2016. Komnas Perempuan bertemu dan bicara dengan sekitar 70 perempuan terutama perempuan petani, CSO, penggiat lingkungan, lembaga Negara, penambang dan karyawan di pertambangan batu kapur/gamping serta mendatangi langsung 2 wilayah penambangan batu kapur yang tersebar luas di wilayah Rembang dan Grobogan. Dimana batu kapur yang ditambang akan dikirimkan sebagai bahan baku pabrik semen. Fokus pemantauan adalah untuk mendokumentasi dimensi kekerasan terhadap perempuan dan indikasi

pelanggaran Hak Asasi pada kasus tersebut.

Temuan-temuan kunci Komnas Perempuan:

Terjadi kehancuran dan kerusakan alam yang parah dengan penambangan batu kapur, dari mengamputasi gunung, menggali hingga nyaris mendekati kedalaman permukaan laut. Tanpa memperhatikan keamanan penambangan hingga terjadi longsor yang mengundang kematian, jatuh kedalam lubang tambang, hingga dampak banjir di wilayah lain.

Polusi berat udara karena debu yang diakibatkan lalu lalangnya kendaraan pengangkut bahan baku batu kapur tersebut, baik di area penambangan, arena proyek pabrik Semen Rembang, maupun perkampungan yang dilalui mobil tersebut. Debu putih menutupi tanaman, yang dilaporkan warga sudah tidak bisa dikonsumsi ternak, dan mengganggu pernafasan, mata, kulit yang dapat merusak kesehatan warga baik dalam waktu dekat atau panjang.

Terjadi konflik horisontal yang merusak kehidupan sosial yang selama ini banyak dirawat oleh perempuan, ketegangan antar warga yang pro dan tolak semen.

Retaknya kohesi sosial, tergerusnya budaya saling mengayomi, hilangnya rasa aman oleh tetangga sendiri, misalnya perempuan pemilik tanah yang tolak semen selalu bawa pasir untuk perlindungan diri karena diancam. Rumah-rumah bersaing memasang pamflet pro atau tolak semen yang menghentikan interaksi dan komunikasi yang semula adalah masyarakat yang rekat. Politik sumbangan dan konsultasi yang dirasakan cenderung banyak melibatkan warga pro semen yang semakin menaikkan ketegangan warga.

Rusaknya ekosistem dan keanekaragaman hayati; perempuan-perempuan Kendeng, mengidentifikasi potensi hancurnya ekosistem, baik air yang disimpan di gunung karts akan hancur padahal tempat bergantungnya pertanian masyarakat, tanaman obat yang diidentifikasi setidaknya 52 jenis sebagai apotik masyarakat yang lambat laun dikhawatirkan akan punah.

Perempuan Surokonto Wetan kehilangan rasa aman akibat kriminalisasi lahan tukar guling PT Semen Indonesia dengan lahan yang selama ini mereka garap sebagai sumber kehidupan, perempuan Surokonto Wetan terancam bermigrasi tanpa kesiapan dan menimbulkan permasalahan baru.

Terganggunya wilayah sakral dan hak budaya masyarakat, karena kehadiran pabrik semen di dekat lokus yang disakralkan dan dijadikan lokus spiritual, salah satunya adalah makam tokoh spiritual perempuan, yang dihormati warga, termasuk makam yang dipercaya warga sebagai keturunan wali. Padahal lokus tersebut bagian dari situs sejarah penting bagi bangsa.

Konflik bahkan terjadi sampai ke keluarga yang menyebabkan ketegangan bahkan perceraian karena perbedaan keberpihakan pro dan tolak semen. Yang lebih menyedihkan, anak-anak yang tolak semen diintimidasi guru dan didiskriminasi di sejumlah sekolah.

Kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan yang dialami perempuan saat demonstrasi menentang pendirian semen, ancaman pada perempuan pembela HAM perempuan oleh preman, aparat, juga oleh tetangga. KDRT dengan berbagai pola akibat banyaknya pendatang yang kost dan mulai ada gangguan pada isteri pemilik kost, isteri yang bekerja untuk berjualan menopang karyawan pabrik semen yang mulai dicurigai suami dan warga, karena

dikhawatirkan menjalani prostitusi terselubung. Selain itu warung-warung kopi yang dahulu dijaga orang tua mulai diganti jadi tempat karaoke dan dilayani oleh perempuan-perempuan muda, diskotik yang menampilkan wajah-wajah perempuan belia untuk mengundang pengunjung. Selain itu politisasi agama yang memecah warga dan mem-victimisasi perempuan.

Perendahan dan pengabaian pada perjuangan perempuan Kendeng oleh aparat negara dalam berbagai bentuk: a) mengabaikan analisis dan kekhawatiran perempuan akan kerusakan lingkungan yang dikalkulasi dengan cermat berdasarkan kedekatannya pada alam dan merawat kehidupan. b)

Mempertanyakan kemampuan dan mencurigai bahwa perempuan-perempuan ini dipakai dan dipolitisasi. c) Mengabaikan pelaporan kekerasan yang dialami perempuan saat peletakan baru pertama pendirian pabrik semen Rembang, karena hingga saat ini belum ada tindak lanjut atas pelaporan tersebut.

Untuk itu Komnas Perempuan menyatakan sejumlah hal:

Apresiasi kepada Presiden RI yang melakukan langkah kehati-hatian untuk meninjau kembali pendirian pabrik semen, dan memberi ruang kepada perempuan Kendeng untuk didengarkan. Komnas Perempuan akan menyerahkan hasil laporan pemantauan ini untuk mendukung pertimbangan komprehensif Presiden. Negara harus berani bersikap, tindak lanjuti keputusan inkrah, hentikan rencana pendirian pabrik semen, karena proses pendiriannya maupun penambangan yang ada, sudah berdampak serius pada kerusakan sosial, konflik horisontal, kekerasan terhadap perempuan dan dampak panjang kerusakan lingkungan.

Gubernur Jateng segera melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM warga negara, dan sebagai bagian dari penyelesaian konflik pengelolaan SDA secara bermartabat.

Hentikan ekspor semen dan menyerukan seluruh pihak untuk meminimalisir penggunaan semen sebagai bahan baku membangun, juga sebagai bagian dari upaya minimalisir eksploitasi alam yang akan merusak ekosistem.

Negara harus cermat keluarkan izin, lakukan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang independent, akui kajian masyarakat terutama analisa perempuan di komunitas atas wilayahnya, karena mereka yang tahu dekat dengan bumi sebagai sumber hidup, faham wilayahnya dan yang akan terdampak langsung atau tidak langsung. Libatkan perempuan dalam seluruh proses konsultasi secara sejati bukan hanya syarat formal.

Tanggulangi konflik dan kekerasan di komunitas, utamanya kekerasan terhadap perempuan yang sudah dan yang akan timbul baik di publik maupun domestik. Mengapresiasi perjuangan perempuan Kendeng dan masyarakat peduli Kendeng yang tidak lelah berjuang untuk merawat ekosistem. Mereka telah melakukan langkah-langkah damai, konstitusional, dengan taat pada proses hukum. Selain itu mereka jeli melakukan kajian lingkungan dengan perspektif integratif baik pada isu lingkungan maupun dampak jangka panjang, termasuk pada perempuan dan merawat hak masyarakat adat.

Narasumber : Azriana (ketua), Yuniyanti Chuzafah (wakil ketua), Adriana Veny, Sri Nurherwati, Saur Tumiur Situmorang, Riri Khariroh (komisioner).

Kontak/kordinasi wawancara: Pino 081342317804, Elwi 081287996922.

Pangkur :

Ndika para Wakil rakyat

Niki wanci kawula nagih janji

Mring pangandikan rumuhun

Sumadya merjuwangna

Nasipe para kawula aning dhusun

Kang Niki nembe kaancam

Pabrik semen PTSI

Setelah 22 hari warga Kendeng bertahan di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk menuntut dihentikannya aktivitas pabrik semen di Rembang belum juga ditanggapi oleh Gubernur, hari ini warga beserta segala elemen masyarakat yang bersolidaritas dan mendukung perjuangan warga Kendeng untuk mengetuk rumah rakyat di Kantor DPR Jawa Tengah untuk mengadu kepada wakilnya.

Seperti telah diketahui, pasca Putusan Mahkamah Agung yang memenangkan tuntutan warga Kendeng atas kasus pabrik semen di Rembang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belum juga menghentikan aktivitas PT. Semen Indonesia di Rembang. Sebaliknya pada tanggal 9 November 2016 Gubernur Jawa Tengah justru diam-diam menerbitkan ijin lingkungan baru pada PT. Semen Indonesia di Rembang. Tindakan tersebut merupakan siasat untuk meneruskan kehadiran pabrik semen di Rembang, sekaligus pembangkangan hukum atas Putusan Mahkamah Agung yang telah memenangkan perjuangan warga. Gubernur ditengarai juga mengeluarkan berbagai pernyataan yang mengindikasikan bahwa pabrik semen di Rembang boleh jalan terus. Oleh karena itu, warga bertahan di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah dan tidak akan pulang sebelum Gubernur melaksanakan Putusan MA.

Di kampung halaman warga, terhitung 939 hari sudah warga bertahan di Tenda Perjuangan di Gunung Bokong, Rembang sejak alat berat datang untuk membangun pabrik semen di Rembang. Sama seperti saudara-saudaranya yang bertahan di depan Kantor Gubernur, mereka bertekad tidak akan membongkar tendanya sampai pabrik semen angkat kaki dari Kendeng. Penolakan atas kehadiran pabrik semen di pegunungan Kendeng tersebut didasari atas keinginan untuk menjaga dan melestarikan alam dan ruang hidup warga yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Terlebih karena warga menengarai adanya kejanggalan dan manipulasi data di dalam AMDAL yang menjadi dasar bagi dikeluarkannya ijin lingkungan.

Dalam perjuangannya warga telah mencoba mengadukan masalah ini ke berbagai lembaga negara, termasuk menempuh jalur hukum, berupa gugatan ke PTUN yang berlanjut ke tingkat banding hingga KASASI dan Peninjauan Kembali. Dari awal warga mendesak agar pembangunan pabrik dihentikan terlebih dahulu. Pada tanggal 22 Oktober 2014 Komnas HAM juga pernah menerbitkan rekomendasi penghentian pembangunan pabrik semen hingga selesainya proses menghasilkan keputusan hukum yang tetap. Tapi rupanya hal tersebut tidak dihiraukan dan pembangunan terus saja dilanjutkan. Kini saat putusan dari lembaga hukum

tertinggi memenangkan tuntutan warga, atas nama investasi senilai 5 triliun berbagai pihak justru memaksakan dilanjutkannya pabrik semen tersebut.

Meskipun tidak sebanding dengan besarnya nilai kelestarian alam, investasi senilai 5 triliun bukanlah nilai yang kecil. Sebagai BUMN, investasi tersebut sebagian besar adalah milik negara yang diperoleh dari pajak yang dibayar oleh warga negara. Oleh karena itu, investasi tersebut seharusnya dikelola dengan prinsip kehati-hatian, bermartabat dan menghormati aturan hukum yang ada. Kekhawatiran akan kerugian atas investasi sebesar 5 triliun seharusnya tidak perlu terjadi, jika dari awal PT. Semen Indonesia menjalankan proses pembangunan pabrik di Rembang dengan prinsip kehati-hatian dan menghormati segala peraturan yang ada, termasuk mendengarkan permintaan warga dan rekomendasi Komnas HAM untuk menghentikan sementara pembangunan pabrik semen sampai keluarnya keputusan hukum tetap. Prinsip kehati-hatian seharusnya dijalankan dari awal, bukan dengan mengintimidasi dan mengkriminalisasi warga saat Putusan MA, tiba-tiba memerintahkan pencabutan ijin lingkungan atas pabrik. Ironis memang, warga yang telah memiliki kekuatan hukum oleh lembaga hukum tertinggi justru dicurigai sebagai alat kepentingan asing dan tidak nasionalis.

Berpegang teguh pada tujuan perjuangan mempertahankan pelestarian alam dan penghormatan terhadap hukum, maka warga beserta segala elemen masyarakat yang besolidaritas dan mendukung perjuangan warga menyerukan kepada wakil rakyat di DPR agar:

1. Sebagai Lembaga Legeslatif DPR mendesak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk segera mematuhi putusan MA dan mendorong adanya moratorium tambang pabrik semen.
2. Memastikan bahwa keuangan negara berupa investasi yang ditanamkan dalam pabrik PT Semen Indonesia di Rembang dikelola dengan baik dan benar.
3. Menghentikan intimidasi dan usaha-usaha ke arah kriminalisasi terhadap warga yang menolak kehadiran pabrik semen di Rembang.

Salam Kendeng
Lestari !!!!!

Narahubung JM-PPK :
Gunretno : 0813 9128 5242
Joko Prianto : 0823 1420 3339

Pers Rilis JM-PPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) Semarang
2 Februari 2017

2 - Feb - 2017 | adplus



Memperjuangkan nasib tanah leluhurnya sendiri dan lingkungan hidup di negara kita sendiri memang tidak mudah.

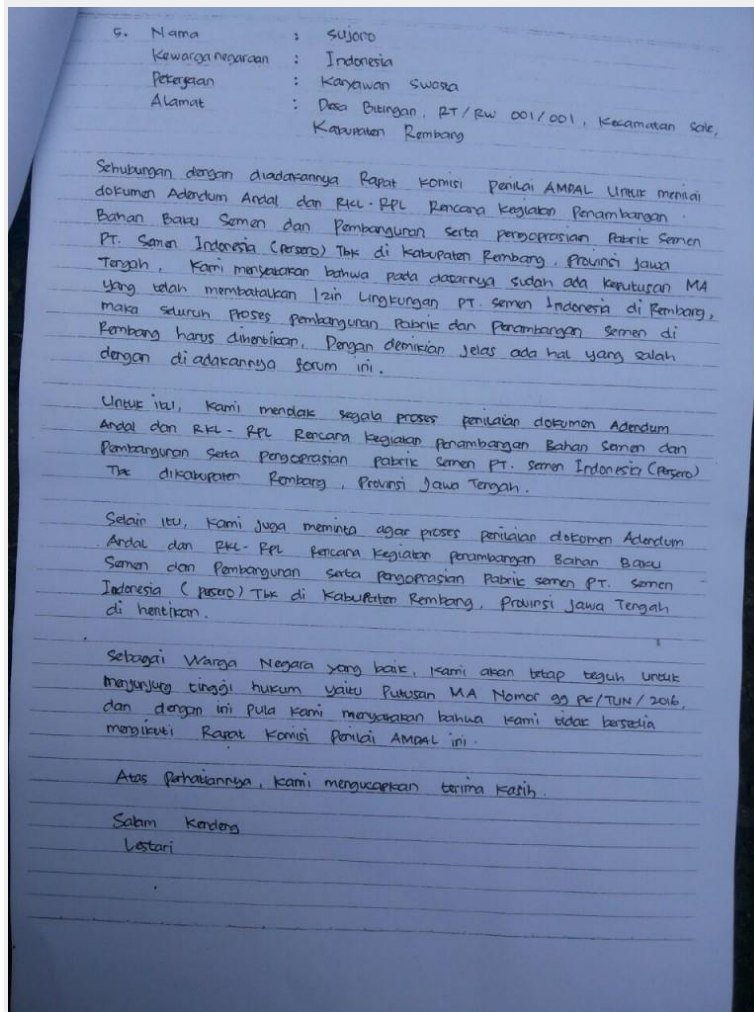
Ancaman kehancuran lingkungan dalam arti luas, peralihan lahan pertanian menjadi wilayah tambang yang merupakan sumber penghidupan, termasuk lenyapnya sumber air kehidupan bagi manusia dan semua makhluk yang menghuni di Pegunungan Kendeng.

Perlu dicatat Pegunungan Kendeng merupakan suatu wilayah kehidupan semua makhluk yang lebih tua dari pemerintahan raja-raja Jawa, jauh lebih tua lagi dari pemerintahan kaum penjajah maupun pemerintahan negara Republik Indonesia.

Apalagi sekedar dibanding dengan Pemerintahan Jawa Tengah, yang sekarang dipimpin orang yang ideologi partainya mengabdikan kepentingan kaum marhaen ” WONG CILIK” dan mereka yang tertindas oleh kekuatan apapun.

Dibawah pemerintahan orang yang berpegang pada ideologi partai seperti itu, haruskah rakyatnya berjuang sendiri mati-matian untuk mempertahankan tanah leluhur, mempertahankan lahan pertanian untuk tetap menjadi petani dan mempertahankan hak hidup dari segala jenis ancaman kehancuran.

Proses panjang yang telah dilalui masyarakat baik secara non-litigasi maupun litigasi/peradilan akhirnya sedikit membuahkan hasil. Putusan PK Mahkamah Agung yang telah memenangkan masyarakat telah menjadi bukti bahwa apa yang selama ini diperjuangkan adalah suatu kebenaran. Majelis Hakim Agung memutuskan dalam pertimbangannya bahwa Amdal yang dijadikan dasar terbitnya izin lingkungan PT Semen Indonesia telah cacat prosedur.



Masyarakat kembali dibuat bingung saat mendapat undangan rapat Komisi Penilaian Amdal di BLH Provinsi Jawa Tengah. Undangan tersebut untuk menilai adendum Andal dan RKL-RPL PT Semen Indonesia. Logika hukum seperti apa yang digunakan oleh pemrakarsa maupun BLH Provinsi Jawa Tengah sehingga memproses permohonan adendum Andal dan RKL-RPL PT Semen Indonesia yang telah dinyatakan cacat prosedur melalui putusan PK Nomor 99/PK/TUN/2016. Tentu tidak selayaknya jika nanti keluar izin lingkungan baru yang didasarkan pada Amdal yang telah dinyatakan cacat. Kehadiran 9 Kartini Kendeng dari Rembang dengan membawa berbagai hasil pertanian pada hari ini di depan kantor BLH, hendak menunjukkan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pemerintah pengambil kebijakan dan kepada seluruh investor semen, bahwa tanah kami begitu subur. Tidak hanya padi, segala

palawija dan ternak hidup dan dihidupi oleh sumber air dari Peg. Kendeng yang saat ini terancam musnah jika ekspansi pabrik semen dan tambang batu kapur jadi dilaksanakan di Peg. Kendeng. Kami tidak pernah gentar sedikitpun untuk terus berjuang agar sumber kehidupan dan penghidupan kami tetap lestari, tidak hanya untuk masa sekarang, tetapi juga untuk masa depan anak cucu.

Sehubungan dengan diadakannya Rapat Komisi Penilai AMDAL untuk menilai dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan serta pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, maka JM-PPK menyatakan Sidang AMDAL tersebut tidak layak untuk dilakukan, pada dasarnya sudah ada keputusan MA yang telah membatalkan Izin Lingkungan PT Semen Indonesia di Rembang, maka seluruh proses pembangunan pabrik dan penambangan semen di Rembang harus dihentikan.

Sebagai Warga Negara yang baik, kami akan tetap teguh untuk menjunjung tinggi hukum yaitu Putusan MA Nomor 99 PK/TUN/2016, yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kami akan meminta kepada Gubernur Jawa Tengah untuk melaksanakan janjinya yang akan menjadikan Jawa Tengah ijo royo-royo dengan tidak mengeluarkan izin untuk pabrik semen di Rembang.. dengan ini pula kami meminta kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendahulukan kepentingan kaum marhaen ” WONG CILIK” (petani) daripada mendahulukan kepentingan export semen karena terbukti di Indonesia over produksi semen.

Salam Kendeng
Lestari.
JM-PPK
Joko Prianto 082314203339

Siaran Pers: “Kegiatan Usaha PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Di Kabupaten Rembang Ilegal ; Petani Rembang Laporkan Pidana Ke POLDA Jawa Tengah”

10 - Feb - 2017 | adplus



Semarang, 8 Februari 2017. Warga petani Rembang yang akan terdampak dari adanya pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang datang bersama LBH Semarang sebagai kuasa hukumnya ke Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Adapun tindak pidana yang diduga dilakukan oleh PT Semen Indonesia adalah melakukan usaha/kegiatan tanpa izin lingkungan sebagaimana diatur Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
Lihat: [Video Aktivitas di tapak pabrik](#)

Sebagaimana diketahui, pada 5 Oktober 2016 Mahkamah Agung telah memenangkan Peninjauan Kembali Petani Rembang lewat putusan bernomor 99 PK/TUN/2016. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jateng tentang Izin Lingkungan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk (yang kemudian berganti nama menjadi PT. Semen Indonesia). Selain itu, dalam amar putusan PK tersebut juga memerintahkan Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut SK Izin Lingkungan tersebut. Berdasarkan Pasal 40 UU PPLH, putusan ini juga memiliki konsekuensi batalnya Izin-Izin turunan dari objek sengketa termasuk Izin Usaha, Izin Konstruksi dan Izin Operasi. Meski dalam mersepon putusan ini Gubernur Jawa Tengah menerbitkan sejumlah SK yang tak sejalan dengan perintah MA, akhirnya pada 16 Januari 2017 Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan SK Nomor 660.1/4 Tahun 2017. Secara substansial, SK ini sebenarnya tidak sepenuhnya sesuai dengan perintah putusan Mahkamah Agung. Dikatakan tidak sepenuhnya sesuai lantaran SK ini tidak hanya mencabut Izin Lingkungan PT Semen Indonesia di Rembang, namun sekaligus memerintahkan PT Semen Indonesia untuk memperbaiki dokumen Amdal. Padahal, putusan MA tidak menyatakan demikian. Oleh karena itu, dengan adanya SK Gubernur Nomor 660.1/4 Tahun 2017, Gubernur Jawa Tengah membuka peluang untuk tetap berjalannya kegiatan usaha PT Semen Indonesia di Rembang.

Lihat: [video pekerja PT SI keluar masuk lokasi pabrik 2](#)

Meskipun SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 Tahun 2017 telah mencabut Izin Lingkungan PT Semen Indonesia, namun kegiatan usaha PT Semen Indonesia di lokasi pembangunan pabrik semen masih terus berlangsung. Artinya, usaha ini dilakukan tanpa memiliki Izin Lingkungan sebagai dasar hukumnya. Padahal, Pasal 36 ayat (1) UU PPLH menyatakan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”. Karena itu, tindakan PT. Semen Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di Rembang ialah tindakan ilegal.

Lebih lanjut, Pasal 109 UU PPLH menyatakan : “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Atas dasar inilah Petani Rembang didampingi LBH Semarang melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia. Selain PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai badan usaha (Korporasi) yang menjadi terlapor dalam dugaan tindak pidana ini, berdasarkan Pasal 116 UU PPLH, turut dilaporkan pula penanggungjawab usaha/kegiatan yaitu Rizkan Chandra (Direktur Utama PT. Semen Indonesia) serta Ir. Suharto (Direktur Penelitian dan Pengembangan dan Operasional PT. Semen Indonesia). Bersamaan dengan pelaporan ini, diserahkan juga kepada petugas yang menerima laporan ini yaitu Kompol Iswanto, S.E., S.H. barang bukti permulaan berupa 4 (empat) dokumen dan sejumlah foto maupun video aktivitas PT. Semen Indonesia di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Pasca pelaporan, Kompol Iswanto, S.E., S.H. menjelaskan bahwa selanjutnya Polda Jawa Tengah akan melakukan

penyelidikan terkait dugaan tindak pidana ini.

Untuk itu, demi menjaga kelestarian Pegunungan Kendeng dari industri ilegal perusak lingkungan, kami menuntut Polda Jawa Tengah agar dapat bertindak objektif dan profesional untuk mengusut dugaan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana yang telah kami laporkan.

Kontak Person :

Ngatiban – 081348479183 (Petani Rembang – JM-PPK)

Eti Oktaviani – 083842317409 (LBH Semarang)

SIARAN PERS: Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia dan Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration (CHRM2) Fakultas Hukum Universitas Jember

11 - Feb - 2017 | adplus



***MERAGUKAN KOMITMEN JOKOWI
SOAL PENEGAKAN HUKUM, PERLINDUNGAN HAM
DAN PENYELAMATAN LINGKUNGAN***

Mengapa Rencana Operasi Pertambangan
PT Semen Indonesia di Rembang Harus Dihentikan?

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” (Pasal 28D ayat 1 UUD Negara RI 1945)

Sungguh memprihatinkan! Upaya warga petani Rembang yang menghendaki tegaknya hukum atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (MA) pada 5 Oktober 2016 (No Register 99 PK/TUN/2016), harus kembali berhadapan dengan cara-cara kekerasan yang diduga dilakukan oleh pendukung tambang. Kekerasan tersebut dalam bentuk perusakan tenda posko perjuangan penolakan tambang semen dan pembakaran mushola.

Peristiwa ini seharusnya tidak terjadi bila Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mematuhi putusan MA tersebut dalam bentuk mencabut ijin, bukan addendum. Karena permohonan warga sebagai penggugat adalah mencabut izin, dan hal tersebut telah dikabulkan seluruhnya.

Amar putusan PK Mahkamah Agung tersebut,
1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/17 Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

Ini artinya, izin berikut operasi pertambangan semen PT Semen Indonesia, sudah seharusnya DIHENTIKAN.

Niat baik Gubernur Jateng sesungguhnya sangat diragukan sejak awal, karena membiarkan PT Semen Indonesia membangun pabrik hingga menelan biaya, khabarnya mendekati 5T. Andai, Gubernur Jateng, taat hukum dan menghormati proses peradilan, maka seharusnya pembangunan tersebut ditunda, dan investasi yang telah dikeluarkan negara tidaklah sia-sia. Namun, pembiaran terus terjadi, bahkan di lapangan, warga penolak tambang semen terus mendapatkan kekerasan dan intimidasi, hingga tadi malam (10/2/2017).

Bahkan atas situasi itu, sebenarnya Presiden RI, Joko Widodo, meminta hentikan rencana pembangunan PT Semen Indonesia, untuk menantikan kajian mengenai dampak pembangunan dan operasi pertambangan pabrik semen di wilayah pegunungan Kendeng tersebut (2/8/2016). Instruksi Jokowi kepada Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, faktanya di lapangan diabaikan. Pembangunan terus berjalan dan berulang kali menyatakan kesiapan untuk beroperasi.

Setelah Putusan Peninjauan Kembali MA, Gubernur justru abai dengan membuat addendum AMDAL dan ijin baru dikeluarkan. Sementara di sisi lain, situasi buruk penyelenggaraan pemerintahan ini seakan dibiarkan oleh pemerintah pusat, atau Presiden RI Joko Widodo, melalui Kantor Kepala Staf Kepresidenan, sehingga tidak lagi peka atas kenyataan penolakan dan kekhawatiran kerusakan lingkungan.

Situasi ini memperlihatkan rusaknya sistem birokrasi yang patuh dalam kerangka negara hukum Indonesia. Peradilan seakan bukan lagi tempat untuk encari keadilan sosial dan keadilan ekologis bagi masyarakatnya, karena penyelenggara pemerintahan dengan mudahnya berakrobatik secara administratif dalam mengeluarkan kebijakannya.

Bila ini semua terus menerus dibiarkan terjadi, maka sesungguhnya Pemerintah, khususnya Gubernur Ganjar Pranowo, semakin jelas posisinya tidak peduli terhadap nasib kaum tani dan penyelamatan lingkungan di wilayah pegunungan Kendeng. Dari hari ke hari kian memperlihatkan justru arogansi kekuasaan, baik itu di birokrasi maupun dukungannya terhadap pengusaha tambang, dan apalagi pembiaran peristiwa pembakaran dan perusakan, yang semua itu menandai

reproduksi kekerasan dan konflik sosial, dimana justru melemahkan komitmen perlindungan HAM dan ekologis!

Melihat perkembangan ini, maka kami dari SEPAHAM Indonesia menyatakan,

1. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas menunjukkan komitmen penegakan hukum, HAM dan penyelamatan lingkungan dengan **MENGHENTIKAN IZIN DAN OPERASI Tambang PT Semen Indonesia.**

2. Mendesak Pemerintah Pusat beserta jajarannya terkait untuk **MENGEVALUASI** secara lebih hati-hati, bijak, dan kokoh, terhadap semua rencana usaha pertambangan dan meneguhkan upaya perlindungan hak-hak konstitusional warga negara serta hak atas lingkungan.

3. Mendesak Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, untuk **TAAT HUKUM** terhadap Putusan Mahkamah Agung PK No. 99 PK/TUN/2016, dan menghormatinya sebagai petanggungjawaban konstitusional pejabat negara, dan membatalkan ijin lingkungan kegiatan penambangan. Pengabaian, pembiaran, dan bahkan upaya administrasi untuk addendum adalah jelas **PEMBELAJARAN SANGAT BURUK DALAM MENEGUHKAN KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM.**

4. Mendesak kepada KAPOLRI untuk **MENGUSUT** tuntas segala bentuk kekerasan dan pembiaraan oleh aparat penegak hukum kepolisian di bawah jajarannya, sebagai upaya perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat yang telah diberikan kemenangan putusan Mahkamah Agung.

5. Menegaskan bahwa hilangnya **INVESTASI** negara dalam Perusahaan BUMN, adalah akibat **PEMERINTAH JAWA TENGAH** itu sendiri yang **TIDAK MENGHORMATI PROSES PERADILAN YANG BERJALAN**, dan hal ini telah diingatkan warga dan dalam forum peradilan itu sendiri

Jember, Sabtu, 11 Februari 2017

SERIKAT PENGAJAR HAK ASASI MANUSIA (SEPAHAM) INDONESIA

Al Hanif, LL.M. PhD. (Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration (CHRM2) Fakultas Hukum Universitas Jember) (+62 813-3587-6651)

Dr. Herlambang P. Wiratraman, SH., MA. (Pusat Studi Hukum Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Airlangga) (+62 821-4083-7025)

Prof. Dr. Soelistyowati Irianto, SH., MA. (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta)

Khairani Arifin, SH., M.Hum. (Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh)

Aloysia Vira Herawati, S.S., M.Hum.Rights Edu. (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya)

Siti Rakhma Mary Herwati, SH., MSi., MA (Dosen Prodi Hukum President University, Jakarta)

Ayu Wahyuningroem, PhD. (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, Jakarta).

Rosita Indrayati, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Jember)

Dr. Zainal Arifin Mochtar, SH., LL.M. (Pusat Studi Anti Korupsi/Pukat, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta)

Dr. Tisnanta, SH. (Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia/PKKP-HAM, Universitas Lampung)

I Wayan Titib S, SH., MS. (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya)

Adam Muhshi, SH., MH. (CHRM2, Fakultas Hukum Universitas Jember)

Dina Tsalist Wildana, SH.,LLM. (CHRM2, Fakultas Hukum Universitas Jember)

Fiska Maulidan Nugroho, SH., MH. (CHRM2, Fakultas Hukum Universitas Jember)

Haidar Adam, SH., LL.M. (Pusat Studi Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga)

Rachminawati, SH., MA. (Paham Fakultas Hukum Universitas Pajajaran)

KENDENG MENUNDUKKAN KEPALA

21 - Mar - 2017 | adplus



Jakarta, Selasa, 21 Maret 2017

Sejak Senin 13 Maret 2017, warga pedesaan di kawasan bentang alam karst Kendeng memulai aksi kolektif untuk memprotes pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menanggapi penolakan warga kawasan Kendeng terhadap rencana pendirian dan pengoperasian pabrik Semen milik PT Semen Indonesia di Rembang dan semen lainnya di pegunungan Kendeng. Termasuk

dalam ketidak-becusan tersebut antara lain adalah pengambilan keputusan dan tindakan yang memperlakukan hukum, termasuk mengecil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membatalkan Ijin Lingkungan; dan mengganggu usaha warga untuk mendapatkan keadilan atau membiarkan berlangsungnya gangguan dari pihak lain.

Sejak awal, seluruh peserta aksi #DipasungSemen2 didampingi dan dimonitor selalu oleh tim Dokter yang siaga di YLBHI dan di lokasi aksi. Aksi protes berlangsung setiap hari, dimulai dari siang sampai sore, dengan fasilitas sanitasi lapangan dan peneduh. Pada sore hari peserta aksi pulang ke tempat beristirahat dan menginap di YLBHI jalan Diponegoro Jakarta.

Kamis, 23 Maret 2017, datang menyusul kurang-lebih 55 warga dari kabupaten Pati dan Rembang bergabung melakukan aksi pengecoran kaki dengan semen. Dua Puluh dari yang datang memulai mengecor kaki di hari Kamis tersebut. Bu Patmi adalah salah satu dari yang mengecor kaki dengan kesadaran tanggung jawab penuh. Beliau datang sekeluarga, dengan kakak dan adiknya, dengan seijin suaminya.

Senin sore, 20 Maret 2017, perwakilan warga diundang Kepala Kantor Staf Presiden, Teten Masduki untuk berdialog di dalam kantor KSP. Pada pokoknya, perwakilan menyatakan menolak skema penyelesaian konflik yang hendak digantungkan pada penerbitan hasil laporan KLHS yang sama tertutupnya dan bahkan samasekali tidak menyertakan warga yang bersepakat menolak pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia dan Pabrik Semen lainnya di Pegunungan Kendeng tersebut.

Senin 20 Maret 2017, pada malam hari, diputuskan untuk meneruskan aksi tetapi dengan mengubah cara. Sebagian besar warga akan pulang ke kampung halaman, sementara aksi akan terus dilakukan oleh 9 orang. (Alm) Bu Patmi (45) adalah salah satu yang akan pulang sehingga cor kakinya dibuka semalam, dan persiapan untuk pulang di pagi hari.

Bu Patmi sebelumnya dinyatakan sehat dan dalam keadaan baik oleh Dokter. Kurang lebih pukul 02:30 dini hari (Selasa, 21 Maret 2017) setelah mandi, bu Patmi mengeluh badannya tidak nyaman, lalu mengalami kejang-kejang dan muntah. Dokter yang senang mendampingi dan bertugas segera membawa bu Patmi ke RS St. Carolus Salemba. Menjelang sampai di RS, dokter mendapatkan bahwa Bu Patmi meninggal dunia. Pihak RS St. Carolus menyatakan bahwa bu Patmi meninggal mendadak pada sekitar Pukul 02.55 dengan dugaan jantung. Innalillahi wa inna lillahi roji'un.

Pagi ini jenazah almarhumah bu Patmi dipulangkan ke desa Larangan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati untuk dimakamkan di desanya. Dulur-dulur kendeng juga langsung pulang menuju Kendeng.

Kami segenap warga-negara Republik Indonesia yang ikut menolak pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng berduka atas kematian bu Patmi dalam aksi protes penolakan di seberang Istana Presiden ini. Kami juga ingin menegaskan kekecewaan kami yang mendalam terhadap tumpulnya kepekaan politik para pengurus negara, termasuk pengingkaran tanggung-jawab untuk menjamin keselamatan warga-negara dan keutuhan fungsi-fungsi ekologis dari bentang alam pulau Jawa, khususnya kawasan bentang alam karst Kendeng. Sungguh ironis, bahwa di satu pihak pemerintah Republik Indonesia menggembar-gemborkan itikad dan tindakan untuk ikut menjadi resolusi sejati dari krisis perubahan iklim dan hilangnya keragaman hayati, menegakkan hukum dan melakukan pembangunan dari pinggiran. Kematian Bu Patmi menjadi saksi bagi seluruh dunia, bahwa warga masyarakat Indonesia masih harus menyatakan sikapnya sendiri karena tidak adanya pembelaan sama-sekali dari pengurus kantor-kantor pemerintah yang seharusnya mengurus nasib warga negara. Kami juga menyampaikan kepada kalangan berpendidikan tinggi yang justru memilih peran sebagai juru-sesat untuk mengaburkan duduk-perkara masalah yang tengah dilawan oleh warga kawasan bentang alam karst Kendeng, termasuk sebagian pengurus media massa bahwa upaya-upaya bangsa Indonesia dan kemerdekaan Republik Indonesia.

Koalisi Untuk Kendeng Lestari

CP :

Mokh Sobirin – Desantara [0822 2072 1419]

Muhamad Isnur – YLBHI [0815 1001 4395]

31 - Mar - 2017 | adplus



**Aksi Solidaritas
SALATIGA
Peduli Kendeng**

RANGKAIAN ACARA:

1. Tahlil Ibu Bumi (Doa Bersama untuk Alm. Ibu Patmi dan Perjuangan Warga Kendeng) pada Kamis, 30 Maret 2017, pukul 19.00 Wib-Selesai, di Sekretariat YLSKAR (Jalan Gajah Oya, Nanggulan, Salatiga/Depan GBI Blondo Celong).
2. Aksi Solidaritas Amankan Tani untuk Perjuangan Warga Kendeng pada Jumat, 31 Maret 2017, pukul 09.00-11.30 Wib, di Jalan Sudirman (Tugu Jam), Salatiga -Titik Kumpul di Depan Gedung Pertemuan Daerah (GPD), Salatiga.

ALIANSI MASYARAKAT ANTI KEKERASAN TERHADAP PETANI (AMANKAN TANI):

BAWA KAUS BERWARNA GELAP ADA SABLON GRATIS

NARAHUBUNG:
Eric Darmawan - 0856 2696 662
Galih Agus Saputra - 0819 0173 1778



Perjuangan para petani Kendeng melawan pendirian pabrik semen milik PT. Semen Indonesia di Rembang belum menemukan titik terang. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tak mengindahkan putusan Mahkamah Agung yang telah memenangkan gugatan para petani Kendeng. MA melalui surat putusan No. 99 PK/TUN/2016 menyatakan bahwa Surat Izin Lingkungan, Penambangan dan Pendirian Pabrik Semen di Kendeng, yang telah dikeluarkan Gubernur Jateng sebelumnya melalui SK No. 660.1/17 tahun 2012 harus dicabut.

Putusan MA No. 99 PK/TUN/2016 keluar sejak 5 Oktober 2016 atau setelah warga melakukan tahapan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa sekaligus terakhir di Mahkamah Agung. Tapi, kondisi ini diperparah oleh ulah Ganjar, yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang izin lingkungan baru pada 9 November 2016 yaitu SK No 660.1/30 tahun 2016. Padahal dalam pertemuan antara Perwakilan Warga Rembang dengan Presiden Jokowi di Kantor Presiden pada 2 Agustus 2016, Presiden telah meminta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLs) Pegunungan Kendeng, dan selama kajian itu dilakukan semua operasi di pabrik harus dihentikan.

Di lain kesempatan, Ganjar pernah mencabut SK No 660.1/30 tahun 2016, melalui Surat Keputusan Gubernur No 660.1/4 Tahun 2017 pada 16 Januari 2017. Namun demikian, toh Ganjar masih mengeluarkan SK baru pada 23 Februari 2017 yaitu SK Nomor 660.1/6 Tahun 2017. Ini aneh karena Ganjar mengeluarkan SK baru disaat Amdal induk sudah dinyatakan cacat yuridis oleh MA karena ada ketidakbenaran substansi, cacat data dan informasi. Maka dari itu, pada kesempatan ini Ganjar hanya sedang mem-pingpong warga rembang menggunakan beberapa kebijakan yang telah dikeluarkannya. Satu hal yang perlu diketahui pula, dalam hal ini Ganjar telah menganggangi keputusan yang telah ditetapkan oleh MA, sebagai lembaga hukum tertinggi di Indonesia.

Selain diselimuti dengan berbagai macam kebijakan yang telah dikeluarkan Ganjar, setidaknya ada dua argumen (baca juga: mitos) yang selalu disebarluaskan oleh pemerintah kepada masyarakat bahwa membangun pabrik semen ini; pertama, menyejahterakan masyarakat sekitar pertambangan, dan kedua, Pegunungan Kendeng tak memiliki sumber mata air sehingga tak masalah jika dilakukan eksploitasi besar-besaran. Parahnya lagi, pada 30 Maret 2017, Menteri ESDM melalui surat NO. 2537/42/MEM. S/2017 HAL: Dukungan Pemetaan Sistem Aliran Sungai Bawah Tanah CAT Watuputih Rembang Jawa Tengah ke Menteri KLHK menyatakan “CAT Rembang tidak ditemukan sungai bawah tanah dan seolah-olah sudah menyimpulkan bahwa CAT Rembang tidak Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK).”

Dua mitos, berikut pernyataan Menteri ESDM itu dangkal. Data Sensus Pertanian Kabupaten Rembang 2013 telah menunjukkan bahwa 108.359 dari 166.199 rumah tangga di sana melakukan usaha pertanian dan tidak melakukan kerja-kerja pertambangan. Maka dari itu, mengedepankan sektor pertambangan dikala masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian ini bagai api yang jauh dari panggung, karena kedua sektor tersebut pun sebenarnya juga sangat berbeda dari sudut pandangnya. Pertanian adalah usaha padat karya yang lebih banyak menyerap tenaga kerja. Sementara pertambangan milik PT. Semen Indonesia itu adalah usaha padat modal yang lebih menguntungkan segelintir orang saja. Toh, menurut data Asosiasi Semen Indonesia (ASI) 2015, konsumsi semen Nasional menyisakan surplus. Kemudian pada 2016, kapasitas produksi semen Nasional diperkirakan kembali meningkat menjadi 92,8 juta ton dengan beroperasinya beberapa pabrik baru, seperti PT Semen Padang, PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk (INTP), dan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR).

Mitos Pegunungan Kendeng tak memiliki sumber mata air lagi-lagi terasa dangkal kala disandingkan dengan data dari PDAM Rembang. Data tersebut menunjukkan bahwa sekitar 153.402 jiwa di Kabupaten Rembang bergantung langsung pada Cekungan Air Tanah Watuputih di Pegunungan Kendeng, yang mengalirkan ratusan mata air. Bahkan aliran mata air ini juga mencukupi kebutuhan air minum di Kabupaten Pati, Blora dan Tuban. Oleh karena itu, jika pemerintah hendak memuluskan upaya PT. Semen Indonesia mendirikan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, tak lain dan tak bukan mereka hanya menghendaki

masyarakatnya terlibat konflik atas air. Persoalan air menjadi lebih serius karena air adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, kecuali Ganjar dan Menteri ESDM. Mereka makan dan minum semen.

Selanjutnya, perjuangan warga menolak pabrik semen di Rembang untuk memperoleh keadilan dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup juga tak dimanusiakan. Gugurnya (Alm) Ibu Patmi (48) dalam perjuangannya untuk menyelamatkan Kawasan Resapan Air Tanah (KARST) di Rembang pun, barang sedikit tidak mengetuk hati nurani Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi. Terakhir, keluhan dua orang perwakilan warga, yakni Gunarti dan Gunarto kepada Presiden Jokowi di Istana malah tidak digubris. Mempermainkan hukum demi kepentingan industri tak lain hanyalah siasat mengelak dari kewajiban mematuhi hukum dan putusan pengadilan. Ini adalah preseden buruk bagi penegakan hukum lingkungan, dimana pembangkangan hukum justru dilakukan pejabat publik dan badan usaha negara, yang justru seharusnya memberi contoh mentaati putusan peradilan yang bersifat final dan mengikat.

Maka dari itu, kami, para pemuda, petani, seniman, mahasiswa, pegiat HAM dan lingkungan hidup yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Kekerasan Terhadap Petani (Amankan Tani) menuntut;

1. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mematuhi Putusan Mahkamah Agung yang keluar sejak 5 Oktober 2016, yaitu Surat Putusan MA No. 99 PK/TUN/2016.
2. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencabut semua kebijakan yang telah dikeluarkannya, sehubungan dengan Surat Izin Lingkungan, Penambangan dan Pendirian Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng,
3. Presiden Jokowi, sebagai pemegang tampuk kekuasaan tertinggi di negeri ini, menggunakan kapasitasnya untuk memanusiaikan semua orang yang telah merelakan waktu dan tenaga untuk menjaga Rahim (Ibu Bumi), dan
4. Menghentikan kriminalisasi terhadap petani di Jawa Tengah,
5. Menyelesaikan konflik agraria yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah.
6. Menjaga lumbung padi, termasuk memperbaiki sistem regenerasi petani di Jawa Tengah.
7. Mewujudkan reforma agraria sejati di seluruh negeri ini.

“Ibu Bumi Wis Maringi, Ibu Bumi Dilarani, Ibu Bumi Kang Ngadili.” Salam Lestari!

Kami yang turut berpartisipasi bersama Amankan Tani;

1. Kerja Kreatif Akar Rumput
2. Aliansi Petani Indonesia (API) Jateng
3. Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) Jateng
4. Yayasan Kristen Trukajaya Salatiga
5. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jateng.
6. Salatiga Peduli
7. Prosa Nada
8. Benci Buncit
9. Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT)
10. Yayasan Lingkar Studi Kesetaraan Aksi dan Refleksi (YLSKAR)
11. Jejer Wadon
12. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Salatiga
13. Teater Getar IAIN Salatiga
14. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota (DK) Yogyakarta
15. PPMI DK Semarang
16. Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Salatiga
17. Ikatan Keluarga Mahasiswa Pati (IKMP)
18. Individu Merdeka
19. Yayasan Desantara
20. Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Salatiga
21. Skeptis
22. Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Salatiga
23. SUH Upcycleandart
24. Front Mahasiswa Progresif dan Revolusioner Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
25. Akar Merdeka

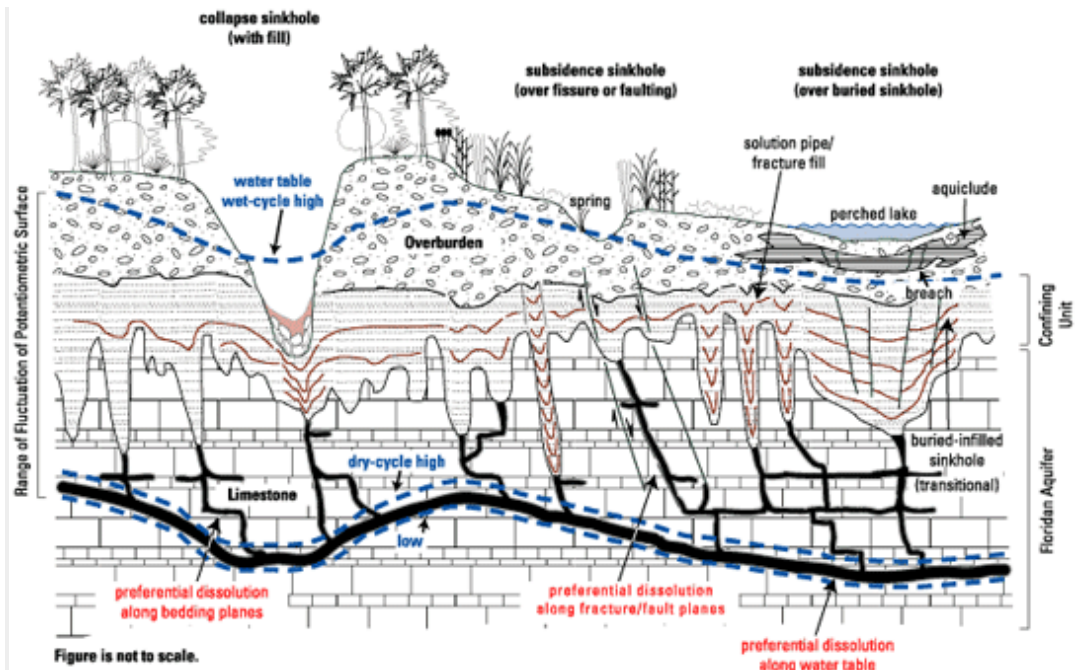
Narahubung:

Eric Darmawan : 0856-2696-662

Galih Agus Saputra : 0819-0173-1778

Pers Rilis JM-PPK: “KEMBALIKAN HAK WATUPUTIH SEBAGAI KAWASAN LINDUNG”

31 - Mar - 2017 | adplus



Dalam menanggapi surat Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) tentang “Dukungan Pemetaan Sistem Aliran Sungai Bawah Tanah Cekungan Air Tanah (CAT Watuputih, Rembang, Jawa Tengah)” dengan nomor 2537/42/MEM.S/ 2017 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup tertanggal 24 Maret 2017. Kami dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) melihat Kemen ESDM (cq Badan Geologi) cenderung terlalu tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan CAT Watuputih tidak mengindikasikan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK), karena berdasarkan data yang terbatas dan ala kadarnya. Padahal banyak data-data CAT Watuputih dari JM-PPK dan juga dari tesis mahasiswa UGM, UPN, UNDIP, dan lainnya. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa Badan Geologi (Kepala Badan Geologi dan pejabat yang membidangi air tanah dan lingkungan) tidak profesional dan tidak cakap dalam menjalankan tugas. Kami ingin Kepala Bidang Geologi bertanggung jawab dan dievaluasi atas kesimpulannya terkait CAT Watuputih, karena bila kesalahan yang sama terjadi di bidang lainnya, dapat membahayakan dan ini berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat di muka bumi.

Kami percaya Bapak Ignatius Jonan selaku menteri ESDM bekerja secara profesional, terbukti dari hasil kinerjanya yang sangat baik sewaktu menjabat sebagai Dirut PT KAI, Menteri Perhubungan hingga menyelesaikan masalah yang terkait dengan energi dan sumber daya mineral. Untuk itu, kami meminta agar mengevaluasi kinerja Kepala Bidang Geologi dan jajarannya, mengingat masalah

geologi sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat di muka bumi ini. Kami memohon kepada Menteri ESDM dalam bekerja untuk jujur, lugas, tegas dan punya data yang memadai dalam mengevaluasi dan memutuskan CAT Watuputih masuk kriteria KBAK atau bukan KBAK. Untuk itu, kami merasa sangat penting untuk menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut :

1. Kementerian ESDM dalam hal ini diwakili oleh Yth. Bapak Ignatius Jonan sebagai Menteri seharusnya mengutamakan sikap kehati-hatian dalam membuat pernyataan terkait status kawasan CAT Watuputih, mengingat status CAT Watuputih adalah KAWASAN LINDUNG GEOLOGI berdasarkan fungsinya sebagai resapan air tanah sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NO.14 TAHUN 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang 2011-2031 Pasal 19/a.

2. Kementerian ESDM dalam hal ini diwakili oleh Yth. Bapak Ignatius Jonan sebagai Menteri seharusnya mengutamakan sikap kehati-hatian dalam membuat pernyataan terkait status kawasan CAT Watuputih, mengingat status CAT Watuputih telah ditetapkan oleh Presiden sebagai salah satu CEKUNGAN AIR TANAH (CAT) dengan luas 31 Km² berdasarkan KEPUTUSAN PRESIDEN NO.26 TAHUN 2011.

3. Penjelasan mengenai batas-batas dan kondisi CAT WATUPUTIH telah disampaikan oleh Kepala Badan Geologi yang pada waktu dijabat oleh Yth. Bapak Suroso melalui surat bernomor 1855/40/BGL/2014 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM dan ditembuskan ke JM-PPK. Dalam surat tersebut dijelaskan CAT Watuputih merupakan bentang alam yang tersusun oleh batugamping pejal dan batugamping dolomitan. Formasi Paciran yang memiliki karakteristik AKUIFER dengan aliran melalui celahan, rekahan dan saluran. CAT WATUPUTIH MEMILIKI KLASIFIKASI DAN BATASAN YANG SAMA DENGAN AKUIFER KARST.

4. Hasil uji lacak jaringan hidrologi yang dilakukan oleh Tim Penyusun AMDAL PT. Semen Indonesia di Watuputih, MENUNJUKKAN ADANYA KAITAN ANTARA WILAYAH IUP BATUGAMPING DENGAN MATA AIR SUMBER BRUBULAN yang berjarak 4 kilometer di sebelah tenggara (BAB V halaman 74-75 dokumen AMDAL PTSI). Dalam dokumen tersebut dituliskan bahwa larutan perunut yang dituangkan ke dalam titik bor 3 terdeteksi di Sumber Brubulan (100 liter/detik) setelah 3.5 hari (82 jam), dituliskan permeabilitas mencapai 1 kilometer/hari hanya memungkinkan terjadi pada akuifer konduktif (saluran). Titik Bor 3 juga terhubung dengan titik bor 5 yang diperkirakan merupakan satu sistem dengan Sumber Brubulan. Titik bor 3 dan 5 berada di wilayah IUP Batugamping PT Semen Indonesia. Saluran air bawah tanah dengan panjang sedikitnya 4 kilometer dan debit 100 liter/detik telah secara jelas ditunjukkan keberadaannya di CAT WATUPUTIH. Hasil uji perunut ini dengan sendirinya telah menjawab poin 2 dan poin 3 dalam surat yang disampaikan oleh Menteri ESDM.

5. Hasil pendataan tim JM-PPK dan Semarang Caver Assosiation (SCA) menemukan sedikitnya 154 titik mata air, 28 titik mulut goa dan 15 titik ponor (lubang resapan alami) di Watuputih. Sedikitnya terdapat 2 titik mulut goa dan 18 titik ponor yang berada di dalam IUP batugamping PT. Semen Indonesia. Temuan-temuan tersebut masih membutuhkan penelitian lebih lanjut terutama terkait jaringan goa-goa dan hubungannya terkait tata hidrologi di Kawasan Watuputih. Dalam Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional Pasal 60 menuliskan Bentang Alam Goa (poin 2c) dan Bentang Alam Karst (poin 2f) merupakan unsur-unsur yang berdiri sendiri sebagai KAWASAN LINDUNG GEOLOGI dari sisi keunikan bentang alam. Belum ditetapkannya Watuputih sebagai Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) seharusnya tidak menggugurkan status CAT Watuputih sebagai kawasan yang harus dilindungi, mengingat banyaknya bentang alam goa dan mata air yang ditemukan di kawasan WATUPUTIH, terlebih dengan mempertimbangkan fungsinya sebagai KAWASAN RESAPAN AIR (Pasal 52 Poin 1c) dan KAWASAN PERLINDUNGAN AIR TANAH (Pasal 53 Poin a dan Poin b).

6. Hasil Penelitian LIPI dan Tim KLHK (Kompas, Rabu 22 Oktober 2014) menyatakan bahwa Watuputih merupakan ekosistem karst yang memiliki fungsi lingkungan tinggi sehingga harus hati-hati dalam pemanfaatannya. Tim LIPI dan KLHK juga telah menemukan dampak penambangan yang telah berlangsung saat ini yang dilakukan oleh perusahaan lokal (PT SAF) di lokasi Watuputih yaitu hilang/berkurangnya fungsi daerah imbuhan aliran air tanah dan sedimentasi pada sumber-sumber mata air. Tim LIPI juga menyatakan secara biologi KAWASAN WATUPUTIH MEMILIKI INDIKASI FUNGSI LINDUNG EKOSISTEM KARST. Temuan tim LIPI antara lain di Goa Jagung dan Goa Joglo sedikitnya terdapat tiga jenis kelelawar pemakan serangga : *Minioterus australis* (240 individu), *Rhinolopus pusillus* (400 individu) dan *Hipposideros larvatus* (90 individu) di Goa Joglo dan Goa Jagung.

Sementara di Goa Temu dijumpai ribuan individu kelelawar *Miniopterus* sp. Kelelawar pemakan serangga memiliki fungsi pengendali hama pertanian, Kelelawar penghuni Goa Joglo dan Goa Jagung dalam satu malam diperkirakan mampu memakan 2,2 kilogram serangga yg berpotensi menjadi hama pertanian.

7. Penelitian yang diprioritas oleh Kementerian ESDM pada tanggal 15-24 Februari dan tanggal 8-9 Maret 2017 (total selama 12 hari) menurut kami belum cukup meyakinkan untuk menyimpulkan status kawasan Watuputih sebagai kawasan karst atau bukan. Hal ini sebenarnya telah dijelaskan sendiri dalam surat tersebut (Poin 2) bahwa minimal pengamatan harus dilakukan minimal selama setahun. Berdasarkan data-data primer yang kami miliki, kami menghimbau dan mengajak tim Kementerian ESDM untuk kembali melakukan identifikasi lapangan bersama-sama masyarakat dan pendamping ahli untuk membuktikan bahwa temuan-temuan di kawasan WATUPUTIH dengan jelas telah memenuhi kriteria kawasan karst sebagaimana dalam PERMEN ESDM 17/2012.

8. Kami juga menghimbau agar Kementerian ESDM dalam hal ini Bapak Ignatius Jonan sebagai Menteri ESDM meminta seluruh pihak terbuka terkait data hasil riset dan penelitian yang telah dilakukan di WATUPUTIH, terutama penelitian

keterkaitan IUP batugamping PT Semen Indonesia dengan mata air Sumber Brubulan yang telah dilakukan oleh penyusun AMDAL. Kami meminta Kementerian ESDM, masyarakat dan ahli pendamping untuk membuktikan keberadaan aliran bawah tanah di WATUPUTIH.

Berdasarkan poin-poin tersebut di atas kami dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) menghimbau kepada pemerintah untuk **MENGEMBALIKAN HAK WATUPUTIH SEBAGAI KAWASAN LINDUNG** dan berhenti melakukan manuver-manuver yang semakin menunjukkan pemerintah tidak independen dalam menentukan sikap terkait polemik pendirian pabrik semen di Kawasan Pegunungan Kendeng.

Rembang, 31 Maret 2017

Salam Kendeng

Lestari !!!!

Narahubung JM-PPK :

Joko Prianto: 0823-1420-3339

Gunretno : 081391285242

Aktivist Gelar Aksi Tutup Mulut Desak Batalkan Izin Pabrik Semen di Rembang

KONTRIBUTOR SEMARANG, PUJI UTAMI

Kompas.com - 05/11/2014, 17:35 WIB



Sejumlah aktivis dari berbagai komunitas menolak pendirian pabrik semen di Kabupaten Rembang Jawa Tengah dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah Jalan Pahlawan Semarang, Rabu (5/11/2014)(KOMPAS.com/PUJI UTAMI)

SEMARANG, KOMPAS.com - Sejumlah aktivis dari berbagai komunitas di Semarang mendesak pembatalan izin lingkungan PT Semen Indonesia yang akan membangun pabriknya di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Desakan itu disampaikan melalui aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Semarang, Rabu (5/11/2014).

Aktivis yang menamakan diri Koalisi Semarang untuk Kendeng itu menilai, pembangunan pabrik semen akan merusak lingkungan. Sehingga alat berat yang sudah ada di kawasan karst Rembang harus ditarik dan aktivitasnya segera dihentikan.

Beberapa aktivis terlihat memakai kaos hitam bertuliskan "Save Rembang" dengan mulut mereka ditutup lakban hitam. Selain itu, mereka juga membawa sejumlah poster, antara lain bertuliskan "Tolak Pabrik Semen dan Segera Tarik Mundur Alat Berat Tambang Selama Sidang Gugatan di PTUN" dan "Bebaskan Bumi Rembang dari Alat Berat Tambang".

Koordinator aksi, Zaenal Arifin mengatakan, aktivitas pabrik semen harus dihentikan selama proses gugatan pembatalan izin lingkungan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang masih dilakukan. Warga telah melakukan

gugatan melalui PTUN untuk membatalkan izin lingkungan pendirian pabrik pada 1 September lalu.

Selain itu, aksi ini juga sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan warga Rembang yang menolak pendirian pabrik semen karena dianggap akan sangat merugikan warga.

"Mereka yang menolak itu ibu-ibu, sudah mendirikan tenda di dekat lokasi dan lebih dari empat bulan tinggal di tenda perjuangan itu," ujarnya.

Penolakan itu, ungkapnya, bukan tanpa dasar, sebab daerah yang akan didirikan pabrik berada di kawasan cekungan air tanah Watu Putih dan merupakan kawasan lindung geologi.

Ia mengatakan di kawasan itu ditemukan 49 goa tersebar dengan empat goa memiliki sungai bawah tanah aktif. Selain itu terdapat 109 mata air yang mengalir di sepanjang musim kemarau maupun penghujan yang mampu memenuhi kebutuhan 607.198 jiwa di 14 kecamatan.

"Kalau kawasan itu hilang, maka hilang pula fungsi resapan air," tandasnya.

Sementara terkait dengan gugatan yang diajukan ke PTUN Semarang, Zaenal mengatakan hal itu sebagai bentuk protes warga terhadap Gubernur Jawa Tengah yang dinilai tidak memihak warga. Gubernur juga dianggap telah lepas tanggung jawab sebagai pemimpin daerah dengan mengeluarkan izin lingkungan terkait pendirian pabrik semen tersebut.

Secara terpisah, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta semua pihak bersabar menunggu keputusan majelis hakim PTUN atas gugatan penerbitan izin lingkungan tersebut.

"Kita tunggu saja, putusan itulah yang paling *fair*, sebab kalau setiap ada sesuatu atau pihak yang tidak setuju kemudian ada tekanan yang terus membuat kita mencabut, maka tidak ada yang bisa berjalan," katanya.

PenulisKontributor Semarang, Puji Utami
EditorFarid Assifa

Walhi: Pabrik Semen Ancam 607.198 Warga di Rembang

KONTRIBUTOR SEMARANG, NAZAR NURDIN

Kompas.com - 06/11/2014, 16:15 WIB



Sejumlah aktivis dari berbagai komunitas menolak pendirian pabrik semen di Kabupaten Rembang Jawa Tengah dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah Jalan Pahlawan Semarang, Rabu (5/11/2014)(KOMPAS.com/PUJI UTAMI)

SEMARANG, KOMPAS.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyampaikan sejumlah argumen hukum untuk meminta pembatalan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang izin lingkungan kegiatan pertambangan oleh PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang.

Argumen tersebut disampaikan Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi, Munhur Sathayaprabu dalam sidang pembacaan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Kamis (6/11/2014).

Walhi, selaku salah satu penggugat, menuding bahwa penambangan yang dilakukan PT Semen Indonesia berada di kawasan cekungan air tanah (CAT) Watu Putih yang masuk ke kawasan lindung geologi. Di tempat itu, diklaim terdapat 49 goa, empat di antaranya adalah goa yang mempunyai sungai bawah tanah aktif. Selain itu, di tempat penambangan juga ada 109 mata air yang tersebar di kawasan CAT sebagai mata air yang mengalir, baik pada musim kemarau maupun hujan.

“Jika CAT Watu Putih itu hilang, fungsi resapan air akan hilang. Itu berarti 607.198 jiwa masyarakat di 14 kecamatan di Rembang akan terkena dampaknya,” ujar Munhur.

Di depan majelis hakim yang diketuai hakim Husein Amin Effendi itu, penggugat memperingatkan akan pentingnya fungsi resapan air dalam rangka menghindari bencana. Jika penambangan dilakukan dan air hujan tidak bisa menyerap ke tanah, akan menjadi air di permukaan atau *run off*.

“Hal itu dapat mengakibatkan banjir di wilayah dataran yang berhubungan langsung dengan daerah aliran sungai (DAS) yang bermuara pada CAT Watu Putih,” paparnya.

Selain hal tersebut, potensi air yang hilang diperkirakan mencapai 51 juta liter. Sementara wilayah yang bakal terkena imbas dari kegiatan penambangan bisa mencapai 3.020 hektar.

“131,5 hektar di antaranya adalah kawasan karst,” ujarnya lagi.

Walhi sendiri bersama warga Kabupaten Rembang meminta agar hakim PTUN bersedia membatalkan SK Gubernur bernomor 668.1/17/2012 tersebut. Dia menilai, SK tersebut telah bertentangan dengan banyak aturan, antara lain UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air jo Keputusan Presiden RI Nomor 26 tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Selain itu, SK tersebut juga bertabrakan dengan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2030, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten tahun 2011-2031.

Atas hal ini, pihak tergugat diminta menyiapkan tanggapan atas gugatan yang telah dibacakan. Hakim memberi waktu selama dua pekan bagi Pemprov Jawa Tengah untuk menyusun tanggapan.

PenulisKontributor Semarang, Nazar Nurdin
EditorFarid Assifa

Tolak Pabrik Semen, Ibu-ibu di Rembang Blokade Jalan Selama 160 Hari

Kompas.com - 26/11/2014, 19:18 WIB



Aliansi warga Rembang peduli pegunungan Kendeng menggelar aksi simpatik menolak pendirian pabrik Semen Indonesia di halaman Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Semarang, Senin (1/9/2014)(Kompas.com/Nazar Nurdin)

REMBANG, KOMPAS.com - Puluhan ibu rumah tangga yang selama ini mendiami tenda perlawanan penolakan pabrik semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang memblokade jalan masuk pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia (PT SI), Rabu (26/11/2014).

Dikutip *Tribun Jateng*, ibu rumah tangga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) memblokade jalan di Hutan Kadiwono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang.

Blokade tersebut adalah wujud penolakan mereka yang selama ini dilakukan tidak direspons oleh pemerintah dan PT SI. Sudah lebih dari 160 hari ibu-ibu menginap di tenda penolakan tapi pembangunan dengan alat berat terus dilakukan oleh PT SI.

Masyarakat yang kebanyakan ibu-ibu memblokade jalan dengan cara menghadang jalan memakai poster bertuliskan "jalan ditutup warga". Penolakan warga tersebut karena lokasi pabrik dan lokasi eksploitasi penambangannya di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih. Kawasan tersebut merupakan kawasan yang memiliki fungsi penyimpan cadangan air.

Blokade warga akan terus dilakukan selama pemerintah dan PT SI tidak menghormati proses hukum yang ada di PTUN Semarang dengan menghentikan

pembangunan pabrik dan eksploitasi kawasan resapan air Cekungan Air Tanah Watuputih.

607.198 warga terancam

Sebelumnya, Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Munhur Sathayaprabu dalam sidang pembacaan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Kamis (6/11/2014), menuding bahwa penambangan yang dilakukan PT Semen Indonesia berada di kawasan cekungan air tanah (CAT) Watu Putih yang masuk ke kawasan lindung geologi.

Di tempat itu, diklaim terdapat 49 goa, empat di antaranya adalah goa yang mempunyai sungai bawah tanah aktif. Selain itu, di tempat penambangan juga ada 109 mata air yang tersebar di kawasan CAT sebagai mata air yang mengalir, baik pada musim kemarau maupun hujan.

“Jika CAT Watu Putih itu hilang, fungsi resapan air akan hilang. Itu berarti 607.198 jiwa masyarakat di 14 kecamatan di Rembang akan terkena dampaknya,” ujar Munhur.

Di depan majelis hakim yang diketuai hakim Husein Amin Effendi itu, penggugat memperingatkan akan pentingnya fungsi resapan air dalam rangka menghindari bencana. Jika penambangan dilakukan dan air hujan tidak bisa menyerap ke tanah, akan menjadi air di permukaan atau *run off*.

“Hal itu dapat mengakibatkan banjir di wilayah dataran yang berhubungan langsung dengan daerah aliran sungai (DAS) yang bermuara pada CAT Watu Putih,” paparnya.

Selain hal tersebut, potensi air yang hilang diperkirakan mencapai 51 juta liter. Sementara wilayah yang bakal terkena imbas dari kegiatan penambangan bisa mencapai 3.020 hektar.

“131,5 hektar di antaranya adalah kawasan karst,” ujarnya lagi.

Walhi sendiri bersama warga Kabupaten Rembang meminta agar hakim PTUN bersedia membatalkan SK Gubernur bernomor 668.1/17/2012 tersebut. Dia menilai, SK tersebut telah bertentangan dengan banyak aturan, antara lain UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air jo Keputusan Presiden RI Nomor 26 tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Selain itu, SK tersebut juga bertabrakan dengan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Jawa Tengah

Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2030, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten tahun 2011-2031.

Atas hal ini, pihak tergugat diminta menyiapkan tanggapan atas gugatan yang telah dibacakan. Hakim memberi waktu selama dua pekan bagi Pemprov Jawa Tengah untuk menyusun tanggapan.

EditorFarid Assifa

Sumber[Tribun Jateng](#)

Warga Protes Putusan Peninjauan Kembali Pabrik Semen di Rembang KONTRIBUTOR SEMARANG, NAZAR NURDIN

Kompas.com - 14/10/2016, 12:08 WIB



Warga yang tinggal di sekitar pabrik semen di Rembang protes di depan kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang, Jumat (14/10/2016)(KOMPAS.com/NAZAR NURDIN)

SEMARANG, KOMPAS.com - Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Rakyat Rembang Bersatu melakukan protes di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang, Jumat (14/10/2016).

Dengan membawa sejumlah spanduk dan pamflet, demonstran tersebut menyerukan penolakan atas putusan peninjauan kembali kasus izin lingkungan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah.

"Warga bekerja dan menggantungkan hidupnya dari pabrik ini, anak-anak kami memiliki masa depan dari pabrik semen ini," ujar Wahid selaku koordinator aksi.

Massa mengecam putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan izin lingkungan oleh Joko Prihanto serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Bagi mereka, putusan itu justru mencederai rasa keadilan warga sekitar pabrik. Menurut Wahid, pabrik semen menjadi lahan harapan baru untuk mengangkat perekonomian warga desa.

Sejauh ini dari proses pembangunan pabrik, warga merasa diuntungkan karena bisa mencari nafkah di sana.

"Pabrik semen jadi momentum untuk mengangkat perekonomian dan pembangunan di Rembang," kata dia.

Pengunjuk rasa juga menyampaikan pesan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui surat aduan yang disampaikan lewat staf gubernur.

Massa menyatakan sikap bahwa mereka tidak dirugikan oleh pembangunan pabrik. Mereka meminta agar pabrik tetap di sana dan beroperasi.

Pada Selasa (12/10/2016) lalu, warga yang mengajukan gugatan lingkungan dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ganjar.

Mereka merasa bahwa Gubernur Jateng telah membantu mewujudkan masyarakat secara adil dan sejahtera.

Mereka meminta Ganjar untuk menaati semua apa pun putusan hukum terkait pendirian pabrik semen ini.

"Ini karena Jawa Tengah adalah lumbung Nusantara," ujar Sumarno, perwakilan warga yang menolak kehadiran pabrik.

Ganjar memilih menunggu hingga putusan lengkap diterbitkan untuk membuat kebijakan selanjutnya. Sejauh ini, putusan baru dibacakan petikannya di laman resmi Mahkamah Agung.

"Saya masih menunggu putusannya, bunyinya apa. Prinsip hukumnya, ketika putusan sudah keluar memerintahkan sesuatu isinya semuanya harus taat. Tidak bisa enggak," kata dia.

Dalam perkara izin lingkungan ini, Gubernur Jawa Tengah masuk sebagai tergugat I, sementara tergugat II adalah PT Semen Indonesia (SI) Persero Tbk di Rembang.

MA telah melansir putusan kasus ini pada 5 Oktober 2016. Putusan dibacakan majelis hakim PK dipimpin oleh Yorsan, Sudaryono dan Irfan Fachruddin. Amar putusan tertulis dalam laman MA dengan judul *Kabul PK, Batal Putusan Judex Facti, Adili Kembali: Kabul Gugatan, Batal Objek Sengketa*.

PenulisKontributor Semarang, Nazar Nurdin

EditorLaksono Hari Wiwoho

Terkait Pabrik Semen, Ganjar Pertemukan Dua Kelompok Warga Rembang

KONTRIBUTOR SEMARANG, NAZAR NURDIN

Kompas.com - 20/12/2016, 14:55 WIB



Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo(Kontributor Semarang, Nazar Nurdin)

SEMARANG, KOMPAS.com – Dua kelompok warga di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang menolak dan mendukung keberadaan pabrik semen Indonesia di Kecamatan Gunem, Rembang, dipertemukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di ruang kerjanya, Selasa (20/12/2016).

Sebanyak 20 orang perwakilan masing-masing kelompok diundang untuk bertemu dan berbicara.

Warga penolak pabrik semen diwakili tetua dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Gunretno, sementara warga mendukung diwakili tokoh Desa Tegaldowo, Joko Supriyanto.

Dalam pertemuan itu, Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak mengeluarkan izin baru. Keputusan sikap soal semen Rembang masih ditimbang dan akan diputuskan pada 17 Januari 2017.

Keputusan itu, lanjut dia, sesuai hasil rapat yang disepakati bersama di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta. Di sela waktu itu, ada tim kecil untuk merespon putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung dalam perkara ini.

“Putusan MA sama sekali menyatakan tidak ada penutupan pabrik. MA hanya memutuskan pencabutan izin lingkungan semen Rembang,” kata Ganjar.

Keputusan tersebut juga sudah disetujui bersama, termasuk perwakilan dari penggugat, dalam hal ini diwakili Pancaputra Taringan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Menurut Ganjar, pihak Walhi tidak pernah bilang untuk bicara penutupan pabrik.

“Jadi kalau izin apakah dicabut, dan pasti dicabut. Tapi apakah dicabut saja, pabriknya tutup, atau dicabut dengan tambahan diktum-diktum, tunggu 17 Januari,” tambahnya.

Salahkan Ganjar

Warga yang menolak pendirian pabrik semen di Rembang sendiri mengutarakan kekecewaannya pada orang nomor satu di Jawa Tengah.

Ganjar disalahkan karena tetap menerbitkan addendum atas Surat Keputusan izin lingkungan pertambangan yang dibatalkan Mahkamah Agung. Kelompok ini juga tidak percaya, dan menduga tim kecil yang dibentuk untuk memastikan Semen Rembang agar tetap beroperasi.

“Saya konsisten mengawal penolakan pabrik semen di mana pun di Jawa Tengah,” ujar warga Pati, Jawa Tengah ini.

Sementara itu, Joko Supriyanto, warga yang mendukung, agar persoalan pabrik semen diselesaikan secara kekeluargaan. Bagi Joko, warga penolak masih bisa diajak bicara karena masih dalam satu keluarga besar di desa.

Selain itu, pihaknya juga minta warga yang tinggal di sekitar pabrik bisa didengar aspirasinya. Klaimnya, dari 12.000 warga di lima desa di ring I pabrik semen, 95 persen diantaranya mendukung keberadaan pabrik.

“Warga banyak mendukung karena PT Semen Indonesia berhasil menunjukkan komitmennya untuk mensejahterakan masyarakat. Yang nolak itu murid saya semua. Joko Prianto itu murid saya. *Ayo tho dirembug sing apik*,” ujar dia.

Joko juga memberi bukti dari tidak akan matinya lahan pertanian warga akibat pabrik semen. Tanah yang dibeli pabrik semen dibeli dengan harga tinggi, serta masih bisa digarap kembali.

“Sawah yang sampai sekarang masih boleh digarap. Eksplorasi semen tidak langsung semuanya, bisa belasan tahun lagi baru ditambang,” paparnya.

Joko juga ingin agar rekannya yang menolak untuk tidak pilih kasih menolak PT Semen Indonesia. Di Rembang, lanjut dia, ada tujuh hingga 10 perusahaan tambang ilegal yang tidak dipersoalkan oleh mereka.

PenulisKontributor Semarang, Nazar Nurdin

EditorCaroline Damanik

Dukung Pabrik Semen di Rembang, Mbah Moen Siap Temui Jokowi

KONTRIBUTOR SEMARANG, NAZAR NURDIN

Kompas.com - 22/12/2016, 19:29 WIB



(Indra Akuntono)

SEMARANG, KOMPAS.com – Ulama kharismatik asal Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah KH Maimoen Zubair mendukung pendirian [pabrik semen](#) Indonesia di wilayah itu.

Mbah Moen, panggilan akrabnya, mendukung pabrik semen adalah bagian dari membela negara Indonesia.

Mbah Moen menyebutkan, PT Semen Indonesia (SI) merupakan perusahaan milik negara, oleh karena itu sudah sepatutnya didukung oleh warga.

“Semen harus didukung agar Indonesia tidak mengeksport orang saja, tapi mengeksport barang (semen). Mendukung (pabrik) semen adalah bagian dari membela negara,” kata Mbah Moen dalam siaran tertulisnya, Kamis (22/12/2016).

Terkait dukungannya itu, Mbah Moen mengaku siap ke Istana Negara Jakarta guna menyampaikan aspirasinya ke Presiden Joko Widodo. Mbah Moen juga merestui warga yang mendukung operasi pabrik semen, yang disebutnya sebagai Laskar Brotoseno.

“Kalau perlu, saya akan ngomong sendiri sama presiden pak Jokowi agar beliau mendukung pabrik semen,” ujarnya.

Warga yang mendukung pabrik semen di Rembang Kamis hari ini melakukan aksi *long march* dari alun-alun Kabupaten Rembang ke Pendopo Bupati.

Warga tersebut berasal dari 9 kecamatan di Rembang, antara lain dari Kecamatan Sale, Sarang, Sedan, Pancur, Pamotan, Sulang, dan Rembang Kota.

Aksi *long march* diikuti ribuan warga, hingga memacetkan jalan Pantura Rembang.

Seusai beraksi mereka bertemu Bupati Rembang Abdul Hafiz untuk menyampaikan aspirasinya.

Sementara warga yang menolak pabrik semen hingga Kamis ini masih mendirikan tenda di depan kantor Gubernur Jateng di Jalan Pahlawan Semarang.

Tenda perjuangan juga berada di dekat pintu masuk PT SI di Kecamatan Gunem. Tenda perjuangan di Semarang berlangsung sejak Senin (19/12/2016) kemarin.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebelumnya diminta oleh Mbah Moen untuk menyelesaikan polemik pendirian [pabrik Semen](#). Kala itu, Mbah Moen meminta agar pabrik semen itu diteruskan.

“Saya ketemu Mbah Maimoen, malah beliau ngomong. ‘Mas ganjar tolong dong karena yang ngundang Semen Gresik ke Rembang minta diteruskan’. Saya jawab, ‘ini mbah, nunggu putusannya, kami belum ada sikap’,” ujar Ganjar kala itu.

PenulisKontributor Semarang, Nazar Nurdin

EditorErlangga Djumena

SK Pencabutan Pabrik Semen di Rembang Dianggap Multitafsir

FACHRI FACHRUDIN

Kompas.com - 17/01/2017, 20:24 WIB



Sembilan perempuan dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng membunyikan lesung saat berunjukrasa di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (6/4). Selain untuk menolak pembangunan pabrik semen, mereka juga meminta kepada Presiden Joko Widodo bersedia meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan mereka terkait nasib petani dan keselamatan pegunungan Kendeng dari Pati hingga Rembang, Jawa Tengah. (KOMPAS/WISNU WIDIANTORO)

JAKARTA, KOMPAS.com — Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan langsung menanggapi polemik pembangunan pabrik PT [Semen Indonesia](#) (PT SI) di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Presiden diharapkan bisa langsung menghentikan pembangunan pabrik semen itu.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan, surat keputusan (SK) mengenai pencabutan izin operasi pabrik PT SI yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah [Ganjar Pranowo](#) menimbulkan penafsiran bercabang.

Pada poin pertama disebutkan bahwa SK Gubernur Nomor 6601/4 tahun 2017 tertanggal 16 Januari 2017 membatalkan SK Gubernur Nomor 660.1/30 tahun 2016 tertanggal 9 November 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku dan Pembangunan serta Pengoperasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Pada poin kedua, SK tersebut juga memerintahkan PT SI untuk menyempurnakan dokumen adendum analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan rencana pengelolaan lingkungan/rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL).

Menurut Dewi, memberi kesempatan PT SI untuk membenahi dokumen perizinan itu sama saja membuka peluang dilanjutkannya pembangunan pabrik tersebut.

"Pernyataan Ganjar jelas bersayap, seolah sebagai Gubernur sudah mematuhi putusan Mahkamah Agung, tetapi terus menyusun strategi dan bersiasat agar pembangunan pabrik PT Semen Indonesia terus berjalan. Di sisi lain, ia kemudian mengarahkan bahwa 'bola panasnya' ke pihak perusahaan, dengan tetap memberi ruang kepada perusahaan untuk melengkapi persyaratan dokumen setelah keputusan ini keluar," kata Dewi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/1/2017).

Dewi menilai, adanya SK yang dikeluarkan Gandjar memunculkan fakta bahwa di kalangan pemerintah juga terjadi multitafsir terhadap putusan MA.

Oleh karena itu, menurut Dewi, sedianya Presiden selaku kepala pemerintahan segera memanggil Gubernur Jawa Tengah, Ketua MA, Kepala KSP, dan Menteri KLHK untuk membicarakan putusan MA dan SK yang dikeluarkan Ganjar.

"Agar memutus rantai kesimpangsiuran tafsir tersebut, sekaligus menertibkan aparat di bawahnya," kata Dewi.

Selain itu, lanjut Dewi, semestinya Presiden juga memerintahkan Gubernur dan kementerian terkait untuk menghentikan operasi penambangan dan pembangunan pabrik semen.

Menurut Dewi, jika Presiden Jokowi tidak bersikap, maka hal itu akan menjadi preseden buruk. Terlebih lagi, kasus pendirian pabrik semen di Rembang ini sempat dibicarakan oleh Istana.

"Sedulur Kendeng telah ditemui Presiden, dan telah ada kesepakatan politik untuk segera diselesaikan. Sayangnya kami saksikan justru seorang gubernur bisa leluasa bersiasat terus dan mengakibatkan penyelesaian kasus yang diminta Presiden menjadi berlarut," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan itu menindaklanjuti putusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu.

Putusan MA itu mensyaratkan beberapa hal, di antaranya berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan tata cara penambangan, kebutuhan air bersih warga, irigasi, dan pelestarian tempat penampungan air di bawah tanah atau akuifer.

"Pabrik harus memenuhi putusan peninjauan kembali (PK), kalau enggak bisa memenuhi putusan PK, maka enggak bisa beroperasi. Maka ada kewajiban dia (PT SI) memenuhi PK," kata Ganjar dalam jumpa pers yang digelar di Wisma Perdamaian, Jalan Pemuda, Kota Semarang, Senin (16/1/2017) malam.

Sesuai putusan MA, Ganjar harus memerintahkan PT SI untuk menyempurnakan dokumen adendum amdal dan RKL-RPL.

Komisi Penilai Amdal Provinsi Jateng juga harus menilai dokumen itu. Adapun batasan waktu perbaikan dokumen lingkungan tersebut tergantung dari PT SI. Namun, selama proses perbaikan, Ganjar memerintahkan penghentian seluruh operasi pembangunan pabrik.

"Dia harus melengkapi dengan batas waktu dia yang menentukan sendiri. Saya juga minta berhenti dulu semuanya (operasi pembangunan pabrik)," kata dia.

Penulis Fachri Fachrudin

Editor Sabrina Asril

Tak Puas, Warga Rembang Tutup Akses ke Pabrik Semen Indonesia

KONTRIBUTOR SEMARANG, NAZAR NURDIN

Kompas.com - 10/02/2017, 19:58 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com – Sekitar 300 warga Kabupaten Rembang, Jawa Tengah menutup akses menuju pabrik semen Indonesia yang berada di Kecamatan Gunem, Rembang, Kamis (10/2/2017). Mereka yang menolak pabrik semen itu membuat portal di jalan akses masuk pabrik.

“Kami buat portal dari bambu di pintu masuk, tepatnya di dekat tenda perjuangan. Ada 300 warga yang berpartisipasi,” kata Joko Prianto, warga Tegaldowo, Kabupaten Rembang, yang juga salah satu penggugat kasus semen Rembang, saat dihubungi dari Kota Semarang, sore ini.

Joko mengatakan, aksi “menyegel” pabrik karena warga tidak puas atas kebijakan pemerintah. Warga berkeyakinan bahwa putusan Mahkamah Agung soal izin lingkungan pabrik semen sudah final.

Penyegelan, lanjut Joko, juga tidak lepas dari upaya mereka yang tidak membuahkan hasil. Warga tak puas, karena pihaknya telah berusaha melayangkan somasi kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta melaporkan kepada Polda Jawa Tengah.

“Kami segel karena somasi kami kepada gubernur dan polda tidak ada jawaban,” ujar Joko.

Warga merasa keberadaan pabrik semen di Rembang tidak lagi berizin, karena sejumlah izin lingkungan yang diberikan pemerintah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Mereka lalu menganggap keberadaan pabrik di Rembang ini tidak berizin.

Pemerintah Provinsi Jateng sendiri sebelumnya telah mencabut izin lingkungan pertambangan untuk PT Semen Indonesia di Rembang. Pencabutan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng No 6601/4 Tahun 2017 tertanggal 16 Januari 2017.

Penerbitan SK ini sekaligus mencabut SK Gubernur Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku dan Pembangunan serta Pengoperasian Pabrik Semen PT SI.

Namun, Ganjar Pranowo memerintahkan pada PT Semen Indonesia untuk menyempurnakan dokumen addendum analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan). Komisi penilai Amdal Provinsi Jateng juga harus menilai dokumen itu.

Adapun batasan waktu perbaikan dokumen lingkungan tersebut, tergantung dari PT SI. Namun, selama proses perbaikan, perseroan diperintahkan untuk menghentikan seluruh operasi pembangunan pabrik.

Setelah penghentian itu, pemerintah lalu menggelar sidang komisi amdal semen dengan mengundang para pihak, termasuk warga yang pro dan yang kontra pembangunan pabrik, serta pihak perusahaan. Namun perwakilan dari warga melakukan walk out meninggalkan sidang Amdal.

PenulisKontributor Semarang, Nazar Nurdin

EditorCaroline Damanik

Gubernur Jateng Lakukan Diskresi Demi Kelanjutan Pabrik Semen Rembang

KONTRIBUTOR SEMARANG, NAZAR NURDIN

Kompas.com - 21/02/2017, 17:22 WIB



Bangunan pabrik Semen Indonesia di Kabupaten Rembang sudah mulai berlumut pasca sebulan tidak beroperasi, akhir pekan lalu. Izin lingkungan kegiatan pertambangan telah dicabut Gubernur Jateng 17 Januari 2017 lalu. (Kontributor Semarang, Nazar Nurdin)

SEMARANG, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan diskresi atau pengambilan keputusan tersendiri terkait kelanjutan operasional pabrik [Semen Indonesia](#) di Kabupaten Rembang.

Diskresi terkait hal ini sudah dimulai dari perintah kepada PT Semen Indonesia untuk melakukan perbaikan adendum dokumen analisis dampak lingkungan.

Ganjar juga meminta kepada tim penilai Andal untuk melihat proses adendum analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang berjalan.

"Gubernur menerapkan diskresi untuk memperbaiki adendum dan meminta Komisi Amdal melihat perbaikan itu," ujar Koordinator Tim Pakar Komisi Penilai Amdal Dwi Sasongko dalam diskusi bertajuk "[Kelanjutan Pabrik Semen Rembang](#)" di Semarang, Selasa (21/2/2017).

Menurut Dwi, diskresi dilakukan karena tidak ada aturan yang menjelaskan soal posisi yang harus dilakukan pemerintah pasca-pembatalan izin oleh Mahkamah Agung.

Ganjar mengambil diskresi dengan meminta perbaikan atas izin yang dibatalkan.

"Saat MA perintahkan untuk mencabut, tidak ada opsi lain, dan itu sudah direalisasi pencabutannya. Lalu, setelah dicabut bagaimana? Gubernur ada pertimbangan yang lain, dari segi ekonomi, sosial, tidak saja tentang lingkungan," kata Dwi.

Soal diskresi ini, Dwi mengatakan bahwa kepala daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan diskresi. Ketentuan itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Sikap Gubernur memerintahkan kepada pemrakarsa dan Komisi Amdal itu kewenangan diskresi karena tidak diatur dalam aturan," ucapnya.

Dalam kasus pabrik semen ini, Komisi Penilai Amdal sudah merekomendasikan hasil sidang kepada Gubernur Jawa Tengah.

Setelah diberikan, Ganjar diberi waktu hingga 24 Februari untuk menentukan sikap.

Secara terpisah, Ganjar membenarkan bahwa ia diberi waktu oleh Komisi Amdal untuk mengambil keputusan sampai Jumat (24/2/2017).

Namun, ia menyayangkan ketidakhadiran pihak kontra pabrik, seperti Wahana Lingkungan Hidup, dalam proses sidang, sedangkan aktivis lingkungan memilih *walk out*.

"Kalau layak dari sisi amdal, diberi waktu sampai tanggal 24. Hasil sidang penilai sudah, sekarang ada di tangan saya," kata Ganjar.

PenulisKontributor Semarang, Nazar Nurdin

EditorLaksono Hari Wiwoho

Ini Rincian Izin Lingkungan Terbaru untuk PT Semen Indonesia

KONTRIBUTOR SEMARANG, NAZAR NURDIN

Kompas.com - 24/02/2017, 07:34 WIB



Aksi massa mendesak Gubernur Jateng mencabut izin lingkungan pabrik semen, Jumat (9/12/2016)(Kontributor Semarang, Nazar Nurdin)

SEMARANG, KOMPAS.com – PT Semen Indonesia Tbk akhirnya mendapat izin kegiatan penambangan dan pembangunan terbaru di Kabupaten Rembang pada Kamis (23/2/2017) malam.

Izin lingkungan diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui Keputusan Gubernur nomor 660.1/6 tahun 2017. Keputusan ditandatangani tanggal 23 Februari 2017.

Melalui keputusan itu, PT Semen Indonesia diperbolehkan untuk beroperasi kembali.

“Sudah ditandatangani dan diumumkan,” kata Ganjar, Kamis malam.

Dalam pengumuman yang disampaikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dijelaskan secara singkat mengenai informasi kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen Indonesia di Kabupaten Rembang.

Baca juga: [Ganjar Pranowo Kembali Terbitkan Izin Lingkungan untuk Pabrik Semen](#)

Dalam surat pengumuman itu dijelaskan, pemrakarsa adalah PT Semen Indonesia Tbk dengan penanggung jawab Rizkan Chandra sebagai direktur utama. Jenis

usaha yang diberi izin, yaitu industri semen yang dibuat melalui produksi klinker dengan kapasitas 3 juta ton per tahun.

Gubernur juga merinci rencana kegiatan penambangan di Rembang. Yaitu penambangan batu gamping di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Rembang; lalu penambangan tanah liat serta sarana dan prasarana di Desa Tegaldowo, Desa Kajar, Desa Pasucen, dan Desa Timbrangan Kecamatan Gunem, serta Desa Kadiwono Kecamatan Bulu.

Kemudian pabrik dan utilitas di Desa Kajar dan Desa Pasucen, Kecamatan Gunem; jalan produksi di Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu; serta jalan tambang di Desa Tegaldowo, Desa Kajar, dan Desa Timbrangan, Kecamatan Gunem.

“Dikeluarkan di Semarang tanggal 23 Februari 2017 ditandatangani kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Sugeng Riyanto,” tulis dalam pengumuman bernomor 660.1/0493 itu.

Penerbitan izin untuk [pabrik semen Rembang](#) tadi malam juga sudah mulai diumumkan di laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pengumuman disampaikan pada Kamis sekitar pukul 22.34 WIB.

Penerbitan izin lingkungan pertambangan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi dari tim Komisi Penilai Amdal (KPA). Tim Komisi Amdal telah menggelar sidang adendum amdal pada 2 Februari 2017 dengan dihadiri sejumlah pakar, pemerintah, akademisi, perwakilan masyarakat, hingga perwakilan lembaga swadaya masyarakat.

Penerbitan izin tersebut merupakan kebijakan yang dibuat tersendiri oleh Ganjar Pranowo atau diskresi pasca-pencabutan izin oleh Mahkamah Agung.

Terkait diskresi yang dibuatnya, Ganjar mengaku melaporkan hal itu kepada Presiden Jokowi, sebelum dan sesudah kebijakan itu dibuat.

PenulisKontributor Semarang, Nazar Nurdin

EditorFarid Assifa

Dapat Izin Tambang Baru, Ini yang Dilakukan Semen Indonesia

KONTRIBUTOR SEMARANG, NAZAR NURDIN

Kompas.com - 24/02/2017, 21:06 WIB



Bangunan pabrik Semen Indonesia di Kabupaten Rembang sudah mulai berlumut pasca sebulan tidak beroperasi, akhir pekan lalu. Izin lingkungan kegiatan pertambangan telah dicabut Gubernur Jateng 17 Januari 2017 lalu. (Kontributor Semarang, Nazar Nurdin)

SEMARANG, KOMPAS.com – PT [Semen Indonesia](#) menyambut baik terbitnya izin lingkungan pertambangan dan pembangunan pabrik dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dengan izin terbaru, PT Semen Indonesia boleh beroperasi kembali.

"Kami tentu bersyukur bisa melewati ujian berat ini. Keputusan mencabut izin dengan perubahan adendum, lalu sidang andal, hingga dipenuhi lagi, kami sangat bersyukur," ujar Sekretaris Perusahaan PT SI Agung Wiharto, Jumat (24/2/2017).

Setelah mendapat izin tambang, pabrik semen belum akan beroperasi terlebih dulu. PT SI ingin memastikan kondisi internal sudah siap untuk bisa diajak kembali beroperasi.

"Kami akan bergerak, konsolidasi ke dalam dulu. Lalu, akan sosialisasi lagi (ke luar) agar bisa diterima lagi di masyarakat semuanya, baik yang sudah menerima maupun menolak," kata dia.

Melalui izin tambang ini, Agung meminta masyarakat memberi waktu bagi perusahaan untuk membuktikan kinerjanya.

Ia juga meminta agar perusahaannya diawasi, terutama terkait kekhawatiran warga soal hilangnya mata air.

Menurut Agung, PT SI mempunyai riwayat sangat baik dalam mengubah lokasi bekas tambang menjadi lahan produktif.

"Soal kekhawatiran ini kan belum, tapi kami punya riwayat baik, seperti di Tuban, Gresik. Di Gresik sudah habis, di Tuban sudah berjalan 22 tahun bisa dilihat. Kami mohon diberi kesempatan," kata Agung.

Izin kegiatan pertambangan dan pembangunan pabrik semen di Rembang itu diterbitkan oleh Ganjar Pranowo pada Kamis (23/2/2017) malam.

Setelah diteken, surat tersebut diumumkan di laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada pukul 22.34 WIB.

Penerbitan izin lingkungan terbaru merupakan tindak lanjut atas rekomendasi dari tim Komisi Penilai Amdal (KPA).

Tim Komisi Amdal telah menggelar sidang adendum andal pada 2 Februari 2017 dengan dihadiri sejumlah pakar, pemerintah, akademisi, perwakilan masyarakat, hingga perwakilan lembaga swadaya masyarakat.

PenulisKontributor Semarang, Nazar Nurdin

EditorLaksono Hari Wiwoho

Tinjau Pabrik Semen di Rembang, Kapolda Jateng Minta Warga Tidak Mudah Terprovokasi

KONTRIBUTOR SEMARANG, NAZAR NURDIN

Kompas.com - 03/03/2017, 19:20 WIB



Pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. (Kontributor Semarang, Nazar Nurdin)

SEMARANG, KOMPAS.com - Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Condro Kirono meninjau proses pembangunan pabrik [Semen Indonesia](#) di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jumat (3/3/2017). Hingga Jumat sore, perkembangan pembangunan pabrik berkapasitas 3 juta ton pertahun itu mencapai 99,16 persen.

Condro datang meninjau bersama Kepala Staf Kodam IV Diponegoro Brigadir Jenderal Joni Supriyanto. Keduanya melihat langsung bangunan pabrik, hingga mendengar pemaparan dari perwakilan pengelola Semen Rembang.

"Terima kasih kepada para pihak termasuk PT Semen Indonesia sama-sama mengedepankan langkah-langkah hukum yang sedang berjalan," kata Condro, mengawali sambutan.

Terkait penanganan Semen Rembang ini, Kapolda minta jajaran Polres Rembang selaku yang bertugas di lapangan untuk mengambil langkah pencegahan agar menciptakan situasi yang kondusif. Upaya pengesahan bisa dilakukan melalui sosialisasi maupun pembinaan dan penyuluhan.

"Berikan informasi sebanyaknya kepada masyarakat agar Rembang tetap kokoh dan tidak mudah terprovokasi," pesannya.

Perwakilan PT Semen Indonesia Gatot Mardiana mengatakan, pembangunan pabrik semen di Rembang saat ini telah menghabiskan biaya Rp. 4,9 Triliun. Pihak pabrik juga sampai saat ini masih belum beroperasi untuk melakukan penambangan.

"Karyawan hanya melakukan pengaman dan perawatan bangunan dan mesin," ucap Gatot yang juga Kepala Biro Operasi PT Semen Gresik tersebut.

PT Semen Indonesia saat ini sudah diperbolehkan beroperasi sejak Jumat (24/2/2017). Hal itu berdasar surat keputusan gubernur Jateng tentang kegiatan operasional pembangunan dan penambangan.

Usai mendapat izin, perseroan langsung mengajukan izin lanjutan terkait dengan rencana operasi pabrik di Kabupaten Rembang berkapasitas 3 juta ton.

"Kurang satu, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), tapi kami sudah serahkan. Kami sudah menyerahkan seketika itu ketika izin lingkungan diputuskan," kata Agung Wiharto, Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia, Februari lalu.

PenulisKontributor Semarang, Nazar Nurdin

EditorErlangga Djumena

Tokoh Samin Komentari Aksi Demo Menolak Pabrik Semen

KONTRIBUTOR SEMARANG, NAZAR NURDIN

Kompas.com - 08/03/2017, 09:16 WIB



Tokoh sedulur Sikep Pati Sutoyo (tengah) berkomentar soal aksi demonstrasi menolak pabrik semen (Kontributor Semarang, Nazar Nurdin)

SEMARANG, KOMPAS.com – Aksi protes warga yang menolak kehadiran pabrik semen di [Rembang](#), Jawa Tengah masih berlangsung. Mereka yang menolak mayoritas dari masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK).

Warga penolak pabrik itu banyak yang berpakaian serba hitam seperti identitas masyarakat [Samin](#) (Sedulur Sikep) selama ini. Hal itu menyebabkan beredar informasi bahwa masyarakat Samin menolak pendirian pabrik semen.

Terkait hal itu, salah seorang tokoh Samin dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Sutoyo (82) menyebutkan, pihaknya enggan dikait-kaitkan dengan demo penolakan pabrik. Bagi mereka, ajaran Samin tidak mengajarkan soal aksi protes yang berlebihan seperti halnya demo.

Dia juga menyesalkan soal adanya identitas yang dipakai warga menolak pabrik. Kebanyakan warga menggunakan baju hitam, celana hitam di atas mata kaki, serta memakai selendang di kepala. Identitas itu lumrah digunakan warga Samin dalam kebiasaannya.

“Warga kebanyakan tahunya yang pakai pakaian hitam itu dari Samin. Padahal tidak, kami tidak melakukan itu,” ujar Sutoyo, warga Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Rabu (8/3/2017).

Dia lalu menceritakan salah satu ajaran Samin. Anggota Samin dilarang untuk mengumbar suara, serta bertindak berlebihan dalam menyikapi satu persoalan. Warga Samin tidak mengenal aksi demonstrasi.

"*Wong Sikep seng asli ora gelem demo. Dadi wong seng lugu, adil, dan jujur,*" katanya.

Dia pun ingin agar aksi demo menolak pabrik semen tidak lagi diidentikkan dengan perjuangan warga Samin. Jika ada anggota Samin yang ikut menolak, diminta untuk tidak menggunakan nama Samin.

Penganut ajaran Samin, Maniyo (43) juga meminta agar warga yang ikut menolak pabrik tidak menggunakan nama komunitasnya, apalagi mengatasnamakan menjadi salah satu tokoh Samin.

"Kita tidak menolak atau meminta, sebab kita tak punya hak di situ. Yang penting tidak mengganggu," ujar Maniyo.

Sementara itu, Gunretno, tokoh di Jaringan Masyarakat Peduli Gunung Kendeng (JMPPK) Pati mengaku aksi penolakan itu bukan atas nama masyarakat Samin. Meski dirinya Samin, dia menyebutkan, kegiatan penolakan bukan mengatasnamakan warga Samin.

"Saya tak pernah mengklaim bahwa aksi-aksi tolak semen itu aksinya Sedulur Sikep. Atas nama JMPPK, yang mana elemen di dalamnya bukan hanya dari para Sedulur Sikep, tetapi juga masyarakat lain," ucapnya.

Terkait dengan ajaran Samin yang tidak bersikap, Gunretno berpendapat berbeda. Menurut dia, tokoh Samin bernama Mbah Tarno vokal menolak pendirian pabrik. Oleh karena itu, alasan soal melanggar ajaran tidak perlu diperdebatkan.

"Mbah Tarno semasa hidup diakui sebagai tokoh Sedulur Sikep? Terang-terangan menyatakan bahwa ia menolak pendirian pabrik semen. Saya punya rekamannya," ucapnya.

Sebelum ini, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga pernah memanggil tokoh Samin di Semarang. Ganjar ingin mengetahui sikap warga Samin terkait pembangunan pabrik [semen Indonesia](#) di Rembang.

PenulisKontributor Semarang, Nazar Nurdin

EditorErlangga Djumena

Petani Kendeng Enggan Buka Belunggu Semen di Kaki Sebelum Bertemu Jokowi

KRISTIAN ERDIANTO

Kompas.com - 13/03/2017, 23:31 WIB



Petani dari kawasan Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, kembali melakukan aksi protes dengan menggelar aksi mencor kaki dengan semen di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (13/3/2017). Aksi tersebut mereka lakukan sebagai bentuk protes terhadap izin lingkungan baru bagi PT Semen Indonesia yang diteken Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wajah Yu Sukinah terlihat sayu. Energinya terkuras habis setelah sore tadi melakukan aksi protes dengan membenamkan kakinya ke dalam kotak berisi adukan semen.

Dia hanya bisa terduduk di atas kasur. Sese kali dia merebahkan badan untuk menghilangkan rasa pegal yang mendera punggungnya. Sejak pukul 15.00 WIB, Senin (13/3/2017) Sukinah bersama sembilan [Petani Kendeng](#) lainnya berunjuk rasa di depan Istana Negara.

Aksi semen kaki itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap izin lingkungan baru bagi PT. [Semen Indonesia](#) yang diteken Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dengan terbitnya izin tersebut kegiatan penambangan karst PT. Semen Indonesia di Rembang masih tetap berjalan.



Petani dari kawasan Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, kembali melakukan aksi protes dengan menggelar aksi mencor kaki dengan semen di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (13/3/2017). Aksi tersebut mereka lakukan sebagai bentuk protes terhadap izin lingkungan baru bagi PT Semen Indonesia yang diteken Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG)

Aksi untuk kedua kalinya itu berlangsung hingga pukul 18.00 WIB.

Dari depan Istana, para petani yang berasal dari sejumlah daerah di Pegunungan Kendeng itu dibawa ke kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Mereka disediakan tempat untuk menginap di ruang "PK Ojong" oleh pihak LBH yang menjadi pendamping hukum para Petani Kendeng.

Meski unjuk rasa sudah berakhir sejak sore tadi, namun kaki mereka tetap dibelunggu semen.

Agus Sudarto (30 tahun), petani asal Purwodadi, mengatakan mereka bersepakat tidak akan membuka belunggu semen di kaki hingga mereka berhasil ketemu Presiden Joko Widodo.

Jika Presiden **Jokowi** bersedia bertemu, mereka akan meminta Presiden segera mencabut izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Ganjar dan menghentikan kegiatan penambangan karst oleh pabrik semen yang dinilai merusak lingkungan.

"Saya ndak tahu sampai kapan, Mas. Yang pasti ya semen ini baru dibuka setelah bertemu pak Jokowi," ujar Agus saat ditemui di kantor LBH Jakarta, Senin (13/3/2017).



Petani dari kawasan Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, kembali melakukan aksi protes dengan menggelar aksi mencor kaki dengan semen di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (13/3/2017). Aksi tersebut mereka lakukan sebagai bentuk protes terhadap izin lingkungan baru bagi PT Semen Indonesia yang diteken Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Petani dari kawasan Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, kembali melakukan aksi protes dengan menggelar aksi mencor kaki dengan semen di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (13/3/2017). Aksi tersebut mereka lakukan sebagai bentuk protes terhadap izin lingkungan baru bagi PT Semen Indonesia yang diteken Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG)

Janji presiden

Protes masyarakat Kendeng telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pada April tahun lalu, sembilan petani perempuan yang kerap disebut Kartini Pegunungan Kendeng, mendatangi jalan Medan Merdeka Barat, seberang Istana Negara.

Mereka mengecor kaki mereka sebagai bentuk protes terhadap pendirian pabrik semen PT. Semen Indonesia. Sembilan Kartini Pegunungan Kendeng tersebut merupakan para petani yang berasal dari Rembang, Pati, Blora, dan Grobogan.

Secercah harapan sempat muncul ketika Presiden Joko Widodo mengundang Sembilan Kartini Kendeng untuk berdialog di Istana Negara, Selasa (2/8/2016). Dari pertemuan itu, pemerintah berjanji akan melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) di pegunungan Kendeng.

Selama kajian dilakukan, maka pabrik semen dilarang untuk beroperasi. Kajian akan dilakukan di bawah koordinasi Kepala Staf Kepresidenan dengan melibatkan berbagai instansi mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM hingga pemerintah daerah setempat.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki memperkirakan KLHS di wilayah pegunungan kendeng akan memakan waktu selama satu tahun. Ia memastikan selama kajian itu, pabrik semen di sana dilarang melakukan eksploitasi tambang.

Kemudian saat sidang peninjauan kembali (PK), Mahkamah Agung memenangkan gugatan petani pegunungan Kendeng dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terhadap PT Semen Indonesia.

Kemenangan tersebut membuat izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah untuk PT. Semen Indonesia harus dibatalkan.

Berdasarkan situs resmi MA, gugatan tersebut diputus pada tanggal 5 Oktober 2016 lalu. Amar putusan mengabulkan gugatan dan membatalkan obyek sengketa. Obyek sengketa yang dimaksud ialah izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen milik PT. Semen Indonesia di pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, tertanggal 7 Juni 2012.

Namun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo justru mengeluarkan izin baru untuk PT. Semen Indonesia di wilayah Pegunungan Kendeng bernomor 660.1/6 Tahun 2017 tertanggal 23 Februari 2017.

Dia mengatakan penerbitan izin lingkungan terbaru ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi dari tim Komisi Penilai Amdal (KPA).

Penulis Kristian Erdianto
Editor Sabrina Asril

Menteri BUMN Tinjau Pendirian Pabrik Semen Rembang

KONTRIBUTOR SEMARANG, NAZAR NURDIN

Kompas.com - 17/03/2017, 11:38 WIB

[REMBANG](#), KOMPAS.com - Di tengah aksi demo menolak [pabrik semen](#) di depan Istana Negara Jakarta, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno meninjau proses pembangunan pabrik semen Indonesia di Kabupaten [Rembang](#), Jumat (17/3/2017).

Rini tiba di pabrik itu pada pukul 09.10 WIB menggunakan helikopter dari Bandara Ahmad Yani, Semarang. Dalam tinjauannya ini, Rini membawa sejumlah direktur utama terkait pembangunan pabrik itu.

Terlihat bersama Rini antara lain Direktur Utama PT Semen Indonesia Rizkan Chandra, Direktur Utama Bank Negara Indonesia Ahmad Baiquni dan Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo.

Dalam kunjungannya, Rini sempat melihat beberapa bangunan pabrik dan berdialog dengan warga sekitar. Dia juga menjelaskan kepada warga bahwa saat ini pabrik masih dalam proses uji coba. Ia ingin agar pabrik yang dioperasikan nantinya membawa kemakmuran bagi warga sekitar.

"Ini uji coba, kami harap warga bisa ikut menjaga pabrik ini dan mendatangkan kesejahteraan," ujar Rini, pagi tadi.

Rini juga memerintahkan kepada perseroan untuk menuntaskan pembangunan tempat penampungan air atau di tingkat kecamatan di Rembang. Dia minta warga melaporkan kepada dirinya terkait janji dari perseroan itu.

"Saya tekankan ke dirut, ada dua embung yang belum dibangun. Katanya tahun ini selesai, Kalau enggak (dibangun) *kasih* tahu saya," ujar Rini.

"Kami ingin tujuannya bisa beroperasi dengan baik, kaki ingin memberi penekanan harus memberi kesejahteraan warga," ucapnya.

Seusai meninjau pabrik semen, Rini bertolak ke kediaman tokoh kharismatik asal Rembang, KH Maimun Zubair.

PenulisKontributor Semarang, Nazar Nurdin

EditorFarid Assifa

Apa Sikap Presiden soal Penolakan Pabrik Semen di Kendeng?

FABIAN JANUARIUS KUWADO

Kompas.com - 20/03/2017, 20:15 WIB



Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki (Ihsanuddin)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Presiden Joko Widodo ditunggu-tunggu dalam hal penolakan masyarakat Pegunungan **Kendeng**, Rembang, Jawa Tengah terhadap pabrik PT Semen Indonesia.

Lantas, apa sikap Presiden soal hal itu?

"Sikap Presiden Jokowi sampai sekarang belum ada perubahan," ujar Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) **Teten Masduki** di kantornya pada Senin (20/3/2017).

Sama seperti pertemuan dengan masyarakat Kendeng, awal Agustus 2016 lalu, Presiden Jokowi masih menunggu hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Diketahui, KLHS akan rampung pada April 2017 yang tinggal sekitar 10 hari lagi.

"Kan Presiden bersedia menerima masyarakat Kendeng karena mereka menyepakati satu hal, yakni menunggu KLHS di wilayah pertambangan pabrik. Sampai sekarang pun sikap Presiden masih itu," ujar dia.

Diberitakan, **petani Kendeng** dibantu aktivis memprotes izin lingkungan baru yang diteken Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dengan terbitnya izin tersebut, kegiatan penambangan karst PT Semen Indonesia di Rembang masih tetap berjalan.



Petani kendeng diterima di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/3/2017). (KOMPAS.com/IHSANUDDIN)

Mereka pun meminta Presiden Joko Widodo segera mencabut izin lingkungan itu dan menghentikan kegiatan penambangan karst oleh pabrik semen yang dinilai merusak lingkungan.

Para penolak pabrik itu menggelar aksi unjuk rasa dengan mengecor kedua kaki mereka dengan semen.

Jumlah petani dan peserta aksi kian bertambah. Hingga hari kedelapan aksi protesnya ini, jumlah petani dan aktivis yang menyemen kakinya mencapai 60 orang.

Aksi yang sama pernah dilakukan oleh sembilan petani perempuan di depan Istana Negara pada April 2016.

Penulis Fabian Januarius Kuwado
Editor Krisiandi

Air Mata Petani Kendeng dan Prinsip "Sedulur Sikep" Menjaga Ibu Bumi

KRISTIAN ERDIANTO

Kompas.com - 23/03/2017, 06:45 WIB



Patmi berkerudung biru (48 tahun) salah seorang petani perempuan asal kawasan Pegunungan Kendeng yang melakukan aksi mengecor kaki di depan Istana Negara, Jakarta, meninggal dunia pada Selasa (21/3/2017) dini hari. Patmi mengalami serangan jantung dan meninggal dalam perjalanan dari kantor LBH Jakarta menuju Rumah Sakit St. Carolus, Salemba, Jakarta Pusat. (KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG)

JAKARTA, KOMPAS.com - "Kalau melihat apa yang dikatakan beliau Pak Jokowi, rasanya saya sudah kehilangan Bapak," ujar Gunarti kepada wartawan usai bertemu Presiden Joko Widodo di kompleks Istana, Rabu (22/3/2017).

Gunarti, perwakilan petani di kawasan [Pegunungan Kendeng](#), akhirnya berhasil menemui Presiden Jokowi untuk menyampaikan protes terkait keberadaan pabrik semen yang dinilai merusak lingkungan.

Dia mengeluhkan sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menerbitkan izin baru bagi PT Semen Indonesia untuk melakukan operasi penambangan di wilayah [pegunungan Kendeng](#).

Ia menganggap, izin itu bertolak belakang dengan janji yang disampaikan Jokowi kepada [petani Kendeng](#), Agustus 2016 lalu. Namun, pertemuan itu hanya menghasilkan kekecewaan dan air mata bagi Gunarti.



Gunarti, salah satu petani di wilayah Kendeng, usia bertemu Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/3/2017). (KOMPAS.com/IHSANUDDIN)

"Pak Jokowi bilang, 'ya itu kalau mengenai izin harus tanyanya sama Gubernur. Selama ini sudah komunikasi sama Gubernur atau belum?' Bukan hanya komunikasi, kami itu sampai melakukan apapun, jangan sampai Pak Ganjar itu mengeluarkan izin dulu," ucap Gunarti.

Tangis pilu Gunarti tampaknya menjadi akumulasi antara kepedihan dan kehilangan sejak mendaraskan doa untuk Patmi.

Sehari sebelumnya, Selasa (21/3/2017), Patmi (48), seorang petani perempuan dari kawasan Pegunungan Kendeng, wafat usai melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana.

Hampir sepekan, Patmi bersama 49 petani lainnya melakukan aksi protes mengecor kaki dengan semen.

Aksi tersebut menjadi simbol kehidupan mereka yang terbelenggu oleh keberadaan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng.

Kultur Perlawanan

Komunitas adat Sedulur Sikep, atau dikenal dengan masyarakat Samin, memiliki peran penting dalam perjuangan para petani menolak keberadaan pabrik semen.

Masyarakat yang mendiami Pegunungan Kendeng sejak ratusan tahun lalu itu memegang prinsip dalam menjaga kelestarian alam. Mereka menganggap bumi layaknya ibu yang harus dilindungi sebagai pemberi kehidupan. Ibu Bumi yang harus dijaga agar tetap lestari.

Dalam setiap aksinya pun para **petani Kendeng** selalu melantunkan tembang Ibu Bumi. "*Ibu bumi wis maringi, ibu bumi dilarani, ibu bumi kang ngadili,*" yang artinya "Ibu bumi sudah memberi, ibu bumi disakiti, ibu bumi akan mengadili."

Kultur perlawanan masyarakat Sedulur Sikep memiliki sejarah yang panjang. Mereka meyakini bentuk perlawanan terhadap sebuah otoritas yang menindas dapat dilakukan tanpa kekerasan.

Bagi orang Jawa yang masih mengikuti laku dan tata cara orang Jawa, kemarahan memiliki tingkatan masing-masing. Salah satu sikap marah yang sudah mencapai puncaknya dan sulit diurai adalah ketika mereka sudah mulai menyakiti diri sendiri, bukan menyakiti atau membuat kekerasan kepada orang lain.



Petani dari kawasan Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, kembali melakukan aksi protes dengan menggelar aksi mencor kaki dengan semen di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/3/2017). Pada aksi hari keempat ini, petani yang mengecor kakinya terus bertambah menjadi 41 orang, sebelumnya diketahui berjumlah 20 orang. Aksi tersebut mereka lakukan sebagai bentuk protes terhadap izin lingkungan baru bagi PT Semen Indonesia yang diteken Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG)

Mengutip artikel "Kultur Berlatar Gerakan Perlawanan" yang ditulis oleh Indira Permasari di Harian Kompas, 25 Oktober 2009, cikal bakal komunitas Sedulur Sikep berasal dari putra dari Raden Surowidjojo bernama Samin Surontiko.

Surowidjojo ibarat Robinhood yang mencuri dari Belanda kemudian dibagikan kepada orang miskin. Ia lalu mendirikan kelompok "Tiyang Sami Amin". Pergerakan dilanjutkan Putra Surowidjojo, priyayi Raden Kohar, yang konon mengganti namanya menjadi Samin Surontiko.

Antropolog Amrih Widodo melalui tulisannya, *Samin In The Order: The Politics of Encounter and Isolation*, berpendapat gerakan Samin dimulai 1890-an akibat penetrasi berlebihan dari pemerintah kolonial Belanda.

Amrih menulis, pengikut gerakan Samin saat itu mengucilkan diri, tidak tunduk pada Belanda dan pegawai desa terutama dalam membayar pajak. Pada tahun 1900-an ajaran Samin menyebar dengan cepat dari wilayah Blora ke Bojonegoro, Grobogan, Ngawi, Pati, Rembang, dan Madiun. Tahun 1907 dilaporkan bahwa pengikutnya mencapai 3.000 orang.

Samin kemudian ditangkap di Rembang karena tersebar rumor akan melakukan pemberontakan. Oleh pemerintah kolonial Samin dibuang ke luar Jawa dan akhirnya meninggal di Padang, Sumatera Barat, tahun 1914.

Namun, aktivitas para pengikut Samin tidak berhenti dan mencapai puncaknya 1914. Para pengikut Samin menolak membayar pajak, berani berbicara dalam bahasa berlevel rendah (ngoko) kepada pegawai Belanda atau priayi.

Mereka juga tidak mengacuhkan otoritas ulama agama yang memimpin upacara perkawinan dan penguburan tetapi buntutnya minta bayaran. Amrih Widodo mengungkapkan, Saminisme adalah fenomena sosial yang paling lama di Asia Tenggara.

"Ketika gerakan Samin sangat gencar, pengikutnya tidak lebih dari 3.000, sangat kecil dibanding pemberontakan petani di Banten. Gerakan pengikut Samin bertahan begitu lama karena dianggap tidak mengancam negara," paparnya.

Menjaga Ibu Bumi

Protes masyarakat atas keberadaan pabrik semen di Pegunungan Kendeng telah berlangsung selama bertahun-tahun. Harian *Kompas* mencatat, warga Kendeng sudah mengalami kekerasan sistemik sejak tahun 2006.

Gunretno, salah satu tokoh muda komunitas Sedulur Sikep menuturkan, aksi protes yang dilakukan oleh petani Kendeng tidak semata bertujuan untuk mempertahankan hak hidup petani yang ada di Kabupaten Rembang saja, melainkan demi kelestarian alam di Jawa Tengah.

Aktivitas penambangan di kawasan karst, kata Gunretno, memiliki dampak yang merusak bagi keberadaan sumber air di bawah Pegunungan Kendeng. Sementara,

para petani di Rembang, Pati, Blora, dan Grobogan bergantung pada sumber air dari pegunungan itu.

"Jawa Tengah seharusnya menjadi lumbung pangan karena daya tampung pulau Jawa itu tidak lagi mendukung untuk kegiatan eksploitasi seperti pabrik semen," ujar Gunretno dalam sebuah diskusi di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2017).

Dalam wawancara dengan jurnalis senior Harian *Kompas* Maria Hartiningsih pada Agustus 2014, Gunretno mengatakan, menolak tambang dan pembangunan pabrik semen di wilayah di Pegunungan Kendeng Utara adalah perjuangan mempertahankan Tanah Air, yang artinya menjaga tanah dan air, demi kehidupan.

Perjuangan itu juga bisa dibaca sebagai upaya merebut kembali otoritas diri (dan komunitas), beserta seluruh definisinya. Komunitas Sedulur Sikep tidak silau oleh iming-iming "kemakmuran dan kesejahteraan" dari pemodal.

Bagi mereka, kemakmuran dan kesejahteraan tidak dihitung dari nilai materi, seperti pangkat, derajat, uang, kuasa, tetapi seger-warat dan kemandirian sebagai petani. Artinya, faktor produksi yang mendukung pertanian, terutama air, tanah, dan manusianya, harus dijaga dan dirawat.

Merunut sejarah, perjuangan komunitas itu selalu terkait dengan kedaulatan hidup.

Pada November 2015, warga dari sejumlah desa yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) menggelar aksi berjalan kaki sejauh 122 kilometer dari Sukolilo, Kabupaten Pati menuju Kota Semarang, Jawa Tengah.

Aksi berjalan kaki yang ditempuh selama dua hari itu dimaknai sebagai wujud perjuangan mencari keadilan saat menghadiri sidang putusan dalam gugatan atas izin pertambangan PT Sahabat Mulia Sakti, anak perusahaan PT Indocement.

Di tahun yang sama mereka juga pernah melakukan aksi membunyikan lesung sebagai tanda "bahaya" di depan Istana Kepresidenan. Tujuan mereka adalah agar bisa berdialog dengan Presiden Jokowi.

Kemudian pada 12 April 2016, sembilan petani perempuan yang kerap disebut "Kartini Pegunungan Kendeng", mendatangi Jalan Medan Merdeka Barat, seberang Istana Negara. Mereka mengecor kaki dengan semen sebagai bentuk protes terhadap pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang.

Sembilan "Kartini Pegunungan Kendeng" tersebut merupakan para petani yang berasal dari Rembang, Pati, Blora, dan Grobogan.

Secercah harapan sempat muncul ketika Presiden Jokowi mengundang sembilan Kartini Kendeng untuk berdialog di Istana Negara, Selasa (2/8/2016). Dari pertemuan itu, pemerintah berjanji akan melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) di Pegunungan Kendeng. Selama kajian dilakukan, pabrik semen dilarang untuk beroperasi.

Kajian dilakukan di bawah koordinasi Kepala Staf Kepresidenan dengan melibatkan berbagai instansi, mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, hingga pemerintah daerah setempat.

Namun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo justru mengeluarkan izin baru untuk PT Semen Indonesia di wilayah Pegunungan Kendeng bernomor 660.1/6 Tahun 2017 tertanggal 23 Februari 2017.

Terbitnya izin lingkungan baru membuat [Petani Kendeng](#) kembali melakukan aksi mengecor kaki pada Senin (13/3/2017) hingga Senin (20/3/2017). Jumlahnya pun bertambah mencapai 50 orang. Sayangnya, sampai aksi itu berujung pada wafatnya Patmi, tuntutan para petani Kendeng tidak terpenuhi.

Penulis Kristian Erdianto
Editor Sabrina Asril

Ketua MPR Desak Pemerintah Tuntaskan Kisruh Pabrik Semen Rembang

Kompas.com - 24/03/2017, 12:15 WIB



KOMPAS.COM - Kisruh antara petani Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan PT Semen Indonesia diharapkan untuk segera dituntaskan agar tidak menimbulkan efek negatif yang berkepanjangan.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan se usai melakukan pertemuan dengan Rektor Universitas Sumatera Utara, Medan, Kamis (23/3/2017).

"Ini harus dicari solusinya bersama. Kompensasi kepada warga terdampak langsung mesti diberikan," ujarnya.

Mantan Menteri Kehutanan itu menuturkan, pembangunan pabrik industri memang mengandung sejumlah konsekuensi yang perlu dipertimbangkan seperti persoalan lingkungan dan nasib masyarakat setempat. Ia mendesak baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam hal ini Jawa Tengah, untuk memberi kompensasi yang layak bagi warga Kendeng.

"Kalau tempat lahan untuk hidup dan mata pencaharian mereka hilang, harus ada kompensasi yang diberikan secara menyeluruh. Seperti pendidikan anak-anak mereka, pembangunan sumber daya manusianya dan keberlangsungan kehidupan mereka," ujarnya.

Zulkifli menyarankan, jika penawaran kompensasi tidak disetujui oleh masyarakat, pemerintah perlu berpegang pada prinsip musyawarah dan mufakat dalam Pancasila. Hal itu juga mengingatkan aksi cor kaki para petani Kendeng membahayakan sehingga perlu dihentikan.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu juga mendesak pemerintah harus memberikan respon positif dengan cara menemui peserta aksi serta

mengakomodasi permintaan mereka. Zulkifli juga mengharapkan pemerintah perlu melaksanakan pertemuan bersama peserta aksi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pihak PT Semen Indonesia.

"Pemerintah harus mendengar rakyatnya. Saya percaya pemerintah sebagai bapaknya rakyat mau mendatangi dan mengajak musyawarah. Negara wajib hadir," ujarnya

Berita Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Rembang Berdasarkan Periode Waktu dan Topik

NO	TANGGAL RILIS	JUDUL	TOPIK
1	22 Oktober 2014	Karst Rembang Punya Fungsi Lindung.	Sikap Pihak di Luar PT. Semen Indonesia dan Masyarakat Rembang
2	05 November 2014	Aktivis Gelar Aksi Tutup Mulut Desak Batalan Izin Pabrik Semen di Rembang.	Sikap Masyarakat Rembang
3	06 November 2014	Walhi: Pabrik Semen Ancam 607.198 Warga di Rembang.	Sikap Pihak di Luar PT. Semen Indonesia dan Masyarakat Rembang
4	26 November 2014	Tolak Pabrik Semen, Ibu-ibu di Rembang Blokade Jalan Selama 160 Hari.	Sikap Masyarakat Rembangs
5	29 November 2014	Presiden Jokowi Didesak Ikut Selesaikan Konflik Pabrik Semen di Rembang.	Sikap Pihak di Luar PT. Semen Indonesia dan

			Masyarakat Rembang
6	29 November 2014	"Jangan Salahkan Kami Bertindak karena Suara Kami Tak Didengar".	Sikap Masyarakat Rembang
7	30 November 2014	Putri Gus Dur Desak PT Semen Indonesia Stop Aktivitas di Rembang.	Sikap Pihak di Luar PT. Semen Indonesia dan Masyarakat Rembang
8	02 Desember 2014	Komnas HAM: Pembuatan Amdal Pabrik Semen di Rembang Langgar HAM.	Sikap Pihak di Luar PT. Semen Indonesia dan Masyarakat Rembang
9	03 Desember 2014	Amdal Dianggap Melanggar HAM, Ini Komentar PT Semen Indonesia.	Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia
10	03 Desember 2014	Penggugat Setuju Temuan Komnas HAM soal Kasus Pabrik Semen di Rembang.	Sikap Pihak di Luar PT. Semen Indonesia dan Masyarakat Rembang
11	04 Desember 2014	Soal Kasus Pabrik Semen, Hakim Diminta Lindungi HAM Warga Rembang.	Tindakan Pemerintah
12	18 Desember 2014	Sukinah Melawan Dunia.	Sikap Masyarakat Rembang
13	10 Oktober 2016	Presiden Jokowi Diharap Resmikan Pabrik Semen di Rembang dan Padang.	Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia
14	11 Oktober 2016	MA Batalkan Izin Pembangunan Pabriknya, Saham Semen Indonesia Anjlok 600 Poin.	Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia

15	12 Oktober 2016	Petani Kendeng Menang di MA Lawan PT Semen Indonesia.	Sikap Masyarakat Rembang
16	14 Oktober 2016	Warga Protes Putusan Peninjauan Kembali Pabrik Semen di Rembang.	Sikap Masyarakat Rembang
17	17 Oktober 2016	Ganjar: Presiden Tanya soal Perkembangan Pabrik Semen di Rembang.	Tindakan Pemerintah
18	16 November 2016	Warga Rembang Minta Ganjar Segera Eksekusi Putusan MA.	Sikap Masyarakat Rembang
19	02 Desember 2016	Tulis Amdal Abal-abal Pabrik Semen, 2 Warga Rembang Dilaporkan.	Sikap Masyarakat Rembang
20	08 Desember 2016	Ganjar: Pabrik Semen di Rembang Dibatalkan atau Tidak?	Tindakan Pemerintah
21	09 Desember 2016	Ganjar Cabut Izin Lingkungan Pabrik Semen Indonesia di Rembang, Warga Tetap Kecewa.	Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia
22	09 Desember 2016	Warga Sekitar Merasa Diuntungkan dengan Keberadaan Pabrik Semen Rembang.	Sikap Masyarakat Rembang
23	09 Desember 2016	Muncul Izin Pabrik Semen Baru, Warga Rembang Merasa Dipermainkan.	Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia
24	11 Desember 2016	Ganjar Pranowo Bantah Terbitkan Izin Baru Pabrik Semen Rembang.	Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia
25	11 Desember 2016	Ganjar: Kalau Putusan MA Tutup Pabrik Semen, Saya Sendiri yang Tutup.	Tindakan Pemerintah

26	13 Desember 2016	Dinilai Bermanfaat, Warga Sekitar Dukung Pabrik Semen Rembang.	Sikap Masyarakat Rembang
27	13 Desember 2016	Ganjar: Ada “Ultramen” dan “Power Rangers” dalam Daftar Warga yang Tolak Pabrik Semen.	Tindakan Pemerintah
28	15 Desember 2016	Ganjar: Kita Sepakat Izin Lingkungan PT Semen Indonesia Dicabut.	Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia
29	20 Desember 2016	Terkait Pabrik Semen, Ganjar Pertemukan Dua Kelompok Warga Rembang.	Tindakan Pemerintah
30	22 Desember 2016	Dukung Pabrik Semen di Rembang, Mbah Moen Siap Temui Jokowi.	Sikap Pihak di Luar PT. Semen Indonesia dan Masyarakat Rembang
31	26 Desember 2016	Polda Jateng Telusuri Keabsahan Dokumen Kasus Semen Rembang.	Tindakan Pemerintah
32	10 Januari 2017	Pabrik Semen di Rembang Belum Beroperasi, Ini Tanggapan Menperin.	Sikap Pihak di Luar PT. Semen Indonesia dan Masyarakat Rembang
33	16 Januari 2017	Ganjar Pranowo Cabut Izin Penambangan Semen di Rembang.	Tindakan Pemerintah
34	17 Januari 2017	SK Pencabutan Pabrik Semen di Rembang Dianggap Multitafsir.	Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia
35	17 Januari 2017	Penolak Pabrik Semen Rembang Sebut Keputusan Ganjar Kelabui Putusan MA.	Sikap Masyarakat Rembang
36	10 Febuari 2017	Tak Puas, Warga Rembang Tutup Akses ke Pabrik Semen Indonesia.	Sikap Masyarakat Rembang

37	10 Febuari 2017	Ini Alasan Warga Tutup Akses Pabrik Semen di Rembang.	Sikap Masyarakat Rembang
38	11 Febuari 2017	Akses ke Pabrik Ditutup Warga, Ini Tanggapan PT Semen Indonesia.	Sikap Masyarakat Rembang
39	11 Febuari 2017	Tenda Perjuangan Penolak Pabrik Semen Rembang Dibakar.	Sikap Masyarakat Rembang
40	11 Febuari 2017	Polisi: Kondusif, Situasi di Pintu Masuk Pabrik Semen Rembang.	Tindakan Pemerintah
41	14 Febuari 2017	Ganjar Pranowo Dilaporkan ke Ombudsman Terkait Izin Pabrik Semen.	Sikap Pihak di Luar PT. Semen Indonesia dan Masyarakat Rembang
42	20 Febuari 2017	Lahan Eksplorasi PT Semen Indonesia di Rembang Susut Jadi 293 Hektar.	Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia
43	20 Febuari 2017	Begini Kondisi Semen Indonesia di Rembang Setelah Izinnya Dicabut.	Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia
44	21 Febuari 2017	Ganjar Dinilai Salah Tafsirkan Putusan MA Terkait Pabrik Semen di Rembang.	Sikap Pihak di Luar PT. Semen Indonesia dan Masyarakat Rembang
45	21 Febuari 2017	ICW Minta KPK Awasi Sengketa Pendirian Pabrik Semen di Rembang.	Tindakan Pemerintah
46	21 Febuari 2017	Gubernur Jateng Lakukan Diskresi Demi Kelanjutan Pabrik Semen Rembang.	Tindakan Pemerintah
47	22 Febuari 2017	Buat Diskresi soal Pabrik Semen, Ganjar Laporkan Presiden Jokowi.	Tindakan Pemerintah

48	24 Febuari 2017	Ganjar Pranowo Kembali Terbitkan Izin Lingkungan untuk Pabrik Semen.	Tindakan Pemerintah
49	24 Febuari 2017	Ganjar Putuskan PT Semen Indonesia Boleh Beroperasi Lagi di Rembang.	Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia
50	24 Febuari 2017	Ini Rincian Izin Lingkungan Terbaru untuk PT Semen Indonesia.	Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia
51	24 Febuari 2017	Soal Penerbitan Izin Baru Pabrik Semen di Rembang, Ganjar Dinilai Membangkang.	Sikap Pihak di Luar PT. Semen Indonesia dan Masyarakat Rembang
52	24 Febuari 2017	Dapat Izin Tambang Baru, Ini yang Dilakukan Semen Indonesia.	Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia
53	24 Febuari 2017	Jokowi Diminta Bersikap soal Izin Baru Pabrik Semen di Rembang.	Sikap Pihak di Luar PT. Semen Indonesia dan Masyarakat Rembang
54	24 Febuari 2017	Ganjar Minta ESDM dan BLH Awasi Pabrik Semen Rembang.	Tindakan Pemerintah
55	25 Febuari 2017	Dapat Izin Induk, Semen Indonesia Lengkapi Izin Usaha di Rembang.	Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia
56	28 Febuari 2017	Aktivis Penolak Pabrik Semen Rembang Jadi Tersangka Pemalsuan Surat.	Sikap Masyarakat Rembang
57	03 Maret 2017	Tinjau Pabrik Semen di Rembang, Kapolda Jateng Minta Warga Tidak Mudah Terprovokasi.	Tindakan Pemerintah
58	08 Maret 2017	Tokoh Samin Komentari Aksi Demo Menolak Pabrik Semen.	Sikap Pihak di Luar PT. Semen Indonesia dan

			Masyarakat Rembang
59	13 Maret 2017	Petani Kendeng Enggan Buka Belunggu Semen di Kaki Sebelum Bertemu Jokowi.	Sikap Masyarakat Rembang
60	14 Maret 2017	Aksi Hari Kedua, Petani Kendeng yang Mencor Kaki Terus Bertambah.	Sikap Masyarakat Rembang
61	14 Maret 2017	Selasa Siang, Petani Kendeng Kembali Aksi Semen Kaki di Depan Istana.	Sikap Masyarakat Rembang
62	14 Maret 2017	Petani Kendeng Kembali Gelar Aksi Semen Kaki, Ini Komentar Ganjar.	Sikap Masyarakat Rembang
63	14 Maret 2017	Gagal Bertemu Jokowi, Petani Kendeng Tetap Melanjutkan Aksi Semen Kaki.	Sikap Masyarakat Rembang
64	15 Maret 2017	Hari Ketiga Protes Pabrik Semen, 20 Petani Kendeng Mencor Kaki di Depan Istana.	Sikap Masyarakat Rembang
65	17 Maret 2017	Rini Minta Direksi Semen Indonesia Sering Komunikasi dengan Warga.	Tindakan Pemerintah
66	17 Maret 2017	Hari Kelima Protes Pabrik Semen, 50 Petani Kendeng Mencor Kaki di Depan Istana.	Sikap Masyarakat Rembang
67	17 Maret 2017	Menteri BUMN Tinjau Pendirian Pabrik Semen Rembang.	Tindakan Pemerintah
68	18 Maret 2017	Peresmian Pabrik Semen di Rembang Tunggu Kajian Lingkungan Hidup.	Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia

69	20 Maret 2017	Massa Pro Pembangunan Pabrik Semen Juga Diterima Istana.	Tindakan Pemerintah
70	20 Maret 2017	Istana Pastikan Operasional Pabrik Semen di Kendeng Berhenti Sementara.	Tindakan Pemerintah
71	20 Maret 2017	Apa Sikap Presiden soal Penolakan Pabrik Semen di Kendeng?	Tindakan Pemerintah
72	20 Maret 2017	Nyerinya Kaki Dicor Semen Demi Lestarinya "Ibu Bumi" Kendeng...	Sikap Masyarakat Rembang
73	21 Maret 2017	Jokowi Tolak Cabut Izin PT Semen Indonesia yang Diterbitkan Ganjar.	Tindakan Pemerintah
74	21 Maret 2017	Kronologi Wafatnya Patmi, Petani Kendeng Usai Aksi Dipasung Semen.	Sikap Masyarakat Rembang
75	22 Maret 2017	Soal Pabrik Semen, Ganjar Minta Warga Bisa Melihat Jernih.	Tindakan Pemerintah
76	23 Maret 2017	Persoalan Semen Rembang Tuntas jika Pemerintah Berpijak pada Hukum.	Sikap Pihak di Luar PT. Semen Indonesia dan Masyarakat Rembang
77	23 Maret 2017	Air Mata Petani Kendeng dan Prinsip "Sedulur Sikep" Menjaga Ibu Bumi.	Sikap Masyarakat Rembang
78	24 Maret 2017	Ketua MPR Desak Pemerintah Tuntaskan Kisruh Pabrik Semen Rembang.	Sikap Pihak di Luar PT. Semen Indonesia dan Masyarakat Rembang
79	30 Maret 2017	Bergantung Putusan KLHS, Saham Semen Indonesia Dibuka Turun.	Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia

80	30 Maret 2017	Rabu Ini, Nasib Proyek Semen Indonesia di Rembang Ditentukan.	Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia
81	30 Maret 2017	Ini Hasil Kajian Kementerian ESDM di Kawasan Semen Rembang.	Tindakan Pemerintah

TRANSKIP WAWANCARA VIA EMAIL

Narasumber : Farid Assifa,

Jabatan : Editor www.kompas.com

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Bagaimana pandangan media Kompas mengenai konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah?

Jawab: Pemerintah dan warga di Rembang, baik yang pro maupun kontra, duduk bersama untuk menyelesaikan konflik tersebut. Di satu sisi, lokasi sekitar pabrik semen merupakan daerah resapan air dan harus benar-benar diperlihara

demi keberlangsungan hidup. Tapi di sisi lain, pabrik semen juga penting untuk pembangunan dan investasi.

2. Bagaimana sikap media Kompas mengenai konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah? Mengapa memilih sikap tersebut?

Jawab: Kami sebagai media berada di posisi netral, mengakomodir kepentingan masyarakat dan ikut mengontrol kebijakan pemerintah soal pabrik semen. Jangan sampai dampak pabrik semen merugikan masyarakat. Kami juga memberi ruang bagi pabrik untuk melakukan pembelaan, memberi penjelasan terkait masalah izin, amdal dan lain-lain. Semua fakta dan hasil wawancara disajikan dalam berita yang utuh.

3. Bagaimana sikap tersebut diambil? Apakah berasal dari keputusan Pimpinan Redaksi atau dari keputusan bersama atau jurnalis sendiri yang menentukan sikap?

Jawab: keputusan bersama berdasarkan hasil rapat redaksi.

4. Bagaimana cara media Kompas memberitakan konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah?

Jawab: Pemberitaan berdasarkan pada fakta di lapangan dengan narasumber yang kompeten, mulai perwakilan masyarakat, aparat pemerintah, kepolisian, pihak perusahaan. Kami sangat menjaga keberimbangan (check and balance).

5. Apakah ada aturan/standar tertentu dalam memberitakan konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah? Kalau ada, aturan atau standar yang seperti apa? Bila tidak ada, maka aturan atau standar yang seperti apakah yang digunakan dalam memberitakan konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah?

Jawab: Aturannya sudah jelas: Kami memberitakan sesuai fakta hukum dan kenyataan di lapangan dengan narasumber yang berimbang dan sesuai dengan prinsip jurnalistik.

6. Apakah ada arahan tertentu dari luar (dari luar Divisi Redaksi), ketika memberitakan konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah?

Jawab: Tidak ada.